



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RPJMD

KABUPATEN BENGKALIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN

2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

<https://bappeda.bengkaliskab.go.id/>



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Rencana 5 (lima) Tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja SKPD.
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran struktur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (Lima) tahun terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaannya setiap tahun dituangkan ke dalam RKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai dasar yuridis dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup.

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kurun waktu tertentu sesuai kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati bersama DPRD menyempurnakan RPJMD.

BAB VII PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses rumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Merugikan kebijakan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

- (5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebelum periode RPJMD berakhir sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan dan/atau penyelesaian permasalahan pembangunan DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat perubahan perubahan Organisasi Perangkat Daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026, penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang baru dibentuk, berpedoman pada:
 - a. tujuan dan saran RPJMD dalam perumusan Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. program Perangkat Daerah induk pada RPJMD dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.
- (2) Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan perubahan RPJMD.

Pasal 10

Dalam hal dokumen RPJMD 2021-2026 berakhir, maka penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkandi Bengkalis
pada tanggal 25 AGUSTUS 2021

BUPATI BENGKALIS,



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

DAERAH KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.39.A/2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat Pasal 260-263 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang penyusunannya mempedomani Bagian Keempat: Tata Cara Penyusunan RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RPJMD ini memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya serta perumusan isu strategis daerah, pengintegrasian visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih 2021, perumusan strategi dan arah kebijakan, kerangka pendanaan program dan perumusan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan.

Akhir kata, demikianlah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam membangun masyarakat Kabupaten Bengkulu selama lima tahun ke depan yang merupakan penjabaran lima tahunan dari arah kebijakan dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkulu Tahun 2005-2025 untuk penggalan tahun 2021-2025.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar isi | ii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar: | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | I-2 |
| 1.3 Hubungan antar Dokumen | I-5 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I-6 |
| 1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD | I-7 |
| BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-1 |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi | II-1 |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | II-24 |
| 2.3 Aspek Pelayanan Umum | II-47 |
| 2.4 Aspek Daya Saing Daerah..... | II-116 |
| 2.5 Evaluasi Hasil RPJMD Periode lalu..... | II-124 |
| BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu | III-1 |
| 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... | III-16 |
| 3.3 Kerangka Pendanaan | III-21 |
| BAB IV. Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah | IV-1 |
| 4.1. Permasalahan..... | IV-1 |
| 4.2. Isu Strategis | IV-15 |
| BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | V-1 |
| 5.1 Visi | V-1 |
| 5.2 Misi | V-2 |
| 5.3 Tujuan dan Sasaran | V-2 |
| BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... | VI-9 |
| 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan | VI-9 |
| 6.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026..... | VI-19 |
| 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial | VI-21 |
| 6.4 Program Unggulan | VI-23 |
| 6.5 Integrasi KLHS Terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupten Bengkulu | VI-31 |

| | | |
|-----------|---|--------|
| 6.6 | Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026..... | VI-42 |
| BAB VII. | Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah | VII-1 |
| BAB VIII. | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | VIII-1 |
| BAB IX. | PENUTUP..... | IX-1 |
| 9.1 | Kaidah Pelaksanaan..... | IX-1 |
| 9.2 | Pedoman Transisi..... | IX-1 |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|--------------|--|-------|
| Tabel II-1 | Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2020 | II-3 |
| Tabel II-2 | Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2020..... | II-5 |
| Tabel II-3 | Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 Provinsi Riau..... | II-18 |
| Tabel II-4 | Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020..... | II-19 |
| Tabel II-5 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2020 | II-22 |
| Tabel II-6 | Ketimpangan Williamson Kabupaten Bengkalis dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2015 - 2019..... | II-33 |
| Tabel II-7 | Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020 | II-34 |
| Tabel II-8 | Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkalis 2015-2020..... | II-45 |
| Tabel II-9. | Persentase Balita Gizi Buruk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis | II-45 |
| Tabel II-10 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis 2020 | II-46 |
| Tabel II-11 | Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2020..... | II-46 |
| Tabel II-12 | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020..... | II-47 |
| Tabel II-13 | Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2020 | II-48 |
| Tabel II-14 | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 | II-49 |
| Tabel II-15 | Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020 | II-50 |
| Tabel II-16 | Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 - 2020 | II-50 |
| Tabel II-17 | Perkembangan Angka Melanjutkan Studi Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020 | II-51 |
| Tabel II-18 | Perkembangan Angka Melanjutkan Study Per Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 | II-51 |
| Tabel II-19 | Rasio Guru-Murid Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019 - 2019/2020 | II-53 |
| Tabel II-20 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 | II-53 |
| Tabel II-21. | Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020..... | II-54 |
| Tabel II-22 | Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020..... | II-55 |
| Tabel II-23 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 | II-57 |
| Tabel II-24 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 | II-58 |
| Tabel II-25 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020..... | II-58 |
| Tabel II-26 | Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Dalam Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 | II-59 |

| | | |
|---------------|--|-------|
| Tabel II-27 | Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran hidup dalam Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-60 |
| Tabel II-28 | Rasio posyandu per 1000 balita Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-60 |
| Tabel II-29 | Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020..... | II-61 |
| Tabel II-30 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020..... | II-62 |
| Tabel II-31 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 ... | II-62 |
| Tabel II-32 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-63 |
| Tabel II-33 | Penderita Diare yang Ditangani per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020..... | II-64 |
| Tabel II-34 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-64 |
| Tabel II-35 | Cakupan Kunjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020..... | II-65 |
| Tabel II-36 | Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020..... | II-65 |
| Tabel II-37 | Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-66 |
| Tabel II-38 | Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-67 |
| Tabel II-39 | Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-67 |
| Tabel II-40 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020..... | II-68 |
| Tabel II-41 | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-69 |
| Tabel II-42 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-69 |
| Tabel II-43 | Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020..... | II-72 |
| Tabel II-44 | Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkulu Tahun 2017 - 2020 | II-74 |
| Tabel..II-45. | Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020..... | II-75 |
| Tabel II-46 | Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020 | II-76 |
| Tabel II-47 | Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020..... | II-77 |
| Tabel II-48 | Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun 2016- 2020 | II-78 |
| Tabel II-49 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-79 |
| Tabel II-50 | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-80 |
| Tabel II-51 | Persentase PMKS yang tertangani Per Kecamatan per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-81 |
| Tabel II-52. | Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020 | II-82 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Tabel II-53 | Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020 | II-83 |
| Tabel II-54 | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020..... | II-84 |
| Tabel II-55 | Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020 | II-85 |
| Tabel II-56 | Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 – 2019 | II-86 |
| Tabel II-57 | Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 – 2020 | II-88 |
| Tabel II-58 | Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020 | II-90 |
| Tabel II-59 | Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2020..... | II-90 |
| Tabel II-60 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-91 |
| Tabel II-61 | Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020..... | II-92 |
| Tabel II-62 | Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020 | II-93 |
| Tabel II-63 | Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020 | II-96 |
| Tabel II-64 | Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020..... | II-97 |
| Tabel II-65 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 | II-98 |
| Tabel II-66 | Perkembangan Indikator Koperasi dan UKM di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020..... | II-99 |
| Tabel II-67 | Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 - 2020..... | II-100 |
| Tabel II-68 | Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020..... | II-100 |
| Tabel II-69 | Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2016– 2020... | II-101 |
| Tabel II-70 | Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020 | II-103 |
| Tabel II-71 | Jumlah Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020..... | II-104 |
| Tabel II-72 | Koleksi Buku yang Tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu 2015-2019..... | II-104 |
| Tabel II-73 | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020 | II-105 |
| Tabel II-74 | Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020 | II-105 |
| Tabel II-75 | Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020..... | II-106 |
| Tabel II-76 | Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkulu 2016-2020..... | II-107 |
| Tabel II-77 | Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020 | II-108 |
| Tabel II-78 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020..... | II-108 |

| | | |
|--------------|--|--------|
| Tabel II-79 | Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020..... | II-111 |
| Tabel II-80 | Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020 | II-112 |
| Tabel II-81 | Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016- 2020 | II-113 |
| Tabel II-82 | Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020..... | II-114 |
| Tabel II-83 | Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu 2016-2020..... | II-114 |
| Tabel II-84 | Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020 | II-115 |
| Tabel II-85 | Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu 2016-2020..... | II-115 |
| Tabel II-86 | Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bengkulu..... | II-116 |
| Tabel II-87 | Rata-Rata Persentase Pengeluaran Non Pangan per Kapita/Bulan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020..... | II-118 |
| Tabel II-88 | Perkembangan NTP Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020..... | II-119 |
| Tabel II-89 | Rasio Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tahun 2015-2019.... | II-119 |
| Tabel II-90 | Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2019..... | II-121 |
| Tabel II-91 | Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020..... | II-121 |
| Tabel II-92 | Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkulu 2016-2020..... | II-122 |
| Tabel II-93 | Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkulu 2016-2020..... | II-124 |
| Tabel II-94 | Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Bengkulu..... | II-125 |
| Tabel III-1 | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2020..... | III-3 |
| Tabel III-2 | Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2020..... | III-7 |
| Tabel III-3 | Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2020..... | III-11 |
| Tabel III-4 | Neraca Daerah Kabupaten Bengkulu 2016-2020..... | III-13 |
| Tabel III-5 | Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018-2020 | III-15 |
| Tabel III-6 | Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2016-2020 Kabupaten Bengkulu | III-17 |
| Tabel III-7 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bengkulu..... | III-18 |
| Tabel III-8 | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020 (dalam jutaan) | III-19 |
| Tabel III-9 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam jutaan)..... | III-20 |
| Tabel III-10 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkulu (dalam %)..... | III-21 |
| Tabel III-11 | Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (Rupiah dalam jutaan)..... | III-24 |
| Tabel III-12 | Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan)..... | III-25 |
| Tabel III-13 | Proteksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan)..... | III-26 |
| Tabel III-14 | Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan)..... | III-27 |

| | | |
|--------------|--|--------|
| Tabel III-15 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu 2021-2026 (dalam Juta)..... | III-28 |
| Tabel V-1 | Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu 2021-2026 | V-4 |
| Tabel VI-1 | Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkulu 2021-2026 | VI-2 |
| Tabel VI-2 | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu | VI-11 |
| Tabel VII-1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bengkulu (dalam Juta) | VII-1 |
| Tabel VII-2 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkulu | VII-3 |
| Tabel VIII-1 | Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu | VIII-1 |
| Tabel VIII-2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026..... | VIII-3 |

DAFTAR GAMBAR:

Halaman

| | | |
|--------------|--|-------|
| Gambar I-1. | Keterkaitan - RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD..... | I-5 |
| Gambar II-1 | Peta Administratif Kabupaten Bengkalis | II-2 |
| Gambar II-2 | Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis..... | II-7 |
| Gambar II-3 | Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis | II-9 |
| Gambar II-4 | Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis | II-11 |
| Gambar II-5 | Peta Pola Ruang Kabupaten Bengkalis Wilayah Rawan Bencana | II-13 |
| Gambar II-6 | Peta Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkalis | II-15 |
| Gambar II-7 | Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis..... | II-17 |
| Gambar II-8 | <i>Sex Ratio</i> Kabupaten Bengkalis tahun 2020..... | II-20 |
| Gambar II-9 | Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2020..... | II-21 |
| Gambar II-10 | Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bengkalis 2020..... | II-22 |
| Gambar II-11 | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2016-2020..... | II-23 |
| Gambar II-12 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis pada PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2016-2020 | II-25 |
| Gambar II-13 | Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020..... | II-26 |
| Gambar II-14 | Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dan 2020 | II-27 |
| Gambar II-15 | Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dan 2020..... | II-28 |
| Gambar II-16 | Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Produksi (Lapangan Usaha) | II-29 |
| Gambar II-17 | Struktur Perekonomian (PDRB) ADHB dan ADHK (2010) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Pengeluaran | II-30 |
| Gambar II-18 | Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2016-2020..... | II-30 |
| Gambar II-19 | PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah) | II-31 |
| Gambar II-20 | Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020..... | II-32 |
| Gambar II-21 | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2016 - 2020..... | II-35 |
| Gambar II-22 | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2016 - 2020 | II-35 |
| Gambar II-23 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020..... | II-37 |
| Gambar II-24 | Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020..... | II-38 |
| Gambar II-25 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 | II-39 |
| Gambar II-26 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020..... | II-40 |
| Gambar II-27 | Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020..... | II-41 |

| | | |
|--------------|--|--------|
| Gambar II-28 | Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020 (%) | II-42 |
| Gambar II-29 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020 (%) | II-43 |
| Gambar II-30 | Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2020..... | II-44 |
| Gambar II-31 | Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018 | II-52 |
| Gambar II-32 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkulu Tahun 2017 – 2020 | II-87 |
| Gambar II-33 | Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020 | II-95 |
| Gambar II-34 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkulu 2020 | II-102 |
| Gambar II-35 | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2018 | II-107 |
| Gambar II-36 | Luas Hutan Menurut Jenis Hutan di Kabupaten Bengkulu..... | II-110 |
| Gambar II-37 | Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik (dalam KWh) PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu tahun 2020..... | II-110 |
| Gambar II-38 | Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkulu Tahun 2018- 2020 | II-111 |
| Gambar II-39 | Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan (dalam rupiah) di Kabupaten Bengkulu 2020 | II-117 |
| Gambar II-40 | Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020 | II-122 |
| Gambar II-41 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkulu 2016-2020 | II-123 |
| Gambar VI-1 | Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Bengkulu..... | VI-11 |
| Gambar VI-2 | Klaster Pembangunan Kawasan Kabupaten Bengkulu | VI-13 |

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Dan, sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan daerah mesti dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis serta *top-bottom* dan *bottom-up*. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik-tematik, integratif-inklusif dan spasial.

Selanjutnya, tata cara perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, dan Kelembagaan. Yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan pelaksanaannya secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut, juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menyiapkan dokumen RPJMD yang merupakan tahapan perencanaan 5 (lima) tahunan dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis paling lambat 6 (enam) bulan

setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik, yang selanjutnya dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempedomani arahan kebijakan pada penggalan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Selain itu, mengacu juga kepada kebijakan pembangunan Provinsi Riau yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta kebijakan pembangunan Nasional yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun sebelumnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals*, penerapan standard pelayanan minimal (SPM) dan peruntukan rencana kawasan dan pola ruang wilayah Kabupaten.

RPJMD ini mempunyai peran penting dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, akan terwujud keselarasan antara perencanaan strategis daerah dengan perencanaan strategis serta perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025 adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);

- f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g) Undang-undang Republik Indonesia Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

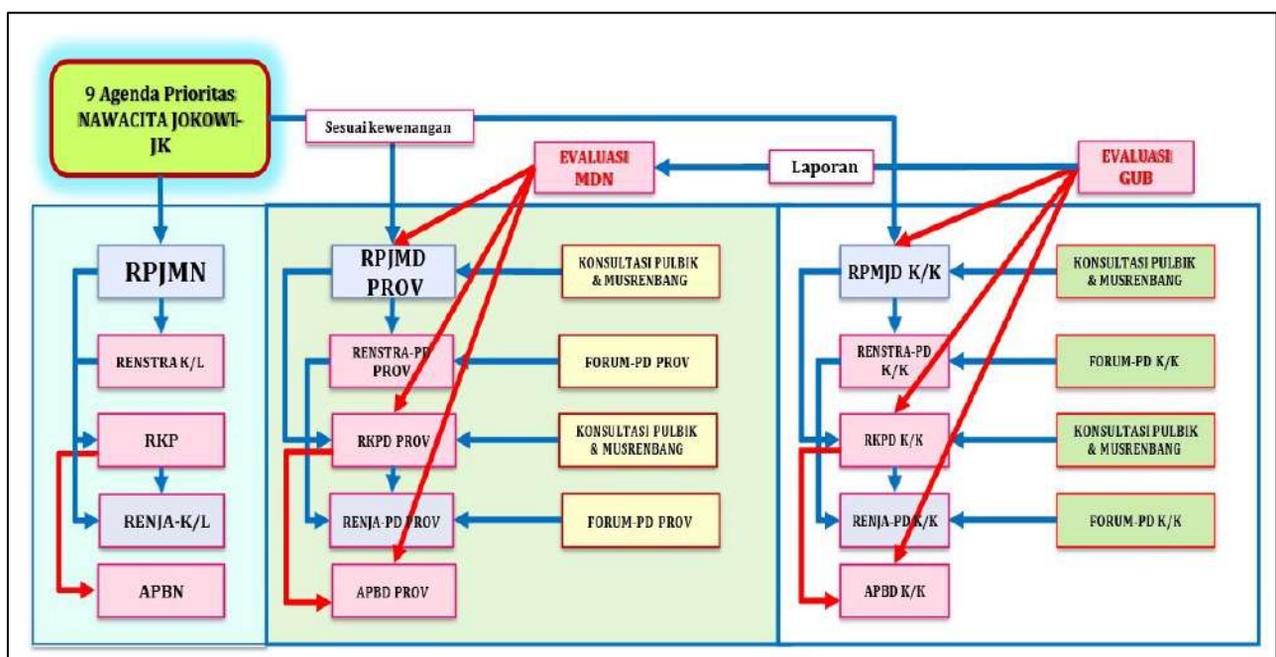
- o) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- p) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- v) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w) Peraturan Menteri Negeri Dalam Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- x) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
- y) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
- z) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 3);
- aa) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor: 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor: 7);

1.3 Hubungan antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang didalamnya terdiri dari unsur-unsur perencanaan program dan penganggaran yang berkaitan dengan rencana strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I-1.Keterkaitan - RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJMD Provinsi Riau dan RPJM Nasional, karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan Tahapan Keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD sekaligus sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD juga menjadi acuan dalam perumusan usulan-usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna memberikan rancangan arah rencana pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat umum depan yang holistik-tematik, integratif-inklusif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk 5 (lima) tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis kerangka keuangan daerah.
- 2) Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus menjelaskan strategi dan arah untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah;

- 3) Memberikan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan perencanaan daerah tahunan RKPD.
- 4) Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- 5) Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penyusunan RPJMD disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN *memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.*

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH *memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi serta pelaksanaan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah 5 (lima) tahun terakhir.*

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH *memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah masa lalu dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang.*

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

memuat perumusan permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, prioritas pembangunan per tahun termasuk program pembangunan yang tersaji dengan holistik-tematik.

Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:

- 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan
- 6.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026
- 6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial
- 6.4. Program Unggulan
- 6.5. Integrasi KLHS terhadap RPJMD
- 6.6. Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disajikan beserta target setiap tahun hingga tahun 2026.

BAB IX. PENUTUP

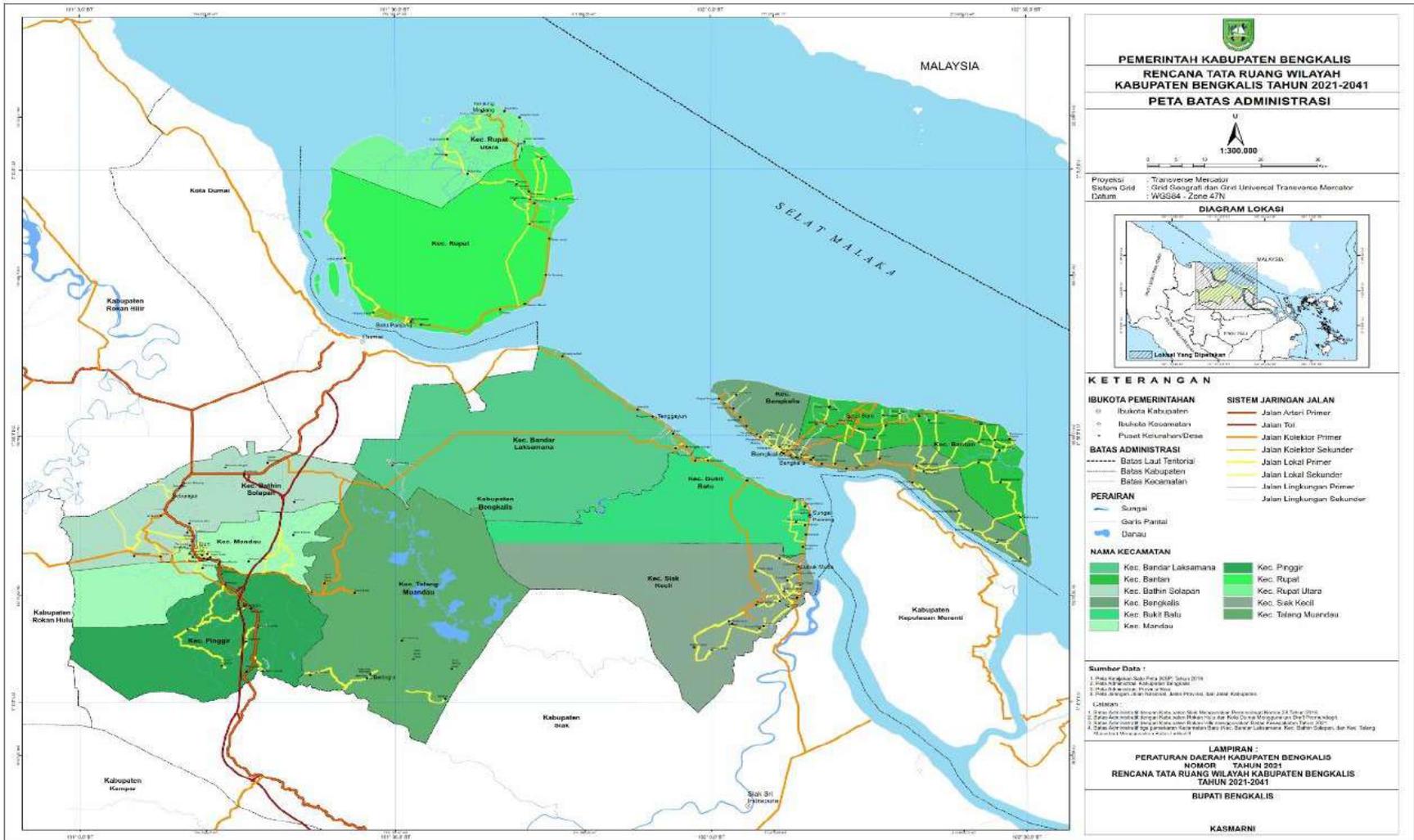
memuat kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai pedoman utama Perangkat Daerah dalam membuat Renstra untuk menjaga kesinambungan pembangunan terutama dalam masa periode transisi pembangunan termasuk rencana pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah periode RPJMD.

BAB II.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Bengkulu menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki luas 8.426,48 km² atau 842.648 Ha, yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas pantai. Terdapat dua pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten Bengkulu. Pulau Bengkulu merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkulu. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupa yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten Bengkulu. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkulu.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Berdasarkan luasan per kecamatan di Kabupaten Bengkalis terdapat ketimpangan luas wilayah, dimana 4 (empat) kecamatan memiliki luas wilayah lebih 54,32% dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Talang Muandau dengan luas wiayah 1.244,71 Km² (14,77%), diikuti oleh Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas wilayah 1.237,70 Km² (14,69%), Kecamatan Rupert dengan luas wilayah 1.136,31 Km² (13,49%) dan Kecamatan Siak Kecil dengan luas wilayah 957,95 Km² (11,37%). Sedangkan luas wilayah 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki luas dibawah 900 Km². Untuk kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Mandau (4,42%) dan Kecamatan Rupert Utara (4,49%). Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel II-1 berikut.

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2020

| No. | Kecamatan | Ibu kota Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Luas Wilayah (Km ²) | Persentase Luas Wilayah |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Bengkalis | Bengkalis Kota | 3 | 28 | 462,24 | 5,49% |
| 2 | Bantan | Selat Baru | - | 23 | 442,93 | 5,26% |
| 3 | Bukit Batu | Sungai Pakning | 1 | 9 | 526,62 | 6% |
| 4 | Bandar Laksamana | Tenggayun | - | 7 | 1.237,70 | 14,69% |
| 5 | Siak Kecil | Lubuk Muda | - | 17 | 957,95 | 11,37% |
| 6 | Mandau | Air Jamban | 9 | 2 | 372,25 | 4,42% |
| 7 | Bathin Solapan | Sebangar | - | 13 | 855,62 | 10,15% |
| 8 | Pinggir | Pinggir | 2 | 8 | 811,46 | 9,63% |
| 9 | Talang Muandau | Beringin | - | 9 | 1.244,71 | 14,77% |
| 10 | Rupert | Batu Panjang | 4 | 12 | 1.136,31 | 13,49% |
| 11 | Rupert Utara | Tanjung Medang | - | 8 | 378,68 | 4,49% |
| Kabupaten Bengkalis | | | 19 | 136 | 8.426,48 | 100% |

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57'57,6" - 102°30'25,2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total 905,17 Km² atau 90.517 Hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas total 1.514,99 Km² atau 151.499 Hektar. Pulau Rupat memiliki 14 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkalis terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas total 2.722,27 Km² atau 272.227 Hektar. Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Sedangkan kawasan geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total 3.284,04 Km² atau 328.404 Hektar.

Secara geografis, letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan sebagian lainnya berada pada jalur ekonomi penting di Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Letak wilayah tersebut berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis Kabupaten Bengkalis pada masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki potensi dan daya tarik bagi investasi pada bidang pertanian dan perikanan, dan industri pariwisata. Posisi geostrategis dan ketersediaan sumberdaya lahan dan panjang garis pantai Pulau Rupat merupakan potensi sumberdaya alam daerah yang masih dapat dikembangkan sebagai objek wisata bahari sebagai penggerak ekonomi daerah dimasa mendatang.

1.1.2 Topografi

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3 - 8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupat,

Rupat Utara, Bengkulu dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkulu dan Pulau Rupat. Selain berhadapan langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi. Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Secara rinci ketinggian wilayah dan jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten disajikan pada Tabel II-2 berikut ini.

Tabel II-2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu, 2020

| No. | Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibu kota Kabupaten |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Mandau | 55 | 103 |
| 2. | Pinggir | 45 | 100 |
| 3. | Bathin Solapan | 55 | 106 |
| 4. | Talang Muandau | 45 | 90 |
| 5. | Bukit Batu | 6 | 15 |
| 6. | Siak Kecil | 6 | 25 |
| 7. | Bandar Laksamana | 6 | 24 |
| 8. | Rupat | 5 | 71 |
| 9. | Rupat Utara | 5 | 86 |
| 10. | Bengkalis | 5 | - |
| 11. | Bantan | 5 | 15 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu, 2020

Fisiografi wilayah Kabupaten Bengkulu pada umumnya terbagi pada dua klasifikasi, yaitu fisiografi cekungan rawa dan fisiografi daratan, dengan karakteristik sebagai berikut:

a) Cekungan Rawa

Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkulu, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.

b) Dataran

Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Di samping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

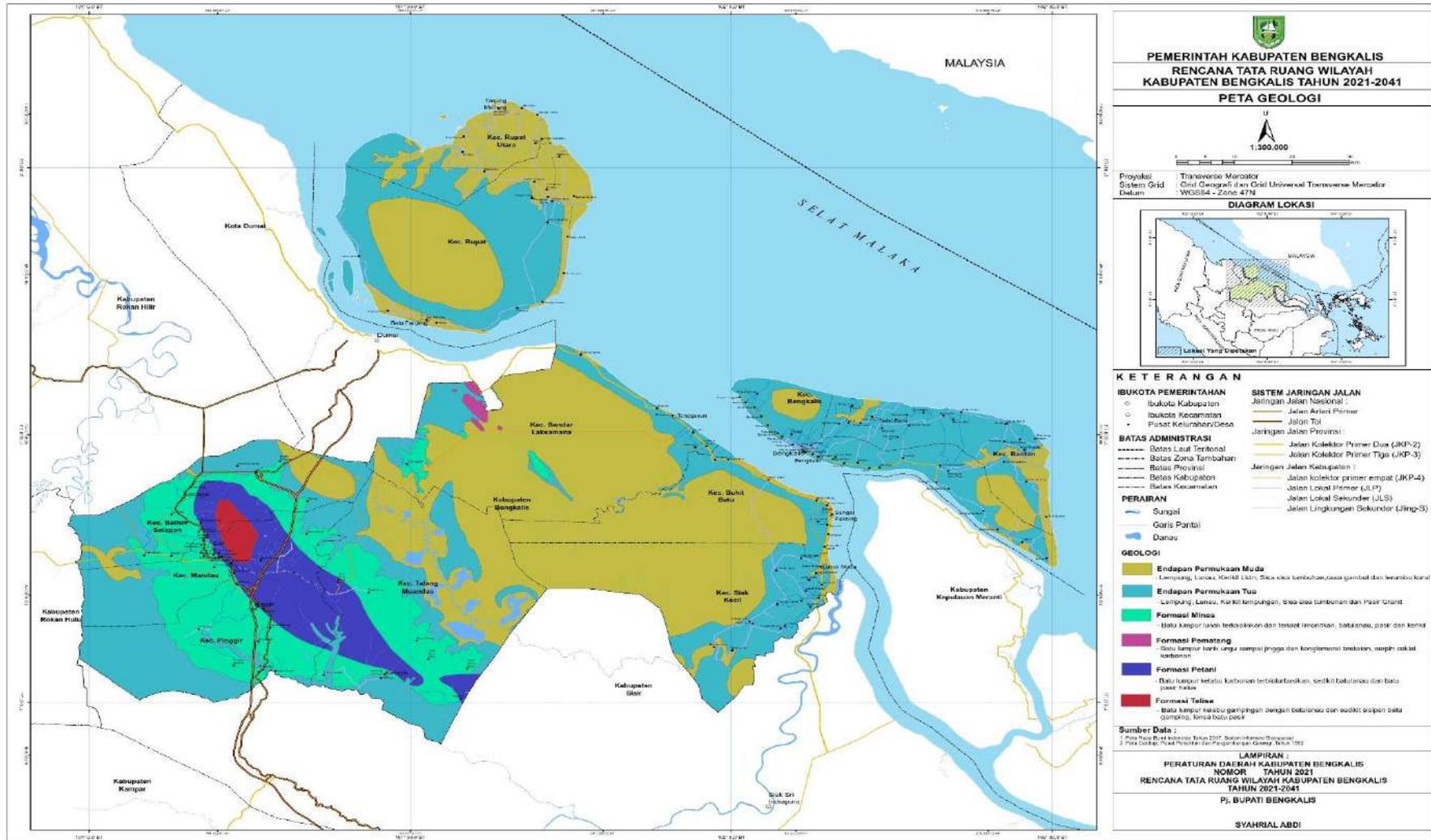
Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkulu didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan

semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.

1.1.3 Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang di antaranya membentuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupa.

Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuartar terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupa, Rupa Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan. Untuk lebih jelasnya geologi tanah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

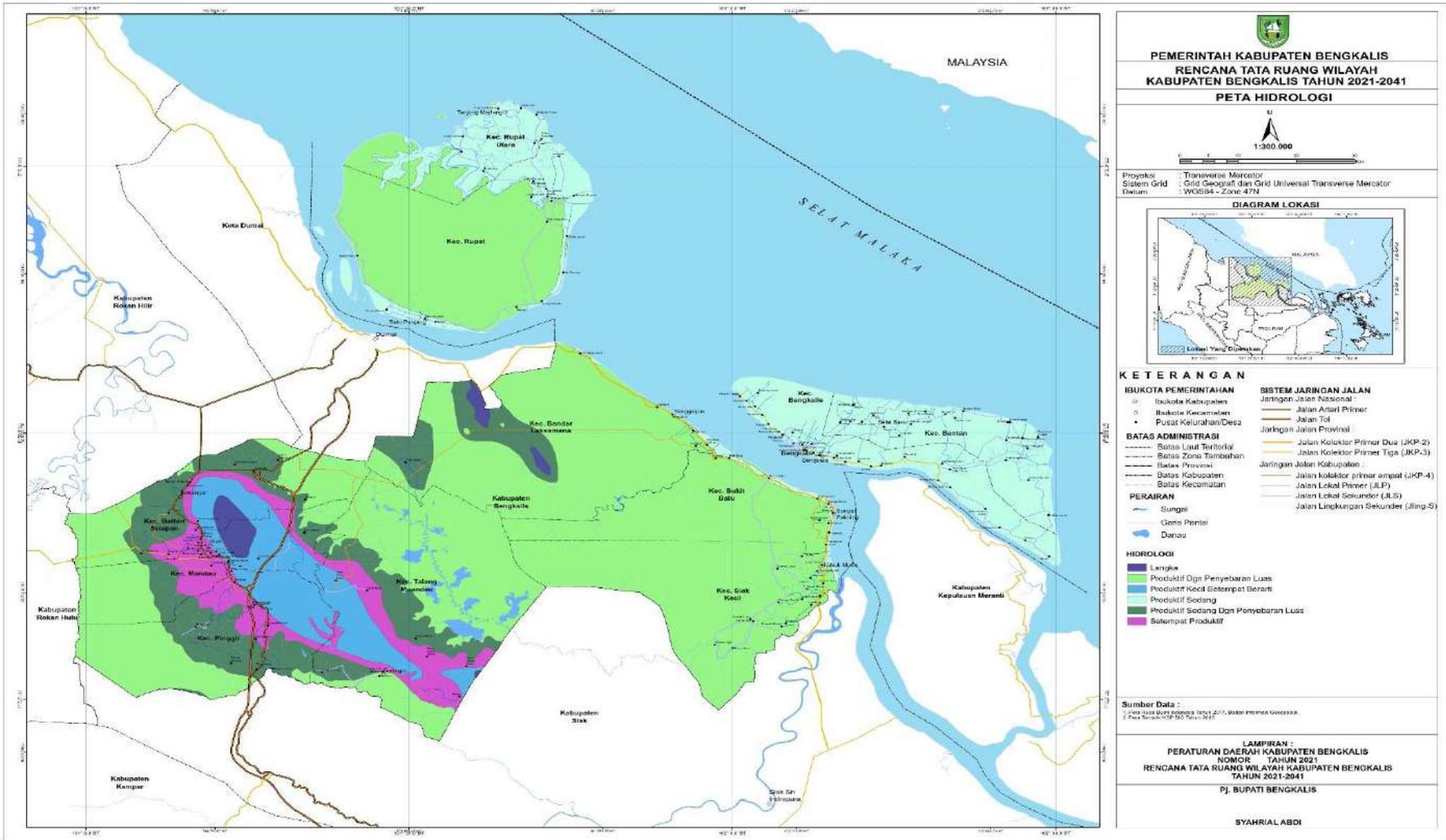
Gambar II-2 Peta Geologi di Kabupaten Bengkulu

1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupert, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembung Luar. Di antara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting perannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang ± 90 Km.

Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa di antaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi.

Kadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupert. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupert dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar. Pada gambar berikut dapat dilihat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkalis.

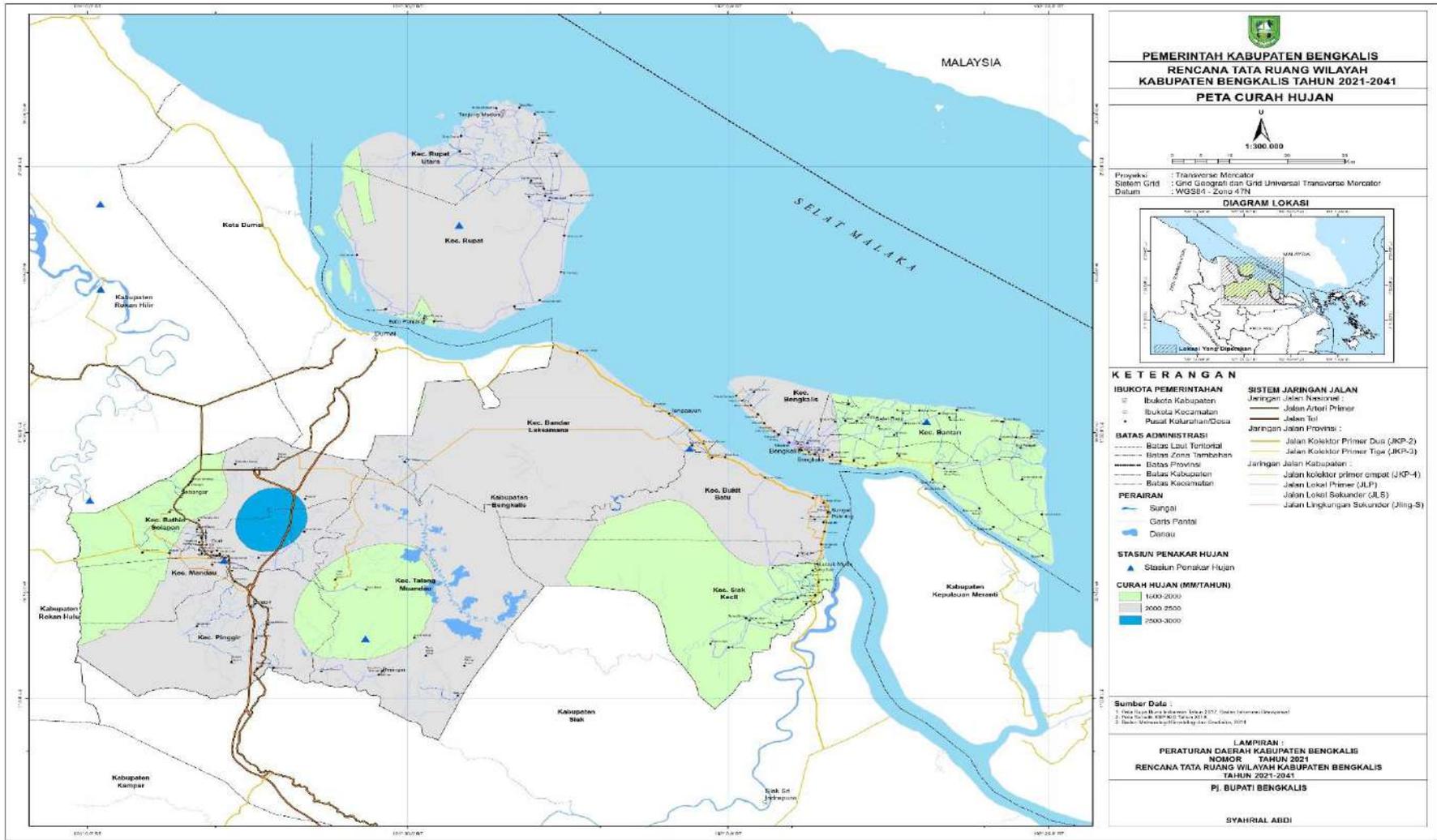


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkulu

1.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi Oldeman menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rumat dan Rumat Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agroklimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Kondisi curah hujan rata-rata Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data curah hujan bulanan rata-rata Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu dan Siak Kecil memiliki empat bulan kering, yaitu Januari, Februari, Maret dan Juni dan tidak memiliki bulan basah. Sedangkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupa dan Rupa Utara memiliki satu bulan kering yaitu bulan Februari dan satu bulan basah yaitu bulan Oktober. Setiap kecamatan memiliki tipe hujan yang hampir sama yaitu memiliki puncak hujan bimodal (Maret -April dan Oktober-November) dan musim kering yang lemah.

1.1.6 Penggunaan Ruang Wilayah

Rencana jangka panjang penggunaan lahan di Kabupaten Bengkalis untuk rencana tahun 2020-2040 dapat dilihat dari rencana peta pola ruang Kabupaten Bengkalis yang tersaji pada Gambar II-5. Secara umum penggunaan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi dalam dua kategori yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Budidaya diperuntukan penggunaan lahan untuk hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan dan penggunaan lahan untuk perikanan budidaya. Hal ini berimplikasi kepada pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pengembangan perekonomian masyarakat skala kecil semakin terbatas yang disebabkan oleh akses terhadap sumberdaya lahan yang juga semakin terbatas. Konsekwensi pengembangan usaha pertanian rakyat akan membutuhkan inovasi teknologi intensifikasi yang dapat mengembangkan produktivitas di masa mendatang.

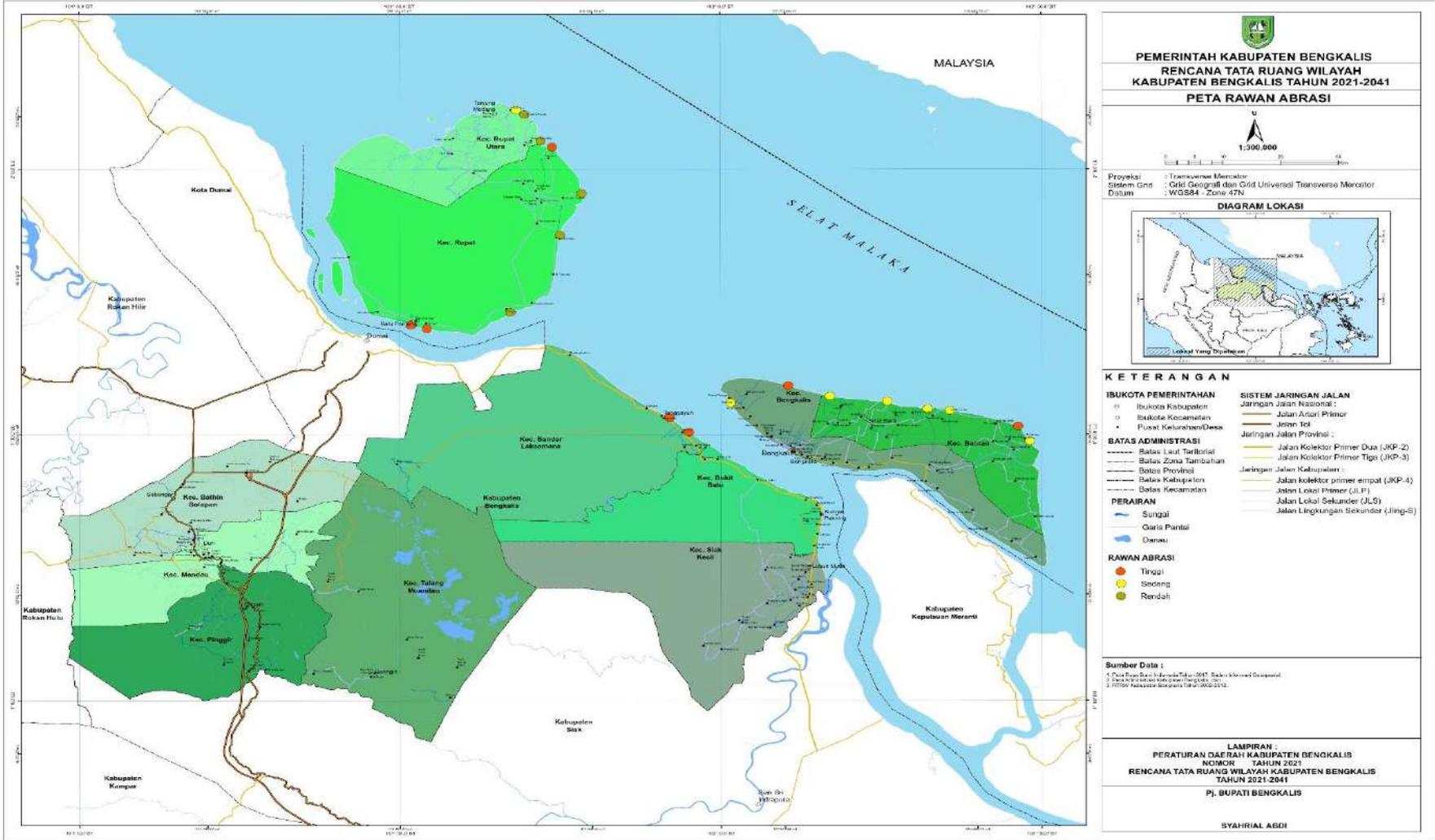
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis, khususnya pada pusat-pusat perkotaan diproyeksi akan menyebabkan terjadinya pengembangan kawasan pemukiman perkotaan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kawasan pemukiman perdesaan sehingga membutuhkan kebijakan penataan kawasan pusat perkotaan yang lebih baik nantinya.

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkulu menggambarkan jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan penting dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu. Adapun jenis dan wilayah rawan bencana di Kabupaten Bengkulu dapat dijelaskan berikut ini.

1) Rawan abrasi

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkulu berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupa yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkulu/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkulu yang berhadapan dengan Selat Bengkulu/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkulu yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkulu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.

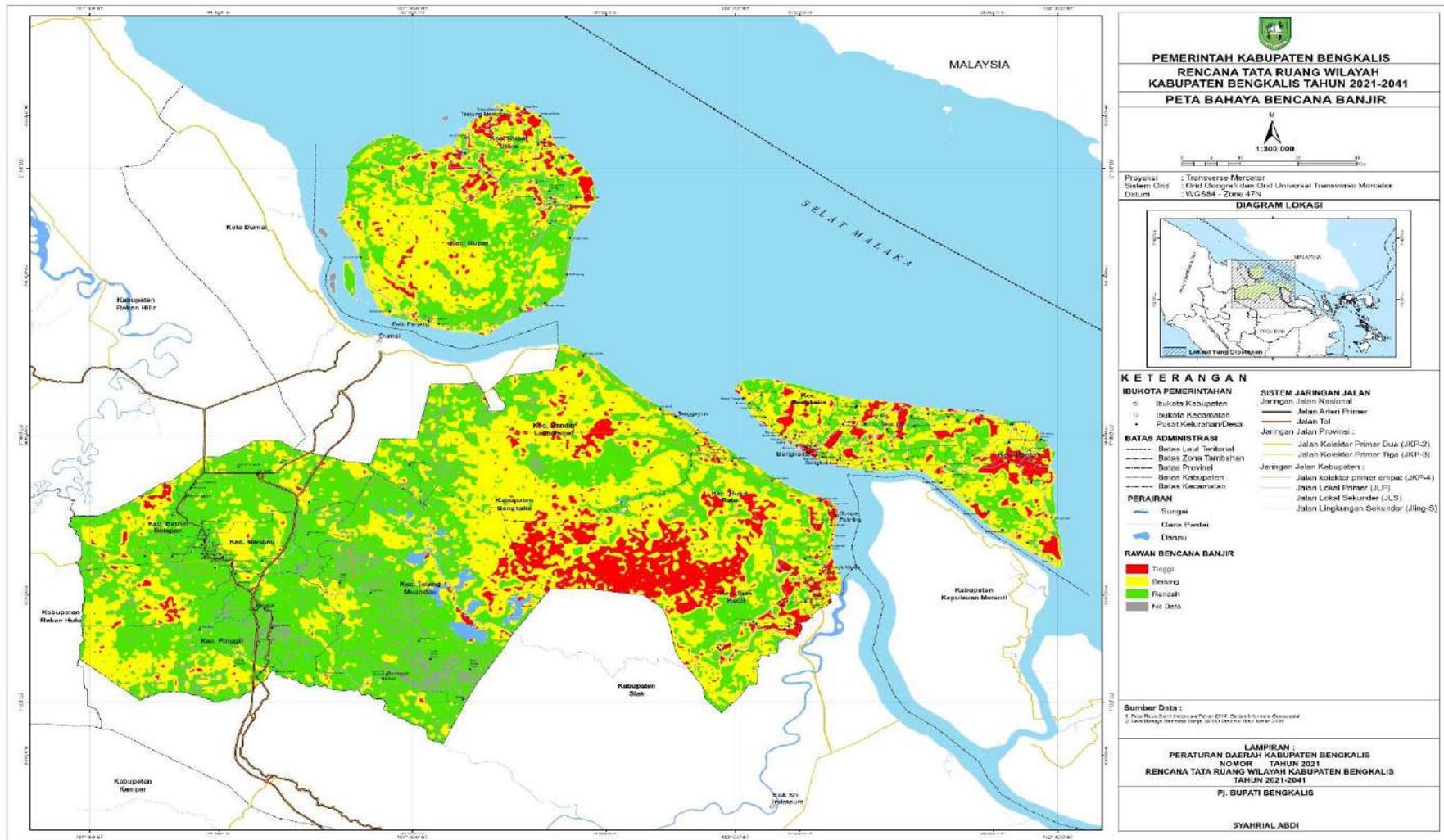


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-6 Peta Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkalis

2) Rawan banjir dan gelombang tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkulu terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkulu dan Rupa. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya. Kawasan kerawanan banjir di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-7 Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis

Selain banjir, terdapat juga potensi gelombang tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kawasan yang memiliki potensi rawan gelombang tinggi berlokasi di Desa Tanjung Medang dan Selat Baru sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan masyarakat Bengkalis terutama kegiatan pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Sehingga pada kawasan tersebut dibutuhkan rambu-rambu yang dapat memberitahukan adanya bahaya gelombang tinggi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

3) Rawan kebakaran lahan dan hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi jarang. Berdasarkan data titik api yang terpantau tahun 2016-2020, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah titik api yang terbanyak ketiga di Provinsi Riau pada tahun 2019, seperti terlihat pada Tabel II-4 berikut. Pada tahun 2020 jumlah kebakaran lahan dan hutan telah mengalami penurunan dari 245 titik api pada tahun 2019 menjadi 3 titik api pada tahun 2020. Hal ini seiring dengan upaya mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau semakin membaik.

**Tabel II-3 Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2020 Provinsi Riau**

| No. | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|----------------------|------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kuantan Singingi | 10 | 9 | | 11 | 1 |
| 2 | Indragiri Hulu | 14 | 5 | 44 | 210 | 2 |
| 3 | Indragiri Hilir | 18 | 14 | 137 | 548 | 1 |
| 4 | Pelalawan | 34 | 12 | 63 | 549 | 1 |
| 5 | Siak | 26 | 4 | 50 | 144 | 1 |
| 6 | Kampar | 27 | 2 | 7 | 27 | 1 |
| 7 | Rokan Hulu | 38 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | Bengkalis | 76 | 8 | 21 | 245 | 3 |
| 9 | Rokan Hilir | 96 | 15 | 266 | 309 | 2 |
| 10 | Kep. Meranti | 17 | 3 | 26 | 154 | 1 |
| 11 | Pekanbaru | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 12 | Dumai | 25 | 2 | 77 | 85 | 4 |
| Provinsi Riau | | 383 | 81 | 694 | 2.289 | 21 |

Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau 2016, Kementerian Lingkungan Hidup 2020, BPS 2021

1.1.7 Aspek Demografi

a) Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 67,12 jiwa per Km². Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah

dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penambahan jumlah penduduk akibat berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkulu.

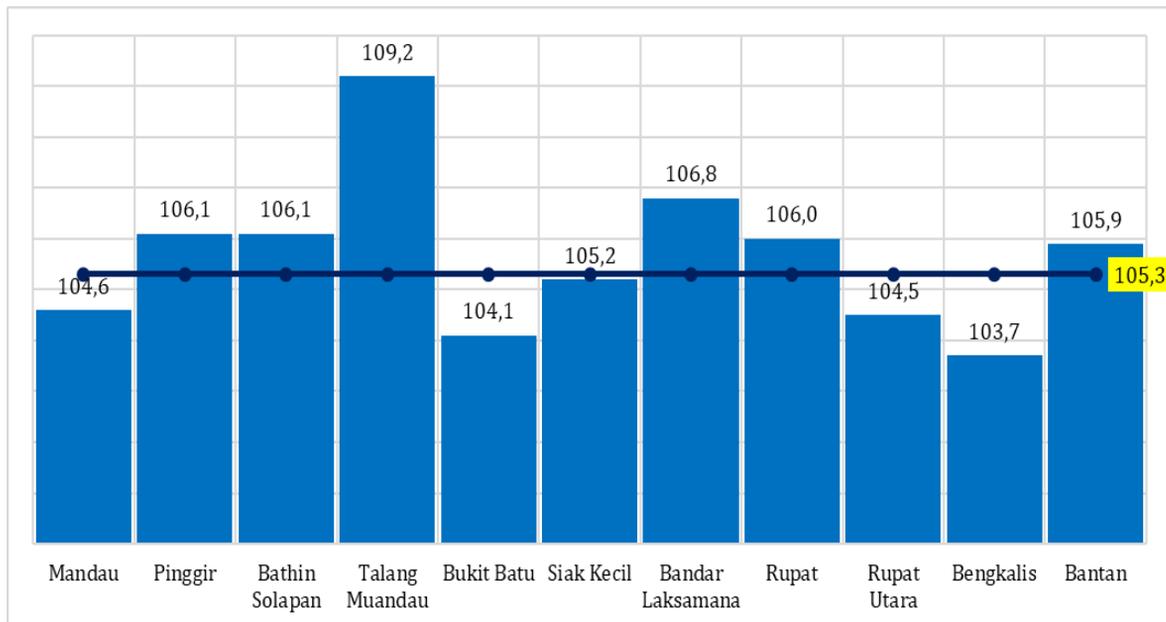
Tabel II-4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Luas wilayah (Km ²) | Jumlah (Jiwa) | Peresentase Penduduk | Kepadatan Penduduk (Jw/Km ²) |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| 1. | Mandau | 372,25 | 152.258 | 26,92% | 409,02 |
| 2. | Pinggir | 811,46 | 62.098 | 10,98% | 76,53 |
| 3. | Bathin Solapan | 855,62 | 91.586 | 16,19% | 107,04 |
| 4. | Talang Muandau | 1.244,71 | 24.000 | 4,24% | 19,28 |
| 5. | Bukit Batu | 526,62 | 21.771 | 3,85% | 41,34 |
| 6. | Siak Kecil | 957,95 | 24.186 | 4,28% | 25,25 |
| 7. | Bandar Laksamana | 1.237,70 | 15.842 | 2,80% | 12,8 |
| 8. | Rupat | 1.136,31 | 34.719 | 6,14% | 30,55 |
| 9. | Rupat Utara | 378,68 | 14.117 | 2,50% | 37,28 |
| 10. | Bengkalis | 462,24 | 83.085 | 14,69% | 179,74 |
| 11. | Bantan | 442,93 | 41.907 | 7,41% | 94,61 |
| Kabupaten Bengkulu | | 8.426,48 | 565.569 | 100,00% | 67,12 |

Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam Angka 2021

Berdasarkan Tabel II-5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkulu, yaitu sebanyak 409.02 jiwa/Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 152.258 jiwa atau sebesar 26,92% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu sebanyak 14.117 Jiwa atau 2,50% dari total penduduk Kabupaten Bengkulu. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persoalan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antarwilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan sosial lainnya.

Penduduk berdasarkan *sex ratio* di Kabupaten Bengkulu terlihat masih didominasi oleh penduduk laki-laki, dengan perbandingan 105 dari 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada semua kecamatan lebih banyak dari penduduk perempuan. Namun, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau, Bandar Laksamana, Rupert dan Bantan, ditemukan rata-rata jumlah penduduk laki-laki lebih dari banyak dari rata-rata Kabupaten Bengkulu. Secara rinci perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan menurut kecamatan dapat dilihat pada Gambar II-7 berikut.

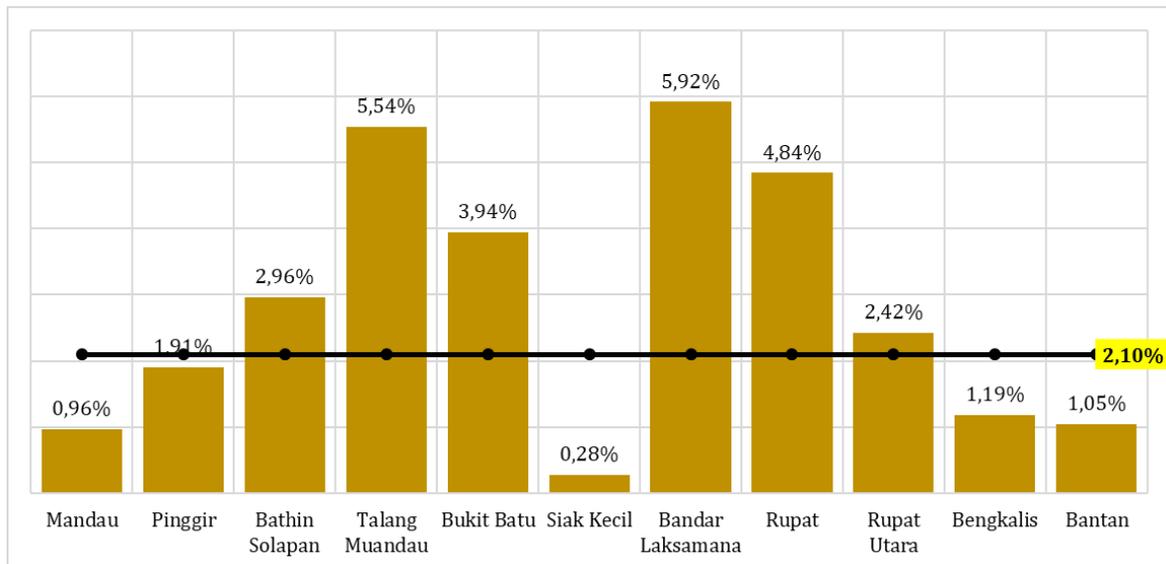


Sumber: Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2021

Gambar II-8 Sex Ratio Kabupaten Bengkulu tahun 2020

b) Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk setiap tahun di Kabupaten Bengkulu mengalami pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2016 pertambahan penduduk sebesar 1,63% kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,80% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,1% per tahun. Letak wilayah Kabupaten Bengkulu pada jalur lintas Sumatera dan pulau-pulau di Kabupaten Bengkulu yang terbuka bagi daerah lain menjadi salah satu penyebab pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk pada setiap Kecamatan Kabupaten Bengkulu tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertumbuhan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 2,10% per tahun, lihat Gambar II-8.



Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam angka 2021

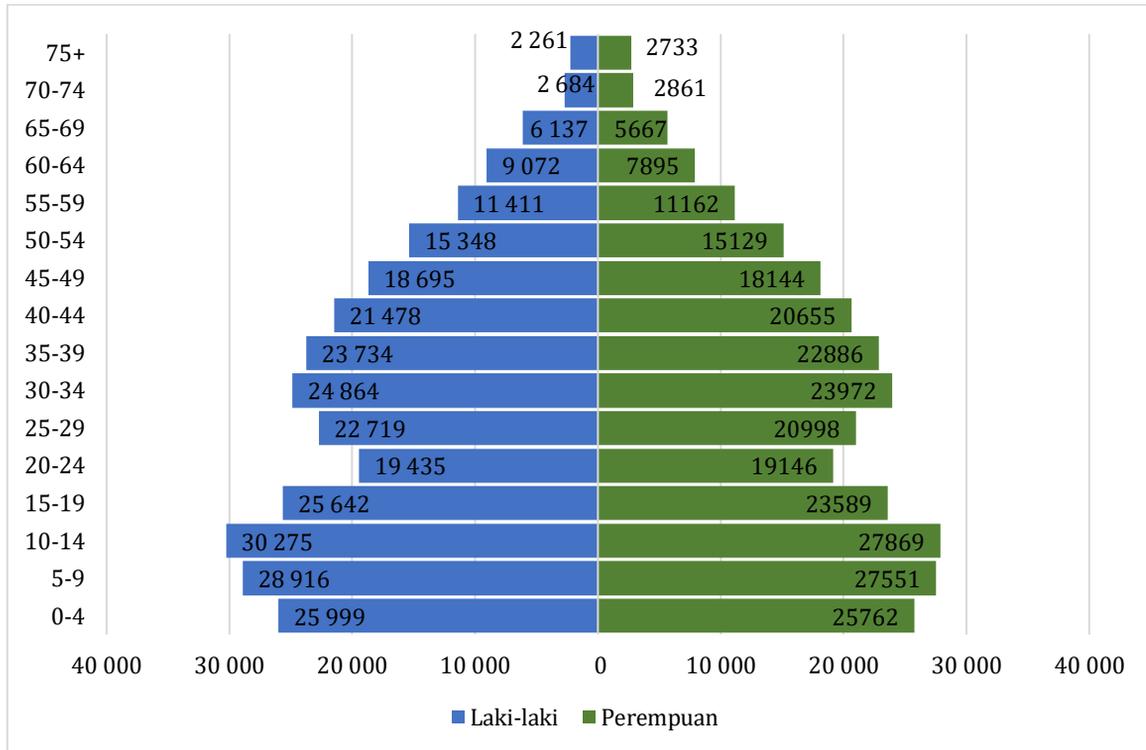
Gambar II-9 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu 2020

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkulu pada beberapa kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif penambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

c) Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Piramida penduduk Kabupaten Bengkulu termasuk ke dalam kategori piramda penduduk expansive. Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkulu memiliki tingkat kelahiran lebih tinggi dibanding tingkat kematian. Penduduk Kabupaten Bengkulu banyak berada pada usia produktif (15-64) yaitu berjumlah 375.974 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan penduduk yang berada pada kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 166.372 jiwa dan penduduk pada usia tidak produktif (>64 tahun) berjumlah 22.343 jiwa.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu, 2021

Gambar II-10 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bengkulu 2020

d) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian

Penduduk Kabupaten Bengkulu berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bengkulu, 2019. Dalam hal ini tahun 2019 menggunakan komposisi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan pekerjaan yang dilakukan seminggu lalu.

Tabel II-5 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu, 2020

| Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Berusaha sendiri | 23.763 | 15.901 | 39.664 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 25.169 | 8.961 | 34.130 |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 3.643 | 834 | 4.477 |
| Buruh/Karyawan/Pegawai | 74.948 | 32.141 | 107.089 |
| Pekerja bebas | 17.132 | 3.919 | 21.051 |
| Pekerja keluarga/tak dibayar | 7.667 | 24.727 | 32.394 |
| Jumlah | 152.322 | 86.483 | 238.805 |

Sumber: BPS Bengkulu Dalam Angka 2021

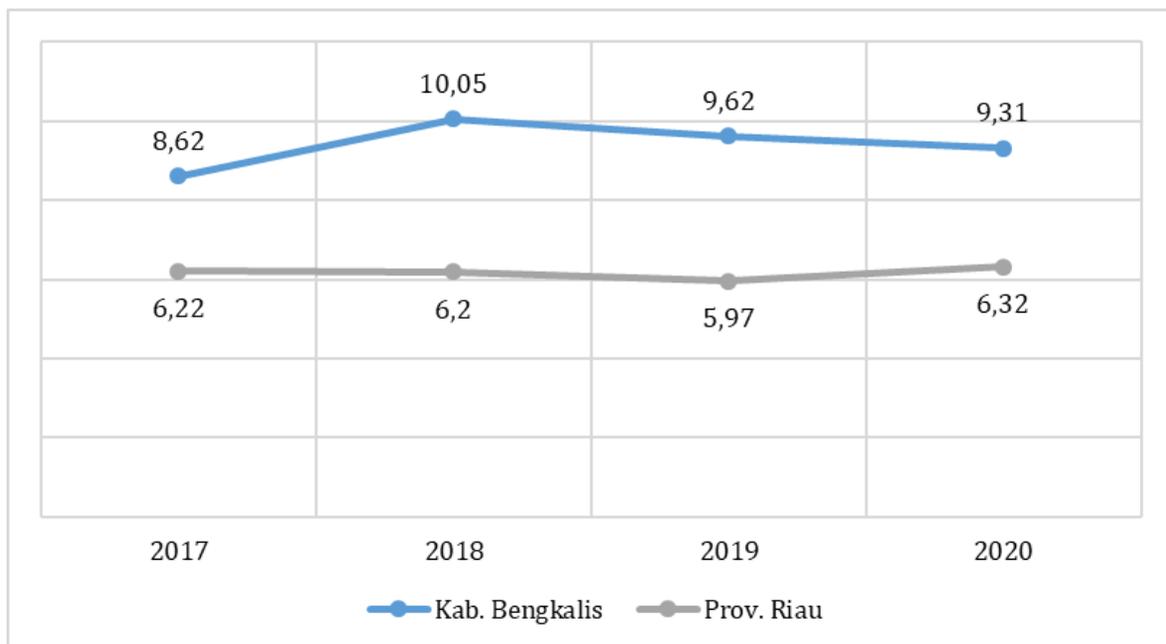
Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas yang berkerja semingu lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu, 2019. Untuk tenaga kerja

yang tidak dibayar atau pekerja keluarga dinominasi oleh perempuan dengan menduduki 70% lebih dari total 25,058 orang. Untuk tenaga kerja laki laki, yang berumur 15 tahun keatas mendominasi status pekerjaan utama, baik berusaha sendiri, buruh bebas dan buruh bayar. Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang berkerja dalam seminggu terakhir berjumlah 232.055 orang. Tidak merata status pekerjaan utama terhadap gender perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat.

e) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Pertambahan penduduk yang tinggi, yang bersumber dari tingkat kelahiran dan migrasi masuk ke daerah menjadi pendorong pada penyediaan (*supply*) tenaga kerja di daerah. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan dampak negatif bari pembangunan, yaitu munculnya pengangguran dan setengah pengangguran.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Riau selama periode 2017-2020. Gambar II-9 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis 2016-2020 memiliki kecenderungan meningkat. Kabupaten Bengkalis pernah tercatat dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 tingkat pengangguran dapat ditekan hingga pada level 9,62% dan terus menurun hingga 9,31% pada tahun 2020.



Sumber: BPS Provinsi Riau 2021

Gambar II-11 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2016-2020

1.1.8 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada kajian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2011 - 2030.

1) Pengembangan wilayah strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

2) Pengembangan wilayah strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

3) Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (Pulau Rupat)

Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri. Namun, upaya pengembangan kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (mangrove).

1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

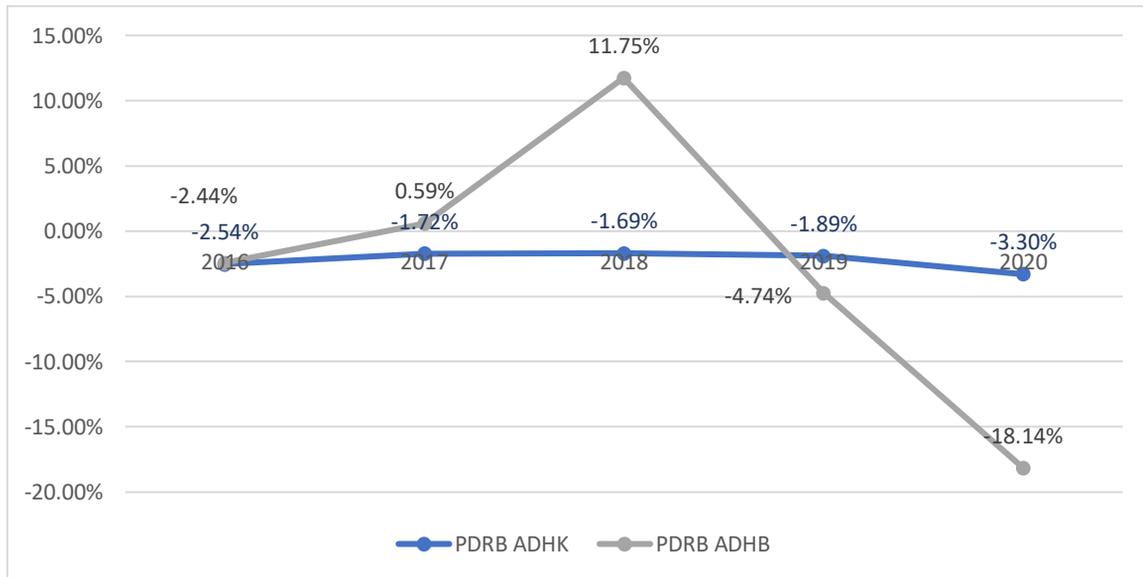
1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi kumulatif, PDRB per kapita, indeks gini dan kemiskinan.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada masa waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi pada setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Secara total PDRB berdasarkan harga konstant tahun 2010, nilai perekonomian Kabupaten Bengkulu mengalami penurunan sebesar 8,34% selama periode 2016-2020. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Bengkulu berdasarkan harga berlaku penurunan lebih besar mencapai 12,34% selama periode 2016-2020.



Sumber Kabupaten Bengkulu dalam angka 2021

Gambar II-12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu pada PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2016-2020

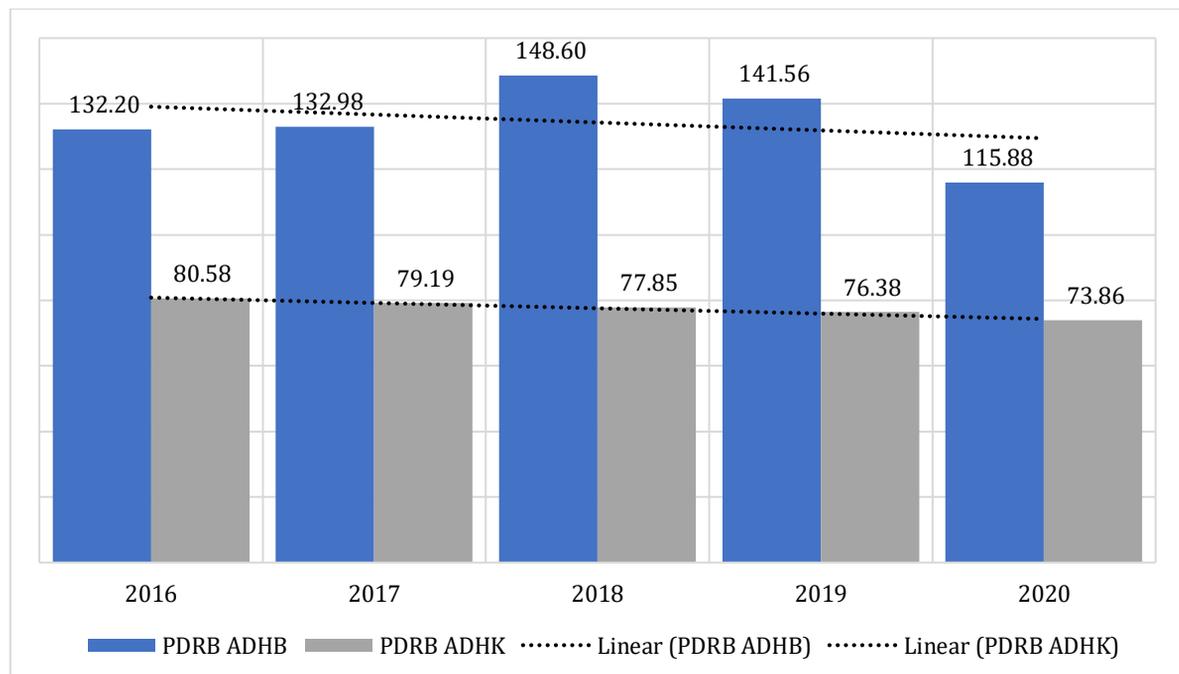
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu selama periode 2016-2020 terlihat mengalami fluktuasi yang sangat besar. Laju pertumbuhan Kabupaten Bengkulu berdasarkan harga konstan selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan negatif, atau mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan karena perkembangan nilai produksi sektor pertambangan mengalami kontraksi selama periode 2016-2020, sehingga mempengaruhi akumulasi nilai PDRB Kabupaten Bengkulu. Sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 5 – 6% pertahun. Sementara sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2016-2019, khusus tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ada beberapa sektor yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Sektor yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 selain sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Lainnya . Penurunan nilai output beberapa sektor perekonomian tersebut pada tahun 2020 disebabkan karena pembatasan kegiatan pada masa pandemi, seperti pengalihan biaya pembangunan beberapa infrastruktur untuk penanganan Covid-19 telah menyebabkan banyak kegiatan pembangunan di daerah ditunda. Pengurangan jam operasional pemerintahan pada masa pandemi berdampak pada menurunnya nilai output sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Pembatasan

kegiatan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, larangan bepergian dan juga pembatasan jam operasional rumah makan, toko-toko, hotel dan kegiatan usaha lainnya pada masa pandemi ditenggarai menyebabkan menurunnya nilai output sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Jasa Perusahaan dan sektor Jasa Lainnya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan dasar harga berlaku selama periode 2016-2020, mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi pada tahun 2016, 2019 dan 2020, dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan positif atau mengalami ekspansi. Pertumbuhan ekonomi negatif pada PDRB harga konstan tahun 2010 mengindikasikan bahwa nilai produksi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010. Kemudian, pertumbuhan ekonomi positif pada harga berlaku disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas pada sektor yang mengalami pertumbuhan positif.

2) Perkembangan PDRB

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, begitu pula dengan perkembangan nilai PDRB pada harga konstant. Kecenderungan penurunan nilai PDRB harga berlaku dan harga konstant ditenggarai karena terjadinya penurunan produksi minyak dan jatuhnya harga minyak mentah dunia. Selain itu pandemi COVID-19 semakin memperparah produksi output daerah Kabupaten Bengkalis yang terus menurun.



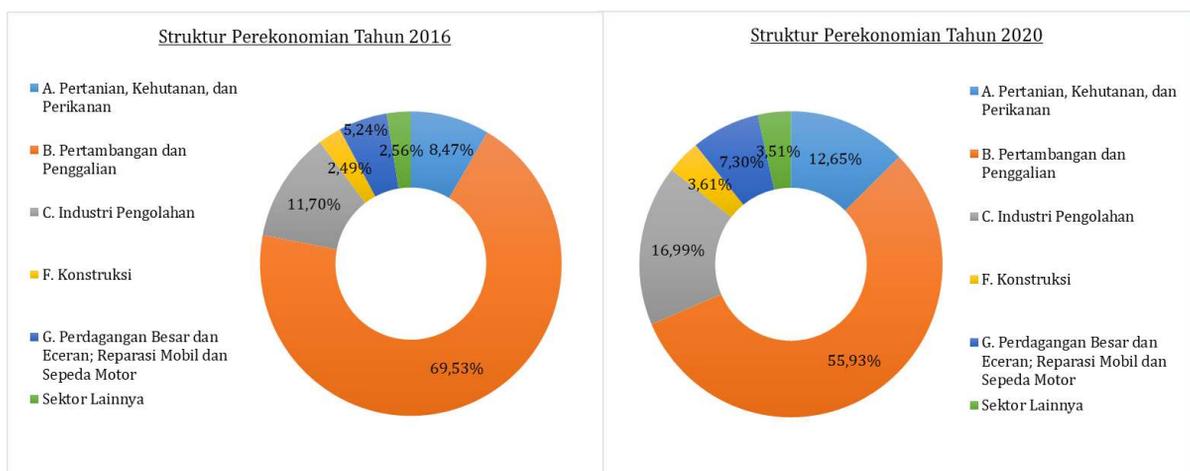
Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-13 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp. 132,20 Triliun dan 2017 sedikit meningkat menjadi Rp. 132,98 Triliun. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 148,60 Triliun Namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 141,56 Triliun. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku kembali menurun secara signifikan Sedangkan perkembangan nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2016 sebesar Rp. 80,58 Triliun dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 73,86 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara total, nilai produksi dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu selama periode 2016-2020 mengalami penurunan. Penurunan dominan terjadi pada penurunan produksi minyak pada sektor pertambangan dengan kontribusi mencapai 60% terhadap PDRB atas dasar harga konstant.

3) Struktur Perekonomian

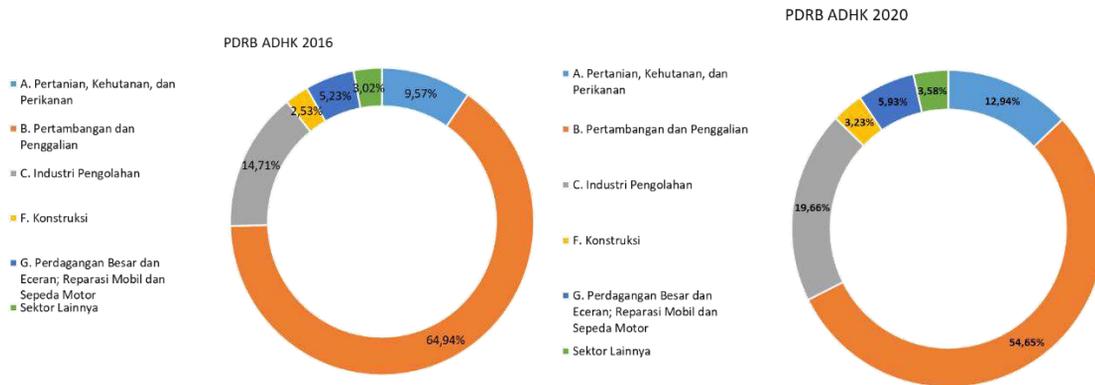
Struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu pada PDRB atas dasar harga berlaku pada sisi produksi atau lapangan usaha dibangun oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kelima sektor ini secara akumulasi berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bengkulu tahun 2020 sebesar 96,49%. Sedangkan sisanya sebesar 3,51% disumbangkan dari 12 sektor lainnya. Pada PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016, sektor pertambangan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 69,53% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 55,93%. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 11,70% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 16,99% pada tahun 2020. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 8,47% pada tahun 2016 dan sedikit meningkatkan menjadi 12,65% pada tahun 2020. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 5,24% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 7,30% pada tahun 2020. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan gabungan beberapa sektor selain empat sektor dominan tersebut memberikan kontribusi sebesar 4,48% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 5,91% pada tahun 2020.



Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam angka 2021

Gambar II-14 Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu tahun 2016 dan 2020

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu pada PDRB atas dasar harga konstant juga dibangun oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kelima sektor ini secara akumulasi berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bengkulu tahun 2020 sebesar 96,42%. Sedangkan sisanya sebesar 3,58% disumbangkan dari 12 sektor lainnya.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu

Gambar II-15 Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkulu tahun 2016 dan 2020

Pada PDRB atas dasar harga konstat pada tahun 2016, sektor pertambangan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 64,94% dan sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 54,65%. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 14,71% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 19,66% pada tahun 2020. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 9,57% pada tahun 2016 dan sedikit meningkatkan menjadi 12,94% pada tahun 2020. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 5,23% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 5,93% pada tahun 2020. Sedangkan sektor lainnya diluar lima sektor dominan tersebut memberikan kontribusi sebesar 3,02% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 3,58% pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu selama periode 2016-2020, terlihat bahwa elemen-elemen penyusun perekonomian adalah sektor yang rentan terhadap dinamika pasar. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional.



Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-16 Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Produksi (Lapangan Usaha)

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan luar negeri melalui aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa merupakan pembentuk dominan, yaitu 59,73% berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 dan sebesar 57,59% berdasarkan PDRB tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010. Kontribusi neraca perdagangan dalam pembentukan nilai PDRB menurut pengeluaran sangat terkait erat dengan aktivitas perdagangan pada sektor pertambangan dan industri besar di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain perekonomian Bengkalis adalah perekonomian terbuka dan sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan luar negeri (perekonomian terbuka) yang mengandalkan produk minyak dan gas.

Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal bruto (investasi). Sedangkan konsumsi pemerintah (*government expenditure*) memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Bengkalis saat ini sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan pada sektor minyak dan kaitanya dengan pembentukan modal pada perusahaan minyak dan gas di Riau. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dari sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian di masa mendatang.

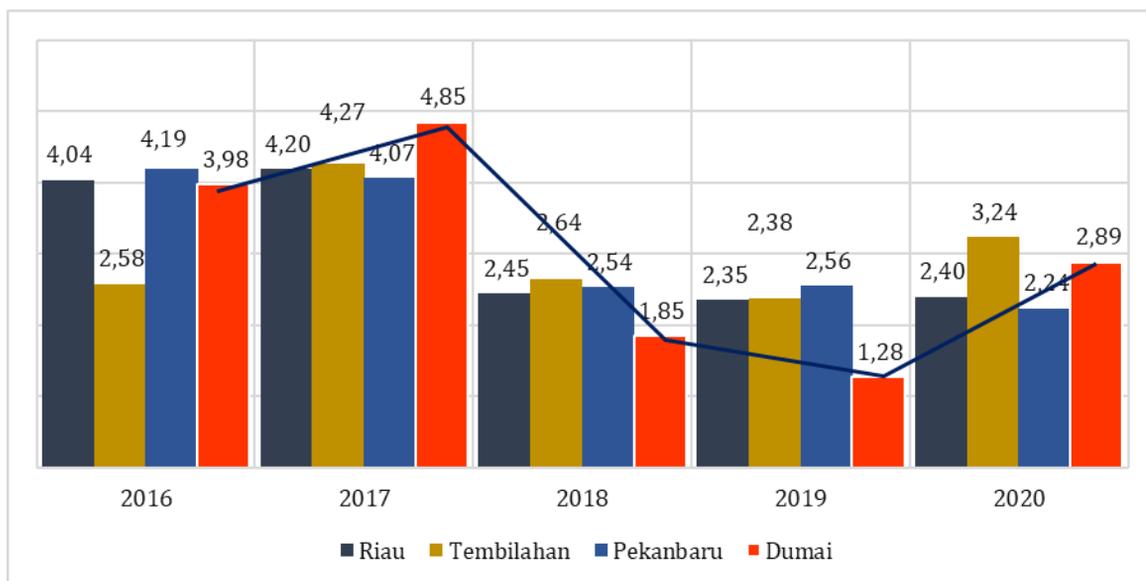


Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-17 Struktur Perekonomian (PDRB) ADHB dan ADHK (2010) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Pengeluaran

4) Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar II-18 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2016-2020

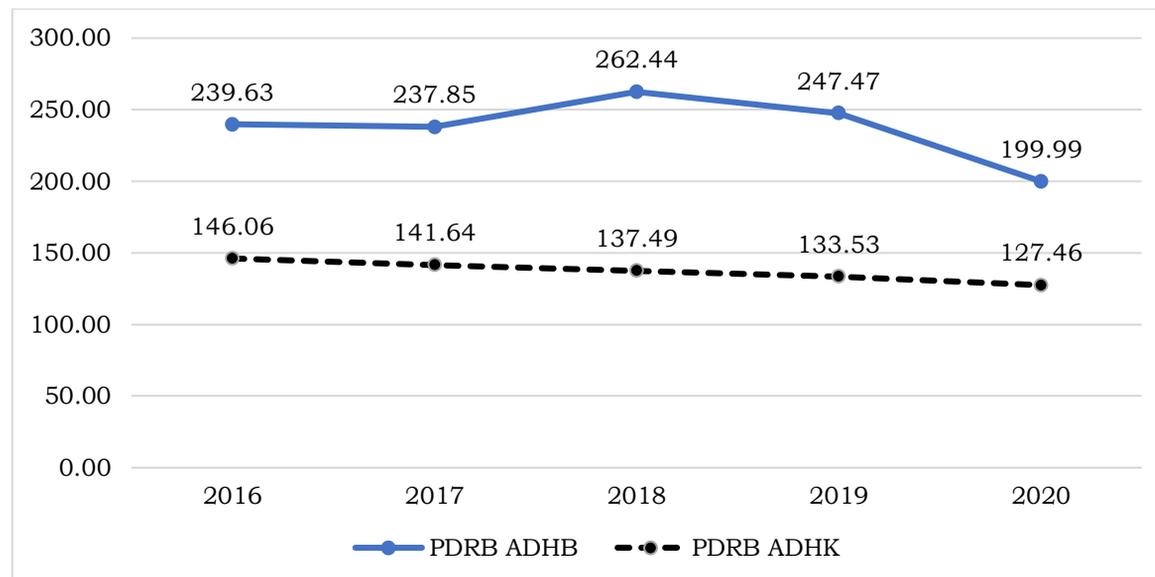
Data inflasi yang digunakan adalah inflasi Kota Dumai, hal ini dikarenakan perhitungan inflasi di Provinsi Riau hanya pada 3 Kabupaten/Kota saja, yaitu Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan. Penggunaan data inflasi Kota Dumai disebabkan karena secara geografis Kota Dumai berdekatan dengan Kabupaten Bengkalis. Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten

Bengkalis juga banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Sedikit banyak pergerakan harga di Kota Pekanbaru akan berpengaruh langsung terhadap harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis. Inflasi tahun 2020 sebesar 2,89%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 berada pada 1,28%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum di daerah. Meski begitu, kenaikan inflasi yang terjadi masih dalam batas wajar dan termasuk dalam kategori rendah. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan.

Menilik angka inflasi Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 2,89% dan Kota Pekanbaru sebesar 2,24%, maka dapat diperkirakan bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis secara umum berkisar di angka 2% hingga 3%.

5) PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis selama satu tahun. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut.



Sumber: PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

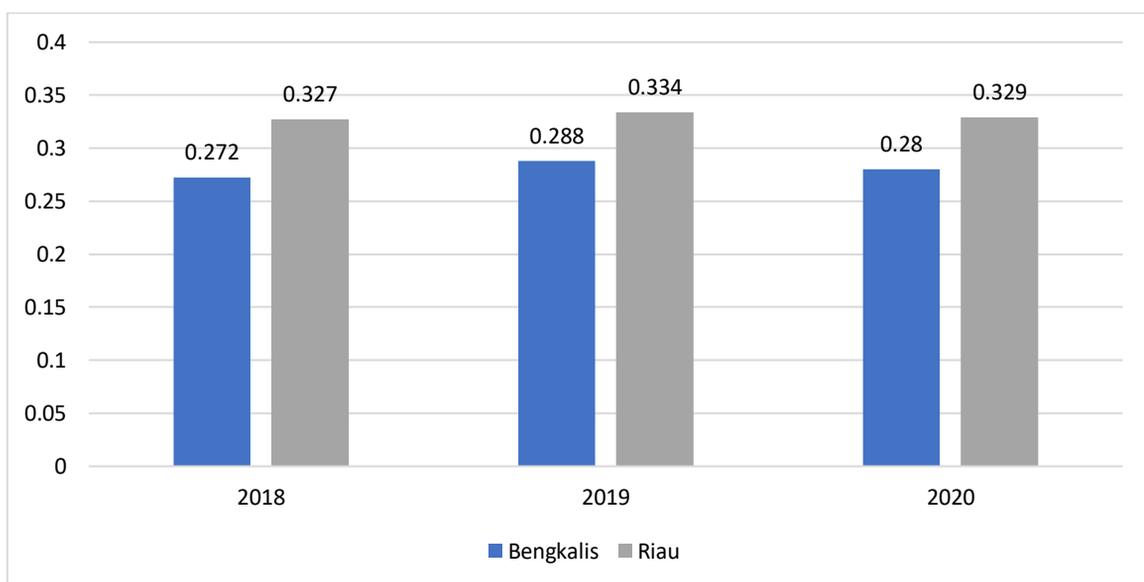
Gambar II-19 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkalis, pendapatan per kapita penduduk cenderung mengalami penurunan, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan (2010). Penurunan PDRB per Kapita Kabupaten Bengkalis ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu penurunan nilai output total Kabupaten Bengkalis dan penambahan jumlah

penduduk. Penurunan nilai output total menggambarkan kinerja perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum. Beberapa penyebab utamanya ditengarai adalah melemahnya produksi minyak Bengkalis dan harga minyak dunia yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir berimbas pada menurunnya pendapatan daerah, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa secara umum. Penyebab utama lainnya disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang dengan laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan penduduk cenderung meningkat sementara pertumbuhan PDRB cenderung menurun di Kabupaten Bengkalis.

6) Perkembangan Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.



Sumber: Indikator Strategis Statistik Sosial Kabupaten Bengkalis 2020, LPPD Bengkalis 2020

Gambar II-20 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa gini ratio Kabupaten Bengkalis jauh lebih rendah dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Bengkalis relatif lebih merata dibandingkan ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2020 gini rasio Kabupaten Bengkalis mencapai 0,280, angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, sementara gini rasio Provinsi Riau termasuk dalam kategori sedang. Penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa hasil-hasil pembangunan memiliki dampak positif pada pemerataan pendapatan penduduk, sehingga aliran uang dari produksi dapat ditransfer sampai kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan berupa pemberian *transfer of payment* dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial

(*social security*) yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kelompok rentan dan miskin dapat menikmati. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tinggi akan menyebabkan terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk yang dapat memicu permasalahan sosial. Oleh sebab itu, permasalahan ketimpangan pendapatan harus dikontrol dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

7) Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Table berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2015-2019.

Tabel II-6 Ketimpangan Williamson Kabupaten Bengkalis dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2015 – 2019

| No. | Kabupaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Kuantan Singingi | 0.039 | 0.044 | 0.053 | 0.060 | 0.071 |
| 2 | Indragiri Hulu | 0.055 | 0.039 | 0.027 | 0.018 | 0.011 |
| 3 | Indragiri Hilir | 0.447 | 0.345 | 0.271 | 0.217 | 0.169 |
| 4 | Pelalawan | 0.016 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.000 |
| 5 | Siak | 2.058 | 1.846 | 1.665 | 1.537 | 1.418 |
| 6 | Kampar | 0.270 | 0.255 | 0.248 | 0.258 | 0.234 |
| 7 | Rokan Hulu | 1.677 | 1.667 | 1.661 | 1.678 | 1.695 |
| 8 | Bengkalis | 7.991 | 6.879 | 5.967 | 5.236 | 4.478 |
| 9 | Rokan Hilir | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.030 | 0.054 |
| 10 | Kepulauan Meranti | 0.036 | 0.024 | 0.015 | 0.006 | 0.003 |
| 11 | Pekanbaru | 0.539 | 0.415 | 0.307 | 0.222 | 0.147 |
| 12 | Dumai | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.030 | 0.055 |

Sumber: BPS Riau, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan Indek Williamson, ditemukan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki ketimpangan pembangunan yang sangat senjang terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau selama periode 2015-2019. Perbedaan potensi antar kabupaten/kota di Riau dapat menjadi pemicu terjadi kesenjangan antarwilayah. Potensi sumberdaya alam minyak yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis menjadi penyebab terjadinya kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Nilai produksi minyak yang menyebabkan nilai perekonomian Kabupaten Bengkalis berada di atas kabupaten lainnya. Proporsi nilai PDRB atas dasar harga konstant (2010) Kabupaten Bengkalis sebesar 15,41%

terhadap total PDRB atas dasar harga konstant (2010) Provinsi Riau. Kontribusi terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, sedangkan proporsi jumlah penduduk sebesar 8,22%, masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru.

8) Kemiskinan

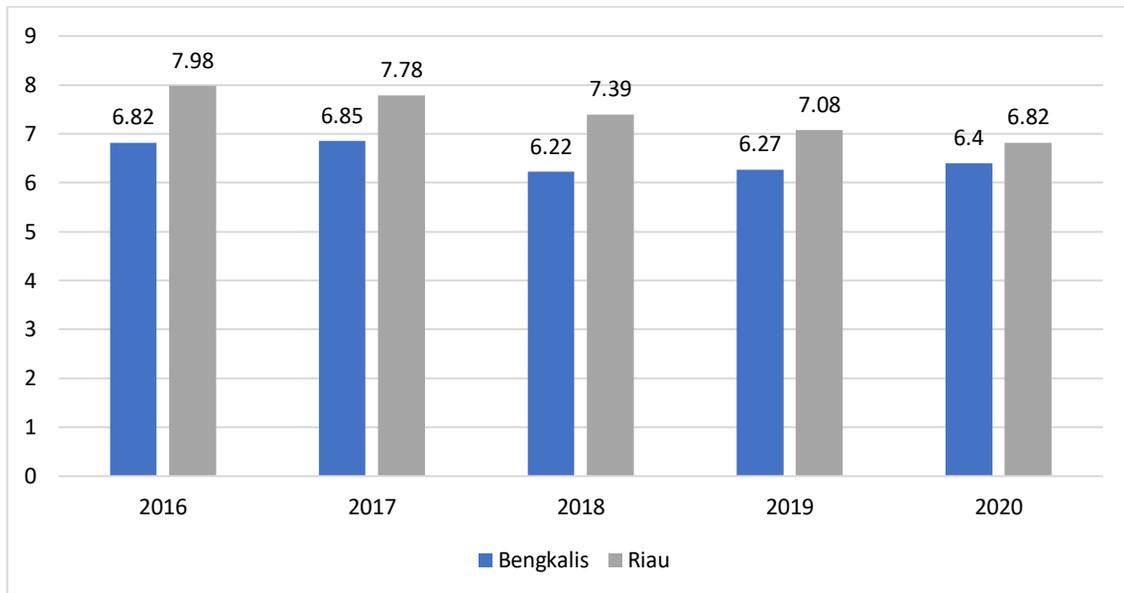
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk.

Tabel II-7 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (%) | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2016 | 455.021 | 37,49 | 6,82 | 1,41 | 0,43 |
| 2017 | 496.657 | 38,19 | 6,85 | 0,95 | 0,24 |
| 2018 | 508.633 | 35,11 | 6,22 | 0,87 | 0,18 |
| 2019 | 533.123 | 35,83 | 6,27 | 0,50 | 0,07 |
| 2020 | 581.416 | 36,96 | 6,40 | 0,72 | 0,14 |

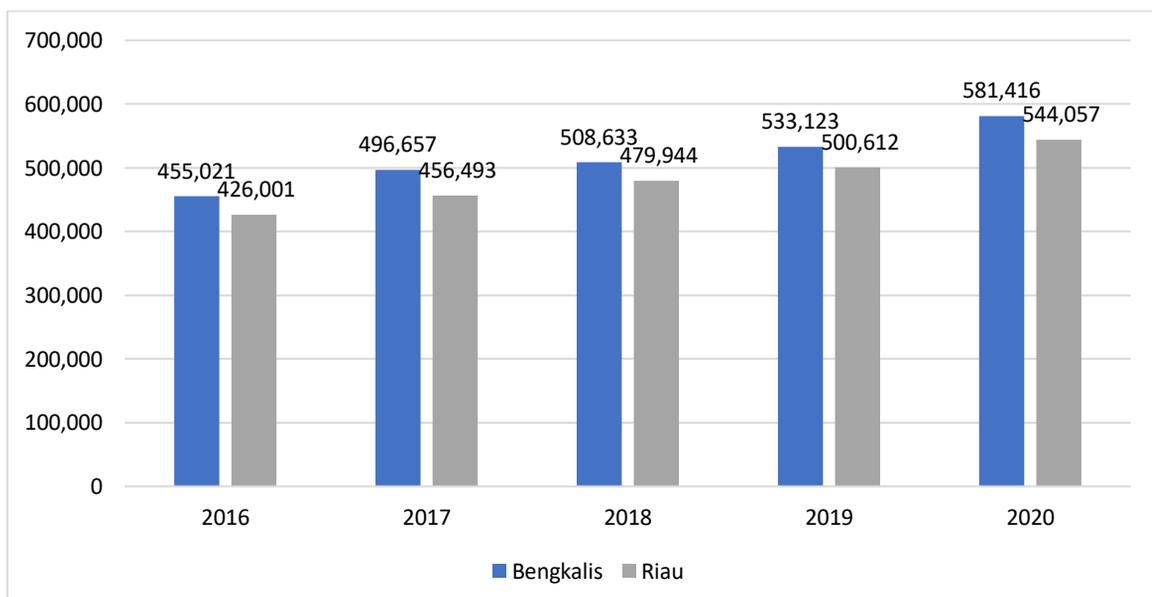
Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021, BPS (2021)

Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup penduduk miskin semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcount ratio* atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. *Headcount index* memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak bisamemberikan informasi 'seberapa miskin' orang miskin tersebut atau pemenuhan aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.



Gambar II-21 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2016 - 2020

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan pada tahun 2016-2018, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit peningkatan meskipun masih berada di bawah persentase kemiskinan provinsi. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan Kabupaten Bengkalis mencapai 6,4%, lebih rendah dibandingkan persentase kemiskinan Provinsi Riau yang berada pada angka 6,82%.



Gambar II-22 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2016 - 2020

Secara umum pada periode 2016-2020 garis kemiskinan Kabupaten Bengkalis terus mengalami kenaikan dan selalu berada di atas garis kemiskinan Provinsi Riau. Kenaikan

persentase penduduk miskin pada tahun 2020 menjadi 6,4% disinyalir sebagai akibat naiknya garis kemiskinan di Kabupaten Bengkulu sebesar 9,06% pada masa pandemi tahun 2020, dari sebelumnya garis kemiskinan sebesar Rp 533.123 tahun 2019 menjadi Rp 581.416 pada tahun 2020. Kenaikan garis kemiskinan ini membuat sebagian masyarakat masuk ke dalam kategori miskin pada masa pandemi tahun 2020.

Indek kedalaman kemiskinan atau disebut juga dengan *poverty gap* menggambarkan jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian *poverty gap* disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Perkembangan *poverty gap* di Kabupaten Bengkulu semakin membaik, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan mendekati angka nol. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu selama periode 2016-2020 semakin tinggi dan berkembang melewati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan di antara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu selama periode 2016-2020, menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu semakin merata. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Keparahannya yang mendekati nol dari tahun 2016 dari 0,43 menjadi 0,14 pada tahun 2020.

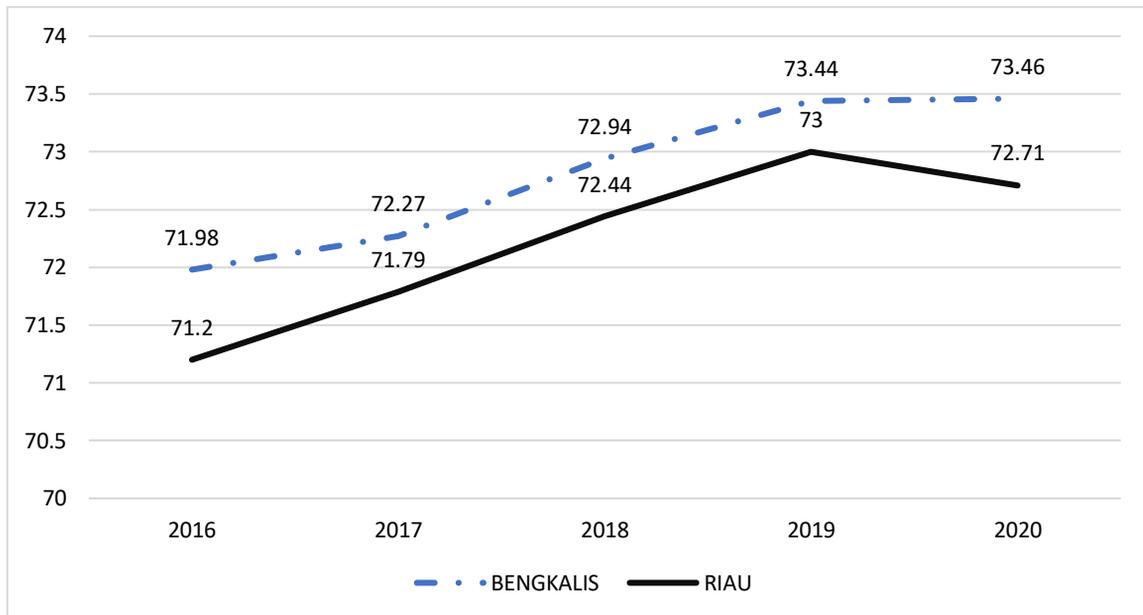
1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan

kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.



Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam angka 2021

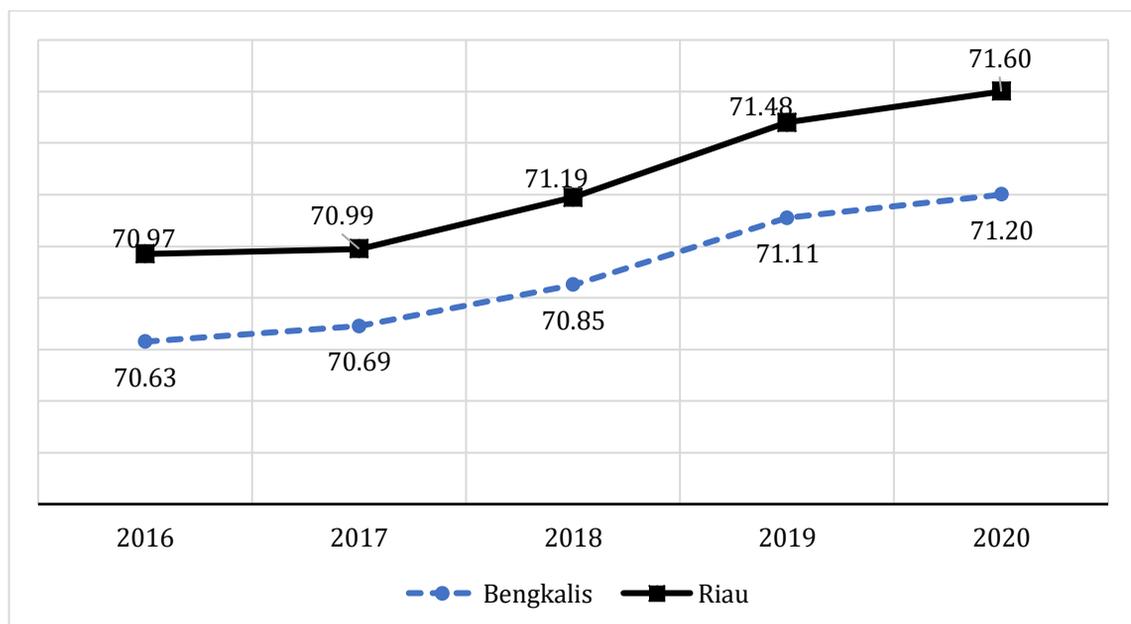
Gambar II-23 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu tahun 2016 - 2020

Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu menunjukkan perkembangan yang baik dan terus meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada tahun 2016 nilai IPM Kabupaten Bengkulu sebesar 71,98 dan terus mengalami peningkatan hingga 73,46 pada tahun 2020. Nilai IPM Kabupaten Bengkulu telah termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian IPM Kabupaten Bengkulu mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu sebesar 1,48 selama lima tahun terakhir. Perkembangan IPM medi kabupaten Bengkulu yang cukup baik ini memperlihatkan bahwa hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan tarah pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkulu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas hidup penduduk Kabupaten Bengkulu selama periode 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2020 kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu mengalami perlambatan akibat Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.

Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2016-2020 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkulu lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup di Kabupaten Bengkulu lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.

a) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan.



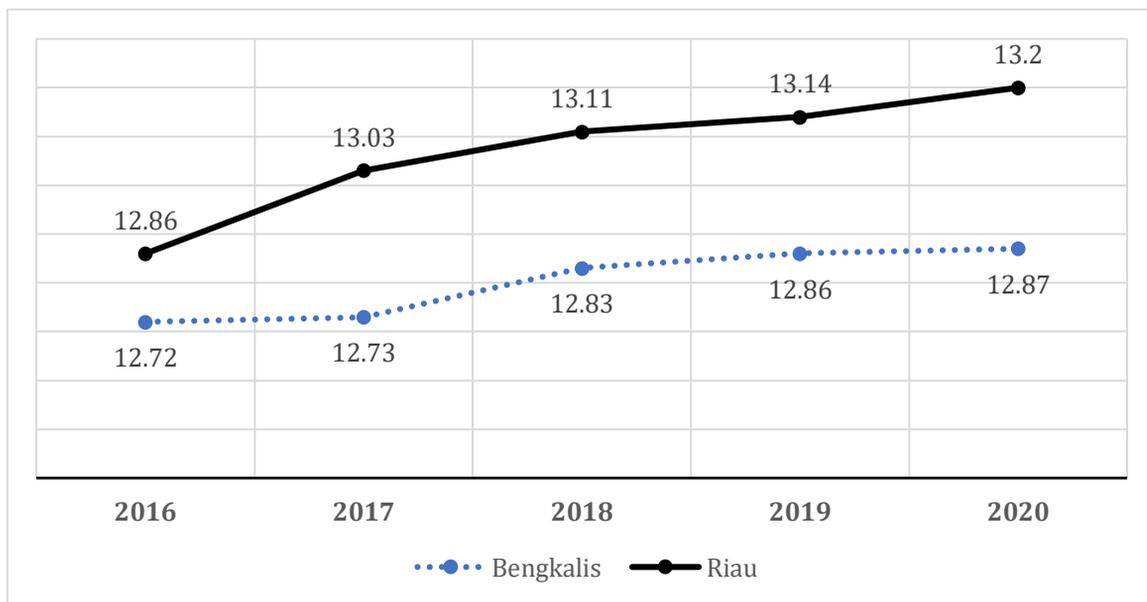
Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-24 Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan 0,57 selama periode 2016-2020, yaitu dari angka harapan hidup 70,63 tahun pada tahun 2016 menjadi 71,20 tahun pada tahun 2020. Secara umum angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari rata-rata angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk secara umum masih lebih baik di Provinsi Riau dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis, termasuk respon cepat terhadap keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan angka harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Secara umum, keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Provinsi Riau masih lebih baik jika dibandingkan dengan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020.

b) Angka Harapan Lama Sekolah

Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis berada di posisi keempat di antara kabupaten/kota lainnya setelah Pekanbaru, Dumai dan Kuantan Singingi.



Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-25 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

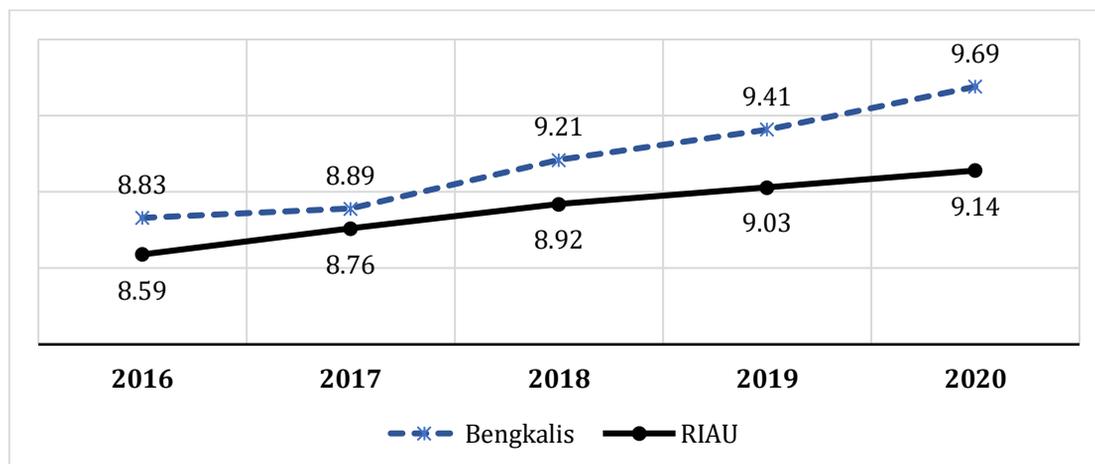
Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 12,72 tahun dan sedikit meningkat menjadi 13,87 tahun pada tahun 2020. Sedangkan angka harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah 12,86 tahun dan meningkat menjadi 13,20 tahun pada tahun 2019. Rata-rata harapan lama sekolah penduduk baru pada tingkat menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan tepatnya masuk jenjang pendidikan perguruan tinggi semester satu. Sedangkan harapan lama sekolah penduduk di Riau, telah memasuki jenjang perguruan tinggi, tepatnya pada semester tiga.

Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk hingga 5,13 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis.

Kebijakan pendidikan terkait pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Salah satu bentuk kebijakan yang tersebut adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk Bengkalis yang ingin melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.

c) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2019, masih diperlukan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk sampai 5,59 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata-rata lama sekolah bagi Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

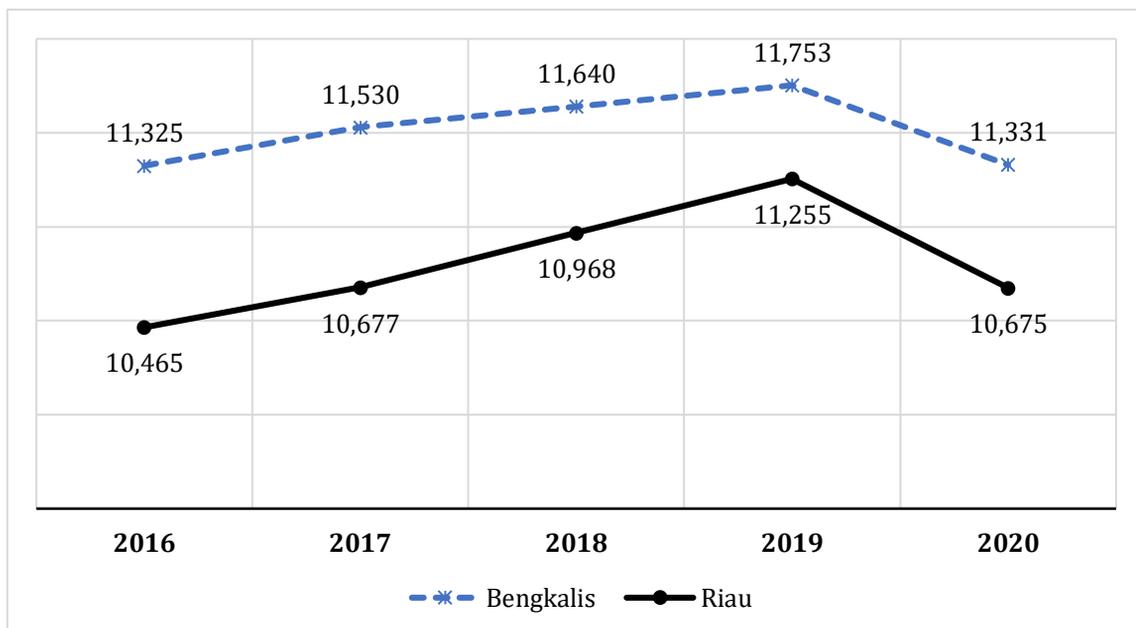
Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami perbaikan 0,59 tahun selama periode 2015-2019. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 adalah 8,82 tahun atau rata-rata kelas tiga SMP dan meningkat menjadi 9,41 tahun pada tahun 2019 atau rata-rata kelas satu SMA. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Riau. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau berada pada tingkat 8,49 tahun (kelas 3 SMP) dan meningkat menjadi 9,03 tahun pada tahun 2019 (kelas 1 SMA). Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam

rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkulu lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau.

d) Pengeluaran Per Kapita Riil

Pengeluaran perkapita riil dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkulu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita penduduk Riau selama periode 2016-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkulu memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup layak yang lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk Riau.

Namun demikian, untuk mencapai batas maksimum pengeluaran per kapita riil di Kabupaten Bengkulu masih perlu ditingkatkan hingga Rp. 14.8 juta per tahun pada tahun 2020. Selama periode 2016-2020, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkulu meningkat sebesar Rp. 788 ribu atau sekitar Rp. 157,600 per tahun. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkulu sebesar Rp. 11,325 ribu jumlah ini meningkat hingga menjadi Rp. 11.753 ribu pada tahun 2019, namun mengalami penurunan cukup drastis pada tahun 2020 menjadi 11,331 diakibatkan pandemi Covid-19 yang mengganggu perekonomian global.



Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam angka 2021

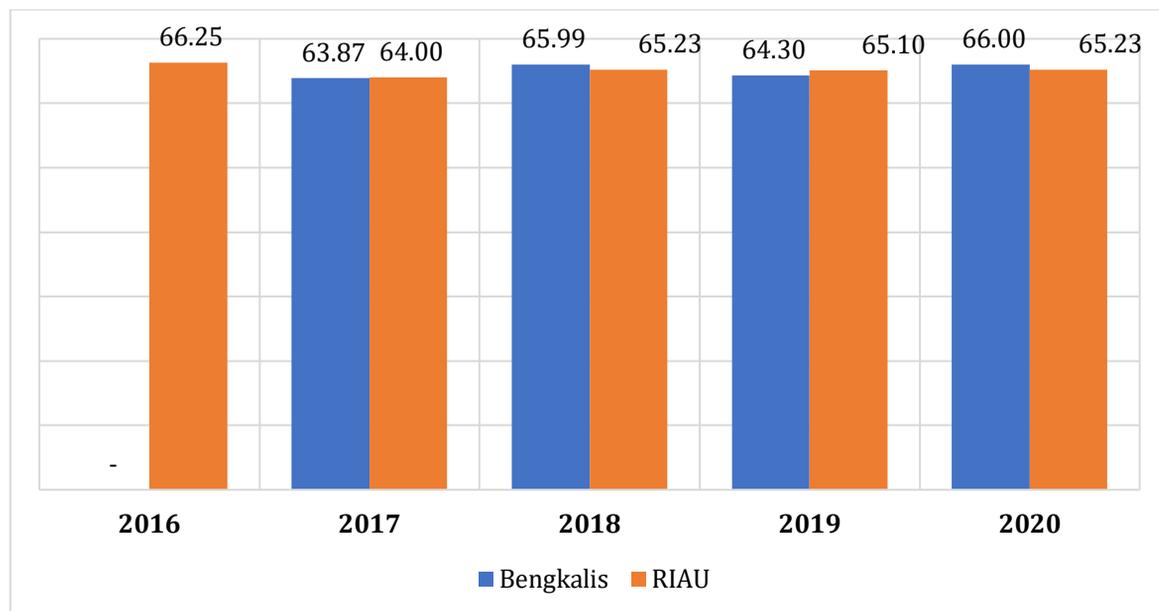
Gambar II-27 Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun)
Kabupaten Bengkulu tahun 2016 - 2020

Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2016-2020 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian harapan lama sekolah dan usia harapan hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.

2) Rasio Penduduk Bekerja

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dan periode waktu tertentu. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.



Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2021

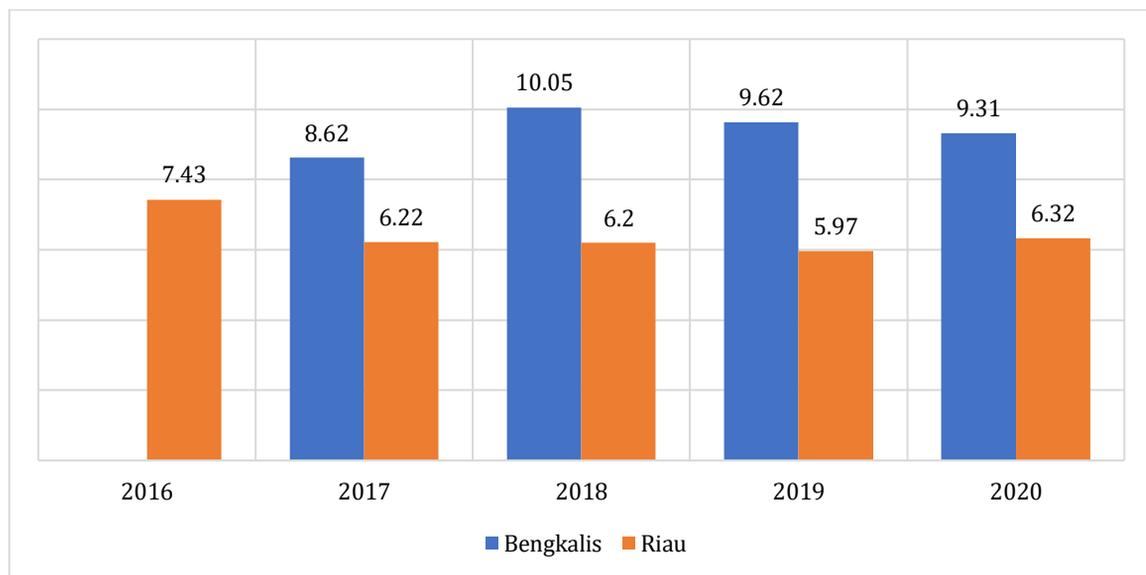
Gambar II-28 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 (%)

TPAK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Tingkat partisipasi tenaga kerja penduduk Kabupaten Bengkalis cenderung stagnan pada kisaran 65%, walaupun sedikit berfluktuasi selama periode 2016-2020. Pada tahun 2020, partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja di Provinsi Riau. Pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Bengkalis 63,87% dan kemudian sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 66,00%, atau terjadi peningkatan sekitar 2,13%. Sedangkan TPAK Provinsi Riau pada tahun 2020 berada pada tingkat 65,23%, sedikit meningkat dibanding tahun 2019 dengan

TPAK sebesar 65,10%. Adanya peningkatan TPAK Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya perbaikan lapangan kerja yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkalis seperti yang terlihat pada gambar berikut.



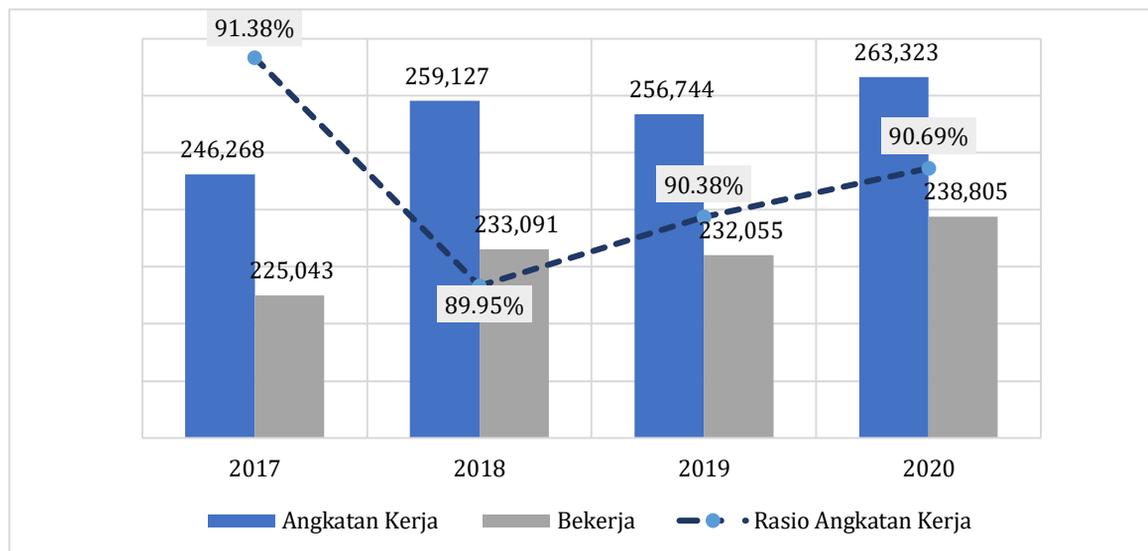
Sumber: BPS Provinsi Riau dan BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-29 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 (%)

Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka ditahun 2017 sebesar 8,62%, kemudian mengalami peningkatan mencapai 10,05% pada tahun 2018. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 mencapai 9,31%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau adalah 7,43% dan menurun menjadi 6,32% pada tahun 2020. Sedikitnya pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis mengindikasikan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis lebih sempit jika dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Riau. Ketergantungan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada sektor pertambangan menjadi salah satu penyebab sempitnya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis.

c) Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demmand side* (pengangguran).



Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2021

Gambar II-30 Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2020

Berdasarkan pada Gambar II-24, terlihat bahwa tren rasio kesempatan kerja menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 1,09 persen per tahun selama periode 2017-2020, yaitu dari 91,38% pada tahun 2017 menurun menjadi 90,69% pada tahun 2020. Rendahnya peningkatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga dalam setiap sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Kesenjangan antara penawaran tenaga kerja (*labour supply*) dan permintaan tenaga kerja (*labour demand*) menjadi salah satu penyebab rendahnya daya serap terhadap angkatan kerja pada dunia kerja. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja perlu menjadi perhatian untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkulu.

3) Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata.

Tabel II-8 Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkulu 2015-2020

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Jumlah Balita Gizi Buruk | 6 | 4 | 6 | 8 | 35 |
| Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) | 0,010 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,07 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkulu cukup rendah meski menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2017 hingga 2020. Dimana pada tahun 2018 jumlah bayi menderita gizi buruk sebanyak 6 orang atau sebesar 0.007% dari total semua balita di Kabupaten Bengkulu. Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 8 balita menderita gizi buruk atau sebesar 0.014% dari total keseluruhan balita. Terakhir pada tahun 2020 terjadi peningkatan balita gizi buruk menjadi 35 balita sehingga menjadikan prevalensi gizi buruk menjadi 0,07.

Tabel II-9. Persentase Balita Gizi Buruk Kecamatan di Kabupaten Bengkulu

| No | Kecamatan | Jumlah Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita | Persentase Balita Gizi Buruk |
|----|------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 0 | 7136 | 0 |
| 2 | Bukit Batu | 0 | 1628 | 0 |
| 3 | Bantan | 0 | 3429 | 0 |
| 4 | Mandau | 0 | 9787 | 0 |
| 5 | Rupat | 0 | 3523 | 0 |
| 6 | Rupat Utara | 24 | 1232 | 1.9 |
| 7 | Siak Kecil | 1 | 2297 | 0.04 |
| 8 | Pinggir | 1 | 6171 | 0.02 |
| 9 | Bandar Laksamana | 0 | 1390 | 0 |
| 10 | Talang Muandau | 5 | 1750 | 0.28 |
| 11 | Bathin Solapan | 4 | 8371 | 0.04 |
| | Jumlah | 35 | 46714 | 0.07 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu, 2021

Dari Tabel II-10 terlihat bahwa kasus balita gizi buruk terbanyak berada di Kecamatan Rupat Utara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi anak ditenggarai menjadi penyebab utama tingginya kasus gizi buruk di Kecamatan Rupat Utara. Daerah Rupat Utara merupakan daerah terluar dengan aksesibilitas kurang baik, pada daerah ini masih banyak masyarakat yang terisolir dan jauh dari jangkauan tenaga medis, sehingga bisa dipastikan sosialisasi dan pemahaman tentang kebutuhan gizi anak masih kurang baik di daerah ini.

1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat dari pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu. Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian, melindungi dan

menjaga Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu. Hal ini dikarenakan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-10 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkulu 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Belum dilestarikan |
|----|------------------|--|---|---|
| 1 | Bengkalis | 4 | 6 | 2 |
| 2 | Bukit Batu | 5 | 6 | 1 |
| 3 | Bantan | - | 1 | 1 |
| 4 | Mandau | - | - | - |
| 5 | Rupat | - | - | - |
| 6 | Rupat Utara | 1 | 1 | - |
| 7 | Siak Kecil | - | - | - |
| 8 | Pinggir | 2 | - | - |
| 9 | Bandar Laksamana | - | - | - |
| 10 | Talang Muandau | - | - | - |
| 11 | Bathin Solapan | - | - | - |
| | Jumlah | 12 | 14 | 4 |

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu 2021

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 sebanyak 12 dari total 14 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu. Dengan demikian pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini sudah mencakup 86% dari total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-11 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkulu 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah cabang olahraga yang dibina | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Jumlah seluruh cabang olahraga terdaftar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Cakupan pembinaan olahraga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu 2021

Sementara itu dari segi cakupan pembinaan olah raga di Kabupaten Bengkulu dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik. Sebanyak 40 cabang olah raga yang ada dan terdaftar di Kabupaten Bengkulu sudah berhasil dibina seluruhnya pada setiap tahun dalam periode 2016-2020. Pembinaan cabang olahraga ini dibutuhkan untuk menciptakan generasi muda Kabupaten Bengkulu yang berprestasi baik di tingkat lokal, maupun nasional dan internasional.

1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bengkulu, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikan ditempuh tanpa melihat batas usia sekolah yang diharuskan. APK SD/MI selama periode 2016-2020 telah sangat baik dengan capaian telah lebih dari 100%.

**Tabel II-12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020**

| No. | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | APK SD/MI | 100,44 | 111,29 | 106,01 | 108,63 | 106,72 |
| 2. | APK SMP/MTs | 96,86 | 88,18 | 94,77 | 95,01 | 97,41 |
| 3. | APK SMA/MA/SMK | 70,07 | 75,17 | 79,12 | 77,29 | 79,38 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu, 2021

Namun untuk tingkat pendidikan SMP masih terdapat anak usia sekolah SMP yang tidak bersekolah. Hal ini terlihat dari APK SMP/MTs masih mencapai 95,01% pada tahun 2019 dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 83,64%. Beberapa alasan APK SMP/MTs belum mencapai 100% adalah ketersediaan jumlah sekolah yang masih kurang

untuk menampung penduduk usia sekolah SMP untuk bersekolah, masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP, angka putus sekolah, penyebaran sekolah SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau sekolah, alasan ekonomi seperti orangtua tidak mampu membiayai sekolah anak atau anak harus berkerja membantu orang tua mencari nafkah. Pada beberapa daerah seperti di Kecamatan Rupert dan Rupert Utara, akses menuju sekolah sangat jauh, memakan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Pengorbanan cukup besar yang dibutuhkan oleh beberapa masyarakat di wilayah pedalaman, membuat angka partisipasi sekolah menjadi kurang dari 100%.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang banyak pulau menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bengkalis, sehingga anak usia sekolah yang ada di pulau-pulau dan daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Pada jenjang pendidikan SMA sederajat juga belum mencapai APS pada tingkat 100%, yaitu baru mencapai 79,38% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan masih terdapat sekitar 20,62% anak usia sekolah SMA yang tidak bersekolah.

Namun demikian, Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan, seperti pemberian dukungan peningkatan akses menuju sekolah, kepastian usia sekolah untuk dapat bersekolah dari pemerintah melalui pemberian bantuan pendidikan/beasiswa serta kebijakan daerah yang menyelenggarakan pendidikan hingga 12 tahun.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak tahun 2007, tidak hanya menghitung siswa pada sekolah formal, tetapi juga termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Secara umum, angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan selama periode 2016-2020. APM SD/MI pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020 nilai APM SD/MI sebesar 98,06, naik sebanyak 0,15% dibanding tahun 2019. Penurunan ini disinyalir karena daya tampung lembaga pendidikan di tingkat SD/MI belum mampu mencukupi kebutuhan.

Tabel II-13 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2020

| No. | Jenjang | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | APM SD/MI | 97,49 | 98,54 | 98,33 | 97,91 | 98,06 |
| 2. | APM SMP/MTs | 82,2 | 82,03 | 84,35 | 85,70 | 86,50 |
| 3. | APM SMA/MA/SMK | 64,61 | 63,95 | 66,46 | 66,07 | 66,97 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

APM SMP/MTs terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,8%. Kondisi ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada usia sekolah SMP/MTs belum sepenuhnya tertampung dijenjang SMP/MTs sementara ketersediaan pendidikan non formal belum mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik untuk dapat menikmati pendidikan ditingkat SMP/MTs, terutama di wilayah pedalaman. Kemudian, APM SMA/MA/SMK terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,90%. Kondisi ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada usia sekolah SMA/MA/SMK belum sepenuhnya tertampung dijenjang SMA/MA/SMK sementara ketersediaan pendidikan non formal belum mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik untuk dapat menikmati pendidikan ditingkat SMA/MA/SMK.

Pemerataan fasilitas pendidikan di semua daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan angka partisipasi murni di Kabupaten Bengkulu. Selain pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan transportasi dan ekonomi juga dapat memperlancar akses penduduk usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. Maka dari Tabel II-13 dapat kita lihat bahwa APS untuk SD/MI/Paket A pada tahun 2020 mencapai 99,66. Dengan makna bahwa dari 1000 penduduk usia 7-12 tahun sudah sebanyak 996 orang berpartisipasi pada SD/MI/Paket A yang ada di Kabupaten Bengkulu. Dengan kata lain, sudah mencapai 99,66%% penduduk usia 7-12 berpartisipasi di sekolah.

**Tabel II-14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020**

| No. | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1. | APS SD/MI/Paket A | 103,2 | 102,2 | 115,4 | 98,0 | 99,66 |
| 2. | APS SMP/MTs/Paket B | 77,9 | 99,4 | 98,0 | 79,3 | 94,56 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Bengkulu 2021

Untuk angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 sudah mencapai 94,56%. Dengan makna bahwa dari 100% penduduk usia SMP sederajat (13-15 tahun) telah memasuki sekolah pada jenjang SMP Sederajat termasuk pada sekolah non formal sebanyak 94,56%. Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

d) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2018 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 147, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs berjumlah 220. Besarnya angka putus sekolah pada tahun 2018 ini ditengarai akses terhadap pendidikan yang belum optimal, terutama dalam hal pemberian bantuan pendidikan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi siswa putus sekolah di Kabupaten Bengkulu. Perbaikan akses pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melanjutkan pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam menekan angka putus sekolah di Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-15 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 - 2020

| No. | Kecamatan | Angka Putus Sekolah SD/MI | | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Bengkalis | 25 | 3 | 0 | 20 | 9 | 0 |
| 2 | Bantan | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 3 | Bukit Batu | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Siak Kecil | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | Rupat | 46 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| 6 | Rupat Utara | 10 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 7 | Mandau | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 8 | Pinggir | 12 | 5 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 9 | Bandar Laksamana | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bathin Solapan | 25 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 |
| 11 | Talang Muandau | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Kabupaten Bengkulu | | 147 | 15 | 0 | 220 | 28 | 0 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, 2021

e) Angka Kelulusan

Indikator lain dari urusan pendidikan di Kabupaten Bengkulu adalah perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bengkulu. Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa di Kabupaten Bengkulu dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

Tabel II-16 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkulu Tahun 2017 - 2020

| No. | Jenjang Pendidikan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|
| 1 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 2 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, 2021

Angka Kelulusan di Kabupaten Bengkalis sudah mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2020. Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis sudah baik. Namun demikian tingkat melanjutkan pendidikan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan lanjutan, yaitu sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

f) Angka Melanjutkan Studi

Indikator selanjutnya adalah angka melanjutkan studi yang menggambarkan seberapa banyak siswa pada jenjang pendidikan tertentu bisa melanjutkan pendidikannya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bengkalis belum mencapai 100%, artinya belum seluruh siswa yang lulus dari pendidikan sekolah dasar sederajat dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP sederajat.

**Tabel II-17 Perkembangan Angka Melanjutkan Studi
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs | 11740 | 11628 | 11598 |
| 2 | Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya | 11921 | 11965 | 12240 |
| 3 | Angka Melanjutkan Studi SMP/MTs | 98,48 | 97,18 | 94,75 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021

Jumlah angka melanjutkan studi di Kabupaten Bengkalis untuk jenjang SMP/MTS belum mencapai 100% hingga tahun 2020. Masih ada sekitar 5,25% siswa lulusan SD/MI yang belum bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/MTS. Kecamatan Bukit Batu merupakan daerah dengan angka melanjutkan studi ke SMP/MTs paling rendah. Hanya sebanyak 58,78% dari siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel II-18 Perkembangan Angka Melanjutkan Study Per Kecamatan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020**

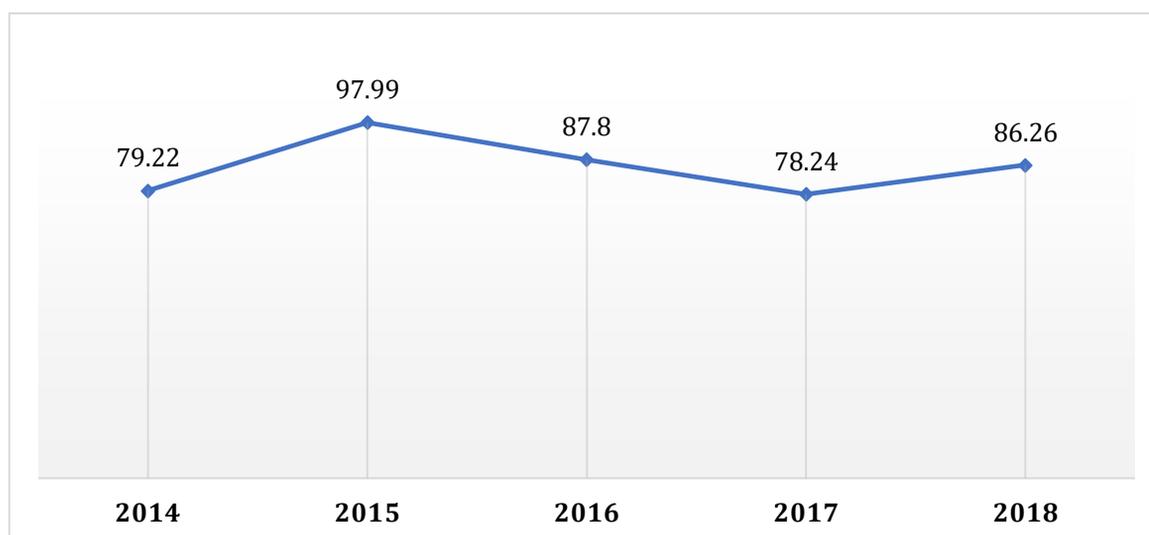
| No. | Kecamatan | Jumlah siswa baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs | Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya | Angka Melanjutkan Study ke SMP/MTs |
|-----|-------------|--|---|------------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 270 | 377 | 71,62 |
| 2 | Bukit Batu | 425 | 723 | 58,78 |
| 3 | Bantan | 2.037 | 2.140 | 95,19 |
| 4 | Mandau | 1.334 | 1.633 | 81,69 |
| 5 | Rupat | 350 | 434 | 80,65 |
| 6 | Rupat Utara | 3594 | 3.146 | 114,24 |
| 7 | Siak Kecil | 1.598 | 1.399 | 114,22 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 8 | Pinggir | 718 | 824 | 87,14 |
| 9 | Bandar Laksamana | 335 | 363 | 92,29 |
| 10 | Talang Muandau | 405 | 485 | 83,51 |
| 11 | Bathin Solapan | 532 | 716 | 74,30 |
| Kabupaten Bengkulu | | 11.598 | 12.240 | 94,75 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, 2021

g) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Sehingga guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV, adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebagai berikut:



Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam angka 2020

Gambar II-31 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 - 2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan S1/D-IV yang dimiliki guru cenderung meningkat, dimana capaian tertinggi dicapai pada 2015 sebesar 97,99%. Namun, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 87,80% dan hingga akhir tahun 2018 berjumlah 86,26% hal ini dikarenakan bertambah jumlah guru yang ada pada Kabupaten Bengkulu dan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta adanya guru yang pindah tugas.

h) Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ajaran 2018/2019 menuju taun ajaran 2019/2020, untuk rasio guru/murid SD/MI mengalami peningkatan dari 623 menjadi 644, Rasio guru/murid SD/MI

kembali meningkat pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi 670. Sama halnya dengan rasio Guru/Murid SMP/MTS juga mengalami peningkatan menjadi 809 pada tahun ajar 2019/2020 dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 774. Peningkatan rasio ini menggambarkan bahwa ada lebih banyak murid pada tahun 2019/2020 dibanding tahun 2018/2019 yang menjadi beban kerja guru.

**Tabel II-19 Rasio Guru-Murid
Kabupaten Bengkulu Tahun 2018/2019 - 2019/2020**

| No | TAHUN AJARAN | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah Murid SD/MI | 80.157 | 81.573 | 81.090 |
| 2 | Jumlah Guru | 4.996 | 5.253 | 5.432 |
| 3 | Rasio per 10.000 | 623 | 644 | 670 |
| 4 | Jumlah Murid SMP/MTS | 36.271 | 35.772 | 35.864 |
| 5 | Jumlah Guru SMP/MTS | 2.806 | 2.894 | 2.941 |
| 6 | Rasio per 10.000 | 774 | 809 | 820 |
| 7 | Jumlah Murid SMA/SMK/MA | 29.865 | 31.067 | 35.569 |
| 8 | Jumlah Guru SMA/SMK/MA | 2.507 | 2.549 | 2.748 |
| 9 | Rasio per 10.000 | 839 | 820 | 773 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu 2020

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SLTA mengalami penurunan dari 839 menjadi 820 pada tahun 2019. Rasio Guru/Murid SLTA kembali mengalami penurunan pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi 773. Hal ini berarti beban kerja guru menjadi lebih sedikit, sehingga dapat bekerja dan mengelola kelas dengan lebih baik untuk menciptakan kualitas Pendidikan yang baik.

i) Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk dalam fase usia produktif dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu faktor penting yang harus dimiliki penduduk pada fase ini adalah kemampuan membaca atau melek huruf.

**Tabel II-20 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf
Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1 | Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis | 376.022 | 372.755 | 358.597 | 390.293 | - |
| 2 | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas | 376.195 | 373.253 | 359.184 | 390.655 | - |
| 3 | Angka Melek Huruf >15 | 99,95 | 99,87 | 99,84 | 99,91 | 99,30 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu 2021

Penduduk kelompok usia 15-44 tahun di Kabupaten Bengkulu telah sepenuhnya melek huruf pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan untuk usia 45 tahun keatas masih terdapat beberapa persen penduduk yang belum melek huruf. Penduduk yang tidak melek huruf ini kebanyakan

adalah penduduk lanjut usia dan penduduk yang tinggal di pedesaan. Faktor usia dan kondisi pedesaan menjadi faktor penghambat penduduk usia lanjut sebagian masih belum melek huruf. Hal ini pula yang menyebabkan capaian angka melek huruf >15 belum mampu mencapai 100%.

j) Capaian perkembangan Standard Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari empat indikator yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar SD/MI, Pendidikan Dasar SMP/MTS dan pemenuhan pendidikan kesetaraan. Capaian indikator SPM bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel II-21. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020**

| No. | Indikator | Capaian Tahun 2019 (%) | Capaian Tahun 2020 (%) | Pembiayaan (xRp.1.000) Tahun 2019 | Pembiayaan (xRp.1000) Tahun 2020 |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini | 94,01 | 68.43 | 6,110,000 | 10,270,810 |
| 2 | Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Dasar | 98,03 | 99.66 | 35,987,489 | 67,624,647 |
| 3 | Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 79,29 | 94.56 | 28,749,141 | 31,153,699 |
| 4 | Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Kesetaraan | 100 | 23 | 2,747,058 | 972,585 |
| Rata-Rata Capaian | | 92,83 | 71.41 | 73,593,689 | 110,021,741 |

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkulu 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rata-rata capaian SPM bidang pendidikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan anggaran meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan

pada capaian SPM pada pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan, namun tidak mempengaruhi ketercapaian APK dari masing-masing sub urusan pendidikan tersebut.

1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

Angka kematian bayi di Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Dimana pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 5,1 per 1000 kelahiran hidup, lalu kemudian berkurang menjadi 4 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup tahun 2020. Perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis telah membuat penurunan jumlah kematian bayi dari 57 kematian pada tahun 2016, menjadi 42 kematian pada tahun 2020. Perbaikan pelayanan kesehatan secara umum, terutama dalam mengurangi angka kematian bayi, masih perlu ditingkatkan dengan pemerataan pelayanan pada beberapa daerah terpencil yang masih minim fasilitas kesehatan.

Indikator kinerja dalam urusan kesehatan dapat pula dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Dimana, pada periode 2016-2020 AKI per 100.000 kelahiran hidup berfluktuasi cenderung naik, terutama dalam tiga tahun terkahir. Dibandingkan dengan tahun 2016, AKI tahun 2020 masih lebih tinggi, yaitu mencapai 201 kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel II-22 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 5,1 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,0 |
| 2 | Jumlah Kematian bayi | 57 | 48 | 48 | 45 | 42 |
| 3 | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup | 187 | 120 | 116 | 131 | 201 |
| 4 | Jumlah Kematian Ibu | 21 | 13 | 12 | 14 | 21 |
| 5 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | 95% | 95% | 90% | 84% | 77% |
| 6 | Cakupan Pelayanan Nifas | 98% | 90% | 86% | 78% | 75% |
| 7 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani | 17% | 9% | 21% | 60% | 14% |
| 8 | Angka Kelangsungan Hidup | 1-5,1 | 1-4,4 | 1-4,5 | 1-4,2 | 1-4,0 |
| 9 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup | 5,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,1 |
| 10 | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| 11 | Rasio Posyandu Per 1000 Balita | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |

| No. | Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| 12 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk | 4 | 4 | 4 | 4 | na |
| 13 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 1 | 1 | 1 | 1 | na |
| 14 | Rasio dokter per 1000 penduduk | na | na | 50,2 | 22,3 | 66,8 |
| 15 | Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk | na | na | 50,2 | 22,3 | 66,8 |
| 16 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | na | na | 73% | 72% | 61,30% |
| 17 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 97% | 89% | 86% | 81% | 79% |
| 18 | Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan | 82% | 83% | 85% | 78% | na |
| 19 | Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan | 91% | 85% | 94% | 87% | na |
| 20 | Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi | 93% | 85% | 94% | 90% | na |
| 21 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 62% | 67% | 69% | 90% | 69% |
| 22 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak | 77% | 87% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
| 25 | Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani | na | na | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | 74% | 90% | 93% | 101% | 28% |
| 27 | Tingkat Prevalensi TBC per 100.000 penduduk | 86 | 123 | 114 | 142 | 121 |
| 28 | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS | na | na | 93,20% | 93,30% | na |
| 30 | Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS | 83% | 84% | 70% | 27% | 12% |
| 31 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 32 | Penderita Diare yang di Tangani | 12,48 | 9,56 | 44% | 32% | 10% |
| 33 | Jumlah Kejadian Malaria | 2 | 4 | 3 | 31 | 11 |
| 34 | Tingkat Kematian Akibat Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 36 | Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi | 0,10% | 0,20% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 37 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | na | na | na | na | 60% |
| 38 | Cakupan Kunjungan Bayi | 76% | 85% | 89,90% | 85,20% | 81,60% |
| 39 | Cakupan Puskesmas | 154% | 154% | 164% | 164% | 164% |
| 40 | Cakupan Pembantu Puskesmas | 43% | 43% | 36% | 36% | 36% |
| 41 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | 76% | 75% | 65% | 65% | 23% |

| No. | Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|------|------|--------|--------|--------|
| 42 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin | 3% | 15% | na | na | 5% |
| 43 | Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat | 22% | 92% | 12% | na | 40% |
| 44 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 39% | 31% | 33% | na | 60% |
| 45 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 46 | Cakupan Desa Siaga Aktif | | | 94,44% | 93,65% | 92,86% |
| 47 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 sebanyak 42 kejadian. Kasus kematian bayi berumur kurang 1 tahun paling banyak ditemukan di Kecamatan bantan, yaitu sebanyak 9 kasus, lalu di Kecamatan Bengkalis tercatat sebanyak 6 kejadian dan di Kecamatan Rupal Utara serta Siak Kecil terjadi 5 kasus. Kecamatan lain yang memiliki paling sedikit kejadian kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun adalah kecamatan Pinggir dan Kecamatan Tualang Muandau dengan 1 kejadian.

Tabel II-23 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup |
|----------------------------|------------------|--|--|--|
| 1 | Bengkalis | 6 | 1.356 | 4,4 |
| 2 | Bukit Batu | 3 | 358 | 8,3 |
| 3 | Bantan | 9 | 861 | 10,4 |
| 4 | Mandau | 2 | 2.851 | 0,7 |
| 5 | Rupal | 3 | 666 | 4,5 |
| 6 | Rupal Utara | 5 | 254 | 19,7 |
| 7 | Siak Kecil | 5 | 424 | 11,8 |
| 8 | Pinggir | 1 | 1.505 | 0,7 |
| 9 | Bandar Laksamana | 3 | 297 | 10,1 |
| 10 | Talang Muandau | 1 | 454 | 2,2 |
| 11 | Bathin Solapan | 4 | 1.421 | 2,8 |
| Kebupaten Bengkalis | | 42 | 10.447 | 4,0 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Secara total Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup tertinggi berada di Kecamatan Rupal Utara. Dengan AKB per 1000 kelahiran hidup mencapai 19,7. Hal ini berarti ada sekitar 20 kematian tiap 1000 bayi lahir hidup di kecamatan ini. Rasio ini cenderung besar

karena jumlah kelahiran di Kecamatan Rupa Utara yang relatif rendah, namun kasus kematian bayi relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Bengkulu tahun 2020 adalah 4,0. Artinya terdapat 4,0 kematian bayi setiap 1000 bayi yang lahir hidup di Kabupaten Bengkulu. Jumlah ini diharapkan dapat terus berkurang hingga mencapai 0 dalam tahun-tahun ke depan.

Tabel II-24 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Angka Kelangsungan Hidup Bayi |
|---------------------------|------------------|--|--|--|-------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 6 | 1.356 | 4,4 | 1-4,4 |
| 2 | Bukit Batu | 3 | 358 | 8,3 | 1-8,3 |
| 3 | Bantan | 9 | 861 | 10,4 | 1-10,4 |
| 4 | Mandau | 2 | 2.851 | 0,7 | 1-0,7 |
| 5 | Rupa | 3 | 666 | 4,5 | 1-4,5 |
| 6 | Rupa Utara | 5 | 254 | 19,7 | 1-19,7 |
| 7 | Siak Kecil | 5 | 424 | 11,8 | 1-11,8 |
| 8 | Pinggir | 1 | 1.505 | 0,7 | 1-0,7 |
| 9 | Bandar Laksamana | 3 | 297 | 10,1 | 1-10,1 |
| 10 | Talang Muandau | 1 | 454 | 2,2 | 1-2,2 |
| 11 | Bathin Solapan | 4 | 1.421 | 2,8 | 1-2,8 |
| Kebupaten Bengkulu | | 42 | 10.447 | 4,0 | 1-4,0 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Angka Kelangsungan Hidup Bayi paling tinggi ditemukan di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau. Hal ini tentu saja dikarenakan tidak adanya kematian bayi tahun 2020 di kecamatan tersebut. Tingginya angka kelangsungan hidup bayi di kecamatan Mandau, Pinggir dan Tualang Muandau ditenggarai karena lebih mudahnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik beberapa kecamatan ini. Untuk kecamatan Rupa Utara yang memiliki angka kematian bayi paling tinggi membuatnya menjadi kecamatan dengan angka kelangsungan hidup bayi paling rendah di kabupaten Bengkulu.

Tabel II-25 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Kematian Bayi (Berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu. | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup |
|----|------------|---|--|--|
| 1 | Bengkalis | 6 | 1.356 | 4,4 |
| 2 | Bukit Batu | 3 | 358 | 8,3 |
| 3 | Bantan | 9 | 861 | 10,4 |

| No | Kecamatan | Jumlah Kematian Bayi (Berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu. | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup |
|----------------------------|------------------|---|--|--|
| 4 | Mandau | 2 | 2851 | 0,7 |
| 5 | Rupat | 3 | 666 | 4,5 |
| 6 | Rupat Utara | 5 | 254 | 19,7 |
| 7 | Siak Kecil | 6 | 424 | 14,1 |
| 8 | Pinggir | 1 | 1.505 | 0,7 |
| 9 | Bandar Laksamana | 3 | 297 | 10,1 |
| 10 | Talang Muandau | 1 | 454 | 2,2 |
| 11 | Bathin Solapan | 4 | 1.421 | 2,8 |
| Kabupaten Bengkalis | | 43 | 10.447 | 4,1 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Total Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 berjumlah 4,4. Artinya, setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 4,4 balita yang meninggal pada tahun 2020. Dimana untuk kecamatan dengan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup tertinggi adalah Kecamatan Rupat Utara. Hal ini sesuai dengan data bahwa Kecamatan Rupat Utara memiliki angka Kematian Bayi tertinggi di Kabupaten Bengkalis, selain itu Kecamatan Utara juga merupakan salah satu Kecamatan yang jauh dari fasilitas kesehatan utama, seperti rumah sakit umum membuat daerah ini memiliki pelayanan kesehatan yang belum memadai jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan lain.

Tabel II-26 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Dalam Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup. |
|----------------------------|------------------|--|---|---|
| 1 | Bengkalis | 6 | 1.356 | 4,4 |
| 2 | Bukit Batu | 2 | 358 | 8,3 |
| 3 | Bantan | 9 | 861 | 10,4 |
| 4 | Mandau | 2 | 2851 | 0,7 |
| 5 | Rupat | 2 | 666 | 3,0 |
| 6 | Rupat Utara | 4 | 254 | 15,7 |
| 7 | Siak Kecil | 5 | 424 | 11,8 |
| 8 | Pinggir | 1 | 1.505 | 0,7 |
| 9 | Bandar Laksamana | 3 | 297 | 10,1 |
| 10 | Talang Muandau | 1 | 454 | 2,2 |
| 11 | Bathin Solapan | 3 | 1.421 | 2,1 |
| Kabupaten Bengkalis | | 38 | 10.447 | 3,7 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 berjumlah 3,7, yang berarti bahwa setiap 1000 kelahiran hidup, terdapat 3,7 bayi yang berumur kurang dari 1 bulan meninggal dunia. Kematian bayi neonatal paling banyak ditemukan di Kecamatan Rupa Utara, diikuti oleh Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bantan. Pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran Ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan dan perilaku hidup sehat menjadi penting dalam pembangunan kesehatan bayi di Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-27 Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran hidup dalam Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun | Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup |
|---------------------------|------------------|--|---|--|
| 1 | Bengkalis | 2 | 1.356 | 147,5 |
| 2 | Bukit Batu | 0 | 358 | 0 |
| 3 | Bantan | 6 | 861 | 696,9 |
| 4 | Mandau | 5 | 2.851 | 175,4 |
| 5 | Rupa | 1 | 666 | 150,2 |
| 6 | Rupa Utara | 1 | 254 | 393,7 |
| 7 | Siak Kecil | 1 | 424 | 235,8 |
| 8 | Pinggir | 0 | 1.505 | 0 |
| 9 | Bandar Laksamana | 0 | 297 | 0 |
| 10 | Talang Muandau | 1 | 454 | 220,3 |
| 11 | Bathin Solapan | 4 | 1.421 | 281,5 |
| Kabupaten Bengkulu | | 14 | 10.447 | 201 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kabupaten Bengkulu Berjumlah 201 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi 201 kematian setiap 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkulu tahun 2020. Angka ini dinilai cukup tinggi, terutama bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah mencapai lebih dari 200 kejadian per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II-28 Rasio posyandu per 1000 balita Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Posyandu | Jumlah Balita | Rasio Posyandu per 1000 Balita |
|----|------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 64 | 7.136 | 0,9 |
| 2 | Bukit Batu | 25 | 1.628 | 1,5 |
| 3 | Bantan | 45 | 3.429 | 1,3 |
| 4 | Mandau | 92 | 9.787 | 0,9 |
| 5 | Rupa | 63 | 3.523 | 1,8 |

| No | Kecamatan | Jumlah Posyandu | Jumlah Balita | Rasio Posyandu per 1000 Balita |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 6 | Rupat Utara | 20 | 1.232 | 1,6 |
| 7 | Siak Kecil | 34 | 2.297 | 1,5 |
| 8 | Pinggir | 56 | 6.171 | 0,9 |
| 9 | Bandar Laksamana | 18 | 1.390 | 1,3 |
| 10 | Talang Muandau | 31 | 1.750 | 1,8 |
| 11 | Bathin Solapan | 63 | 8.371 | 0,8 |
| Kabupaten Bengkulu | | 511 | 46.714 | 1,1 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Jumlah posyandu di Kabupaten Bengkulu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah posyandu berjumlah 503 unit, kemudian meningkat menjadi 506 unit pada tahun 2019 dan kembali meningkat lagi menjadi 511 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah posyandu ini sangat bagus dalam meningkatkan pelayanan kesahat ibu hamil dan balita di tingkat desa/lurah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa setiap 1000 balita terdapat setidaknya 1 posyandu yang melayani.

Tabel II-29 Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Tenaga Medis | Jumlah Penduduk. | Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk |
|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 88 | 83.402 | 105,5 |
| 2 | Bukit Batu | 8 | 42.212 | 19,0 |
| 3 | Bantan | 22 | 21.550 | 102,1 |
| 4 | Mandau | 184 | 152.215 | 120,9 |
| 5 | Rupat | 11 | 33.628 | 32,7 |
| 6 | Rupat Utara | 6 | 14.222 | 42,2 |
| 7 | Siak Kecil | 10 | 24.901 | 40,2 |
| 8 | Pinggir | 17 | 62.604 | 27,2 |
| 9 | Bandar Laksamana | 5 | 15.714 | 31,8 |
| 10 | Talang Muandau | 6 | 23.814 | 25,2 |
| 11 | Bathin Solapan | 21 | 91.307 | 23,0 |
| Kabupaten Bengkulu | | 378 | 565.569 | 66,8 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Jumlah tenaga medis di suatu daerah sangat mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan daerah tersebut. Di Kabupaten Bengkulu, secara total terdapat 378 tenaga medis pada tahun 2020. Namun, jumlah tenaga medis ini tidak merata antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Pada Kecamatan Mandau, jumlah tenaga medis mencapai hampir 50% dari total tenaga medis di Kabupaten Bengkulu, sementara kecamatan lain seperti Rupat Utara hanya memiliki 6 tenaga medis dan kecamatan Bandar Laksamana hanya memiliki 5 tenaga medis di daerahnya. Ketimpangan ini tentu saja dapat membuat beberapa daerah lebih terbelakang dalam pelayanan kesehatannya.

Tabel II-30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif | Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani |
|---------------------------|------------------|--|--|---|
| 1 | Bengkalis | 119 | 342 | 34,8 |
| 2 | Bukit Batu | 104 | 88 | 118,7 |
| 3 | Bantan | 136 | 196 | 69,5 |
| 4 | Mandau | 258 | 720 | 35,8 |
| 5 | Rupat | 181 | 157 | 115,4 |
| 6 | Rupat Utara | 0 | 66 | 0 |
| 7 | Siak Kecil | 118 | 94 | 125,5 |
| 8 | Pinggir | 289 | 363 | 79,7 |
| 9 | Bandar Laksamana | 40 | 59 | 68,3 |
| 10 | Talang Muandau | 161 | 127 | 127 |
| 11 | Bathin Solapan | 278 | 539 | 51,6 |
| Kabupaten Bengkulu | | 1.684 | 2.749 | 61,2 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Bengkulu yang ditangani tahun 2020 sebesar 61,2% dari total komplikasi kebidanan yang terjadi. Capaian terendah terjadi di Kecamatan Rupat Utara dengan komplikasi kebidanan yang tertangani sebesar 0%. Kecamatan Rupat Utara menjadi satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan, padahal penanganan komplikasi sangat berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan bayi. Lemahnya infrastruk kesehatan dan tenaga medis yang tidak memadai membuat pelayanan komplikasi kebidanan di Kecamatan Rupat Utara sangat terbatas sekali.

Tabel II-31 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan |
|----|------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Bengkalis | 1.358 | 1.636 | 83 |
| 2 | Bukit Batu | 354 | 416 | 85,1 |
| 3 | Bantan | 831 | 955 | 87 |
| 4 | Mandau | 2.851 | 3.435 | 83 |
| 5 | Rupat | 636 | 806 | 78,9 |
| 6 | Rupat Utara | 239 | 316 | 75,6 |
| 7 | Siak Kecil | 416 | 430 | 96,7 |
| 8 | Pinggir | 1.507 | 1.645 | 91,6 |
| 9 | Bandar Laksamana | 299 | 279 | 107,2 |
| 10 | Talang Muandau | 445 | 605 | 73,6 |

| No | Kecamatan | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan |
|---------------------------|----------------|---|-------------------------------------|---|
| 11 | Bathin Solapan | 1.422 | 2.570 | 55,3 |
| Kabupaten Bengkulu | | 10.358 | 13.093 | 79,1 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkulu pada Tahun 2020 mencapai 79,1%. Capaian ini terbilang sudah cukup baik dan sudah merata antarkecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkulu secara umum sudah cukup baik dan merata. Hal ini tentu saja didukung dengan program pemerintah satu desa satu bidan.

Tabel II-32 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Desa / Kelurahan UCI. | Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) |
|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Bengkalis | 30 | 31 | 97 |
| 2 | Bukit Batu | 8 | 10 | 80 |
| 3 | Bantan | 21 | 23 | 91 |
| 4 | Mandau | 2 | 11 | 18 |
| 5 | Rupat | 4 | 16 | 25 |
| 6 | Rupat Utara | 2 | 8 | 25 |
| 7 | Siak Kecil | 15 | 17 | 88 |
| 8 | Pinggir | 10 | 10 | 100 |
| 9 | Bandar Laksamana | 6 | 7 | 86 |
| 10 | Talang Muandau | 4 | 9 | 44 |
| 11 | Bathin Solapan | 5 | 13 | 38 |
| Kabupaten Bengkulu | | 107 | 155 | 69 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 sudah mencapai 69% pada tahun 2020. Dari 155 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bengkulu, sudah sebanyak 107 desa/kelurahan yang menjadi desa/kelurahan UCL. Hal ini berarti sudah sebagian besar desa/kelurahan mencapai imunisasi dasar dasar secara lengkap pada bayi keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (dibawah 1 tahun). Yang perlu menjadi perhatian adalah, capaian di kecamatan Rupat, Rupat Utara dan Bathin Solapan jauh lebih rendah dibanding kecamatan lain di Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-33 Penderita Diare yang Ditangani per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader | Jumlah perkiraan penderita diare | Penderita diare yang ditangani |
|---------------------------|------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 558 | 812 | 69% |
| 2 | Bukit Batu | 266 | 215 | 124% |
| 3 | Bantan | 532 | 460 | 116% |
| 4 | Mandau | 646 | 1.606 | 40% |
| 5 | Rupat | 343 | 405 | 85% |
| 6 | Rupat Utara | 108 | 162 | 67% |
| 7 | Siak Kecil | 324 | 229 | 142% |
| 8 | Pinggir | 903 | 598 | 151% |
| 9 | Bandar Laksamana | 189 | 167 | 113% |
| 10 | Talang Muandau | 719 | 271 | 265% |
| 11 | Bathin Solapan | 903 | 969 | 93% |
| Kabupaten Bengkulu | | 5.491 | 5.893 | 93% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Indikator penderita diare yang ditangani di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 sudah sangat baik secara keseluruhan dan cukup merata antarkecamatan. Terlihat bahwa pada tahun 2020 sudah sebesar 93% penderita diare datang dan diberikan pelayanan di sarana kesehatan. Meski demikian, perlu menjadi perhatian untuk penanganan penderita diare di Kecamatan Bantan yang hanya mencapai 40% dari total perkiraan penderita.

Tabel II-34 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah pasien HIV dan AIDS | Jumlah penduduk. | Prevalensi HIV/AIDS |
|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Bengkalis | 18 | 81.159 | 0,022% |
| 2 | Bukit Batu | 1 | 21.488 | 0,005% |
| 3 | Bantan | 1 | 45.997 | 0,002% |
| 4 | Mandau | 39 | 160.572 | 0,024% |
| 5 | Rupat | 1 | 40.460 | 0,002% |
| 6 | Rupat Utara | 1 | 16.229 | 0,006% |
| 7 | Siak Kecil | 1 | 22.888 | 0,004% |
| 8 | Pinggir | 6 | 59.845 | 0,010% |
| 9 | Bandar Laksamana | 0 | 16.681 | 0,000% |
| 10 | Talang Muandau | 0 | 27.133 | 0,000% |
| 11 | Bathin Solapan | 2 | 96.851 | 0,002% |
| Kabupaten Bengkulu | | 70 | 589.303 | 0,012% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 sudah sangat rendah, yaitu 0,012% dari total penduduk. Kecamatan Mandau menjadi daerah dengan jumlah pasien HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Bengkulu, yaitu sebanyak 39 penderita tahun 2020. Sementara itu Kecamatan Bandar Laksamana dan Talang Muandau tidak memiliki pasien HIV/AIDS pada tahun 2020.

Tabel II-35 Cakupan Kunjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup | Cakupan Kunjungan Bayi |
|---------------------------|------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | Bengkalis | 1.346 | 1.680 | 80,1 |
| 2 | Bukit Batu | 348 | 445 | 78,2 |
| 3 | Bantan | 872 | 952 | 91,5 |
| 4 | Mandau | 2.564 | 3.324 | 77,1 |
| 5 | Rupat | 494 | 837 | 59,0 |
| 6 | Rupat Utara | 254 | 336 | 75,6 |
| 7 | Siak Kecil | 412 | 474 | 86,9 |
| 8 | Pinggir | 1.498 | 1.239 | 120,9 |
| 9 | Bandar Laksamana | 296 | 345 | 85,8 |
| 10 | Talang Muandau | 452 | 562 | 80,4 |
| 11 | Bathin Solapan | 1419 | 2.005 | 70,8 |
| Kabupaten Bengkulu | | 9.955 | 12.199 | 81,6 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 sebesar 81,6% dari total bayi lahir hidup di Kabupaten Bengkulu. Secara keseluruhan cakupan kunjungan bayi antarkecamatan sudah menunjukkan adanya pemerataan yang baik. Cakupan kunjungan bayi yang baik akan meningkatkan kesehatan bayi dan mengurangi resiko kesehatan yang mungkin terjadi pada bayi.

Tabel II-36 Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 | Jumlah Sasaran Ibu Hamil | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. |
|----|-------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 1.501 | 1.711 | 87,7 |
| 2 | Bukit Batu | 391 | 438 | 89,3 |
| 3 | Bantan | 880 | 979 | 89,9 |
| 4 | Mandau | 2.629 | 3.599 | 73 |
| 5 | Rupat | 716 | 784 | 91,3 |
| 6 | Rupat Utara | 231 | 331 | 69,8 |
| 7 | Siak Kecil | 438 | 470 | 93,2 |

| No | Kecamatan | Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 | Jumlah Sasaran Ibu Hamil | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. |
|---------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| 8 | Pinggir | 1.545 | 1.814 | 85,2 |
| 9 | Bandar Laksamana | 304 | 293 | 103,8 |
| 10 | Talang Muandau | 412 | 634 | 65 |
| 11 | Bathin Solapan | 1.516 | 2.694 | 56,3 |
| Kabupaten Bengkulu | | 10.563 | 13.747 | 76,8 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Indikator cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Indikator ini juga dapat memberikan gambaran persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 mencapai 76,80%. Dari total 13.747 ibu hamil, sudah sebanyak 10.563 ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4. Capaian ini sudah cukup baik dan merata di Kabupaten Bengkulu, menggambarkan bahwa kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan ke tenaga kesehatan berkompeten.

Tabel II-37 Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Puskesmas | Jumlah Seluruh Kecamatan | Cakupan Puskesmas |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Bengkalis | 2 | 1 | 200% |
| 2 | Bukit Batu | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Bantan | 2 | 1 | 200% |
| 4 | Mandau | 2 | 1 | 200% |
| 5 | Rupat | 2 | 1 | 200% |
| 6 | Rupat Utara | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Siak Kecil | 2 | 1 | 200% |
| 8 | Pinggir | 2 | 1 | 200% |
| 9 | Bandar Laksamana | 1 | 1 | 100% |
| 10 | Talang Muandau | 1 | 1 | 100% |
| 11 | Bathin Solapan | 2 | 1 | 200% |
| Kabupaten Bengkulu | | 18 | 11 | 164% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkulu sudah cukup baik, yaitu mencapai 164% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata terdapat lebih satu Puskesmas pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkulu. Setidaknya setiap kecamatan terdapat satu puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat, bahkan terdapat 8 (delapan) kecamatan yang memiliki Puskesmas berjumlah 2 unit, khususnya pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lebih padat dan daerah perkotaan. Selain tersedianya Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar masyarakat atau

disebut juga fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga tersedia Puskesmas Pembantu yang tersebar pada setiap kecamatan. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu dan menunjang memperluas jangkauan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan seperti halnya Puskesmas.

Tabel II-38 Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Puskesmas Pembantu | Jumlah Seluruh Desa/ Kel. | Cakupan Puskesmas Pembantu |
|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Bengkalis | 10 | 31 | 32 |
| 2 | Bukit Batu | 4 | 10 | 40 |
| 3 | Bantan | 8 | 23 | 35 |
| 4 | Mandau | 3 | 11 | 27 |
| 5 | Rupat | 6 | 16 | 38 |
| 6 | Rupat Utara | 5 | 8 | 63 |
| 7 | Siak Kecil | 5 | 17 | 29 |
| 8 | Pinggir | 6 | 10 | 60 |
| 9 | Bandar Laksamana | 4 | 7 | 57 |
| 10 | Talang Muandau | 3 | 9 | 33 |
| 11 | Bathin Solapan | 2 | 13 | 15 |
| Kabupaten Bengkulu | | 56 | 155 | 36 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkulu sebesar 36% dari total kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bengkulu. Hingga tahun 2020 terdapat sebanyak 56 Puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkulu. Kecamatan Bengkulu memiliki puskesmas pembantu paling banyak, yaitu berjumlah 10 unit puskesmas pembantu. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bengkulu adalah setiap kecamatan setidaknya terdapat 3 (tiga) unit Puskesmas Pembantu. Dengan demikian, maka pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu dapat dikatakan cukup tersedia.

Tabel II-39 Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar | Seluruh Ibu Nifas | Cakupan Pelayanan Nifas |
|----|------------|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bengkalis | 1.188 | 1.555 | 76,4 |
| 2 | Bukit Batu | 327 | 397 | 82,4 |
| 3 | Bantan | 795 | 909 | 87,5 |
| 4 | Mandau | 2.562 | 3.273 | 78,3 |
| 5 | Rupat | 327 | 767 | 42,6 |

| No | Kecamatan | Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar | Seluruh Ibu Nifas | Cakupan Pelayanan Nifas |
|---------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|
| 6 | Rupat Utara | 238 | 301 | 79,1 |
| 7 | Siak Kecil | 398 | 409 | 97,3 |
| 8 | Pinggir | 1.392 | 1.547 | 90 |
| 9 | Bandar Laksamana | 277 | 265 | 104,5 |
| 10 | Talang Muandau | 377 | 590 | 63,9 |
| 11 | Bathin Solapan | 1.454 | 2.448 | 59,4 |
| Kabupaten Bengkulu | | 9.335 | 12.461 | 74,9 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 mencapai 74,9% dari total seluruh ibu nifas yang ada di Kabupaten Bengkulu. Hanya terdapat satu kecamatan yang memiliki cakupan pelayanan nifas di bawah 50%, yaitu kecamatan Rupa. Sementara kecamatan lain capaiannya sudah berada di atas 50%.

Tabel II-40 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Yang Mendapat MP-ASI | Jumlah Seluruh Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin. | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin. |
|---------------------------|------------------|--|--|---|
| 1 | Bengkalis | 5 | 76 | 6.6 |
| 2 | Bukit Batu | 2 | 35 | 5.7 |
| 3 | Bantan | 7 | 59 | 11.8 |
| 4 | Mandau | 9 | 210 | 4.3 |
| 5 | Rupa | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Rupa Utara | 4 | 65 | 6.2 |
| 7 | Siak Kecil | 0 | 16 | 0 |
| 8 | Pinggir | 11 | 278 | 3.9 |
| 9 | Bandar Laksamana | 0 | 10 | 0 |
| 10 | Talang Muandau | 5 | 86 | 5.8 |
| 11 | Bathin Solapan | 2 | 117 | 1.7 |
| Kabupaten Bengkulu | | 46 | 962 | 4.8 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 baru berkisar di angka 4,8%. Saat ini baru 46 dari 962 orang anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin yang mendapatkan MP-ASI. Bahkan pada kecamatan Rupa dan Siak Kecil belum ada pemberian MP-ASI terhadap anak berusia 6-24%. Capaian ini masih perlu ditingkatkan karena MP-ASI sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskin sangat penting dalam melengkapi zat gizi ASI untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia.

Tabel II-41 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Murid SD dan Setingkat yang Diperiksa kesehatannya | Jumlah Murid SD dan Setingkat | Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat |
|---------------------------|------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | Bengkalis | 1701 | 4.225 | 40% |
| 2 | Bukit Batu | 2.557 | 2.966 | 86% |
| 3 | Bantan | 3.343 | 4.772 | 70% |
| 4 | Mandau | 5.257 | 12.047 | 44% |
| 5 | Rupat | 2.916 | 4.628 | 63% |
| 6 | Rupat Utara | 919 | 2.378 | 39% |
| 7 | Siak Kecil | 3.093 | 3.388 | 91% |
| 8 | Pinggir | 1.681 | 10.667 | 16% |
| 9 | Bandar Laksamana | 380 | 2.273 | 17% |
| 10 | Talang Muandau | 516 | 3.020 | 17% |
| 11 | Bathin Solapan | 3.856 | 15.242 | 25% |
| Kebupaten Bengkulu | | 26.219 | 65.606 | 40% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 baru mencapai 40%. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat tertinggi ditemukan di Kecamatan Siak Kecil, yaitu 91% dari total siswa SD dan setingkat. Sedangkan capaian terendah adalah Kecamatan Bandar Laksamana dan Talang Muandau yaitu mencapai 17% dari total siswa SD setingkat.

Tabel II-42 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1 | Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin |
|---------------------------|------------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Bengkalis | 15022 | 37872 | 40% |
| 2 | Bukit Batu | 9591 | 13750 | 70% |
| 3 | Bantan | 9679 | 22331 | 43% |
| 4 | Mandau | 16482 | 35396 | 47% |
| 5 | Rupat | 6486 | 12864 | 50% |
| 6 | Rupat Utara | 14898 | 12364 | 120% |
| 7 | Siak Kecil | 8055 | 13037 | 62% |
| 8 | Pinggir | 13191 | 18237 | 72% |
| 9 | Bandar Laksamana | 8685 | 10181 | 85% |
| 10 | Talang Muandau | 3702 | 10877 | 34% |
| 11 | Bathin Solapan | 20941 | 19310 | 108% |
| Kebupaten Bengkulu | | 126372 | 210325 | 60% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 baru mencapai 60% dari total 210.325 masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bengkulu. Pada beberapa kecamatan cakupan ini bahkan lebih rendah dari 50%. Seperti pada kecamatan Talang Muandau yang Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin baru mencapai 34% dari total masyarakat miskin.

Sedangkan untuk capaian SPM bidang kesehatan berdasarkan 12 (dua belas) jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan 100% bagi masyarakat sesuai kewenangannya. Adapun capaian kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel II ... Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020**

| No. | Indikator | Capaian Tahun 2019 (%) | Capaian Tahun 2020 (%) | Pembiayaan (xRp.1.000) Tahun 2019 | Pembiayaan (x Rp. 1.000) Th. 2020 |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu hamil | 85,41 | 76,8 | 871.420 | 1.301.270 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin | 78,45 | 76,1 | 4.366.000 | 643.416.6 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 86,54 | 79,9 | 358.820 | 238.479 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 64,76 | 23 | 153.780 | 63.660 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 92,63 | 40,9 | 135.260 | 428.835 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 37,38 | 34,0 | 160.550 | 373.650 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 92,15 | 70,2 | 135.260 | 426.890 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi | 79,90 | 28,1 | 25.630 | - |

| No. | Indikator | Capaian Tahun 2019 (%) | Capaian Tahun 2020 (%) | Pembiayaan (xRp.1.000) Tahun 2019 | Pembiayaan (x Rp. 1.000) Th. 2020 |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 9 | Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus | 100 | 149,3 | 25.630 | 13.424 |
| 10 | Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat | 72,44 | 53,7 | 60.490 | 106.760 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100 | 48,6 | 25.630 | 184.343 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 35,43 | 40,3 | 207.640 | 925.177,48 |
| | Rata-rata Capaian | 77,09 | 60,075 | 6.526.110 | 4.705.905,08 |

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan diikuti dengan penurunan pembiayaan SPM tersebut. Dari 12 (dua belas) indikator SPM tersebut, yang sangat mempengaruhi penurunan rata-rata capaian pada indikator: pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi, upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan TB dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh Dinas Kesehatan agar pencapaian SPM ditahun berikutnya lebih baik lagi.

1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada beberapa indikator pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Beberapa capaian indikator selama periode 2016-2020 menunjukkan perbaikan, meskipun dalam beberapa indikator masih perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pembangunan infrastruktur jalan memperlihatkan ada sedikit kenaikan dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 51,38%, dan menurun pada 2017 menjadi 38,48%. Selanjutnya, pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 35,93% dan terus menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik meningkat menjadi 37,04%. Secara umum, dalam lima tahun terakhir Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik cenderung berkurang. Dimana pada tahun 2016 Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 731 km, namun pada tahun 2020 hanya sebesar 465,68%.

Sementara itu, untuk Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis masih rendah, yaitu berada pada angka 0.002 atau dalam rasio 1:450 pada tahun 2020. Hal ini berarti tiap satu km jalan berbading setidaknya 450 penduduk. Dalam lima tahun terakhir pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis relatif stagnan dan belum menunjukkan perubahan berarti. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk belum diikuti oleh pembangunan jalan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan peningkatan kemudahan akses penduduk dalam pemenuhan kebutuhan.

Tabel II-43 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km) | 731,50 | 571,74 | 451,72 | 449,62 | 465,68 |
| 2 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 51,38 | 38,48 | 35,93 | 35,77 | 37,04 |
| 3 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk | 0,0027 | 0,0027 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 4 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk | 1:371 | 1:376 | 1:450 | 1:456 | 1:450 |
| 5 | Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB | na | 34,58 | 77,02 | na | na |
| 6 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak | na | 84,49 | 78,47 | 87,79 | 89,67 |
| 7 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak | na | 88,74 | 86,88 | 91,19 | 93,73 |
| 8 | Ketaatan Terhadap RTRW | na | 39,05 | 39,05 | na | na |
| 9 | Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik | 5,51 | 8,29 | 8,8 | na | na |
| 10 | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | 62,77 | 63,48 | 74,7 | 77,78 | na |
| 11 | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat | na | 35,75 | 32,61 | na | na |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2021

Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2) Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis

yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar berkondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarnya.

Indikator lain dalam urusan pekerjaan umum, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak terlihat sudah memiliki capaian yang sangat baik, yaitu sebesar 93,73%. Sementara itu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak juga menunjukkan capaian yang baik, sebesar 89,67%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber air minum dan sanitasi yang ada di Kabupaten Bengkulu sebagian besar sudah baik dan layak.

Untuk indikator SPM bidang Pekerjaan Umum berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang terdiri atas 4 (empat) indikator dengan masing-masing target pelayanan masyarakat mencapai 100 %.

Rata-rata capaian dan pembiayaan SPM untuk tahun 2019-2020 bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II ... Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020**

| No. | Indikator | Capaian Tahun 2019 (%) | Capaian Tahun 2020 (%) | Pembiayaan (x Rp. 1.000) Tahun 2019 | Pembiayaan (x Rp. 1.000) Th. 2020 | Rencana Pembiayaan (X Rp. 1.000) 2021 |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 14,83 | 19,28 | 72.908.458 | 76.376.280 | 150.160.600 |
| 2 | Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Dasar | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Aman | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | Capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman | 0 | 0 | - | - | - |
| Rata-rata Capaian | | 3,71 | 4,82 | 72.908.458 | 76.376.280 | 150.160.600 |

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkulu 2021

Untuk rata-rata capaian SPM bidang Pekerjaan Umum terjadi peningkatan sebesar 1,11 % dengan pembiayaan juga terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.746.822.000,- peningkatan ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan target capaian pelayanan 100 % sesuai dengan standard SPM. Pencapaian SPM hanya pada indikator Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dimana kondisi pencapaian yang kecil ini karena penyediaan layanan air perpipaan ke rumah tangga selain masih kecil juga baru sebatas kepada penyediaan air bersih saja.

Tiga indikator lainnya yang merupakan indikator penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik belum dapat dilaksanakan untuk kawasan permukiman perkotaan dikarenakan belum tersedia pembiyaannya pada dua tahun tersebut.

1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa indikator penting dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di antaranya adalah rasio rumah layak huni, persentase lingkungan permukiman kumuh serta cakupan lingkungan sehat dan aman didukung dengan PSU.

Untuk rasio rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2019 telah mencapai 1. Ini menunjukkan bahwa telah semua rumah yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah layak huni bagi penduduk. Sedangkan untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau pada tahun 2017 sebesar 70,80%. Kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi sebanyak 65,32% saja Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun 2019 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan menjadi 70,63%. Terakhir pada tahun 2020 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau kembali mengalami peningkatan menjadi 80,49%.

Sementara itu pada sisi lain lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 0,0018% dari total permukiman penduduk. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit kawasan pemukiman yang kumuh di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian upaya pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat sudah sangat baik.

Tabel II-44 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 - 2020

| No | Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|---------|--------|--------|---------|
| 1 | Rasio rumah layak huni | 0,96 | 0,96 | 1 | 1 |
| 2 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 1,37% | 0,11% | 0,74% | 0,75% |
| 3 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 40,47% | 45,81% | 43,79% | na |
| 4 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 0,0032% | na | 0,002% | 0,0018% |
| 5 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 6,45% | 23,59% | 17,42% | 5,16% |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 6 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau | 70,80% | 65,32% | 70,63% | 80,49% |
|---|---|--------|--------|--------|--------|

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu, 2021

Cakupan lingkungan sehat dan aman, serta didukung oleh PSU adalah indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan lebih maju jika lingkungannya aman dan sehat serta didukung oleh PSU yang memadai. Pada tahun 2017 capaian lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai hanya sebesar 6,45% saja di kabupaten Bengkulu. Cakupan lingkungan aman dan sehat serta didukung oleh PSU yang memadai baru mencapai 5,16% pada tahun 2020. Ini berarti masih banyak lingkungan perumahan dan permukiman yang belum didukung oleh PSU yang memadai. Hal ini jika tidak diperhatikan secara serius akan dapat menimbulkan lingkungan kumuh dan tidak sehat, yang berujung penyakit pada masyarakat.

Standard Pelayanan Minimal Bidang Perumahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator berjumlah 2 (dua) buah dengan target pelayanan masing-masingnya sebesar 100 %. Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan tahun 2019-2020 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel II-45. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020

| No. | Indikator | Capaian Tahun 2019 (%) | Capaian Tahun 2020 (%) | Pembiayaan (x Rp.1.000) Tahun 2019 | Pembiayaan (x Rp.1.000) Tahun 2020 |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 9,09 | 0 | 702.000 | - |
| 2 | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 0 | 0 | - | - |
| Rata-rata Capaian | | 4,55 | - | 702.000 | - |

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkulu 2021

Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk tahun 2020 tidak dapat dicapai begitu juga pembiayaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada usulan korban akibat bencana dan relokasi

akibat program pemerintah daerah kepada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan.

1.3.1.5 Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketetraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur melalui indikator cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016 cakupan petugas linmas sebesar 7.22% namun pada tahun 2019 berkurang menjadi 6.73%. Sedangkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mulai dilakukan pada tahun 2016 sebesar 14% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 24%. Penegakan Peraturan Daerah mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 18% pada tahun 2016 menjadi 19% pada tahun 2019. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum semakin berkurang selama periode 2015-2019.

Sementara itu untuk Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bengkulu baru mencakup 37,47% daerah pada tahun 2020. Capaian ini dalam empat tahun terakhir masih belum menunjukkan perkembangan dan cenderung stagnan. Hal ini ditengarai karena keterbatasan SDM dan anggaran untuk menyediakan fasilitas pelayanan Kebakaran di setiap kecamatan. Angka ini belum mencapai standar pelayanan minimum dengan angka cakupan minimal 80%.

Sementara itu Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sudah mencapai 80%. Hal ini berarti pemadam kebakaran di Kabupaten Bengkulu telah berhasil menyelesaikan sebesar 80% kasus kebakaran dalam waktu 15 maksimal 15 menit. Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel di Bawah

Tabel II-46 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| No. | Indikator (Persen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 7,22 | 7,05 | 6,89 | 6,73 | na |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | 14 | 18 | 24 | 24 | na |
| 3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 23,12 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| 4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 53,11 | 80 | 80 | 90 | 80 |
| 5 | Persentase Penegakan PERDA | 18 | 18 | 19 | 19 | na |

Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu, 2021

Untuk perhitungan rata-rata capaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel II-47. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020

| No. | Indikator | Capaian Tahun 2019 (%) | Capaian Tahun 2020 (%) | Pembiayaan (x Rp.1.000) Tahun 2019 | Pembiayaan (x Rp.1.000) Tahun 2020 |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada | 95,74 | - | 3.459.605 | 0 |
| 2 | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | 36,64 | 96.66 | 202.011,7 | 1.156.225,2 |
| 3 | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 25,37 | 63.78 | 442.937 | 1.704.469,5 |
| 4 | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 2,2 | 97.43 | 1.705.977 | 3.128.198,5 |
| 5 | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 3,86 | 327.9 | 6.404.871,2 | 9.605.361 |
| | Rata-rata Capaian | 32,76 | 117,154 | 12.215.401,9 | 15.594.254,2 |

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkulu 2021

Terjadi peningkatan rata-rata capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2020 sebesar 84,39 % dengan peningkatan pembiayaan untuk pelayanan SPM sebesar Rp. 3.378.852,1 dimana dari lima indikator, hanya satu indikator yang tidak dapat mencapai target pelayanan yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh

layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada disebabkan oleh tidak tersedianya pembiayaan untuk pelaksanaan pelayanan indikator tersebut.

1.3.1.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial dapat diukur melalui indikator jumlah fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan, jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase PMKS yang tertangani dan persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

**Tabel II-48 Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020**

| No. | Indikator (dalam persen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|-------|-------|---------|------|------|
| 1 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial | 22% | 23% | 75% | 82% | 75% |
| 3 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 44% | 50% | 77% | 78% | 82% |
| 4 | Persentase PMKS yang tertangani | 38% | 39% | 99% | 99% | 79% |
| 5 | Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 22% | 27% | 76% | 77% | 80% |
| 6 | Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan | 4.360 | 7.667 | 113.954 | na | na |
| 7 | Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial | 1.214 | 1.284 | 1.232 | na | na |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2016 sebanyak 44% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 50%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 77%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2019 sebanyak 78% dari total PMKS, kemudian meningkat menjadi 82% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkalis terus berupaya melakukan penanganan terhadap penyandang masalah sosial. Hal ini juga terlihat dari jumlah PMKS yang tertangani dalam lima tahun terakhir yang mengalami perbaikan hingga mencapai 79% pada tahun 2020. Meskipun memiliki anggaran yang terbatas, namun Pemerintah tetap berupaya dan berkomitmen agar permasalahan PMKS ini dapat ditangani. Sementara itu, indikator persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2016 sebesar 21% dan hingga akhir 2020 meningkat menjadi 80%.

Salah satu indikator pada urusan sosial yaitu persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bengkulu menunjukkan perbaikan capaian yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Dimana pada 2016 persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia telah menerima jaminan sosial hanya sebesar 22%, namun pada tahun 2020 capaian meningkat menjadi 75% dari total penyandang cacat fisik dan mental yang ada di Kabupaten Bengkulu.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan pada tahun 2018 sebesar 113.954 orang, angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 7.667 orang. Fakir Miskin ini diberikan pembinaan dan pendampingan manajemen usaha selain itu pada tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu mendapatkan dana dekon yang diperuntukan untuk bantuan KUBE FM Perkotaan agar meningkatnya SDM Fakir Miskin.

Sementara itu, untuk jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial pada tahun 2018 sebesar 1.232 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2017 angka ini mengalami peningkatan dari 1.284 orang. Penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja dan diberikan beberapa pelatihan di dalam dan di luar provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan dan kemandirian para penyandang disabilitas agar dapat bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan dengan orang lain, sehingga tidak menjadi permasalahan sosial baru.

Tabel II-49 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan | Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | Bengkalis | 22.252 | 25.116 | 89% |
| 2 | Bukit Batu | 7.128 | 7.372 | 97% |
| 3 | Bantan | 15.680 | 15.953 | 98% |
| 4 | Mandau | 14.661 | 29.018 | 51% |
| 5 | Rupat | 15.680 | 16.963 | 92% |
| 6 | Rupat Utara | 5.898 | 5.986 | 99% |
| 7 | Siak Kecil | 6.423 | 6.659 | 96% |
| 8 | Pinggir | 8.832 | 11.859 | 74% |
| 9 | Bandar Laksamana | 3.659 | 3.803 | 96% |
| 10 | Talang Muandau | 4.364 | 4.499 | 97% |
| 11 | Bathin Solapan | 10.276 | 12.932 | 79% |
| Kabupaten Bengkulu | | 114.853 | 140.160 | 82% |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu, 2021

Data PMKS penerima bantuan Sosial merupakan data Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Data yang seharusnya menerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana berdasarkan data ini, pada tahun 2020 terdapat 140.160 orang yang terdaftar di DTKS, dan sudah sebanyak 114.853 penduduk Kabupaten Bengkulu mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari dana APBD dan APBN.

Jumlah PMKS terbanyak berdasarkan DTKS berada di Kecamatan Mandau sebanyak 29.018 orang dan pada Kecamatan Bengkulu dengan jumlah sebanyak 25.116 penduduk. Sedangkan jumlah PMKS paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana dengan jumlah 3.803.

Tabel II-50 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | Jumlah PMKS yang Seharusnya Memperoleh Bantuan Sosial | Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar |
|---------------------------|------------------|--|---|--|
| 1 | Bengkalis | 21.756 | 25.116 | 87% |
| 2 | Bukit Batu | 7.101 | 7.372 | 96% |
| 3 | Bantan | 15.248 | 15.953 | 95% |
| 4 | Mandau | 14.511 | 29.018 | 50% |
| 5 | Rupat | 15.500 | 16.963 | 91% |
| 6 | Rupat Utara | 5.708 | 5.986 | 95% |
| 7 | Siak Kecil | 6.408 | 6.659 | 96% |
| 8 | Pinggir | 8.684 | 11.859 | 73% |
| 9 | Bandar Laksamana | 3.656 | 3.803 | 96% |
| 10 | Talang Muandau | 4.344 | 4.499 | 96% |
| 11 | Bathin Solapan | 10.076 | 12.932 | 78% |
| Kabupaten Bengkulu | | 112.992 | 140.160 | 80% |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu, 2021

Data PMKS penerima bantuan merupakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat dan Otonom. Data yang seharusnya menerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana pada tahun 2020 terdapat sebanyak 140.160 penduduk yang berhak menerima bantuan berdasarkan data DTKS, dan sudah sebanyak 80% di antaranya diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Bengkulu melalui KPM dan BPNT secara keseluruhan sudah menunjukkan capaian yang cukup baik dan merata. Hanya saja, diperlukan perhatian lebih dalam pemberian bantuan sosial di Kecamatan Mandau, yang capaiannya baru 50% dari total PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Pada Kecamatan Mandau masih terdapat setidaknya 14.511 penduduk yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan sosial berdasarkan data DTKS. Dinas Sosial harus lebih memperhatikan hal ini, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan baru karena tidak meratanya bantuan yang diberikan pada PMKS di Kecamatan Mandau ini.

Tabel II-51 Persentase PMKS yang tertangani Per Kecamatan per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Jumlah PMKS yang Tertangani | Jumlah PMKS yang Ada | Persentase PMKS yang Tertangani |
|-----|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 775 | 848 | 91 % |
| 2 | Bukit Batu | 177 | 210 | 84 % |
| 3 | Bantan | 405 | 474 | 85 % |
| 4 | Mandau | 318 | 639 | 50 % |
| 5 | Rupat | 354 | 393 | 90 % |
| 6 | Rupat Utara | 115 | 128 | 90 % |
| 7 | Siak Kecil | 259 | 269 | 96 % |
| 8 | Pinggir | 198 | 333 | 59 % |
| 9 | Bandar Laksamana | 94 | 110 | 85 % |
| 10 | Talang Muandau | 66 | 86 | 77 % |
| 11 | Bathin Solapan | 343 | 439 | 78 % |
| | Kabupaten Bengkulu | 3.104 | 3.926 | 79 % |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu, 2021

Data PMKS yang tertangani merupakan data PMKS yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu. Dimana pada tahun 2020 terdapat sebanyak 3.104 PMKS yang tertangani dan menerima layanan rehabilitasi sosial. Capaian ini sebesar 79% dari total 3.926 PMKS yang ada. Secara umum penanganan PMKS sudah cukup baik dan merata antarkecamatan, kecuali pada Kecamatan Mandau baru 50% PMKS yang tertangani dan pada Kecamatan Pinggir baru 59% PMKS yang tertangani. Pada dua kecamatan ini masih diperlukan perhatian lebih baik dalam penanganan PMKS di Kabupaten Bengkulu.

Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) indikator pelayanan dengan target 100 % setiap tahunnya. Dimana rata-rata capaian SPM Bidang Sosial tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-52. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2020**

| No. | Indikator | Capaian Tahun 2019 (%) | Capaian Tahun 2020 (%) | Pembiayaan (xRp.1.000) Tahun 2019 | Pembiayaan (xRp. 1.000) Tahun 2020 |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti | 100 | 96 | 1.314.840 | 143.967,48 |
| 2 | Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti | 100 | 100 | 1.289.728 | 538.360 |
| 3 | Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti | 100 | 69 | 1.930.500 | 545.790 |
| 4 | Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti | 0 | 100 | - | 162.380 |
| 5 | Persentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 559.350 | 605.896,84 |
| Rata-rata Capaian | | 80 | 93 | 5.094.418 | 1.996.394,32 |

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkulu 2021

Dari kelima indikator, ada dua indikator SPM Bidang Sosial yang belum terpenuhi di tahun 2020, yaitu: Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti dan Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti yang menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan ada beberapa aktivitas pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kondisi pandemi *Covid-19* baik dari segi pelayanan dan mendapatkan prasarana pelayanan mengalami hambatan dilaksanakan.

1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah di antaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

1.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Keberhasilan pelayanan pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu rasio lulusan S1/S2/S3, persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun, serta keselamatan dan perlindungan. Rasio lulusan S1/S2/S3 menggambarkan seberapa banyak perkembangan penduduk Kabupaten Bengkulu yang mampu mencapai jenjang Pendidikan tinggi. Pendidikan yang tinggi tentu sangat berperan penting dalam menciptakan kualitas tenaga kerja yang baik dan memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan membawa perkembangan yang baik untuk kemajuan daerahnya. Dapat dilihat bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkulu semakin berkembang setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 rasio lulusan S1/S2/S3 sebanyak 22,15% saja, kemudian mengalami peningkatan menjadi 23,00% pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019, penduduk yang mencapai lulusan S1/S2/S3 meningkat cukup tinggi yaitu 47.53% dari jumlah penduduk.

**Tabel II-53 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja
Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020**

| No | Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | 22.15 | 23.00 | 23.00 | 47.53 | 48,38 |
| 2 | Keselamatan dan Perlindungan (%) | 90.32 | na | na | na | na |
| 3 | Penyelesaian Sengketa Pengusaha-Pekerja (%) | 58.24% | 72.58% | 80,00% | | na |
| 4 | Angka sengketa pengusaha-pekerja | na | na | na | 18 | 31 |
| 5 | Persentase Besar kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 20.60% | 30.50% | 47.20% | 28% | 22% |
| 6 | Persentase Besar pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | na | na | 91.94% | 97.74% | 93.20% |
| 7 | Persentase Besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 100% | 100% | 100% | 100.% | na |
| 8 | Persentase Besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | na |
| 9 | Persentase Besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | na | na | na | 100% | na |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu, 2020

Aspek lain yang menjadi ukuran pencapaian urusan ketenagakerjaan adalah persentase penyelesaian sengketa pengusaha dan pekerja pertahun. Pada tahun 2018 penanganan sengketa pengusaha dan pekerja yang ditangani cukup tinggi, yaitu 80%. Capaian ini semakin membaik jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 72,58%, dan meningkat sangat jauh jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang baru mencapai 58,24%. Penyediaan mediator penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dari ASN Kabupaten Bengkulu menjadi faktor pendukung peningkatan penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja, yang sebelumnya belum tersedia.

Aspek lain dalam mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan adalah keikutsertaan pekerja dan buruh dan program jaminan sosial. Hingga tahun 2020, persentase

pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sudah sangat baik, yaitu dari 91,94% pada tahun 2018 menjadi 97,74% pada tahun 2019 dan sedikit menurun menjadi 93,20%. Penurunan ini disinyalir diakibatkan meningkatnya pekerja/buruh yang dirumahkan selama masa pandemi 2020 yang tidak melanjutkan program jamsostek.

Pelayanan tenaga kerja dalam pembangunan juga diindikasikan dari pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kewirausahaan, dan kompetensi telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh tenaga kerja telah mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kewirausahaan, dan kompetensi. Kemudian perlindungan tenaga kerja telah mencapai 90,32% pada tahun 2016. Namun, ditahun 2017 dan 2018 urusan keselamatan dan perlindungan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel II-54 Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | na | na | 1.931 | 1.412 | 766 |
| 2 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar. | na | na | 1.825 | 1.482 | 1.363 |
| 3 | Persentase Besaran pencarikerja yang terdaftar yang ditempatkan. | na | na | 94.50% | 95.30% | 56,20% |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, 2021

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam urusan ketenagakerjaan adalah penempatan pencari kerja. Pada tahun 2020, sebanyak 56,20% pencari kerja yang terdaftar telah ditempatkan. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, dimana dari sebanyak 1.931 tenaga kerja yang terdaftar, ditempatkan sebanyak 1825 orang atau 94,5% pada tahun 2018 dan sebanyak 95,30% pencari kerja ditempatkan pada tahun 2019. Permasalahan khusus penyebab penempatan kerja yang rendah pada tahun 2020 adalah karena sangat sedikit perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan pada tahun 2020 karena pandemi, bahkan sebagian perusahaan melakukan pengurangan karyawan pada masa pandemi COVID-19. Selain karena adanya pandemi, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja ini kerap terkendala tidak cocoknya antara spesifikasi dan kemampuan dari pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Hal ini pula yang terkadang menyebabkan tenaga kerja hanya bekerja dalam kurun waktu yang sebentar saja, kemudian kembali menjadi pengangguran terbuka dengan mencari pekerjaan baru.

1.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diukur dari beberapa indikator penting. Keberdayaan perempuan dari proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada periode 2016-2020 sebesar 8,89% dari total kursi DPRD yang ada. Keberdayaan perempuan dari aspek partisipasi perempuan dalam pekerjaan menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan, yaitu dari 18,00% pada tahun 2017, menjadi 17,23% pada tahun 2018.

Kekerasan dalam keluarga sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan dapat dikontrol. Rasio KDRT selama periode 2016-2018 hanya sebesar 0,01, sedangkan pada tahun 2019 sedikit meningkat menjadi 0,04. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu pada tahun 2020 sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020.

Tabel II-55 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

| No | Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR | 8.9 | na | 8.9 | 8.9 | na |
| 2 | Rasio KDRT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0,04 | na |
| 3 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | na | 18.00 | 17.23 | na | na |
| 4 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 52 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | na | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | na | 47.22 | 1.39 | na | na |
| 8 | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | na | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD | 103.2 | 102.2 | 115.4 | na | na |
| 10 | Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP | 77.91 | 99.41 | 97.95 | na | na |
| 11 | Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA | 78.61 | 82.48 | 84.19 | 100.86 | 115.03 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.2.3 Urusan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan daerah dapat diukur dari ketersediaan pangan utama yang diperoleh dari data produk beras dan data pasokan dari luar kabupaten. Ketersediaan pangan utama menjadi penting untuk menjamin kebutuhan asupan energi dan protein bagi semua penduduk, karena pemenuhan pangan bagi penduduk merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak azasi manusia. Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian dalam urusan pangan untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

Jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan meski sedikit menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 176,35 kg/kapita dan pada tahun 2019 menjadi 172,63 kg/kapita. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu perkembangan ketersediaan pangan utama sudah jauh bertumbuh. Hal dikarenakan jumlah produksi meningkat yang didapat dari jumlah

produksi dari dalam daerah dan dari luar daerah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Serta adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung program pemerintah pusat melalui program swasembada pangan.

**Tabel II-56 Indikator Urusan Pangan
Kabupaten Bengkulu Tahun 2015 - 2019**

| No | Keterangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Ketersediaan pangan utama (Kg/kap/thn) | 110,00 | 118,28 | 128,22 | 176,35 | 172,63 |
| 2 | Ketersediaan Energi (kkl/kap/hari) | 2.602 | 2.710 | 2.842 | 3.186 | 3.142 |
| 3 | Ketersediaan Protein (gram/kap/hari) | 63,99 | 68,98 | 73,79 | 78,36 | 73,94 |
| 4 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) | 100 | 100 | 70 | 75,75 | 70,58 |

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu.

Pasokan bahan pangan untuk menjamin konsumsi penduduk telah dapat dipenuhi di Kabupaten Bengkulu selama periode 2015-2019. Ketersediaan energi pada tahun 2019 di Kabupaten Bengkulu telah melebihi standar yang ditetapkan, dimana dalam Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan pangan adalah 2.400 kalori/kapita/hari. Begitu juga halnya dengan ketersediaan protein pada tahun 2019 di Kabupaten Bengkulu yang telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan protein adalah 63 gram/kapita/hari. Dari aspek ketersediaan energi dan protein telah terpenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan penduduk.

Namun, perhatian pada aspek daya beli dan pemerataan penyebaran atau distribusi bahan pangan agar dapat diakses dengan mudah dan murah sampai pada tingkat rumah tangga masih sangat diperlukan, terutama pada beberapa wilayah terluar seperti pulau Rupa. Jaminan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh aspek ketersediaan, tetapi juga aspek distribusi dan konsumsi. Kemampuan konsumsi akan ditentukan oleh daya beli dan pengetahuan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, urusan pangan tidak hanya mengurus ketersediaan tetapi juga advokasi dan pembinaan pengetahuan pangan dan gizi bagi masyarakat.

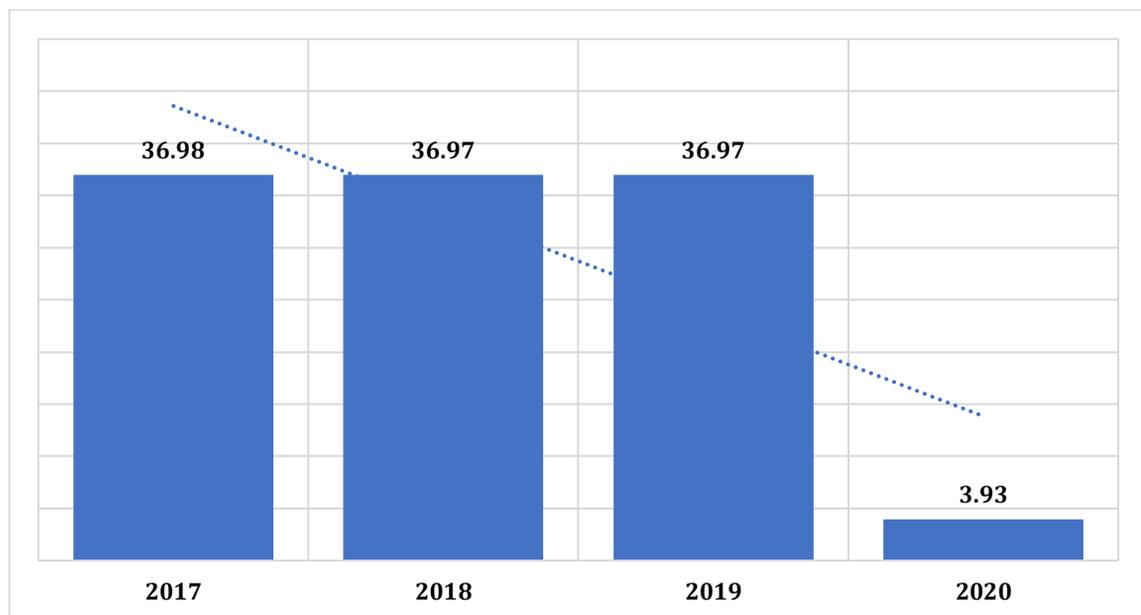
1.3.2.4 Urusan Pertanian

Kinerja urusan Pertanian di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu cukup peduli dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bengkulu sudah melaksanakan program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit di

dalam menertibkan aset. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Dimana pada tahun 2016 persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu sebesar 36,98%, jumlah ini tidak banyak mengalami perubahan (cederung stagnan) hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja yang sangat signifikan. Dimana, Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkulu hanya sebesar 3,93%.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkulu dapat ditingkatkan, agar tidak terjadi berbagai masalah seperti konflik pertanahan.



Sumber: Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu, 2021

Gambar II-32 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkulu Tahun 2017 - 2020

1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengelolaan limbah, izin lingkungan, dan persentase penanganan sampah. Capaian kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada beberapa indikator, di antaranya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Untuk capaian indeks kualitas air di Kabupaten Bengkulu dalam tiga tahun terakhir masih berada pada kategori sedang, yaitu mencapai 50,95 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan Indeks Kualitas air; dari 5 (lima) sungai yang dilakukan pengukuran pada parameter BOD, COD dan TSS, kelimanya masih berada pada status cemar ringan dengan Indeks Kualitas Air berada pada angka 50,95.

Sementara itu, Capaian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018 mencapai 90,43. Dengan kata lain Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu berada pada kategori sangat baik. Pada tahun 2019 Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan menjadi 94,90 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi

96,51. Di samping itu, Indeks Kualitas Udara hasil pengukuran kualitas udara dengan parameter SO₂ dan NO₂ pada lokasi pemukiman, industri, perniagaan dan transportasi, menunjukkan Indeks Kualitas Udara berada pada angka 96,51.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bengkulu berada pada angka 54,36 pada tahun 2018. Kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 52,60 pada tahun 2019. Terakhir 56,73 pada tahun 2020.

Sementara itu, untuk persentase penanganan sampah didapat dengan menghitung perbandingan antara volume sampah yang ditangani terhadap produksi/timbulannya. Pada tahun 2018 persentase penanganan sampah mencapai 66,71%. Hal ini didukung oleh tingkat penanganan sampah yang dipengaruhi kemampuan armada (kapasitas muatan alat angkut dan jumlah rotasi).

Tabel II-57 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 - 2020

| NO. | Indikator Capaian Kinerja | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--|------------|-------|---------|---------|
| I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | 1. Indeks Kualitas Air | indeks | 55 | 61,61 | 50,95 |
| | 2. Indeks Kualitas Udara | indeks | 90,43 | 94,90 | 96,51 |
| | 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan | indeks | 54,36 | 52,60 | 56,73 |
| II. Pengelolaan Limbah B3 | | | | | |
| | 1. Jumlah Limbah B3 yang dikelola | ton | na | 123.773 | 651,265 |
| | 2. Jumlah Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten | izin | 15 | 25 | 22 |
| III. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | | | | | |
| | 1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | perusahaan | 57 | 54 | 23 |
| | 2. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) | orang | 2 | 2 | na |
| V. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | |
| | 1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat | kelompok | 35 | 70 | 57 |
| | 2. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | kelompok | 14 | 43 | 22 |
| VI. Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | | | | | |

| NO. | Indikator Capaian Kinerja | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--|-----------|--------|--------|--------|
| | 1. Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak Lintas kecamatan yang ditangani | pengaduan | 14 | 13 | 18 |
| VII | Pengelolaan Sampah Kabupaten | | | | |
| | 1. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus | % | na | na | na |
| | 2. Persentase Jumlah Sampah Berkurang melalui 3R | % | 10,50% | 14,12% | 15,50% |
| | 3. Persentase Cakupan Area Pelayanan | % | 31,87% | 31,87% | 31,87% |
| | 4. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | % | 64,80% | 65,06% | 68,12% |
| | 5. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA | % | 70% | 70% | 70% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021

Capaian pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 651,256 ton limbah, dengan Jumlah Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten sebanyak 22. Jumlah Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang berjumlah 25 izin.

Sementara itu Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat hanya sebesar 57 kelompok, berkurang 13 kelompok dibanding tahun 2019. Sedangkan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pemberian penghargaan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sebanyak 22 kelompok, berkurang 23 kelompok dibanding tahun 2019. Penurunan capaian Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 disebabkan karena situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan penjagaan protokol kesehatan dan pelarangan perkumpulan banyak orang, membuat beberapa kegiatan di luar jaringan sulit dilakukan.

Selanjutnya, Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak Lintas Kecamatan yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 18 pengaduan yang tertangani. Penanganan pengaduan pada tahun 2020 lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 hanya 14 pengaduan yang tertangani dan pada tahun 2019 hanya 13 pengaduan yang tertangani.

Indikator pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir terlihat mengalami sedikit perbaikan. Dimana, Persentase Jumlah Sampah Berkurang melalui 3R meningkat dari 10,50% pada tahun 2018 menjadi 15,50% pada tahun 2020. Sementara itu, Persentase Cakupan Area Pelayanan persampahan masih stagnan di angka 31,87% dalam tiga tahun terakhir. Untuk indikator Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada tahun 2020 sebesar 68,12%, lebih baik dibanding tahun 2019 sebesar 65,06%.

Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkulu berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupa yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkulu/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkulu yang berhadapan dengan Selat Bengkulu/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkulu yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkulu dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah.

1.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur melalui beberapa indikator seperti jumlah penduduk yang memiliki KTP, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel II-58 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020

| No | Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Penerapan KTP Nasional Bebas NIK | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik | 344.732 | 347.822 | 344.278 | 370.090 | 419.275 |
| 4 | Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk | 96% | 98% | 92% | na | 108% |
| 5 | Rasio pasangan berakte nikah | 2,29 | 43 | 18,93 | na | na |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, 2021

Secara umum capaian indikator administrasi dan catatan sipil di Kabupaten Bengkulu sudah cukup baik. Hingga 2020 cakupan kepemilikan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu mencapai 108% dari total 389.696 penduduk yang wajib memiliki KTP di Kabupaten Bengkulu. Hal ini menunjukkan adanya pelayanan yang baik dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu dan tingginya kesadaran masyarakat untuk tertib secara administrasi kependudukan.

Tabel II-59 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2020

| No | Kecamatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Bengkalis | 41,91% | 51,14% | 62,47% | 93,91% |
| 2 | Bantan | 50,69% | 61,10% | 80,53% | 104,61% |
| 3 | Bukit Batu | 42,88% | 47,19% | 75,98% | 96,48% |
| 4 | Mandau | 42,07% | 50,52% | 63,79% | 96,42% |
| 5 | Rupa | 28,12% | 37,91% | 52,62% | 98,25% |

| No | Kecamatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Rupat Utara | 31,55% | 42,05% | 49,31% | 104,04% |
| 7 | Siak Kecil | 51,05% | 65,19% | 80,66% | 104,95% |
| 8 | Pinggir | 30,75% | 36,86% | 48,48% | 77,81% |
| 9 | Bandar Laksamana | 37,00% | 41,29% | 65,56% | 98,92% |
| 10 | Talang Muandau | 24,87% | 30,02% | 42,13% | 90,45% |
| 11 | Bathin Solapan | 41,41% | 49,44% | 60,50% | 92,45% |
| Kabupaten Bengkulu | | 39,78% | 48,19% | 61,72% | 94,30% |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, 2021

Persentase kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Bengkulu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan signifikan. Upaya pemerintah daerah dalam penertiban administrasi pencatatan sipil dengan memperbaiki pelayanan catatan sipil telah menunjukkan perbaikan dalam pencatatan akte kelahiran di Kabupaten Bengkulu. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 39,78% jumlah kepemilikan akte kelahiran dari total 112.924 penduduk yang wajib memiliki akte Kelahiran. Namun, perbaikan pelayanan catatan sipil pemerintah daerah telah membawa perubahan besar, sehingga pada tahun 2020 sudah 94,30% jumlah kepemilikan akte kelahiran dari total 182.486 penduduk yang wajib memiliki akte kelahiran.

Tabel II-60 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Anak yang Memiliki KIA | Jumlah Anak yang Seharusnya Memiliki KIA | Persecatase Kepemilikan KIA |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Bengkalis | 9713 | 24323 | 39,93% |
| 2 | Bantan | 6430 | 11499 | 55,92% |
| 3 | Bukit Batu | 3053 | 6383 | 47,83% |
| 4 | Mandau | 4468 | 45538 | 9,81% |
| 5 | Rupat | 4321 | 9939 | 43,48% |
| 6 | Rupat Utara | 2821 | 4218 | 66,88% |
| 7 | Siak Kecil | 3353 | 7567 | 44,31% |
| 8 | Pinggir | 1478 | 19306 | 7,66% |
| 9 | Bandar Laksamana | 1884 | 5138 | 36,67% |
| 10 | Talang Muandau | 1786 | 7781 | 22,95% |
| 11 | Bathin Solapan | 3069 | 28714 | 10,69% |
| Kabupaten Bengkulu | | 42376 | 170406 | 24,87% |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, 2021

Sementara itu dari indikator kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 baru mencapai 24,87%. KIA yang merupakan bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya merupakan salah satu program baru yang menjadi wewenang pemerintah daerah untuk menerbitkannya melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Karena itu proses penerbitan KIA ini masih dalam tahap pengembangan menuju penyempurnaan sistem penerbitan, sehingga masih banyak penduduk dibawah usia 17 tahun yang belum memilikinya. Kegiatan sosialisasi

mengenai pentingnya KIA dapat menjadi salah satu solusi dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membuat KIA bagi anak berusia 17 tahun kebawah.

1.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui jumlah BUMDesa aktif, kondisi keaktifan LPM, PKK dan Posyandu. Untuk indikator BUM Desa aktif pada tahun 2016-2020 berjumlah 136. BUM Desa aktif ini didukung dengan adanya keorganisasian yang aktif dan adanya penyertaan modal ke BUMDesa aktif. Selain itu keaktifan bumdes juga didukung dengan kondisi sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis yang sangat baik. Dimana dari total 136 desa di Kabupaten Bengkalis, semuanya memiliki sarana prasarana perkantoran yang sangat baik. Hal ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-61 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

| No | Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | BUM Desa Aktif | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 2 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 3 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Persentase LPM Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase PKK Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Persentase Posyandu Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2021

Indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya adalah persentase LPM dan PKK aktif di Kabupaten Bengkalis. Dalam lima tahun terakhir jumlah LPM di Kabupaten Bengkalis sebanyak 155 dan sudah aktif 100%. Hal ini menunjukkan bahwa LPM dan PKK di Kabupaten Bengkalis sudah berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam penggerak kesejahteraan keluarga.

Indikator lain dalam urusan pemberdayaan masyarakat adalah persentase posyandu aktif di Kabupaten Bengkalis. Pada periode 2016-2020 dari 592 posyandu yang ada di Kabupaten Bengkalis, sudah 100% terkategori posyandu aktif. Ini berarti sebanyak 592 sudah secara aktif memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak.

1.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mengetahui perkembangan indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-62 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020**

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB | | 0,17 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk | | | - | 1 | 1 |
| Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan | | 6 Sektor | - | 6 | 6 |
| Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan | | | 1 | 1 | 1 |
| Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rasio Akseptor KB | | 0,54 | 68,25 | | |
| Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 | 0,37 | 0,37 | 56,65 | 63,65 | 68,25 |
| Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | 15,4 | 15,4 | 28 | 33 | 33 |
| Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun | | 0,37 | 0,92 | 0,98 | 0,98 |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | 11 | 11 | 14,9 | 28,78 | 19,50 |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | 0,12 | 8,5 | 8,78 | 10,43 |
| Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi | | 0,85 | 56,9 | 63,68 | 68,25 |
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB | | 42 | 90,4 | 69,55 | 55,29 |
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) berKB | | 56 | 75,77 | 48,81 | 48,81 |

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB | | 70 | 67,51 | 56,5 | 42,91 |
| Pusat Pelayanan keluarga Sejahtera (PPKS) di setiapKecamatan | 0,25 | 2,18 | | 1 | 1 |
| Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa | | 6,18 | 40 | 45 | 55 |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | | | 25 | 25 | 25 |
| Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri | | | - | 77 | 80 |
| Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan | | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Remaja yang Terkenal Infeksi Menular Seksual (IMS) | | - | - | 0 | 0 |
| Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | | 46,55 | 50 | 55,50 | 75,01 |
| Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | | 50 | 55 | 55 | 60 |
| Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita | | 21,46 | 21,46 | 21,46 | 21,46 |
| Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber :Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu, 2021

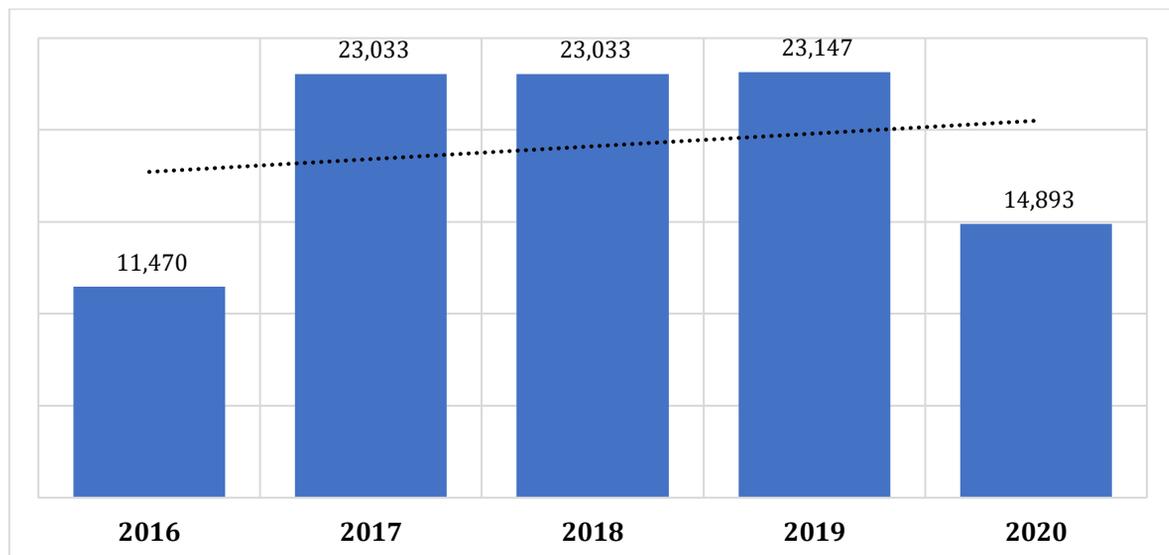
Indikator kinerja urusan pengendalian penduduk menunjukkan bahwa beberapa program sudah mencapai target dengan sangat baik, sementara beberapa program menunjukkan capaian kurang baik.

Dianta kegiatan dengan capaian sangat baik yaitu mencapai 100% adalah Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes, Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa, Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan dan Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat.

Sementara itu di antara program yang perlu lebih diperhatikan adalah Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini perlu ditanggulangi karena semakin meningkatnya kelahiran remaja, maka akan semakin tinggi resiko terjadinya kematian ibu saat melahirkan dan kematian bayi saat lahir.

1.3.2.9 Urusan Perhubungan

Pelayanan pada urusan perhubungan diukur salah satunya melalui indikator jumlah uji kir angkutan umum. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah uji kir sebanyak 11.470 kali. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan signifikan dengan uji kir sebanyak 23.033 kali. Hingga tahun 2019 telah dilakukan uji kir sebanyak 23.147 kali. Namun, pada tahun 2020 jumlah uji KIR menurun drastis hingga 14.893 kali. Penurunan uji KIR pada tahun 2020 ditengarai karena adanya pembatasan aktivitas sosial akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu, 2021

**Gambar II-33 Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkulu
Tahun 2016 - 2020**

Selain melakukan uji kir angkutan umum, masih terdapat beberapa indikator lain yang menjadi ukuran kinerja dinas perhubungan Kabupaten Bengkulu. Untuk mengetahui perkembangan indikator Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-63 Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Bengkulu Tahun 2016- 2020**

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | - | - | - | 276.460 | 150.302 |
| Rasio Izin Trayek | - | 0,000089 | 0,008909 | 0,000903 | 0,000893 |
| Jumlah Uji Kir Angkutan Umum | 11,470 | 23.033 | 23.033 | 23.147 | 14.893 |
| Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 88 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| Persentase Layanan Angkutan Darat | 1.22 | 0,28 | 0,28 | 3 | 0,35 |
| Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | | | | 6,91 | 57,35 |
| Pemasangan Rambu-rambu | 16,33 | 8,00 | 115,7 | 2,18 | 0,20 |
| Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | 0,00552 | 0,00552 | 0,01185 | 0,01002 | 0,01077 |
| Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum | 20.141 | 26.445 | 26.445 | 1.091.610 | 909,552 |
| Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun | 918.663 | 1.041.610 | 965.054 | 1.368.070 | 832.251 |

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu, 2021

Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum terus meningkat setiap tahunnya, terutama dalam periode 2016-2019. Bahkan pada tahun 2019 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun umum mencapai 1.368.070. Meskipun pada tahun 2020 jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal berkurang menjadi 832.251, tapi secara tren pertumbuhan arus orang/barang akan mengalami peningkatan kembali pada tahun yang akan datang. Peningkatan ini ditenggarai oleh bertambah baiknya fasilitas dan pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kabupaten Bengkulu dari tahun ke tahun. Hal ini tentu diharapkan dapat membawa kelancaran perekonomian Kabupaten Bengkulu. Semakin lancar arus orang dan barang, maka akan semakin lancar pula perekonomian daerah berjalan.

Untuk indikator pemasangan rambu-rambu terlihat mengalami penurunan terutama pada dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 pemasangan rambu-rambu telah melampaui target yaitu sebesar 115,7% dari total rambu-rambu yang tersedia. Sehingga pada tahun berikutnya pemasangan rambu-rambu menjadi lebih sedikit. Selain itu, keberadaan pandemi Covid-19 telah membuat beberapa anggaran terkena *refocusing* sehingga pada tahun 2020 beberapa program, termasuk pemasangan rambu-rambu belum dapat dilaksanakan.

1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator proporsi rumah tangga dengan akses internet dan cakupan layanan telekomunikasi. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-64 Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 14,16% | 19,12% | 29,96% | 29,96% | 29,96% |
| Cakupan Layanan Telekomunikasi desa/kelurahan | na | na | 76,12% | 80,00% | 96,32% |
| Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | na | na | 24% | 100% | 100% |
| Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Hp/Mengakses Internet | na | na | 23,25 | 23,25 | 23,25 |
| Persentase/Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet | na | na | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi | na | na | 21,43 | 21,43 | 21,43 |
| Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon | na | na | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Selular | na | na | 64,66 | 64,66 | 64,66 |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2016 sebesar 14,16% dan terus mengalami peningkatan menjadi 19,12% pada tahun 2017 dan kemudian menjadi 29,96% pada tahun 2018 hingga pada akhir tahun 2020. Hal ini tentu dilatarbelakangi dengan maraknya penggunaan telpon pintar dewasa ini, terutama pada generasi milenial dan generasi Z.

Sementara itu, untuk indikator cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 96,32% atau mencapai 131 dari total 155 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkulu. Dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 80% dan tahun 2018 hanya mencapai 76,12%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk indikator ini sudah sangat baik perkembangannya dari tahun ke tahun.

Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu juga menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, yaitu mencapai 100% pada tahun 2020. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2019 yang juga telah berhasil mencapai 100%. Hal ini tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan inovasi di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Bengkulu.

Indikator lain, Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Hp/Mengakses Internet di kabupaten Bengkulu pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2020 sudah sebesar 23,25% penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan ponsel dan mengakses internet. Hal ini menunjukkan persentase penduduk yang memiliki ponsel pintar untuk mengakses internet masih stagnan dan belum

menunjukkan perkembangan yang berarti. Begitu pula dengan Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi baru mencapai 21,43% pada tahun 2018-2020. Indikator rumah tangga yang memiliki komputer pribadi ini juga masih stagnan dalam tiga tahun terakhir.

Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon di Kabupaten Bengkulu hanya sebesar 1,41% dari total rumah tangga yang ada pada periode 2018-2020. Kecilnya rumah tangga yang memiliki telepon ini disebabkan sebagian besar masyarakat sudah beralih menggunakan telepon seluler yang lebih multifungsi dan mudah dibawa kemana-mana. Hal ini terlihat dari Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Selular yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 64,66% pada periode 2018-2020.

Sementara itu, indikator lain dalam urusan komunikasi dan informatika adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, yaitu pada tahun 2020 sudah mencapai 37 KIM per kecamatan di Kabupaten Bengkulu. Kecamatan dengan jumlah Kim terbanyak adalah Kecamatan Rupa dengan 114 KIM. Sedangkan kecamatan Tua;ang Muandau sama sekali belum memiliki Kelompok Informasi Masyarakat.

Tabel II-65 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| NO | KECAMATAN | Jumlah Kecamatan | JUMAH KIM | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM |
|-----|---------------------------|------------------|------------|---|
| 1. | Bengkalis | 1 | 34 | 34 |
| 2. | Bantan | 1 | 8 | 8 |
| 3. | Siak Kecil | 1 | 16 | 16 |
| 4. | Pinggir | 1 | 19 | 19 |
| 5. | Mandau | 1 | 17 | 17 |
| 6. | Bukit Batu | 1 | 13 | 13 |
| 7. | Rupa | 1 | 114 | 114 |
| 8. | Rupa Utara | 1 | 87 | 87 |
| 9. | Bandar Laksamana | 1 | 56 | 56 |
| 10. | Bathin Solapan | 1 | 81 | 81 |
| 11 | Talang Muandau | 1 | - | - |
| | Kabupaten Bengkulu | 12 | 445 | 37 |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu, 2021

1.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 persentase koperasi aktif sebesar 33,91% dan hingga akhir tahun 2020 persentase koperasi aktif mencapai 43,70%. Tren peningkatan ini tentu disebabkan oleh bertambah banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Bengkulu. Pada tahun 2016 hanya terdapat sebanyak 293 koperasi aktif, lalu meningkat menjadi 323 pada tahun 2017 dan sebanyak 334 pada tahun 2018. Jumlah koperasi aktif kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 348 unit koperasi. Meski cenderung mengalami peningkatan, jumlah koperasi aktif masih jauh dari potensi optimal. Ada lebih dari 50% koperasi di Kabupaten Bengkulu yang tidak aktif. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena koperasi adalah

kekuatan ekonomi rakyat yang jika dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk UKM non BPR/LKM aktif capaiannya sudah sangat baik. Hingga tahun 2020 akhir sudah sebanyak 99.36% UKM non BPR/LKM yang aktif di Kabupaten Bengkulu. Capaian ini tentu perlu diapresiasi secara positif karena menjadi tanda bahwa perekonomian UKM non BPR di Kabupaten Bengkulu cukup hidup dan berkontribusi baik bagi masyarakat.

Selanjutnya persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bengkulu menunjukkan jumlah yang sangat dominan, mencapai 99,38% dari semua jenis usaha yang ada di kabupaten Bengkulu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha mikro dan kecil masih menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Bengkulu.

Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel II-66 Perkembangan Indikator Koperasi dan UKM di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Persentase Koperasi Aktif | 33.91% | 38.45% | 37.99% | 42.33% | 43,70% |
| Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif | 96.62% | 97.58% | 99,38% | 99,39% | 99,36% |
| Persentase BPR/LKM Aktif | 44.84% | 45.45% | 47,84% | 47,84% | 47,84% |
| Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 96.45% | 97.43% | 99.40% | 99.41% | 99,38% |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu

1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu jumlah investor berskala nasional, nilai realisasi investasi, rasio daya serap tenaga kerja dan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 PMA berjumlah 157 dan ditahun 2019 naik menjadi 180 investor. Pada tahun 2020 jumlah investor berskala nasional sedikit menurun menjadi 161 investor.

Jika dilihat dari nilai investasi, pada tahun 2018 nilai investasi berskala nasional berjumlah 1.941.751.700.000 rupiah. Jumlah nilai investasi berskala nasional pada tahun 2019 meningkat 245% dibanding tahun 2018 menjadi 6.693.783.700.000 rupiah. Terakhir, nilai investasi berskala nasional pada tahun 2020 menurun 21% dibanding tahun 2019 menjadi 5.264.557.600.000 rupiah. Penurunan nilai investasi dan jumlah investor berskala nasional pada tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu disinyalir karena memburuknya perekonomian global yang mengakibatkan lemahnya perdagangan internasional pada masa pandemi Covid-19.

Indikator lain dari urusan penanaman modal adalah rasio daya serap tenaga kerja dari PMA/PMDN di Kabupaten Bengkulu. Dimana capaian indikator ini pada tahun 2020

menunjukkan adanya perbaikan dibanding tahun 2019. rasio daya serap tenaga kerja dari PMA/PMDN di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 adalah sebesar 20,58. Ini artinya, dari setiap penanaman modal berskala nasional di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 mampu menyerap setidaknya 20 tenaga kerja.

Tabel II-67 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 - 2020

| KETERANGAN | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) | 157 | 180 | 161 |
| Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) | 1.941.751.700.000 | 6.693.783.700.000 | 5.264.557.600.000 |
| Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 26,07 | 18,91 | 20,58 |
| Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Milyar Rupiah) | 420.355.900.000 | 4.401.854.200.000 | 5.208.743.200.000 |

Sumber: DPMTSP Kabupaten Bengkulu, 2021

1.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II-68 Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|--------|--------|--------|
| Cakupan pembinaan olahraga (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cakupan pelatih yang bersertifikasi(%) | 79% | 82% | 73,33% | 73,33% | 73,33% |
| Cakupan pembinaan atlet muda (%) | na | na | na | 100% | 100% |
| Jumlah atlit berprestasi tingkat Nasional | 48 | 49 | 45 | 49 | na |
| Jumlah altit Berprestasi Tingkat Internasional. | na | na | 6 | 1 | na |
| Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Persentase wirausaha muda (%) | 70% | 70% | 80% | 80% | 75% |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2016-2019 cakupan pembinaan olahraga sudah sebesar 100%. Ini berarti, dari 40 cabang olahraga yang terdaftar di Kabupaten Bengkulu, sudah semuanya diberikan pembinaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu. Pembinaan olahraga ini juga diikuti dengan cakupan pelatih yang bersertifikasi yang cukup baik, mencapai 73,33% pada tahun 2020, atau mencakup 88 dari 120 pelatih yang ada di Kabupaten Bengkulu.

Cakupan pembinaan atlet muda hingga tahun 2020 sudah mencapai 100%. Dengan demikian dari 473 atlet muda yang ada di Kabupaten Bengkulu, sudah semuanya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pandemi, pemerintah Kabupaten Bengkulu tetap memberikan pembinaan kepada atlet muda dengan memperhatikan aturan dan himbauan yang berlaku.

Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 49 atlet berprestasi nasional dan sebanyak 1 atlet berprestasi internasional. Untuk atlet berprestasi nasional mengalami peningkatan disbanding tahun 2018 dimana jumlah atlet berprestasi nasional adalah sebanyak 45 atlet. Ini artinya dari tahun 2018 ke tahun 2019 telah terjadi peningkatan atlet berprestasi nasional sebanyak 2,76%, namun secara umum dalam lima tahun terakhir tidak banyak peningkatan atlet berprestasi. Untuk tahun 2020, karena adanya pelarangan berbagai kerumunan massal, membuat berbagai pertandingan olahraga dihentikan sementara, baik secara nasional maupun internasional. Sehingga tidak ada prestasi atlet pada tahun 2020.

Untuk persentase wirausaha muda juga cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 terdapat sebanyak 70% wirausaha muda. Jumlah ini meningkat seiring animo masyarakat yang lebih mandiri dengan memulai usaha sendiri. Hingga tahun 2020 sudah terdapat 75% wirausaha muda di Kabupaten Bengkulu. Capaian tahun 2020 sedikit menurun dibanding tahun 2019 karena banyak usaha masyarakat yang terhenti selama pandemi Covid-19.

1.3.2.14 Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bengkulu dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bengkulu Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya, adapun yang telah dirilis sampai dengan tahun 2020. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten Bengkulu, dimana pada tahun 2020 juga telah tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

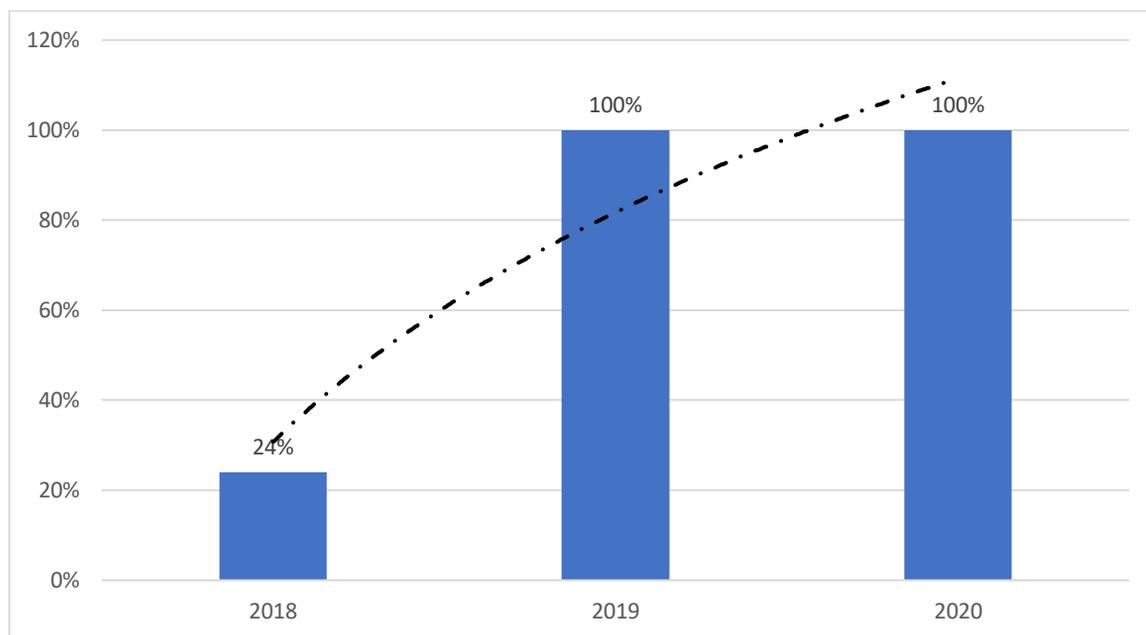
Tabel II-69 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2016- 2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Buku "PDRB" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu, 2021

1.3.2.15 Urusan Persandian

Kabupaten Bengkulu telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. 76% dari perangkat daerah atau 35 PD belum memiliki akun sanapati persandian pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 sudah 100% perangkat daerah memiliki akun sanapati yang digunakan dalam persandian.



Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 2021

Gambar II-34 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkulu 2020

1.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2016 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 6 kegiatan dan ditahun 2017 meningkat menjadi 7 kegiatan. Lalu pada tahun 2018 dan 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya sebanyak 6 kegiatan saja. Terakhir pada tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya berlangsung satu kegiatan saja, dikarenakan situasi pandemi yang menuntut berbagai perencanaan yang telah dilakukan di tahun 2020 tidak berjalan seperti biasanya.

Sementara itu, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 sebanyak 9 situs. Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 11 situs yang dilestarikan, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 14 situs dan tahun 2019 meningkat menjadi 15 situs cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu. Pada tahun 2020 pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu berjumlah 15 situs. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang lebih baik, semakin baiknya

pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya, serta semakin optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah.

Jika dilihat secara persentase pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada, capaian pada tahun 2020, sebesar 58%, cenderung lebih rendah dibanding capaian pada tahun 2016 sebesar 100%. Namun demikian, hal ini bukan berarti adanya penurunan kinerja pelestarian oleh pemerintah daerah, justru sebaliknya. Penurunan capaian ini disebabkan pada tahun 2020 pemerintah daerah semakin gencar menginventarisir dan mendata kekayaan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Bengkulu, sehingga kepemilikan benda, situs dan kawasan cagar budaya Kabupaten Bengkulu meningkat menjadi 26 situs, dari sebelumnya hanya 14 situs budaya pada tahun 2020. Upaya pemerintah daerah dalam mendata kekayaan budaya milik daerah ini sangat perlu diapresiasi karena sangat berguna bagi khasanah ilmu pengetahuan.

Sementara itu, untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2016 berjumlah 9 dan hingga pada tahun 2020 meningkat menjadi 15. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-70 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 6 kegiatan | 7 kegiatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 1 kegiatan |
| Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 9 situs | 11 situs | 14 situs | 15 Situs | 15 Situs |
| Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah | 9 | 11 | 12 | 14 | 26 |
| Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | 100% | 100% | 116% | 107% | 58% |
| Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu, 2021

1.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Kinerja pelayanan pada urusan perpustakaan diukur melalui indikator jumlah pengunjung perpustakaan pertahun. Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2016 berjumlah 70.435 orang dan terus meningkat hingga akhir tahun 2019 mencapai 295.982 orang. Namun, Pada tahun 2020 jumlah kunjungan perpustakaan mengalami penurunan drastis menjadi 61.796 kunjungan saja. Hal ini disebabkan karena pengurangan jam buka perpustakaan karena pandemi Covid-19. Pengurangan kunjungan ini membuat persentase pengunjung perpustakaan menurun drastis hingga angka 10,94% pada tahun 2020.

Tabel II-71 Jumlah Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah kunjungan ke perpustakaan | 70.435 | 91.271 | 260.546 | 295.982 | 61.796 |
| 2 | Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani | 267.519 | 269.886 | 557.707 | 561.358 | 564.689 |
| 3 | Persentase pengunjung perpustakaan | 26.32% | 33.82% | 46.71% | 52.72% | 10.94% |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu, 2021

Selain persentase kunjungan perpustakaan, terdapat indikator lain dalam urusan perpustakaan, yaitu rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator ini dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel II-72 Koleksi Buku yang Tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu 2015-2019

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah | 2.010 | 219 | 207 | 129 | na |
| 2 | Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah | 9.826 | 1.020 | 980 | 131 | na |
| 3 | Rasio koleksi buku | 20.45% | 21.47% | 21.12% | 98.47% | na |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu, 2021

Untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu tampak terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah hanya sebanyak 129 judul buku saja dengan jumlah buku yang tersedia sebanyak 131. Namun untuk rasio koleksi buku cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 rasio koleksi buku hanya 19.07% saja, namun hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 98.47%.

**Tabel II-73 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah perpustakaan | 116 | 134 | 145 | 186 | 295 |
| 2 | Jumlah penduduk | 551.683 | 559.081 | 566.228 | 573.003 | 565.569 |
| 3 | Rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk | 0,021 | 0,024 | 0,026 | 0,032 | 0,052 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2021

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah perpustakaan hanya sebanyak 116 unit saja, lalu mengalami peningkatan menjadi 134 unit pada tahun 2017 dan menjadi 145 unit pada tahun 2018. Jumlah pustaka kembali mengalami peningkatan menjadi 1186 pustaka pada tahun 2019, dan terakhir pada tahun 2020 bertambah sebanyak 109 unit perpustakaan, sehingga pada tahun 2020 jumlah seluruh perpustakaan di Kabupaten Bengkalis menjadi 295 unit.

Pertambahan jumlah pustaka ini menjadi factor penting yang menyebabkan rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2020 rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk sebesar 0.052%. Dengan rasio tersebut satu pustaka di Kabupaten Bengkalis melayani setidaknya 1.917 penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.

1.3.2.18 Urusan Kearsipan

Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase pengelolaan arsip secara baku baru pada tahun 2016 hanya mencapai 6,81% dan pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 6,7% dan 7%. Kemudian meningkat secara drastis pada tahun 2019 sebesar 80%. Terakhir, pada tahun 2020 sudah 80% perangkat daerah melakukan pengelolaan arsip secara baku. Ini artinya pada tahun 2020 sudah 38 dari total 46 perangkat daerah Kabupaten Bengkalis melakukan pengelolaan arsip secara baku

**Tabel II-74 Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020**

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------|------------|------|
| Persentase pengelolaan arsip secara baku | 6,8% | 6,7% | 7,0% | 80% | 80% |
| Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | - | 1 Kegiatan | - |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 adalah yang terbanyak dalam lima tahun terakhir. Sementara itu pada tahun 2018 dan 2020 tidak ada kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bengkalis

1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah di antaranya yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan.

1.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat indikator produksi perikanan dan konsumsi ikan. Produksi perikanan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 produksi perikanan mencapai 7.579 ton namun sempat berkurang hingga 6.777 ton pada tahun 2018, lalu naik Kembali pada tahun 2019 menjadi 7.227 ton, namun kembali berkurang pada tahun 2020 menjadi 7.013 ton. Fluktuasi dari produksi perikanan ini terutama disebabkan oleh tidak menentunya hasil tangkapan nelayan Kabupaten Bengkalis sebagai penghasil utama perikanan di Kabupaten Bengkalis. Nelayan yang mengandalkan hasil tangkap ikan dari laut dan sumber alam lainnya lima tahun terakhir mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2016 sebanyak 7.171 ton ikan dihasilkan kelompok nelayan, namun pada tahun 2020 berkurang hingga lebih dari 10% menjadi 5.948 ton hasil tangkapan ikan.

Pengurangan hasil tangkap nelayan ini harus dibarengi dengan peningkatan produksi dari hasil budi daya agar kebutuhan ikan masyarakat dapat terpenuhi.

Sering dengan perkembangan produksi ikan, konsumsi ikan di Kabupaten Bengkalis cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 konsumsi ikan hanya sebesar 38,64% dari target, namun pada tahun 2020 sudah mengalami perbaikan hingga mencapai 40,89% dari target.

Tabel II-75 Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

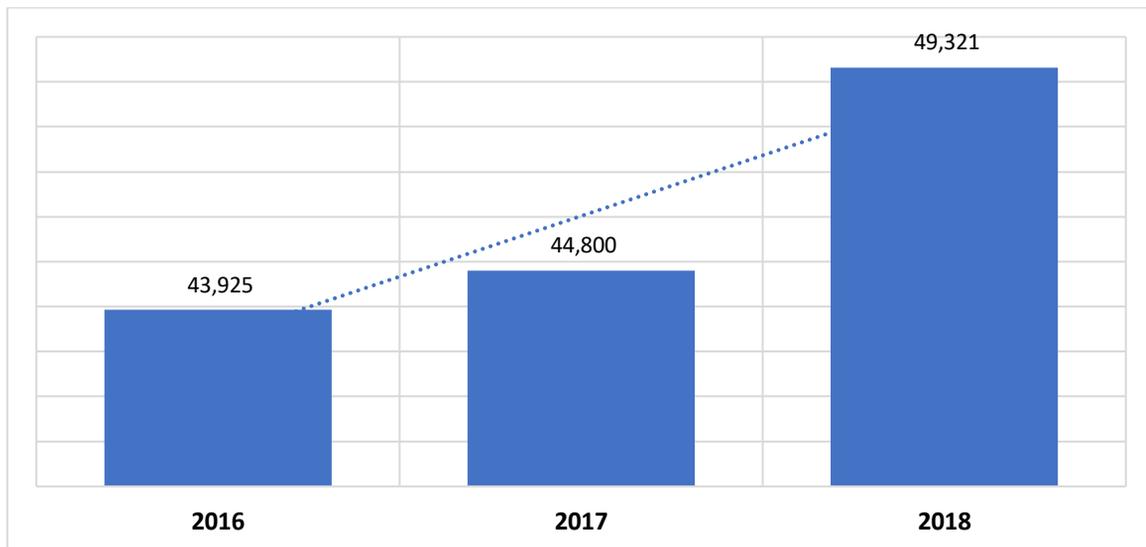
| Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produksi perikanan | 7.579,63 | 6.966,83 | 6.777,20 | 7.227,69 | 7.013,87 |
| Konsumsi ikan (%) | 38.64 | 39.34 | 40.14 | 40.89 | 40.89 |
| Cakupan bina kelompok nelayan | 38 | 53 | 50 | 80 | 67 |
| Produksi perikanan kelompok nelayan | 7.171,44 | 6.634,59 | 6.397,67 | 6.262,43 | 5.947,97 |
| Produktifitas Perikanan Budidaya | 408,19 | 332,24 | 379,53 | 965,26 | 1.065,91 |

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.3.2 Urusan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkulu. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 43.925 orang, namun pada tahun

2017 mengalami peningkatan menjadi 44.800 orang. Tahun 2018 meningkat menjadi 49.321 orang. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap minat wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke Bengkulu. Pada grafik berikut disajikan perkembangan wisatawan di Kabupaten Bengkulu



Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam angka 2020

Gambar II-35 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2018

Untuk lama kunjungan wisata di Kabupaten Bengkulu dari tahun 2016 hingga 2020 yaitu selama 3 hari. Lama kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya uang yang dihabiskan wisatawan selama berada di Kabupaten Bengkulu. Semakin lama wisatawan tinggal maka semakin banyak kontribusi sektor wisata terhadap PAD daerah. Untuk tahun 2019 kontribusi PAD dari sektor pariwisata adalah sebesar 50 juta rupiah, jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 16.000.000. Kontribusi ini disinyalir lebih sedikit dari yang sebenarnya terjadi di lapangan. Banyak pengeluaran wisatawan yang tidak dapat dideteksi karena pengeluaran wisatawan cenderung menasar langsung pada masyarakat dan sulit dihitung angka pastinya.

Tabel II-76 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkulu 2016-2020

| Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| Lama kunjungan Wisata | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari |
| PAD sektor pariwisata | na | na | na | 50.000.000 | 16.000.000 |

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu, 2021

1.3.3.3 Urusan Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat melalui indikator produksi sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bengkulu. Selain itu dapat pula dilihat melalui cakupan bina kelompok petani.

Produksi Sektor pertanian di kabupaten Bengkulu dalam tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Dimana pada tahun 2018 produksi sektor pertanian sebesar 39.534 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 37.985 ton. Terakhir pada tahun 2020 produksi sektor pertanian kembali naik menjadi 38.786 ton.

Tabel II-77 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|------|------|---------|---------|---------|
| Produksi Sektor Pertanian (ton) | na | na | 39.534 | 37.985 | 38.786 |
| Produksi Sektor Perkebunan (ton) | na | na | 246.619 | 243.237 | 289.736 |
| Cakupan bina kelompok petani | 100 | 100 | 100 | na | na |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu, 2021

Sementara itu, untuk Produksi Sektor perkebunan di kabupaten Bengkulu dalam tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Dimana pada tahun 2018 produksi sektor perkebunan sebesar 246.619 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 243.237 ton. Terakhir pada tahun 2020 produksi sektor perkebunan kembali naik menjadi 289.736 ton.

Indikator lain dari urusan pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu. Tabel berikut memberikan gambaran kontribusi sektor pertanian secara umum terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-78 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Share Terhadap Total PDRB | 8,47% | 9,01% | 8,25% | 9,22% | 12,65% |
| Nilai Kontribusi (Juta Rupiah) | 11.201.413,5 | 11.985.422,0 | 12.256.418,5 | 13.053.199,9 | 14.662.023,4 |

Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam angka 2021

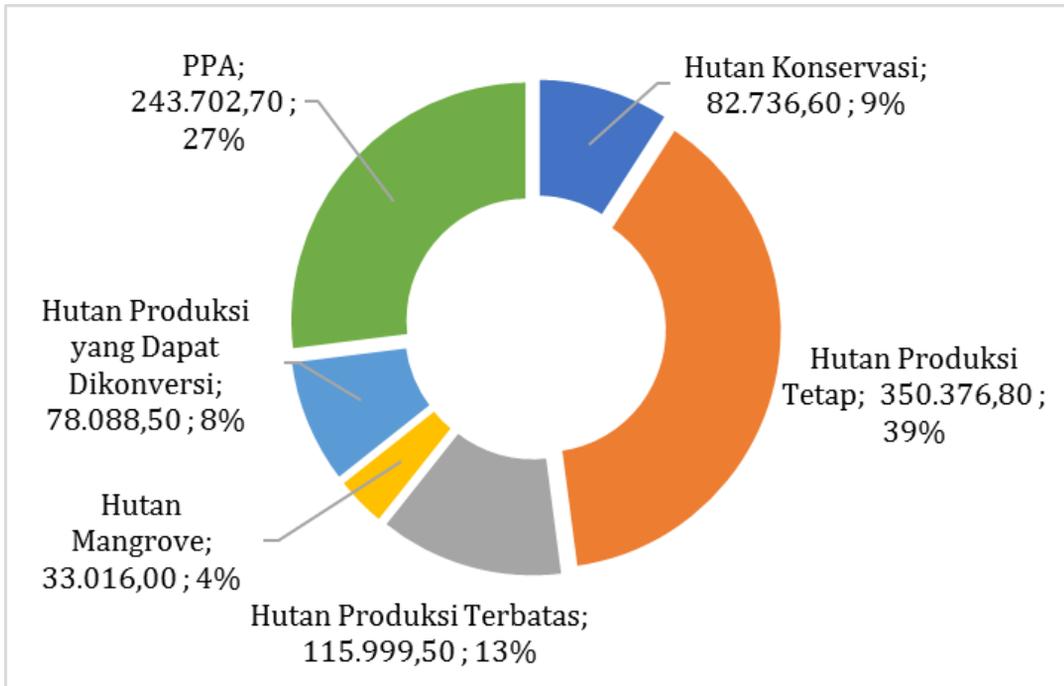
Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Kabupaten Bengkulu setelah pertambangan. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian juga terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB daerah.

Taun 2016 sektor pertanian/perkebunan/perhutanan memberi kontribusi hingga 8,47% pada PDRB Kabupaten Bengkalis atau setara dengan 11,2 triliun rupiah. Angka ini terus bertambah menjadi 9,01% pada tahun 2017 dan menjadi 8,25% pada tahun 20178. Pada taun 2019 kontribusi sektor pertanian/perkebunan/perhutanan meningkat kembali menjadi 9,22% terhadap PDRB. Terakhir, pada 2020 kembali naik menjadi 12,65% kontribusi teradap PDRB atau setara dengan 14,6 triliun rupiah.

1.3.3.4 Urusan Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan, mulai dari perencanaan, perizinan, dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi huta, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

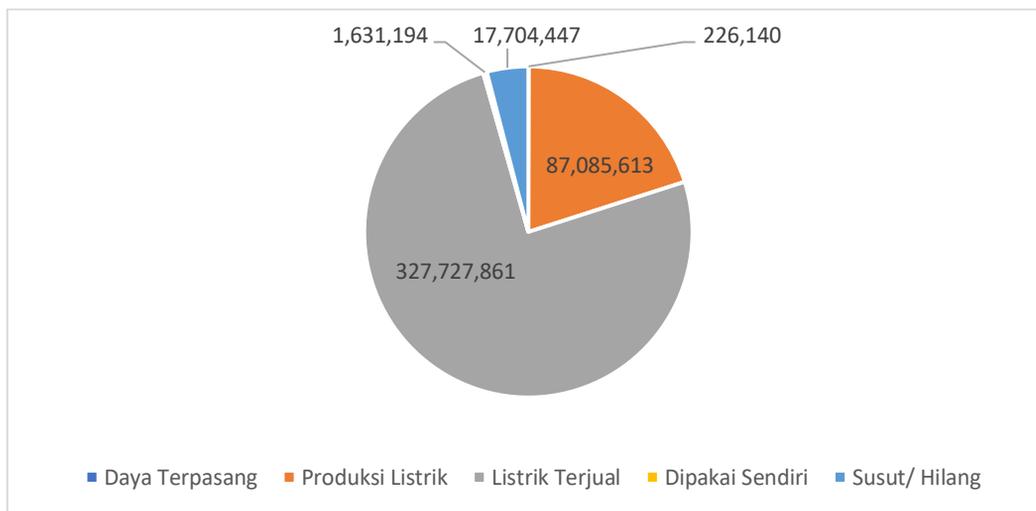
Menjaga fungsi lingkungan dengan mempertahankan hutan menjadi sangat penting dalam pelestarian sumberdaya alam melalui pemeliharaan, pengendalian, pemuliaan, serta pengembangan pemanfaatan kawasa hutan untuk keseimbangan ekosistem. Pada tahun 2015, terdapat 27% luas hutan yang termasuk kategori perlindungan dan pelestarian alam (PPA) dari 903.920 Ha luas hutan di Kabupaten Bengkalis dan hutan produksi tetap dengan proporsi 39%. Hutan mangrove masih terdapat seluas 33.016 Ha atau 4% dari luas hutan Kabupaten Bengkalis. Pemanfaatan hutan mangrive untuk pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi dengan tetap memperhatikan konservasi menjadai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Bengkalis.



Gambar II-36 Luas Hutan Menurut Jenis Hutan di Kabupaten Bengkulu

1.3.3.5 Urusan energi dan Sumber daya mineral

Ketersediaan energi listrik di kabupaten Bengkulu berdasarkan data statistik dengan daya terpasang sebanyak 226.140 KW. Produksi listrik mencapai 87085613 KWh dan listrik terjual sebanyak 327.727.861 KWh. Sementara itu dari total produksi listrik yang dihasilkan sebanyak 1.631.194 KWh dipakai sendiri dan sebanyak 17.704.447 KWh mengalami penyusutan (shrinkage)



Sumber:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu, 2021

Gambar II-37 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik (dalam KWh) PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu tahun 2020

1.3.3.6 Urusan Perdagangan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perdagangan dapat dilihat indikator ekspor bersih perdagangan. Pada tahun 2016 ekspor bersih perdagangan berjumlah US\$. 24.039,79 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi US\$ 290.602,27. Pada tahun 2018 ekspor bersih perdagangan meningkat menjadi US\$. 957.474, kemudian meningkat lagi secara signifikan pada tahun 2019 menjadi UD\$. 250.262.690. Peningkatan ini disebabkan oleh perluasan objek ekspor perdagangan dengan semakin terbukanya kerjasama luar negeri Kabupaten Bengkulu dengan berbagai institusi di negara luar. Perolehan neraca perdagangan yang surplus di Kabupaten Bengkulu sangat erat kaitannya dengan kontribusi nilai ekspor migas yang sangat besar. Dengan demikian, capaian neraca perdagangan yang surplus saat ini sangat tergantung dengan perkembangan produksi minyak di Kabupaten Bengkulu. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi dan aktivitas perdagangan luar negeri masih ditopang oleh satu sektor, yaitu sektor perdagangan. Maka penguatan struktur perekonomian Bengkulu perlu mempertimbangkan pengembangan produksi sektor bukan migas yang dapat mendukung aktivitas industri dan perdagangan dimasa mendatang.

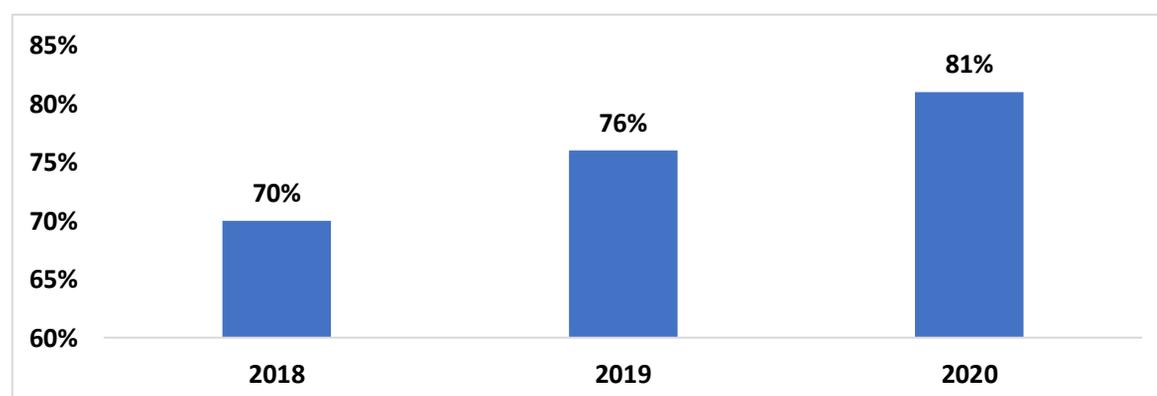
Tabel II-79 Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|------|
| Ekspor Bersih Perdagangan (USD) | US\$. 24.039,79 | US\$. 290.602,27 | US\$. 957.474 | US\$. 250.262,690 | na |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu, 2021

1.3.3.7 Urusan Perindustrian

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Pembinaan pengrajin memiliki arti penting bagi perkembangan industri kreatif di Kabupaten Bengkulu. Selain menyerap tenaga kerja, kelak juga akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah apabila pengrajin dibina dengan baik.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu, 2021

Gambar II-38 Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkulu Tahun 2018- 2020

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok pengrajin semakin meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 70% dan tahun 2017 meningkat menjadi 76%. Kemudian tahun 2020 cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 81% pengrajin yang dibina. Hal ini dikarenakan pasar industri dan kemitraan mulai mengalami peningkatan, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang mulai merata, kapasitas dan kapabilitas SDM pengrajin mulai meningkat dan terjadi peningkatan terhadap penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku industri.

1.3.4 Fokus Penunjang Urusan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah di antaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

1.3.4.1 Urusan Perencanaan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, dan persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD.

**Tabel II-80 Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2016-2020**

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD | 85% | 71,43% | 88,89% | 99,06% | 88,78% |
| Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 80,36% | 96,02% | 99,86% | 99,89% | 88,06% |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkulu 2005-2025. Untuk indikator tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada yang tertuang dala Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Demikian juga halnya dengan dokumen RTRW yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Untuk persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik, dengan persentase kesesuaian mencapai 88,78% hingga tahun 2020. Sementara itu penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu mencapai 88,06% pada tahun 2020.

1.3.4.2 Urusan Keuangan

Kinerja pelayanan pada urusan keuangan dapat diukur melalui opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase SILPA, persentase belanja pendidikan (20%), persentase belanja kesehatan (10%) dan Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-81 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020

| KEUANGAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase SILPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase SILPA terhadap APBD | 0,24 | 0,42 | 6,13 | 5,3 | 5,5 |
| Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksanakan | - | - | - | - | - |
| Persentase belanja pendidikan (20%) | 6,47 | 9,07 | 8,27 | 23,28 | 21,29* |
| Persentase belanja kesehatan (10%) | 6,96 | 6,35 | 9,27 | 10,93 | 12,46* |
| Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | 1,6:1,5 | 2,26:1 | 1,98:1 | 2,48:1 | 1,13:1 |
| Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | |
| Penetapan APBD | Tepat Waktu |

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2021

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2016-2020 mendapat predikat WTP, ini artinya adanya pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah transparan dan akuntabel. Untuk persentase SILPA terhadap APBD ditahun 2020 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 persentase SILPA terhadap APBD sebesar 5.3%, sedangkan tahun 2020 sebesar 5,5%

Sementara itu, persentase belanja pendidikan (20%) pada tahun 2020 sebesar 21,29% sedikit berkurang dibanding tahun 2019 sebesar 23,28%. Persentase belanja kesehatan (10%) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 10,93% dan ditahun 2020 meningkat

menjadi 12,46%. Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya pagu yang dianggarkan untuk urusan kesehatan, terutama menyangkut penangkalan dan pengobatan wabah Covid-19. Peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu.

1.3.4.3 Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat dapat dilihat pada indikator pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural. Pada indikator ini, pada tahun 2020 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural sebanyak 48,96% dari total 1065 jabatan yang ada. Jumlah ini berkurang cukup signifikan dibanding tahun 2019 yang mencapai 71% pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural. Penurunan capaian ini merupakan dampak langsung dari pembatasan kegiatan pemerintahan berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19. Indikator lain dalam urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel II-82 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 7,44 | 10,37 | 9,96 | Na | Na |
| Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | 62,93 | 86,56 | 77,92 | 71,00 | 48,96 |
| Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah | 34 | 15 | 40 | 40 | 40 |
| Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah | 2905 | 2885 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah | 4521 | 4611 | 4452 | na | na |

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkulu, 2021

1.3.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator urusan Penelitian dan Pengembangan dapat diketahui dari beberapa indikator seperti tabel berikut.

Tabel II-83 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu 2016-2020

| NO | KETERANGAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 |
| 2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 30 | 35 | 75% | 75% | 70% |
| 3. | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | - | - | - | 18% | 42% |
| 4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | - | - | - | 18% | 28% |

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu, 2021

Implementasi rencana kelitbang baru mencapai 4% dari keseluruhan rencana yang sudah diimplementasikan. Begitu pula dengan pemanfaatan hasil kelitbang sudah mencapai 70% hingga tahun 2020. Meski begitu Balitbang Kabupaten Bengkulu sudah berusaha dengan baik untuk menerapkan inovasi-inovasi baru di daerah. Dimana kebijakan inovasi yang sudah diterapkan di daerah sudah mencapai 70% pada tahun 2020.

1.3.4.5 Urusan Pengawasan

Kinerja pelayanan pada urusan pengawasan dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu persentase tindak lanjut temuan, jumlah temuan BPK dan persentase pelanggaran pegawai. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkulu dari tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun Inspektorat Kabupaten Bengkulu terus berusaha menjalankan fungsi pengawasan semaksimal mungkin untuk menindak lanjut temuan-temuan yang didapat. Hingga tahun 2019 Inspektrat sudah berhasil menindak lanjut 66.52% temuan.

Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai juga cenderung menurun dalam periode 2015-2019. Yaitu pada tahun 2015 pelanggaran ASN sebanyak 47 kali, namun pada tahun 2019 sudah mengalami penurunan menjadi 36 pelanggaran saja. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-84 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase Tindak Lanjut Temuan | 63,55 | 66,52 | 40,00 | 65,16 | - |
| Jumlah Temuan BPK | 35,08 | 34,8 | 37,3 | 55,66 | - |
| Persentase Pelanggaran Pegawai (ASN) | na | na | 1,55% | 0,53% | 0,30% |

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bengkulu, 2021

1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Berikut ini adalah perkembangan indikator untuk urusan penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-85 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu 2016-2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|
| Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|
| Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | | | | | |
| Terintegrasi Program- program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, 2021

Urusan penunjang untuk indikator penelitian dan pengembangan dalam lima tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik. Dimana ketiga indikator utama udah terlaksana sesuai target yang diinginkan.

1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

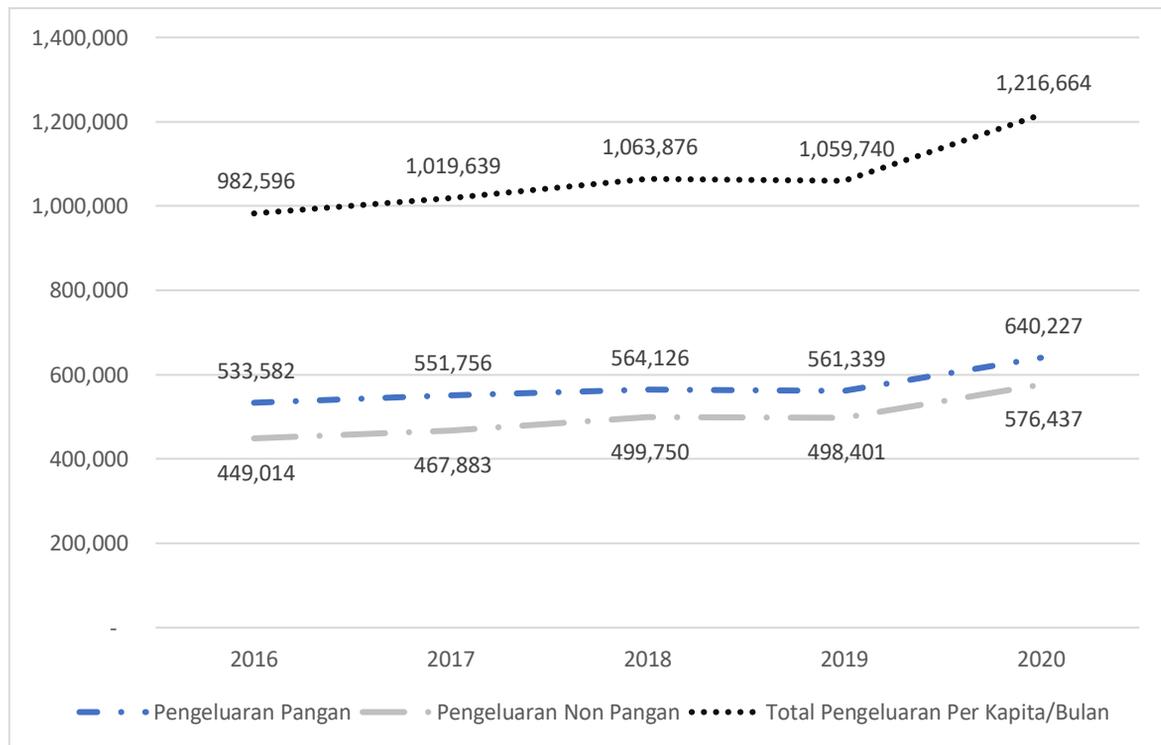
Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku sebesar 177,5 Juta Rp/RT dan hingga akhir tahun 2020 meningkat menjadi 212,62 Juta Rp/RT. Begitu juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan yang terus meningkat dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan berjumlah 112,68 Juta Rp/RT dan tahun 2020 meningkat menjadi 118,87 Juta Rp/RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-86 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Bengkalis

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Harga Berlaku (juta Rupiah) | | | | | |
| Total Pengeluaran RT | 22.795.442,71 | 24.847.827,89 | 27.020.227,81 | 28.548.006,89 | 28.988.335,15 |
| Jumlah RT | 128.938 | 130.667 | 132.337 | 134.337 | 136.337* |
| Pengeluaran per Kapita | 177,5 | 190,16 | 204,12 | 212,14 | 212,62 |
| Harga Konstan (Juta Rupiah) | | | | | |
| Total Pengeluaran RT | 14.528.985,25 | 15.231.276,93 | 15.996.840,85 | 16.437.435,81 | 16.205.868,97 |
| Jumlah RT | 128.938 | 130.667 | 132.337 | 134.337 | 136.337* |
| Pengeluaran per Kapita | 112,68 | 116,57 | 120,88 | 122,36 | 118,87 |

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis dan olahan, 2021

Dilihat dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita berdasarkan PDRB pengeluaran harga berlaku mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu jika berdasarkan harga konstan terlihat mengalami sedikit penurunan. Fenomena ini disinyalir sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat dan berkurangnya pengeluaran konsumsi masyarakat.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu, 2021

Gambar II-39 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan (dalam rupiah) di Kabupaten Bengkulu 2020

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bengkulu menunjukkan tren yang semakin meningkat selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapita penduduk sebesar Rp. 870.432/Kapita/bulan dan meningkat menjadi Rp. 1.059.740/Kapita/bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi pangan dan non pangan setiap penduduk selama sebulan semakin meningkat. Secara umum terlihat bahwa secara absolut jumlah pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pangan masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan non pangan.

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Proporsi pengeluaran per kapita penduduk untuk pemenuhan kebutuhan non pangan mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, proporsi pengeluaran non pangan sebesar 44,79% terhadap total pengeluaran per kapita penduduk. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga menjadi 47,38%. Tidak hanya secara persentase, secara nominal pengeluaran non pangan per kapita juga mengalami kenaikan secara nominal.

Dimana pada tahun 2020 nilai pengeluaran non pangan per kapita sebesar 498.401 rupiah, kemudian meningkat 16% menjadi 576.437 rupiah. Hal ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan non pangan semakin besar dalam struktur pengeluaran rumah tangga. Komponen konsumsi non pangan terbesar dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga, serta pemenuhan kebutuhan aneka komoditas dan jasa. Proporsi pengeluaran untuk pemenuhan non pangan yang meningkat mengindikasikan kesejahteraan rumah tangga semakin meningkat.

Tabel II-87 Rata-Rata Persentase Pengeluaran Non Pangan per Kapita/Bulan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020

| Jenis | Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk (%) | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pengeluaran Pangan (%) | 55,21 | 54,11 | 53,03 | 52,97 | 52,62 |
| Pengeluaran Non Pangan (%) | 44,79 | 45,89 | 46,97 | 47,03 | 47,38 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu 2021

3) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator ukuran tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani menggambarkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup dari nilai produksi yang diperoleh. Nilai tukar petani dapat diukur pada setiap subsektor pertanian. Ketersediaan data nilai tukar petani di Kabupaten Bengkulu masih terbatas, sehingga telaah terhadap capaian kesejahteraan petani menjadi terbatas. Kabupaten Bengkulu mengukur nilai tukar petani fokus kemampuan ekonomi bidang perkebunan. Hal ini didasarkan pada peran subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dominan dalam sektor pertanian. Komoditi kelapa sawit memiliki areal paling luas dalam sub sektor perkebunan yaitu 143.784 Ha dengan produksi 1.188.285 ton pada tahun 2018. Sedangkan areal komoditi perkebunan lainnya relatif lebih sedikit, yaitu luas areal karet 30.841 Ha, kelapa seluas 6.324 Ha. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa sub sektor perkebunan sebagai penyumbang PDRB sektor pertanian dan dominasi pekerja pada lapangan usaha juga berasal dari sektor pertanian khususnya perkebunan. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat NTP untuk petani karet dan kelapa pada tahun 2019 berada pada NTP < 100 dengan demikian kondisi petani karet dan kelapa mengalami defisit ekonomi yang berdampak menurunnya kesejahteraan petani karet dan kelapa. Sementara NTP petani sawit berada hingga tahun 2018 berada pada NTP > 100 dimana kondisi petani sawit masih surplus dengan demikian tingkat kesejahteraan petani sawit masih baik hingga tahun 2019, sekalipun perlu adanya perbaikan dikarenakan NTP petani sawit masih dibawah tahun target 2019. Secara keseluruhan nilai tukar petani di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2019 adalah 81,26, mengalami defisit. Jumlah nilai yang dibayar petani untuk memenuhi seluruh pengeluaran per tahun lebih besar dibandingkan dengan nilai penerimaan yang diperoleh dari produksi pertanian.

Tabel II-88 Perkembangan NTP Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2020

| Indikator Kinerja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Nilai Tukar Petani (NTP) | na | na | 97,7 | 95,59 | 118,77 |
| NTP Petani Perkebunan | | | | | |
| - NTP Petani Karet | 20,50 | 23,50 | 23,65 | 23,65* | na |
| - NTP Petani Kelapa | 38,50 | 40,05 | 40,15 | 40,15* | na |
| - NTP Petani Kelapa sawit | 105,50 | 110,58 | 112,00 | 112,00* | na |

Sumber: LAKIP Kabupaten Bengkulu 2020, LPPD Kabupaten Bengkulu 2020

4) Rasio Perdagangan Terhadap PDRB

Rasio perdagangan terhadap PDRB merupakan indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara atau wilayah. Rasio perdagangan terhadap PDRB dengan membagi nilai agregat impor dan ekspor tahun 2015-2019 dengan produk domestik bruto pada waktu yang sama. Rasio merupakan patokan keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional. Rasio ini dapat dipandang sebagai indikator globalisasi ekonomi sebuah negara atau wilayah.

**Tabel II-89 Rasio Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Bengkulu Tahun 2015-2019**

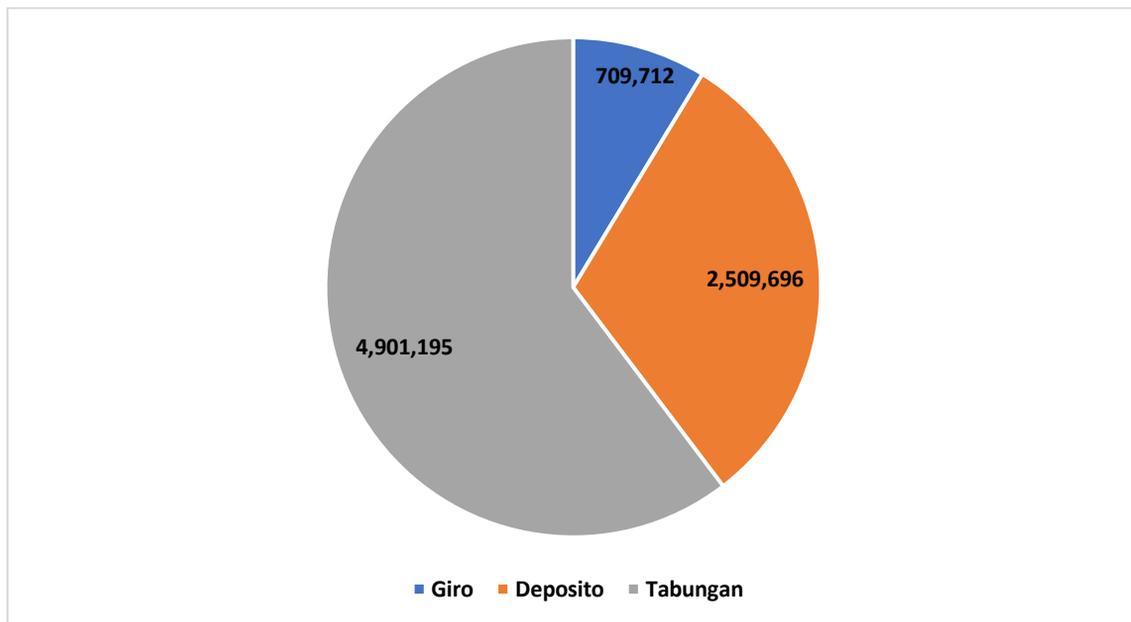
| Komponen Pengeluaran | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Net Ekspor barang dan Jasa | 93.393.142,01 | 84.954.156,06 | 81.987.837,92 | 94.312.786,42 | 85.083.585,84 |
| PDRB | 135.504.919,07 | 132.200.503,50 | 132.993.993,35 | 149.406.574,57 | 142.450.722,80 |
| Rasio Exim Terhadap PDRB | 68,92 | 64,26 | 61,65 | 63,12 | 59,73 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu 2020

Berdasarkan Tabel II-63 menunjukkan terjadinya penurunan rasio perdagangan terhadap PDRB HB dari 2015-2019. Rasio perdagangan tahun 2015 sebesar 68,92% kemudian menurun menjadi 63,12% pada tahun 2018 dengan laju penurunan pertumbuhan sebesar 1,56% per tahun. Penurunan laju pertumbuhan rasio tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan perdagangan ekspor hanya tumbuh sebesar 3,71% per tahun dan import mengalami pertumbuhan negative sebesar 1,45% per tahun dan secara total laju pertumbuhan perdagangan hanya tumbuh sebesar 3,20% per tahun sementara laju pertumbuhan PDRB HB dari tahun 2012-2017 sebesar 4,93% per tahun. Oleh karena itu upaya peningkatan nilai perdagangan ekspor harus terus dilakukan dengan meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa dari barang dan jasa yang bernilai tinggi dari hasil industri unggulan berupa barang akhir atau end produk. Sementara dari sisi import yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan import barang modal terutama teknologi peralatan dan mesin yang dapat digunakan untuk mengolah bahan baku yang terdapat di wilayah ini sehingga barang dan jasa yang dihasilkan bernilai tinggi atau *end produk* sehingga berkontribusi pada peningkatan nilai perdagangan ekspor ke depan.

5) Dana masyarakat di perbankan

Jumlah dana masyarakat pada bank di Kabupaten Bengkalis merupakan jumlah terbanyak kedua di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Pada tahun 2020 jumlah masyarakat pada bank mencapai 8,12 triliun rupiah. Dana ini terbagi pada giro sebanyak 709 milyar rupiah atau sebesar 8,74% dari total dana masyarakat pada bank. Sementara itu masyarakat yang memanfaatkan platform deposito sebanyak 2,5 triliun rupiah atau mencapai 30,91% dari total dana masyarakat pada bank. Sementara itu, dana masyarakat di bank lebih banyak dalam bentuk tabungan, yaitu mencapai 4,9 triliun rupiah atau sebesar 60,36% dari total dana masyarakat pada bank



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar II-Dana Masyarakat pada Perbankan (dalam juta rupiah) di Kabupaten Bengkalis 2020

6) Sektor Unggulan

Sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Namun, sektor pertanian penyerap tenaga kerja terbesar yaitu 33,07% pada tahun 2018. Subsektor dominan pada sektor pertanian subsektor perkebunan yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan sagu. Tercatat pada tahun 2018 produksi kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis mencapai 1.1825,29 ton atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 1.215,44 ton, dengan produktifitas kelapa sawit sebesar 8,21 ton/ha. Produksi ini meningkat lagi menjadi 1.215.440 ton kelapa sawit tahun 2019.

Tabel II-90 Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2019

| Komoditas Unggulan | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Produksi (ribu ton) | Luas Areal (ribu Ha) | Produksi (ribu ton) | Luas Areal (ribu Ha) | Produksi (ribu ton) | Luas Areal (ribu Ha) |
| Kelapa Sawit | 1.215.436 | 148.117 | 1.188.285 | 143.784 | 1.215.440 | 148.280 |
| Karet | 44.953 | 30.385 | 44.383 | 30.841 | 44.950 | 30.380 |
| Kelapa | 14.678 | 6.274 | 13.609 | 6.324 | 14.677 | 6.270 |

Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam Angka 2021

1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Bengkulu hingga tahun 2018 baru mencapai 49,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan wilayah di Kabupaten Bengkulu masih memerlukan pengawasan dan perizinan penggunaan lahan. Karena saat ini masih sedikit pembangunan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Ketidaksiuaian realisasi pembangunan dengan RTRW dapat mengancam kelangsungan hidup berupa deforestasi, banjir dan kebakaran lahan.

Tabel II-91 Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020

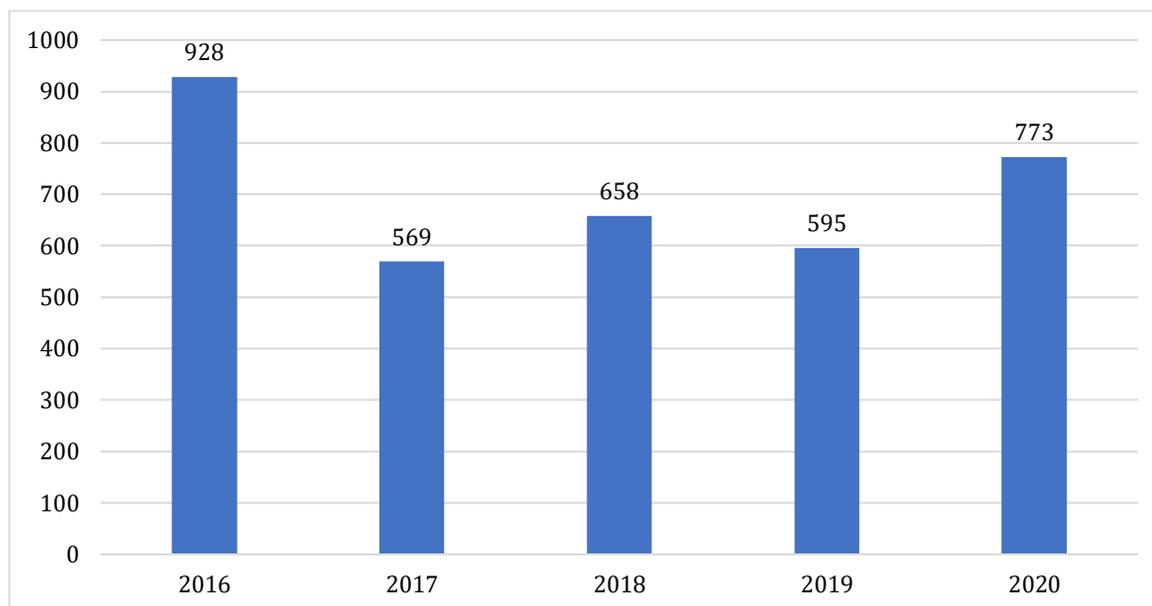
| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------|-------|-------|------|------|
| Ketaatan Terhadap RTRW | na | 39,05 | 39,05 | na | na |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu, 2020

1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1) Kriminalitas

Secara umum, fungsi angka kriminalitas ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah angka kriminalitas yang ditangani oleh Polres Bengkulu dari kurun waktu 2016-2020.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar II-40 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah kasus kriminal yang dilaporkan ke Polres Bengkalis. Tampak pada tahun 2016 ada sebanyak 928 kasus yang dilaporkan dan turun cukup signifikan menjadi 569 kasus pada tahun 2017. Kenaikan kasus kembali terjadi pada tahun 2018 sebanyak 658 kasus yang dilaporkan, namun menurun menjadi 595 kasus saja pada tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 kasus kejahatan yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 773 kejahatan.

Tabel II-92 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis 2016-2020

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Angka Kriminalitas | 928 | 569 | 658 | 595 | 773 |
| Jumlah Penduduk | 551.683 | 559.081 | 566.228 | 573.003 | 565.569 |
| Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk | 16,8 | 10,2 | 11,6 | 10,4 | 13,7 |

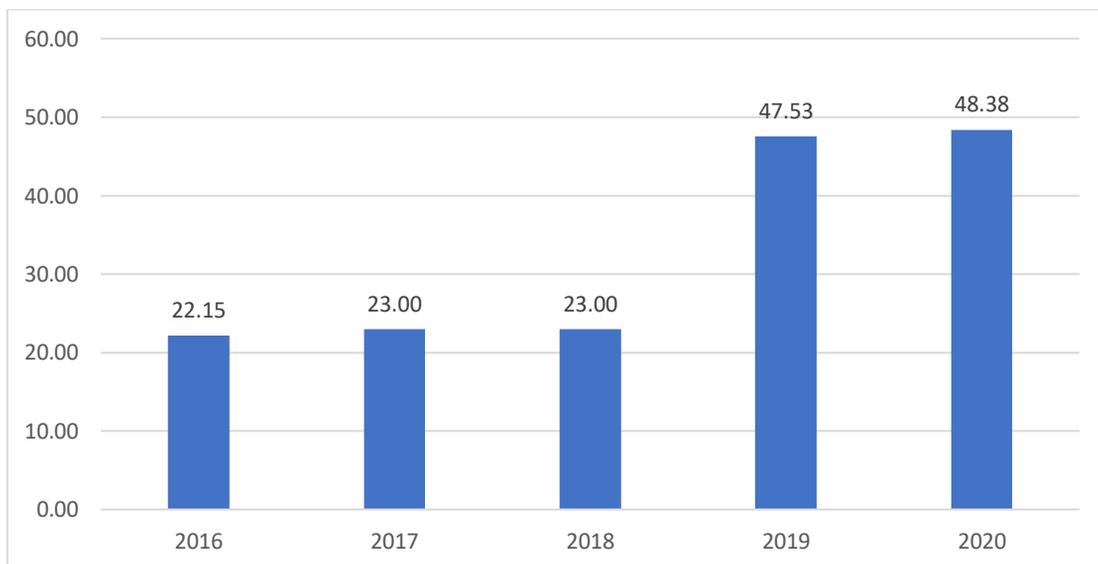
Sumber: Bengkalis dalam Angka 2021

Biasanya semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan semakin rentan terjadi tindak kriminalitas. Secara rasio, tindak kriminalitas di Kabupaten Bengkalis tampak mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Dalam 10.000 penduduk terjadi sebanyak 16,8 kejahatan pada tahun 2016. Rasio kriminalitas kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 10,2 kasus per 10.000 penduduk, sebelum kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 11,6 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 hanya terdapat 10,4 kasus kriminal. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 16,01 kasus per 10.000 penduduk. Adanya kecenderungan penurunan kasus kriminal ini diharapkan membawa dampak positif terhadap keamanan daerah Kabupaten Bengkalis dan mengundang lebih banyak investasi di Kabupaten Bengkalis.

1.4.4 Fokus Sumberdaya manusia

1) Kualitas Tenaga kerja

Keberhasilan pelayanan pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu rasio lulusan S1/S2/S3, persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun, serta keselamatan dan perlindungan. Rasio lulusan S1/S2/S3 menggambarkan seberapa banyak perkembangan penduduk Kabupaten Bengkulu yang mampu mencapai jenjang Pendidikan tinggi. Pendidikan yang tinggi tentu sangat berperan penting dalam menciptakan kualitas tenaga kerja yang baik dan memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan membawa perkembangan yang baik untuk kemajuan daerahnya. Dapat dilihat bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkulu semakin berkembang setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 rasio lulusan S1/S2/S3 sebanyak 22,15% saja, kemudian mengalami peningkatan menjadi 23,00% pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019, penduduk yang mencapai lulusan S1/S2/S3 meningkat cukup tinggi yaitu 47,53% dari jumlah penduduk.



Sumber: BKPP Kabupaten Bengkulu, 2021

Gambar II-41 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkulu 2016-2020

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi

Dari tahun ke tahun rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkulu terus berkurang. Hal ini ditengarai karena semakin meningkatnya penduduk yang memasuki usia produktif, yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun. Hal ini tentu saja merupakan suatu hal yang positif. Dimana

dengan semakin rendahnya rasio ketergantungan menandakan bahwa penduduk cenderung lebih sejahtera dan beban perekonomian berkurang. Hal ini dikarenakan penduduk yang berada pada usia produktif 15-64 tahun biasanya menanggung beban perekonomian dan kebutuhan dari penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Tabel II-93 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkulu 2016-2020

| Kelompok Umur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0-14 | 173.705 | 174.197 | 170.416 | 168.567 | 166.372 |
| 15-64 | 361.111 | 367.095 | 367.989 | 372.007 | 375.974 |
| >64 | 16.867 | 17.789 | 19.302 | 20.784 | 22.343 |
| Jumlah Penduduk | 551.683 | 55081 | 557.707 | 561.358 | 564.689 |
| Rasio Ketergantungan | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0,50 | 0,50 |

Sumber: Kabupaten Bengkulu Dalam Angka, 2021

Dapat dilihat pada tahun 2016 dan tahun 2017 rasio ketergantungan berada pada angka 0.52. Rasio ketergantungan menurun pada tahun 2018 menjadi 0.51 dan menurun lagi menjadi 0.450 pada tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkulu masih berada pada 0,50. Hal ini menunjukkan dari setiap 100 penduduk berusia produktif menanggung beban terhadap 50 orang penduduk tidak produktif, atau setara 1:2.

1.5 Evaluasi Hasil RPJMD Periode lalu

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu tentang Visi, misi, arah Kebijakan dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 2017-2021. Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan misi sampai dengan tahun 2019 disajikan pada table II-94 berikut:

Tabel II-94 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Bengkulu

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1.1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) | -2,54 | -1,72 | -1,67 | -1,86 | -3,3 | 2,05 | belum tercapai (<) |
| 1.1.2 | Perkembangan PDRB (ADHK dalam Triliun Rupiah) | 80,58 | 79,19 | 77,85 | 76,38 | 73,86 | | |
| 1.1.3 | Laju Inflasi | 3,98 | 4,85 | 1,85 | 1,28 | 2,89 | 5,68 | melampaui (>) |
| 1.1.4 | PDRB Perkapita (ADHK dalam Juta Rupiah) | 146,06 | 160,5 | 235,8 | 248,6 | 199,99 | 338,81 | belum tercapai (<) |
| 1.1.5 | Gini Ratio | 0,347 | 0,325 | 0,327 | 0,334 | 0,321 | 0,23 | belum tercapai (<) |
| 1.1.6 | Indeks Ketimpangan Williamson | 6,879 | 5,967 | 5,236 | 4,478 | | | |
| 1.1.7 | Persentase Kemiskinan | 6,82 | 6,85 | 6,22 | 6,27 | 6,4 | 6,5 | melampaui (>) |
| 1.2 | Fokus Kesejahteraan Sosial | | | | | | | |
| 1.2.1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,98 | 72,27 | 72,94 | 73,44 | 73,46 | | |
| 1.2.2 | Angka Harapan Hidup (AHH) | 70,63 | 70,99 | 71,19 | 71,48 | 71,2 | 7,1 | melampaui (>) |
| 1.2.3 | angka harapan lama sekolah | 12,72 | 12,73 | 12,83 | 12,86 | 12,87 | 12,93 | belum tercapai (<) |
| 1.2.4 | Rata-rata lama sekolah | 8,83 | 8,89 | 9,21 | 9,41 | 9,69 | 8,97 | melampaui (>) |
| 1.2.5 | Pengeluaran Per Kapita Riil | 11.325 | 11.530 | 11.640 | 11.753 | 11.331 | | |
| 1.2.6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | | 63,87 | 65,99 | 64,3 | 66 | | |
| 1.2.7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | | 8,62 | 10,05 | 9,62 | 9,31 | 8,65 | belum tercapai (<) |
| 1.2.8 | Rasio kesempatan kerja | | 91,38 | 89,95 | 90,38 | 90,69 | | |
| 1.2.9 | Persentase Balita Gizi Buruk | 0,01 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,07 | 0 | belum tercapai (<) |
| 1.2 | Fokus Seni Budaya dan Olahraga | | | | | | | |
| 1.2.1 | Cakupan pembinaan olahraga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=) |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2 | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| 2.1 | Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 2.1.1 | Urusan Pendidikan | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | APK SD/MI | 100,44 | 111,29 | 106,01 | 108,63 | 106,72 | 100 | melampaui (>) |
| 2.1.1.2 | APK SMP/MTs | 96,86 | 88,18 | 94,77 | 95,01 | 97,41 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.3 | APK SMA/MA/SMK | 70,07 | 75,17 | 79,12 | 77,29 | 79,38 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.4 | APM SD/MI | 97,49 | 98,54 | 79,12 | 97,91 | 98,06 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.5 | APM SMP/MTs | 82,2 | 82,03 | 79,12 | 85,7 | 86,5 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.6 | APM SMA/MA/SMK | 64,61 | 63,95 | 79,12 | 66,07 | 66,97 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.7 | APS SD/MI/Paket A | 103,2 | 102,2 | 115,4 | 98 | 99,66 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.8 | APS SMP/MTs/Paket B | 77,9 | 99,4 | 98 | 79,3 | 94,56 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.9 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | - | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=) |
| 2.1.1.10 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=) |
| 2.1.1.11 | Angka Melanjutkan Studi SMP/MTs | - | - | 98,48 | 97,18 | 94,75 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.12 | Angka Melek Huruf >15 | 99,95 | 99,87 | 99,84 | 99,91 | 99,3 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.1.13 | Rasio Guru Murid SD/MI | 1:17 | 1:15 | 1:18 | 1:16 | 1:15 | 1:25 | melampaui (>) |
| 2.1.1.14 | Rasio Guru Murid SMP/MTs | 1:16 | 1:15 | 1:17 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | melampaui (>) |
| 2.1.2 | Urusan Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 5,1 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4 | 7 | melampaui (>) |
| 2.1.2.2 | Jumlah Kematian bayi | 57 | 48 | 48 | 45 | 42 | < 35 | belum tercapai (<) |
| 2.1.2.3 | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup | 187 | 120 | 116 | 131 | 201 | 115 | belum tercapai (<) |
| 2.1.2.4 | Jumlah Kematian Ibu | 21 | 13 | 12 | 14 | 21 | < 274 | melampaui (>) |
| 2.1.2.5 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | 95% | 95% | 90% | 84% | 77% | 100% | belum tercapai (<) |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.1.2.6 | Cakupan Pelayanan Nifas | 98% | 90% | 86% | 78% | 75% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.2.7 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani | 17% | 9% | 21% | 60% | 14% | | |
| 2.1.2.8 | Angka Kelangsungan Hidup | 1-5,1 | 1-4,4 | 1-4,5 | 1-4,2 | 1-4,0 | | |
| 2.1.2.9 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup | 5,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | | |
| 2.1.2.10 | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | | |
| 2.1.2.11 | Rasio Posyandu Per 1000 Balita | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | | |
| 2.1.2.12 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk | 4 | 4 | 4 | 4 | na | | |
| 2.1.2.13 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 1 | 1 | 1 | 1 | na | | |
| 2.1.2.14 | Rasio dokter per 1000 penduduk | na | na | 50,2 | 22,3 | 66,8 | | |
| 2.1.2.15 | Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk | na | na | 50,2 | 22,3 | 66,8 | | |
| 2.1.2.16 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | na | na | 73% | 72% | 61,30% | | |
| 2.1.2.17 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 97% | 89% | 86% | 81% | 79% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.2.18 | Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan | 82% | 83% | 85% | 78% | na | 100% | |
| 2.1.2.19 | Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan | 91% | 85% | 94% | 87% | na | 100% | |
| 2.1.2.20 | Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi | 93% | 85% | 94% | 90% | na | 100% | |
| 2.1.2.21 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 62% | 67% | 69% | 90% | 69% | 95% | belum tercapai (<) |
| 2.1.2.22 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.1.2.23 | Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak | 77% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.1.2.24 | Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | sesuai (=) |
| 2.1.2.25 | Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani | na | na | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.1.2.26 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | 74% | 90% | 93% | 101% | 28% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.2.27 | Tingkat Prevalensi TBC per 100.000 penduduk | 86 | 123 | 114 | 142 | 121 | | |
| 2.1.2.28 | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| 2.1.2.29 | Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS | na | na | 93,20% | 93,30% | na | | |
| 2.1.2.30 | Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS | 83% | 84% | 70% | 27% | 12% | | |
| 2.1.2.31 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.1.2.32 | Penderita Diare yang di Tangani | 12,48 | 9,56 | 44% | 32% | 10% | | |
| 2.1.2.33 | Jumlah Kejadian Malaria | 2 | 4 | 3 | 31 | 11 | | |
| 2.1.2.34 | Tingkat Kematian Akibat Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.2.35 | Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.1.2.36 | Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi | 0,10% | 0,20% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0.01% | sesuai (=) |
| 2.1.2.37 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | na | na | na | na | 60% | | |
| 2.1.2.38 | Cakupan Kunjungan Bayi | 76% | 85% | 89,90% | 85,20% | 81,60% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.2.39 | Cakupan Puskesmas | 154% | 154% | 164% | 164% | 164% | 100% | melampaui (>) |
| 2.1.2.40 | Cakupan Pembantu Puskesmas | 43% | 43% | 36% | 36% | 36% | | |
| 2.1.2.41 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | 76% | 75% | 65% | 65% | 23% | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.1.2.42 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin | 3% | 15% | na | na | 5% | | |
| 2.1.2.43 | Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat | 22% | 92% | 12% | na | 40% | | |
| 2.1.2.44 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 39% | 31% | 33% | na | 60% | | |
| 2.1.2.45 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.1.2.46 | Cakupan Desa Siaga Aktif | | | 94,44% | 93,65% | 92,86% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.2.47 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.1.3 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km) | 731,5 | 571,74 | 451,72 | 449,62 | 465,68 | | |
| 2.1.3.2 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 51,38 | 52,6 | 48,56 | 47,5 | 52,53 | 62,43 | belum tercapai (<) |
| 2.1.3.3 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk | 0,0027 | 0,0027 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | | |
| 2.1.3.4 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | | |
| 2.1.3.5 | Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB | na | 34,58 | 77,02 | na | na | | |
| 2.1.3.6 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak | na | 84,49 | 78,47 | 87,79 | 89,67 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.3.7 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak | na | 88,74 | 86,88 | 91,19 | 93,73 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.3.8 | Ketaatan Terhadap RTRW | na | 39,05 | 39,05 | na | na | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|--------|--------|---------|-------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.1.3.9 | Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik | 5,51 | 8,29 | 8,8 | na | na | | |
| 2.1.3.10 | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | 62,77 | 63,48 | 74,7 | 77,78 | na | | |
| 2.1.3.11 | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat | na | 35,75 | 32,61 | na | na | | |
| 2.1.4 | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Rasio rumah layak huni | na | 96,20% | 96,59% | 100,67% | na | 100% | |
| 2.1.4.2 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | na | 1,37% | 0,11% | 0,74% | 0,75% | | |
| 2.1.4.3 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | na | 40,47% | 45,81% | 43,79% | na | | |
| 2.1.4.4 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | na | 0,00% | na | 0,00% | 0,00% | | |
| 2.1.4.5 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | na | 6,45 | 23,59 | 30,32 | 46,45 | 25 | melampaui (>) |
| 2.1.5 | Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 7,22 | 7,05 | 6,89 | 6,73 | na | | |
| 2.1.5.2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 14 | 18 | 24 | 24 | na | | |
| 2.1.5.3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 23,12 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | | |
| 2.1.5.4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 53,11 | 80 | 80 | 90 | 80 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.1.5.5 | Persentase Penegakan PERDA | 18 | 18 | 19 | 19 | na | | |
| 2.1.6 | Urusan Sosial | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------|---|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.1.6.1 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.1.6.2 | Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial | 22% | 23% | 75% | 82% | 75% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.6.3 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 44% | 50% | 77% | 78% | 82% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.6.4 | Persentase PMKS yang tertangani | 38% | 39% | 99% | 99% | 79% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.6.5 | Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 22% | 27% | 76% | 77% | 80% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.1.6.6 | Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan | 4.360 | 7.667 | 113.954 | na | na | | |
| 2.1.6.7 | Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial | 1.214 | 1.284 | 1.232 | na | na | | |
| 2.2 | Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 2.2.1 | Urusan Tenaga Kerja | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | 22,15 | 23,00 | 23,00 | na | 48,38 | | |
| 2.2.1.2 | Keselamatan dan Perlindungan (%) | 90,32 | na | na | na | na | | |
| 2.2.1.3 | Penyelesaian Sengketa Pengusaha-Pekerja (%) | 58,24% | 72,58% | 80,00% | na | na | | |
| 2.2.1.4 | Angka sengketa pengusaha-pekerja | na | na | na | 18 | 31 | | |
| 2.2.1.5 | Persentase Besar kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 20,60% | 30,50% | 47,20% | 28% | 22% | | |
| 2.2.1.6 | Persentase Besar pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | na | na | 91,94% | 97,74% | 93,20% | 100% | belum tercapai (<) |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|----------|--------|--------|--------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.2.1.7 | Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 100% | 100% | 100% | 100% | na | | |
| 2.2.1.8 | Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | na | | |
| 2.2.1.9 | Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | na | na | na | 100% | na | | |
| 2.2.1.10 | Persentase Besaran pencarikerja yang terdaftar yang ditempatkan. | Na | na | 94,50% | 95,30% | 56,20% | 90% | belum tercapai (<) |
| 2.2.2 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR | 8,90 | na | 8,90 | 8,90 | na | | |
| 2.2.2.2 | Rasio KDRT | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | na | | |
| 2.2.2.3 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | na | 18.00 | 17.23 | na | na | | |
| 2.2.2.4 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 52 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=) |
| 2.2.2.5 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=) |
| 2.2.2.6 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=) |
| 2.2.2.7 | Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | na | 47.22.00 | 01.39 | na | na | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|--------|--------|---------|---------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.2.2.8 | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=) |
| 2.2.2.9 | Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD | 103,20 | 102,20 | 115,40 | na | na | | |
| 2.2.2.10 | Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP | 77,91 | 99,41 | 97,95 | na | na | | |
| 2.2.2.11 | Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA | 78,61 | 82,48 | 84,19 | 100,86 | 115,03 | | |
| 2.2.3 | Urusan Pangan | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Ketersediaan pangan utama (Kg/kap/thn) | 110 | 118,28 | 128,22 | 176,35 | 172,63 | | |
| 2.2.3.2 | Ketersediaan Energi (kkl/kap/hari) | 2.602 | 2.710 | 2.842 | 3.186 | 3.142 | | |
| 2.2.3.3 | Ketersediaan Protein (gram/kap/hari) | 63,99 | 68,98 | 73,79 | 78,36 | 73,94 | | |
| 2.2.3.4 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) | 100 | 100 | 70 | 75,75 | 70,58 | | |
| 2.2.4 | Urusan Pertanahan | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | na | 36,98 | 36,97 | 36,97 | 3,93 | | |
| 2.2.5 | Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Indeks Kualitas Air | na | na | 55 | 61,61 | 50,95 | | |
| 2.2.5.2 | Indeks Kualitas Udara | na | na | 90,43 | 94,9 | 96,51 | | |
| 2.2.5.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | na | na | 54,36 | 52,6 | 56,73 | | |
| 2.2.5.4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | na | 63,17 | 63,44 | 70,33 | 70,67 | 75 | belum tercapai (<) |
| 2.2.5.5 | Jumlah Limbah B3 yang dikelola | na | na | na | 123.773 | 651,265 | | |
| 2.2.5.6 | Jumlah Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten | na | na | 15 | 25 | 22 | | |
| 2.2.5.7 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin | na | na | 57 | 54 | 23 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | | | | | | | |
| 2.2.5.8 | Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) | na | na | 2 | 2 | na | | |
| 2.2.5.9 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat | na | na | 35 | 70 | 57 | | |
| 2.2.5.10 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | na | na | 14 | 43 | 22 | | |
| 2.2.5.11 | Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak Lintas kecamatan yang ditangani | na | na | 14 | 13 | 18 | | |
| 2.2.5.12 | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus | na | na | na | na | na | | |
| 2.2.5.13 | Persentase Jumlah Sampah Terkurangi melalui 3R | na | na | 10,50% | 14,12% | 15,50% | | |
| 2.2.5.14 | Persentase Cakupan Area Pelayanan | na | na | 31,87% | 31,87% | 31,87% | | |
| 2.2.5.15 | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | na | na | 64,80% | 65,06% | 68,12% | | |
| 2.2.5.16 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA | na | na | 70% | 70% | 70% | | |
| 2.2.6 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.2.6.2 | Penerapan KTP Nasioanal Bebas NIK | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.2.6.3 | Jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik | 344.732 | 347.822 | 344.278 | 370.090 | 419.275 | | |
| 2.2.6.4 | Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk | 96% | 98% | 92% | na | 108% | 100% | melampaui (>) |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.2.6.5 | Rasio pasangan berakate nikah | 2,29 | 43 | 18,93 | na | na | | |
| 2.2.7 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | |
| 2.2.7.1 | BUM Desa Aktif | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | sesuai (=) |
| 2.2.7.2 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.2.7.3 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | sesuai (=) |
| 2.2.7.4 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | sesuai (=) |
| 2.2.7.5 | Persentase LPM Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.2.7.6 | Persentase PKK Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.2.7.7 | Persentase Posyandu Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.2.8 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | |
| 2.2.8.1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 0,85 | 0,78 | 0,72 | 0,65 | 0,59 | | |
| 2.2.9 | Urusan Perhubungan | | | | | | | |
| 2.2.9.1 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | na | na | na | 276.460 | 150.302 | | |
| 2.2.9.2 | Rasio Izin Trayek | na | 0,000089 | 0,008909 | 0,000903 | 0,000893 | | |
| 2.2.9.3 | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum | 11.470 | 23.033 | 23.033 | 23.147 | 14.893 | | |
| 2.2.9.4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 88 | 97 | 97 | 97 | 98 | | |
| 2.2.9.5 | Persentase Layanan Angkutan Darat | 0,06 | 0,28 | 0,28 | 3,00 | 0,35 | | |
| 2.2.9.6 | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | na | na | na | 6,91 | 57,35 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.2.9.7 | Pemasangan Rambu-rambu | 16,33 | 8,00 | 115,70 | 2,18 | 0,20 | | |
| 2.2.9.8 | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | 0,00552 | 0,00552 | 0,01185 | 0,01002 | 0,01077 | | |
| 2.2.9.9 | Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum | 20.141 | 26.445 | 26.445 | 1.091.610 | 909.552 | | |
| 2.2.9.10 | Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun | 918.663 | 1.041.610 | 965.054 | 1.368.070 | 832.251 | | |
| 2.2.10 | Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 2.2.10.1 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 14,16 | 19,12 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | | |
| 2.2.10.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi desa/kelurahan | na | na | 76,12% | 80,00% | 96,32% | 100% | sesuai (=) |
| 2.2.10.3 | Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | na | na | 24% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.2.10.4 | Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Hp/Mengakses Internet | na | na | 23,25 | 23,25 | 23,25 | | |
| 2.2.10.5 | Persentase/Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet | na | na | 29,96 | 29,96 | 29,96 | | |
| 2.2.10.6 | Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi | na | na | 21,43 | 21,43 | 21,43 | | |
| 2.2.10.7 | Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon | na | na | 1,41 | 1,41 | 1,41 | | |
| 2.2.10.8 | Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Selular | na | na | 64,66 | 64,66 | 64,66 | | |
| 2.2.11 | Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah | | | | | | | |
| 2.2.11.1 | Persentase Koperasi Aktif | 33,91% | 38,45% | 37,99% | 42,33% | 43,70% | | |
| 2.2.11.2 | Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif | 96,62% | 97,58% | 99,38% | 99,39% | 99,36% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.2.11.3 | Persentase BPR/LKM Aktif | 44,84 | 45,45 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|--------|----------|----------|----------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.2.11.4 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 96,45% | 97,43% | 99,40% | 99,41% | 99,38% | 100% | belum tercapai (<) |
| 2.2.12 | Urusan Penanaman Modal | | | | | | | |
| 2.2.12.1 | Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) | na | na | 157 | 180 | 161,00 | | |
| 2.2.12.2 | Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) – Juta Rupiah | na | na | 1.941,75 | 6.693,78 | 5.264,56 | 987,69 | melampaui (>) |
| 2.2.12.3 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | na | na | 26,07 | 18,91 | 20,58 | | |
| 2.2.12.4 | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Milyar Rupiah) | na | na | 420,35 | 4.401,85 | 5.208,74 | | |
| 2.2.13 | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | |
| 2.2.13.1 | Cakupan pembinaan olahraga (%) | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | sesuai (=) |
| 2.2.13.2 | Cakupan pelatih yang bersertifikasi(%) | 79 | 82 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.2.13.3 | Cakupan pembinaan atlet muda (%) | na | na | na | 100, | 100 | 100 | sesuai (=) |
| 2.2.13.4 | Jumlah atlet berprestasi tingkat Nasional | 48 | 49 | 45,00 | 49,00 | na | | |
| 2.2.13.5 | Jumlah altit Berprestasi Tingkat Internasional. | na | na | 6,00 | 1,00 | na | | |
| 2.2.13.6 | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 75 | 80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2.2.13.7 | Persentase wirausaha muda (%) | 70 | 70 | 80,00 | 80,00 | 75,00 | | |
| 2.2.14 | Urusan Statistik | | | | | | | |
| 2.2.14.1 | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.2.14.2 | Buku "PDRB" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.2.14.3 | Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.2.15 | Urusan Persandian | | | | | | | |
| 2.2.15.1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | na | na | 24 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=) |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.2.16 | Urusan Kebudayaan | | | | | | | |
| 2.2.16.1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 6 kegiatan | 7 kegiatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 1 kegiatan | | |
| 2.2.16.2 | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 9 situs | 11 situs | 14 situs | 15 situs | 15 situs | | |
| 2.2.16.3 | Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah | 9 | 11 | 12 | 14 | 26 | | |
| 2.2.16.4 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | 100 | 100 | 116 | 107 | 58 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.2.16.5 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 | | |
| 2.2.17 | Urusan Perpustakaan | | | | | | | |
| 2.2.17.1 | Persentase pengunjung perpustakaan | 26,32 | 33,82 | 46,71 | 52,72 | 10,94 | | |
| 2.2.17.2 | Rasio koleksi buku (%) | 20,45 | 21,47 | 21,12 | 98,47 | na | | |
| 2.2.17.3 | Rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk | 0,021 | 0,024 | 0,026 | 0,032 | 0,052 | | |
| 2.2.18 | Urusan Kearsipan | | | | | | | |
| 2.2.18.1 | Persentase pengelolaan arsip secara baku | 6,8 | 6,7 | 7 | 80 | 80 | | |
| 2.2.18.2 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 0 | 1 Kegiatan | 0 | | |
| 2.3 | Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | | | | |
| 2.3.1 | Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Produksi perikanan | 7.579,63 | 6.966,83 | 6.777,20 | 7.227,69 | 7.013,87 | | |
| 2.3.1.2 | Konsumsi ikan (%) | 38,64 | 39,34 | 40,14 | 40,89 | 40,89 | | |
| 2.3.1.3 | Cakupan bina kelompok nelayan | 38 | 53 | 50 | 80 | 67 | | |
| 2.3.1.4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | 7.171,44 | 6.634,59 | 6.397,67 | 6.262,43 | 5.947,97 | | |
| 2.3.1 | Urusan Pariwisata | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.3.1.1 | Lama kunjungan Wisata | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | | |
| 2.3.1.2 | PAD sektor pariwisata | na | na | na | 50.000.000 | 16.000.000 | | |
| 2.3.1 | Urusan Pertanian | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Produksi Sektor Pertanian (ton) | na | na | 39.534 | 37.985 | 38.786 | | |
| 2.3.1.2 | Produksi Sektor Perkebunan (ton) | na | na | 246.619 | 243.237 | 289.736 | | |
| 2.3.1.3 | Cakupan bina kelompok petani | 100 | 100 | 100 | na | na | | |
| 2.3.1.4 | Nilai Kontribusi (Juta Rupiah) | 11.201.413,5 0 | 11.985.422,00 | 12.256.418,50 | 13.053.199,9 0 | 14.662.023,4 0 | | |
| 2.3.1 | Urusan Perdagangan | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Ekspor Bersih Perdagangan (USD) | 24.039,79 | 290.602,27 | 957.474 | 250.262,690 | na | | |
| 2.3.1 | Urusan Perindustrian | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Cakupan Kelompok Pengrajin (%) | na | na | 70 | 76 | 81 | | |
| 2.4 | Fokus Penunjang Urusan | | | | | | | |
| 2.4.1 | Urusan Perencanaan | | | | | | | |
| 2.4.1.1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.4.1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.4.1.3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.4.1.4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.4.1.5 | Persentase kesesuaian RKPd dengan RPJMD | 71,43 | 88,89 | 81,51 | 100 | 94,54 | 100 | belum tercapai (<) |
| 2.4.1.6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD | 80,36 | 96,02 | 99,86 | 99,89 | 88,06 | | |
| 2.4.2 | Urusan Keuangan | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.4.2.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | sesuai (=) |
| 2.4.2.2 | Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | sesuai (=) |
| 2.4.2.3 | Persentase SILPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | belum tercapai (<) |
| 2.4.2.4 | Persentase SILPA terhadap APBD | 0,24% | 0,42% | 6,13% | 5,3% | 5,5% | 0% | belum tercapai (<) |
| 2.4.2.5 | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksanakan | - | - | - | - | - | | |
| 2.4.2.6 | Persentase belanja pendidikan (20%) | 6,47 | 9,07 | 8,27 | 23,28 | 21,29* | | |
| 2.4.2.7 | Persentase belanja kesehatan (10%) | 6,96 | 6,35 | 9,27 | 10,93 | 12,46* | | |
| 2.4.2.8 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | 1,6:1,5 | 2,26:1 | 1,98:1 | 2,48:1 | 1,13:1 | | |
| 2.4.2.9 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | 00.17 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | | | |
| 2.4.2.10 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | sesuai (=) |
| 2.4.2.11 | Persentase peningkatan PAD | na | -27,66 | 2,73 | 2,73 | -5,05 | 4,57 | belum tercapai (<) |
| 2.4.3 | Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | |
| 2.4.3.1 | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 7,44 | 10,37 | 9,96 | na | na | | |
| 2.4.3.2 | Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | 62,93 | 86,56 | 77,92 | 71 | 48,96 | | |
| 2.4.3.3 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah | 34 | 15 | 40 | 40 | 40 | | |
| 2.4.3.4 | Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah | 2905 | 2885 | 1025 | 1025 | 1025 | | |
| 2.4.3.5 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah | 4521 | 4611 | 4452 | na | na | | |
| 2.4.4 | Urusan Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------|--|-----------------|-------|------|-------|------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.4.4.1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | | |
| 2.4.4.2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 30 | 35 | 75 | 75 | 70 | | |
| 2.4.4.3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | na | na | na | 18 | 42 | | |
| 2.4.4.4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | na | na | na | 18 | 28 | | |
| 2.4.5 | Urusan Pengawasan | | | | | | | |
| 2.4.5.1 | Persentase Tindak Lanjut Temuan | 63,55 | 66,52 | 40 | 65,16 | na | | |
| 2.4.5.2 | Jumlah Temuan BPK | 35,08 | 34,8 | 37,3 | 55,66 | na | | |
| 2.4.5.3 | Persentase Pelanggaran Pegawai (ASN) | na | na | 1,55 | 0,53 | 0,3 | | |
| 2.4.6 | Sekretariat Dewan | | | | | | | |
| 2.4.6.1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.4.6.2 | Tersusun dan Terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |
| 2.4.6.3 | Terintegrasi Program- program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | sesuai (=) |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 2.4.7 | Sekretariat Daerah | | | | | | | |
| 2.4.7.1 | Predikat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis | CC | B | B | B | B | BB | belum tercapai (<) |
| 2.4.7.2 | Prestasi LPPD | T | ST | ST | ST | ST | ST | sesuai (=) |
| 2.4.8 | Kewilayahan | | | | | | | |
| 2.4.8.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 50 | 69,47 | 84,33 | 84,29 | 86,69 | 74,75 | melampaui (>) |
| 3 | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | |
| 3.1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Harga Konstan /Juta Rupiah) | 112,68 | 116,57 | 120,88 | 122,36 | 118,87 | | |
| 3.1.2 | Pengeluaran Pangan (%) | 55,21 | 54,11 | 53,03 | 52,97 | 52,62 | | |
| 3.1.3 | Pengeluaran Non Pangan (%) | 44,79 | 45,89 | 46,97 | 47,03 | 47,38 | | |
| 3.1.4 | Nilai Tukar Petani (NTP) | na | na | 97,7 | 95,59 | 118,77 | 95 | melampaui (>) |
| 3.1.5 | Rasio Exim Terhadap PDRB | 68,92 | 64,26 | 61,65 | 63,12 | 59,73 | | |
| 3.1.6 | Komoditas Unggulan | | | | | | | |
| | Kelapa Sawit | na | 1.215.436 | 1.188.285 | 1.215.440 | na | | |
| | Karet | na | 44.953 | 44.383 | 44.950 | na | | |
| | Kelapa | na | 14.678 | 13.609 | 14.677 | na | | |
| 3.2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | |
| 3.2.1 | Ketaatan Terhadap RTRW | na | 39,05 | 39,05 | na | na | | |
| 3.3 | Fokus Iklim Berinovasi | | | | | | | |
| 3.3.1 | Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk | 16,8 | 10,2 | 11,6 | 10,4 | 13,7 | | |
| 3.4 | Fokus Sumberdaya manusia | | | | | | | |
| 3.4.1 | Kualitas Tenaga kerja (%) | 22,15 | 23 | 23 | 47,53 | 48,38 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | Standar Capaian Kabupaten | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|--|-----------------|------|------|-------|-------|---------------------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 3.4.2 | Rasio Ketergantungan | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | | |
| 3.4.3 | Rasio lulusan S1/S2/S3 | | 23 | 23 | 47,53 | 48,34 | 31,95 | melampaui (>) |

BAB III.

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk digunakan sebagai belanja pendanaan pembangunan.

Oleh karena itu, perlu dicermati terhadap kondisi keuangan masa lalu, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kebijakan dalam pengelolaannya. Di samping itu perlu juga dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib, maupun mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Melalui hasil perhitungan tersebut, akan dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka pengolahan data dan analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap data APBD dan laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya.

1.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah serta neraca daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan terhadap Neraca difokuskan pada perkembangan asset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

1.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

a) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- 2) Dana Transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan daerah lainnya

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel III-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata rata Pertumbuhan |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| PENDAPATAN | | | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 47.854.327.923 | 71.781.060.156 | 65.992.135.999 | 67.049.392.095 | 63.710.380.457 | 5.22 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 31.188.867.752 | 14.565.502.468 | 14.689.253.182 | 10.232.707.278 | 9.387.616.385 | (41.46) |
| Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 21.238.125.981 | 31.492.480.950 | 31.369.321.102 | 28.788.248.654 | 20.920.504.935 | (3.60) |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 98.745.329.314 | 154.026.552.335 | 207.229.800.809 | 120.209.535.005 | 172.141.690.460 | 4.84 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 199.026.650.970 | 271.865.595.908 | 319.280.511.092 | 226.279.883.032 | 266.160.192.237 | 3.88 |
| | | | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | | | |
| TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN | | | | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 1.175.781.702.243 | 1.378.704.957.739 | 1.436.254.223.765 | 1.416.335.599.329 | 1.050.702.831.784 | (4.37) |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 1.088.459.032.938 | 816.180.939.707 | 818.101.260.166 | 1.139.933.590.010 | 678,078,156,631 | (18.25) |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 345.070.716.000 | 345.070.716.000 | 373.268.646.000 | 338.731.609.000 | 24.34 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 68.312.742.000 | 51.401.903.000 | 183.801.494.841 | 262.925.372.294 | 208.140.860.895 | 10.73 |
| Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan | 2.332.553.477.181 | 2.591.358.516.446 | 2.783.227.694.772 | 3.192.463.207.633 | 2.275.653.458.310 | (2.65) |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | - | - | - | - | - | |
| Dana Penyesuaian | 199.687.548.625 | 210.619.354.173 | 144.783.974.996 | 131.071.695.996 | 166.657.936.000 | (7.35) |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 199.687.548.625 | 210.619.354.173 | 144.783.974.996 | 131.071.695.996 | 166.657.936.000 | (7.35) |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat | 2.532.241.025.806 | 2.801.977.870.619 | 2.928.011.669.768 | 3.323.534.903.629 | 2.442.311.394.310 | (2.56) |
| TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 107.213.477.450 | 107.512.319.262 | 105.619.783.671 | 131.841.460.583 | 104.662.859.108 | (1.90) |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata rata Pertumbuhan |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | 37.779.386.335 | 49.426.893.669 | 6.816.000.000 | 7.769.995.000 | 15.820.500.000 | (134.61) |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | - | - | - | - | |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 144.992.863.785 | 156.939.212.931 | 112.435.783.671 | 139.611.455.583 | 120.483.359.108 | 2.06 |
| JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER | 2.677.233.889.591 | 3.017.002.509.143 | 3.040.447.453.439 | 3.463.146.359.212 | 2.562.794.753.416 | (1.1) |
| | | | | | | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | | | |
| Pendapatan Hibah | 4.339.071.046 | | - | 85.045.520.000 - | 113.615.460.000 | 31.29 |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah | | | | | 46.326.720.000 | 25.00 |
| Pendapatan Dana Darurat | - | - | - | - | - | |
| Pendapatan Lainnya | - | - | | - | | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 42.118.457.381 | 49.426.893.669 | | 85.045.520.000 | 159.942.180.000 | 40.40 |
| TOTAL PENDAPATAN | 2.918.378.997.942 | 3.280.209.573.127 | 3.359.727.964.531 | 3.774.471.762.245 | 2.929.311.340.656 | (0.1) |

Data tabel III. 1 memperlihatkan bahwa komponen pendapatan daerah yang mengalami pertumbuhan yang paling tinggi selama kurun waktu 2016-2020 adalah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tumbuh rata-rata sebesar 40,40%. Namun demikian dilihat sisi kontribusinya bagi pendapatan Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan sangat kecil yakni rata-rata sebesar 2,14%. Kemudian komponen pendapatan yang lainnya yang mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu yang sama adalah Pendapatan Asli Daerah, namun pertumbuhan yang dicapai cukup kecil yakni rata-rata sebesar 3,88%.

Berbeda hal dengan dua komponen pendapatan di atas, pada komponen transfer pemerintah pusat yang berasal dana perimbangan selama tahun 2016-2020 mengalami penurunan yakni sebesar rata-rata (2,65%). Penyumbang terbesar penurunan pendapatan dari komponen transfer pemerintah pusat dana perimbangan ini berasal dari dana bagi hasil sumberdaya alam yakni rata-rata turun sebesar (18,25%). Kondisi ini disebabkan karena menurunnya produksi minyak dan harga minyak dipasaran internasional sebagai komoditi sumberdaya alam penyumbang terbesar dari bagi hasil sumberdaya alam di Kabupaten Bengkalis.

Dilihat dari kontribusi pada masing komponen pendapatan secara keseluruhan, transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan memberikan berkontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis yakni rata-rata sebesar 81,26%. Hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Provinsi Riau .

Sementara itu komponen Pendapatan Asli Daerah dalam durasi tahun yang sama memberikan kontribusi yang sangat kecil yakni rata-rata sebesar 7,98 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Bengkalis dilihat dari sisi Keuangan Daerah masih jauh dari mandiri atau dengan kata lain ketergantungan Kabupaten Bengkalis terhadap sumber sumber keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat masih cukup kuat. Kondisi yang demikian tentunya harus menjadi perhatian ke depannya mengingat sumberdaya alam minyak dan gas yang menjadi salah satu sub komponen pendapatan yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dibagi hasilkan dengan Kabupatean Bengkalis adalah merupakan sumberdaya alam yang sulit diperbaharui yang produksinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan

Berkenaan dengan itu pengembangan sumber-sumber pendapatan lainnya terutama pendapatan asli daerah haruslah menjadi perhatian ke depannya. Hal ini mengingat potensi untuk pengembangan tersebut masih cukup banyak. Oleh sebab itu diperlukan komitmen dari semua pihak terutama aparatur birokrasi Pemerintah Daerah melakukan serangkaian inovasi dalam rangka menggali potensi yang ada.

b) Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , menyebutkan bahwa adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non

pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Belanja daerah merupakan bentuk upaya untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Hakekat dari belanja daerah sebagai perwujudan dan amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara umum komponen belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:

- 1) Belanja Operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek langsung yang di dalamnya terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
- 2) Belanja Modal, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari: Belanja Tanah, Belanja, Belanja Peralatan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Asset Tetap Lainnya dan Belanja Asset Lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. , Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
- 4) Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam pengelolaan belanja Pemerintah Daerah dihadapkan pada besarnya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan urusan di satu sisi, sementara di sisi yang lain anggaran yang tersedia sangat terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menetapkan skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran.

Belanja Daerah harus diprioritaskan pada pendanaan pada urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka untuk mencapai standar pelayanan minimal, kemudian barulah untuk pendanaan pencapaian visi dan misi dan urusan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja belanja dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang dapat diwujudkan terhadap anggaran yang disediakan. Semakin besar realisasi belanja semakin baik kinerja suatu daerah dalam menggunakan anggaran. Realisasi belanja daerah tahun 2016-2020 sebagaimana disajikan pada Tabel III.2 berikut:

Tabel III-2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata rata Pertumbuhan |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BELANJA | | | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | | | |
| Belanja Pegawai | 1.046.900.038.190 | 966.190.476.031 | 900.644.081.702 | 1.077.884.549.964 | 967,266,480,083 | (2.66) |
| Belanja Barang dan Jasa | 878.133.119.133 | 899.948.340.587 | 886.830.058.509 | 1.041.509.280.891 | 933,384,530,032 | 1.05 |
| Belanja Subsidi | 4.853.979.665 | 14.561.938.995 | 12.776.416.390 | 10.895.753.608 | 9,618,696,893 | 5.54 |
| Belanja Hibah | 78.442.809.950 | 28.460.755.000 | 46.060.359.285 | 59.946.830.651 | 71,023,667,791 | (24.66) |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | 1.697.500.000 | 0.00 | |
| Jumlah Belanja Operasi | 2.373.545.967.549 | 2.234.571.262.679 | 1.846.310.915.886 | 2.191.933.915.114 | 1,981,293,374,799 | (5.53) |
| BELANJA MODAL | | | | | | |
| Belanja Tanah | 956.105.657 | 801.075.000 | 2.016.855.072 | 9.634.892.400 | 815,248,000 | (240.46) |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 132.791.166.536 | 129.291.601.656 | 143.542.877.947 | 159.074.382.252 | 97,002,850,638 | (11.75) |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 155.829.389.573 | 171.428.935.814 | 201.503.179.612 | 254.922.045.127 | 131,718,395,987 | (12.14) |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 470.585.283.920 | 680.372.459.226 | 551.045.934.750 | 671.190.951.974 | 260,976,621,697 | (32.98) |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.580.999.760 | 390.375.000 | 5.298.501.405 | 13.036.665.825 | 9,816,546,659 | (302.62) |
| Belanja Aset Lainnya | - | - | - | - | 0.00 | - |
| Jumlah Belanja Modal | 765.742.945.446 | 982.284.446.696 | 903.407.348.786 | 1.107.858.937.578 | 500,329,662,982 | (22.41) |
| BELANJA TAK TERDUGA | | | | | | |
| Belanja Tak Terduga | 446.000.000 | 4.000.000 | 253.200.000 | - | 152,938,659,147 | (2,712.89) |
| TOTAL BELANJA | 3.139.734.912.995 | 3.216.859.709.375 | 2.749.971.464.672 | 3.299.792.852.692 | 2,634,561,696,928 | (5.79) |
| TRANSFER | | | | | | |
| Transfer Bagi Hasil ke Desa | - | - | - | - | - | |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata rata Pertumbuhan |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bagi Hasil Pajak | 5.457.999.998 | 5.878.043.115 | 5.042.793.908 | 6.654.649.412 | 4,915,347,049 | (5.15) |
| Bagi Hasil Retribusi | 1.541.649.978 | 1.191.820.763 | 1.171.690.615 | 1.114.409.571 | 763,602,328 | (20.54) |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - | | - | | |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 365.216.020.611 | 325.409.752.066 | 401.404.742.296 | 448.416.849.050 | 348,231,605,248 | (2.90) |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | | | 1.481.843.000 | 1.508.127.500 | | 25.44 |
| Jumlah Transfer | 372,215,670,587 | 332,479,615,944 | 409.101.069.819 | 457.694.035.533 | 353,910,554,625 | 2.97 |
| TOTAL BELANJA DAN TRANSFER | 3.146.734.562.971 | 3.223.929.573.253 | 3.159.072.534.491 | 3.757.486.888.225 | 2,988,472,251,553 | (2.37) |

Mencermati data yang disajikan pada tabel III.2 bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 realisasi belanja daerah Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan rata-rata sebesar (2,37%). Penurunan realisasi belanja ini sejalan dengan menurunnya kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah. Penurunan ini disebabkan menurunnya pendapatan daerah yang diterima Kabupaten Bengkalis.

Dilihat dari masing-masing komponen belanja daerah, komponen belanja transfer mengalami pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun yaitu tumbuh rata-rata sebesar 20,14%. Tingginya pertumbuhan belanja transfer ini disebabkan karena adanya kebijakan bantuan keuangan kepada desa yang dimulai pada tahun 2018 sebagai pelaksanaan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa..

Selanjutnya komponen belanja modal, dalam kurun waktu sama mengalami penurunan secara signifikan, yakni turun rata-rata sebesar (22,41%). Penurunan ini disumbangkan dari semua sub komponen belanja modal. Faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut karena menurunnya kapasitas kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan belanja. Kebijakan yang harus diambil atas menurunnya kemampuan pendanaan ini yang berdampak pada menurunnya belanja modal tersebut adalah dengan memprioritaskan belanja modal yang benar benar menyentuh langsung masyarakat khususnya pada belanja modal jalan, jembatan, irigasi dan jaringan. Di samping upaya lain yang harus dilakukan dengan mencari sumber pendanaan lain misalnya melalui APBN, CSR dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan komponen belanja modal, belanja operasi juga mengalami penurunan rata-rata sebesar (5,53%). Penurunan pada belanja operasi ini berasal dari penurunan belanja pegawai .

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Realiasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup besar rata-rata sebesar 327%. Penyumbang peningkatan tersebut semuanya berasal dari Silpa dengan rata rata peningkatan sama dengan

peingkatan penerimaan. Berbeda dengan penerimaan pembiayaan, pada pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan rata-rata sebesar (50%) Penurunan pengeluaran pembiayaan ini adalah karena pengeluaran untuk penyertaan modal hanya dilakukan pada tahun 2016 dan tahun tahun 2019 . Sementara pada tahun 2017, 2018 dan 2020 tidak ada penyertaan modal pada pengeluaran pembiayaan lainnya. Secara lebih rinci pembiayaan dapat dilihat pada Tabel III-3. berikut:

Tabel III-3 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata rata Pertumbuhan |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| PEMBIAYAAN | | | | | | |
| PENERIMAAN | | | | | | |
| Penggunaan SiLPA Tahun Lalu | 280.383.249.620 | 9.909.227.210 | 14.845.655.400 | 215.501.085.439 | 222,090,595,626 | 327% |
| Pencairan Dana Cadangan | | - | - | - | - | 0 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | - | - | - | - | 0 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | | - | - | - | - | 0 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | - | - | - | - | 0 |
| Penerimaan Piutang Daerah | | - | - | - | - | 0 |
| Total Penerimaan | 280.383.249.620 | 9.909.227.210 | 14.845.655.400 | 215.501.085.439 | 222,090,595,626 | 327% |
| PENGELUARAN | | | | | | 0 |
| Pembentukan Dana Cadangan | | - | - | - | - | 0 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 4.339.071.046 | - | - | 10.000.000.000 | | (50%) |
| Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri | - | - | - | - | - | 0 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - | 0 |
| ADB | - | - | - | - | - | 0 |
| Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga | - | - | - | - | - | 0 |
| Total Pengeluaran | 4.339.071.046 | - | - | 10.000.000.000 | - | (50) |
| | - | - | | | - | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 276.044.178.574 | 9.909.227.210 | 14.845.655.400 | 205.501.085.439 | 222,090,595,626 | 311,43% |

1.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan daerah yang sangat penting bagi manajemen Pemerintahan Daerah, karena dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan informasi tersebut diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih terarah sehingga pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Neraca daerah berisikan posisi asset daerah, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal diterbitkan neraca tersebut.

Selama kurun waktu 2016-2020 asset yang tercatat dalam Neraca Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0.24%. Di antara komponen asset yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah asset lancar yang dalam kurun waktu yang sama tumbuh rata-rata sebesar 81,55%. Penyumbang terbesar meningkatnya asset lancar ini berasal dari kas yang tumbuh rata-rata sebesar 316,27% dan piutang rata-rata sebesar. Pertumbuhan kas yang cukup besar ini menyebabkan jumlah kas dan piutang ini semakin meningkat. Kondisi yang demikian menguntungkan dari sisi likuiditas, namun dari sisi efektivitas, justru menunjukkan belum maksimalnya tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyerap anggaran.

Berbeda dengan asset lancar pada aset tetap dalam kurun waktu yang sama mengalami penurunan yakni rata-rata sebesar (1,60%). Menurunnya tingkat pertumbuhan asset tetap ini disebabkan karena rendahnya menurunnya konstruksi dalam pengerjaan dan kecilnya pertumbuhan asset tetap yang lain sementara penyusutan terhadap asset semakin meningkat. Namun demikian walaupun mengalami penurunan dari sisi nilai nominal relatif cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari proporsi asset tetap dari keseluruhan asset selama 5 tahun tahun yang tercatat rata-rata sebesar 87,65%. Keadaan ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar komponen asset berasal dari asset tetap.

Pada Investasi Jangka Panjang selama kurun waktu yang sama juga mengalami penurun rata-rata sebesar (0,03%). Menurunnya tingkat pertumbuhan pada investasi jangka panjang ini disebabkan menurunnya penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan investasi non permanen lainnya,

Selanjutnya kewajiban daerah pada neraca daerah, selama kurun waktu 2016-2020 tumbuh secara signifikan yakni ,rata-rata turun sebesar 17,07%. Penyumbang terbesar pertumbuhan pada kewajiban daerah ini befrasal dari pendapatan yang diterima di muka yakni rata-rata sebesar 7.919 sementara utang pihak ketiga mengalami penurunan rata-rata sebesar (36,63%).

Sementara itu Ekuitas dana selama kurun waktu 2016-2020 sedikit mengalami peningkatan yakni tumbuh rata-rata sebesar 1,33%. Peningkatan ekuitas dana ini walapupun tidak signifikan namun menjadi hal yang positif karena meningkatkan kemampuan daerah iak untuk mendanai sendiri kegiatan pembangunan daerah. Secara lebih rinci neraca daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-4 Neraca Daerah Kabupaten Bengkulu 2016-2020.

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ASET | | | | | | |
| ASET LANCAR | 178.761.889.848 | 143.003.899.085 | 564.853.075.386 | 545.546.098.281 | 843,623,800,019 | 81.55 |
| Kas | 8.024.592.459 | 16.770.602.244 | 215.501.085.439 | 222,093,376,548. | 151,011,573,806 | 316.27 |
| Piutang | 33.395.698.734 | 59.355.653.029 | 52.716.473.669 | 556,315,001,209 | 471,432,588,645 | 258.07 |
| Persediaan | 137.341.598.655 | 66.877.643.812 | 296.635.516.277 | 260,803,124,727 | 221,179,637,567 | 66.40 |
| ASET TETAP | 8.588.657.399.844 | 8.122.815.483.071 | 7.788.966.559.250 | 8.101.303.936.229 | 8,028,790,937,646 | (1.60) |
| Tanah | 1.010.119.701.258 | 825.547.349.302 | 980.699.224.385 | 1,064,387,219,001 | 1,121,014,570,791 | 3.61 |
| Peralatan dan mesin | 1.349.762.741.113 | 1.390.105.128.620 | 1.472.013.838.063 | 1,604,166,831,891 | 1,720,978,286,828 | 6.29 |
| Gedung dan bangunan | 2.776.339.095.048 | 2.634.431.787.564 | 2.757.470.425.996 | 2,950,718,698,715 | 3,051,992,554,203 | 2.49 |
| Jalan, irigasi, dan jaringan | 6.594.724.252.382 | 7.012.556.778.577 | 7.504.157.593.018 | 8,226,825,730,072 | 8,467,252,134,876 | 6.46 |
| Aset tetap lainnya | 75.905.662.296 | 75.261.182.687 | 96.229.032.555 | 117,319,205,805 | 126,159,716,170 | 14.11 |
| Konstruksi dalam pengerjaan | 1.091.875.458.051 | 1.044.825.174.290 | 787.126.441.190 | 807,736,619,379 | 805,839,613,132 | (6.65) |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (4.310.069.510.305) | (4.859.911.917.969) | (5.808.729.995.958) | (6,535,032,096,29) | (7,264,445,938,355) | 13.99 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 519.622.790.517 | 513.928.806.082 | 510.583.993.890 | 519,711,981,948 | 518,962,048,764 | (0.03) |
| ASET LAINNYA | 142.543.662.857 | 265.862.591.099 | 173.383.076.011 | 115,535,058,649 | 115,464,818,221 | 4.51 |
| Tagihan penjualan angsuran | | | | | | |
| Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | 6.309.966.251 | 6.306.966.251 | 6.306.966.251 | 6,306,966,250 | 6,306,966,250. | (0.01) |
| Kemitraan dengan pihak ketiga | 488.750.000 | 488.750.000 | 488.750.000 | 488,750,000 | 488,750,000. | 0.00 |
| Aset tak berwujud | 13.780.180.945 | 10.278.024.225 | 8,020,407,736 | 6,811,093,726 | 6,304,786,148 | (13.70) |
| ASET LAIN-LAIN | 121.964.765.662 | 248.788.850.624 | 158.566.952.024 | 101,928,248,672 | 102,364,315,822 | 10.06 |
| JUMLAH ASET DAERAH | 9.429.585.743.067 | 9.045.610.779.336 | 9.037.786.704.536 | 9,910,580,751,653 | 9,506,841,604,651. | 0.24 |
| KEWAJIBAN | 435.150.109.351 | 419.076.736.805 | 41.879.286.008 | 24,559,872,739 | 81,622,540,156 | 17.07 |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 435.150.109.351 | 419.076.736.805 | 41.879.286.008 | 24,559,872,739. | 81,622,540,156 | 17.07 |
| Utang perhitungan pihak ketiga | 2.805.542 | 8.268.829 | 4.724.631 | 2.780.922 | . | 2.68 |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Uang muka dari kas daerah | | | | | | - |
| Pendapatan diterima dimuka | 526.494.340 | 491.345.822 | 204.861.283 | 180,617,509 | 57,533,376,593 | 7,919.22 |
| UTANG PIHAK KETIGA | 431.600.514.949 | 415.591.519.286 | 40.393.493.556 | 21,185,961,691 | 21,189,093,569 | (36.63) |
| UTANG PENDEK LAINNYA | 3.020.294.520 | 2.985.602.868 | 1.276.206.538 | 3,190,512,616 | 2,900,069,994 | 20.61 |
| UTANG PINJAMAN LUAR NEGERI | | | | | | |
| EKUITAS DANA | 8.954.673.473.464 | 8.671.038.043.079 | 8.995.912.143.159 | 9,886,020,878,913 | 9,425,219,064,495 | 1.33 |
| EKUITAS DANA LANCAR | | | | | | |
| SILPA | | | | | | |
| Cadangan piutang | | | | | | |
| Cadangan persediaan | | | | | | |
| EKUITAS DANA INVESTASI | | | | | | |
| Diinvestasikan dalam aset tetap | | | | | | |
| Diinvestasikan dalam aset lainnya | | | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 9.389.823.582.814 | 9.090.114.779.884 | 9.037.791.429.167 | 9,910,580,751,653 | 9,506,841,604,651 | 0.34 |

Analisis terhadap neraca daerah dapat mengetahui fundamental keuangan Pemerintah Daerah. Analisis yang dilakukan melalui analisis rasio-rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Rasio keuangan dimaksud terdiri dari tiga jenis yaitu:

- 1) Rasio likuiditas, yaitu analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat.
- 2) Rasio aktivitas, adalah rasio untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintahan. Rasio ini terdiri dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.
- 3) Rasio solvabilitas (leverage), adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total asset dan rasio total hutang terhadap modal.

Adapun rasio-rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel III-5 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2018-2020**

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---|-------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| A. | Rasio Likuiditas | | | |
| 1. | Rasio lancar (current ratio) | 0.341 | 13.488 | 19.796 |
| 2. | Rasio cepat (quick ratio) | 0.181 | 6.404 | 9.652 |
| B. | Rasio Solvabilitas | | | |
| 1. | Rasio total hutang terhadap total asset | 0.046 | 0.004 | 0.003 |
| 2. | Rasio hutang terhadap modal | 0.048 | 0.004 | 0.003 |
| C. | Rasio Aktivitas | | | |
| 1. | Rata-rata umur piutang (Hari) | | | |
| 2. | Rata-rata umur persediaan (Hari) | | | |

Sumber: Data Olahan.

Merujuk pada Tabel III-5 di atas secara ringkas dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- 1) Rasio Lancar (Current Ratio) menunjukkan selama kurun waktu 3 tahun menunjukkan tren yang semakin meningkat dari 0,341 pada tahun 2018 meningkat menjadi 13.488 pada tahun 2018. Keadaan ini terus berlanjut pada tahun 2020 yakni meningkat menjadi 19,796. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Pada tahun 2019 rasio lancarnya sebesar 19,986 yang berarti bahwa Rp.1 utang jangka pendek dijamin dengan Rp. 19,796 asset lancar.
- 2) Rasio Cepat (Quick Ratio) selama 3 tahun juga menunjukkan tren yang semakin membaik dari 0.181 pada tahun 2018 meningkat menjadi 6.404 pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 9.652. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan asset lancar dikurangi persediaan semakin membaik.
- 3) Rasio Hutang terhadap Aset (Debt Ratio) Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari 0.046 pada tahun 2018 meningkat menjadi 0.003 pada tahun 2019. Artinya pada tahun 2018 hutang sebesar Rp. 0,046 dijamin dengan Rp. 1 rupiah asset, yang kemudian pada tahun 2020 meningkat dimana Rp. 0.003 hutang dijamin dengan Rp. 1 asset. Ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dari sisi solvabilitas cukup baik.
- 4) Rasio Hutang terhadap Modal (Total Debt Equity Ratio) selama kurun waktu 3 tahun terakhir juga menunjukkan tren yang semakin membaik dari 0.048 tahun 2018 meningkat menjadi 0.003 pada tahun 2020. Ini berarti bahwa pada tahun 2018 hutang

sebesar Rp 0,048 dijamin dengan Rp. 1 modal, kemudian meningkat dimana hutang sebesar Rp 0,003 diajmin dengan Rp. 1 modal.

1.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

1.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.

a) Proporsi Realisasi Belanja

Dalam struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Masing-masing jenis belanja mendapatkan alokasi, yang mencerminkan kebijakan daerah dalam belanja. Adapun realisasi Belanja Daerah selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016–2020 secara nominal dapat dilihat pada Tabel III-6 berikut ini:

Tabel III-6 Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2016-2020 Kabupaten Bengkulu

| Uraian | Tahun | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Rp. | % |
| BELANJA DAERAH | 3,146,734,562,971 | | 3,223,929,573,253 | 100 | 3,159,072,534,491 | 100 | 3,757,486,888,225 | 100 | 2,988,472,251,554 | 100 |
| BELANJA OPERASI | 2,373,545,967,549 | 75.43 | 2.234.571.262.679 | 69,31 | 1,846,310,915,886 | 58.44 | 2,191,933,915,114 | 58.34 | 1,981,293,374,799 | 66.30 |
| Belanja Pegawai | 1,046,900,038,190 | 33.27 | 966.190.476.031 | 29.96 | 900.644.081.702 | 28.51 | 1.077.884.549.964 | 28.69 | 967,266,480,083 | 32.37 |
| Belanja Barang dan Jasa | 878,133,119,133 | 27.91 | 899.948.340.587 | 27.91 | 886.830.058.509 | 28.07 | 1.041.509.280.891 | 27.72 | 933,384,530,032 | 31.23 |
| Belanja Subsidi | 4,853,979,665 | 0.15 | 14.561.938.995 | 0.45 | 12.776.416.390 | 0.40 | 10.895.753.608 | 0,28 | 9,618,696,893 | 0.32 |
| Belanja Hibah | 78,442,809,950 | 2,49 | 28.460.755.000 | 0.88 | 46.060.359.285 | 1.45 | 59.946.830.651 | 1.60 | 71,023,667,791 | 2.38 |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | -- | 0.00 | - | 0.0 | 1.697.500.000 | 0.05 | - | 0.0 |
| BELANJA MODAL | 765,742,945,446 | 24.33 | 982.284.446.696 | 30.46 | 903.407.348.786 | 28.59 | 1.107.858.937.578 | 29.48 | 500,329,662,983 | 16.74 |
| Belanja Tanah | 956,105,657 | 0.03 | 801.075.000 | 0.02 | 2.016.855.072 | 0.06 | 9.634.892.400 | 0.26 | 815,248,000 | 0.03 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 132,791,166,536 | 4.22 | 129.291.601.656 | 4.01 | 143.542.877.947 | 4.54 | 159.074.382.252 | 4.23 | 97,002,850,638 | 3.25 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 155,829,389,573 | 4.95 | 171.428.935.814 | 5.31 | 201.503.179.612 | 6.37 | 254.922.045.127 | 6.78 | 131,718,395,988 | 4.41 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 470,585,283,920 | 14.95 | 680.372.459.226 | 21.10 | 551.045.934.750 | 17.44 | 671.190.951.974 | 17.86 | 260,976,621,698 | 8.73 |
| Belanja Asset Tetap Lainnya | 5,580,999,760 | 0.18 | 390.375.000 | 0.01 | 5.298.501.405 | 0.16 | 13.036.665.825 | 0.35 | 9,816,546,659 | 0.33 |
| BELANJA TAK TERDUGA | | | | | | | | | | |
| Belanja Tak Terduga | 446,000,000 | 0.01 | 4.000.000 | 0.00 | 253.200.000 | 0.008 | - | | 152,938,659,147 | 5.12 |
| BELANJA TRANSFER | 372,215,670,587 | 11.83 | 332,479,615,944 | 10.31 | 409,101,069,819 | 12.95 | 457,694,035,533 | 12.18 | 353,910,554,625 | 11.84 |

b) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Penyediaan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah adalah rangka untuk menjamin terlaksananya secara baik pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Secara lebih rinci belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bengkalis

| No | Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) (a) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b) | Prosentase (a)/(b)x100% |
|----|---------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | Tahun anggaran 2017 | 966.190.476.031 | 3.223.929.573.253 | 29,97 |
| 2 | Tahun anggaran 2018 | 900.644.081.702 | 3.159.072.534.491 | 28,51 |
| 3 | Tahun anggaran 2019 | 1.077.884.549.964 | 3.767.486.888.225 | 28,61 |
| 4 | Tahun anggaran 2020 | 858.289.230.646 | 2,988,472,251,554 | 28,72 |

Data tabel III-7 di atas memperlihatkan bahwa secara nominal selama kurun waktu 3 tahun terakhir belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis berfluktuasi dengan menunjukkan kecenderungan meningkat pada 2 tahun terakhir. Namun demikian dilihat dari proporsinya terhadap total pengeluaran daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur ini disebabkan meningkatnya total belanja secara keseluruhan lebih besar dibandingkan meningkatnya belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara keseluruhan rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 4 tahun adalah sebesar 28,95% dari total belanja. Keadaan ini menunjukkan belanja daerah sudah relatif baik, karena proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tidak mendominasi dalam belanja daerah.

1.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi dalam rangka menutup defisit data menyalurkan surplus. Analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, analisis ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Silpa tahun lalu, penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan maupun penjualan asset yang dipisahkan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan adalah anggaran hutang, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-8 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020
(dalam Jutaan)**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Realisasi Pendapatan Daerah | 2.880.599 | 3.230.782 | 3.359.727 | 3.774.471 | 2.929.311 |
| Dikurangi realisasi: | | | | | |
| Belanja Daerah | 3.146.734 | 3.223.929 | 3.159.072 | 3.757.486 | 2,988,472 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4,339 | - | - | 10,000 | - |
| Defisit/surplus riil | (270,474) | 6,853 | 200,655 | 6,984 | (59.161) |

Merujuk pada data tabel III-8 di atas diketahui bahwa bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat defisit anggaran pada 2 tahun yakni tahun 2016 dan 2020. Artinya dalam 2 tahun tersebut jumlah belanja lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Kemudian 3 tahun berikutnya yakni 2017 s.d 2019, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu, berada pada posisi surplus yakni jumlah pendapatan melebihi dari jumlah belanja.

Defisit yang terjadi 2 tahun pertama ditutupi dengan melakukan kebijakan penganggaran memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan pencarian kembali dana cadangan. Secara lebih jelas komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Bengkulu 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam jutaan)

| NO | URAIAN | Tahun Anggaran | | | | |
|--------------------|---|----------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | PENDAPATAN | 2.880.599 | 3.230.782 | 3.359.727 | 3.774.471 | 2,929,311 |
| B | BELANJA | 3.146.734 | 3.223.929 | 3.159.072 | 3.757.486 | 2,988,472 |
| C | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 4,339 | | | 10,000 | - |
| A-(B+C) | DEFISIT RIIL | (270,474) | 6,853 | 200,655 | 6,984 | (59.161) |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 280,383 | 9,909 | 14,845 | 215,501 | 222,090 |
| | Pencairan Dana Cadangan | | | | | |
| | Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang | - | - | - | - | - |
| D | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 280,383 | 9,909 | 14,845 | 215,501 | 222,090 |
| D+ DEFISIT RIIL | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 9,909.23 | 16,762.33 | 215,501.09 | 222,485.96 | 162.929 |

Dari tabel III-9 dapat dicermati bahwa SiLPA Kabupaten Bengkulu menunjukkan tren yang berfluktuasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran perlu menjadi perhatian.

Selanjutnya defisit riil yang terjadi pada tahun 2016 dan 2020 ditutupi dengan Silpa tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun anggaran 2017 dan 2019 realisasi anggaran APBD Kabupaten Bengkulu berada pada posisi surplus, dimana realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja sehingga realisasi pembiayaan pada tahun 2016 dan 2020 tidak digunakan untuk menutup defisit. Adapun secara rinci komposisi penutup defisit riil seperti terlihat pada tabel berikut

**Tabel III-10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkulu
(dalam %)**

| No. | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | | | |
|-----|---|----------------------------------|------|------|------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 96,46 | - | - | | 26,63 |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | | |
| 3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | - | - | - | | |
| 4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | | |
| 5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | | |
| 6. | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | | |
| 7. | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | - | - | - | | |

Data tabel III.11 di atas memberikan informasi bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kondisi keuangan Kabupaten Bengkulu berada pada posisi surplus, dimana jumlah realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sehingga dengan demikian SiLPA yang dimiliki pada tahun tersebut tidak dipergunakan untuk menutupi defisit riil. Sementara itu tahun 2016 sebesar 96,46% dari Silpa tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 26,63% Silpa digunakan untuk menutupi defisit.

1.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah lima tahun ke depan.

1.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah adalah untuk memperkirakan besaran kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah 5 tahun ke depan. Proyeksi pendapatan daerah merupakan rujukan untuk menentukan kapasitas keuangan daerah dan sebagai dasar untuk membuat perkiraan besaran belanja daerah untuk 5 tahun ke depannya.

Pada dasar proyeksi pendapatan dan belanja untuk lima tahun ke depan berdasarkan pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja selama lima tahun kebelakang. Di samping rata-rata pertumbuhan, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi ke depan yang mempengaruhi pendapatan daerah. proyeksi untuk lima tahun ke depan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja, dan proteksi kemampuan kapasitas daerah untuk mendanai pembangunan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Proyeksi Pendapatan

Proyeksi terhadap pendapatan daerah dalam hal ini berpedoman kecenderungan ekonomi saat ini dan ke depannya. Perekonomian saat ini dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan sebagai dampak dari pandemik *Covid-19* yang diperkirakan akan berkontribusi bagi penurunan aktivitas perekonomian. Namun demikian saat ini Pemerintah telah sedang melakukan program vaksinasi secara massal dan menerapkan PPKM untuk mengatasi penyebaran *Covid-19*. Kondisi ini diharapkan akan dapat menurunkan penyebaran *Covid-19*. Sehubungan dengan tersebut pada tahun 2021 diperkirakan ekonomi akan masuk pada masa pemulihan dan bergerak tumbuh walaupun masih lambat. Berkenaan dengan hal itu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan kembali mengalami pertumbuhan walaupun relatif kecil, dan begitu juga pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Bengkalis.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis ke depannya harus ditingkatkan secara optimal, karena pada dasarnya potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Bengkalis cukup potensial. Oleh sebab itu upaya-upaya untuk menggali potensi PAD, dengan berbagai kebijakan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi menjadi salah satu kebijakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut di antaranya melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, yang sudah lama tidak dilakukan penyesuaian sejak dialihkannya pajak ini dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Perbaikan administrasi perpajakan daerah untuk semua jenis pajak untuk memperkuat basis pajak daerah seperti identifikasi subjek dan objek pajak, perbaikan cara penghitungan, penetapan dan memperkuat pengawasan. Begitu juga dengan sumber PAD lainnya, seperti pendapatan dari retribusi daerah akan dilakukan perbaikan administrasi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana daerah akan menambah penyertaan modal daerah secara selektif dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap BUMD yang ada, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penggalian potensi PAD dengan kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi menjadikan hal yang sangat strategis dilakukan dalam mewujudkan kemadirian daerah. Di samping itu Pendapatan dari transfer diproyeksikan masih tetap dominan dalam pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis dan akan terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Dengan kebijakan penggalian potensi PAD dan semakin membaiknya perekonomian nasional diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis seperti terlihat pada tabel III-11.

2) Proyeksi Belanja

Proyeksi belanja dilakukan berdasarkan pertumbuhan proyeksi dari pendapatan. Artinya besaran belanja sangat tergantung pada perkiraan pendapatan daerah. Pada tahun 2021-2026 pendapatan daerah diproyeksikan meningkat maka belanja daerah pada juga diproyeksi meningkat. Pada tahun 2021-2026 komponen belanja transfer diperkirakan akan naik rata-rata sekitar 7,66%. Besarnya peningkatan belanja transfer ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adanya kebijakan bantuan keuangan terhadap Desa sebesar Rp. 1 milyar setiap desa yang mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya komponen Komponen belanja operasi diperkirakan naik rata-rata sekitar sebesar 1,525%. Belanja Modal juga diperkirakan akan meningkat sebesar 9,84%.

Berdasarkan besaran perkiraan peningkatan pendapatan dan belanja tersebut untuk periode RPJMD 2021-2026 dapat dilihat perkiraan belanja seperti pada tabel III-12.

3) Proyeksi Pembiayaan.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Bengkalis pada dasar adalah untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu. Disamping itu kebijakan pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komponen dalam pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan daerah yang akan dilakukan Kabupaten Bengkalis pada pengeluaran pembiayaan dalam periode RPJMD 2021-2026 adalah melakukan investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMD yang akan dilakukan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Lebih rinci proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel III.13.

Tabel III-11 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (Rupiah dalam jutaan)

| No | Uraian | Tahun Dasar | Proyeksi Tahun Rencana (Rp) | | | | |
|--------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | PENDAPATAN | 2,929,311,34 | 3,209,562.17 | 3,372,741.30 | 3,437,162.86 | 3,505,140.45 | 3,602,117.96 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 266,160,19 | 355,695.30 | 386,603.16 | 417,820.77 | 452,195.54 | 504,843.05 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 63,710,38 | 89,252.00 | 105,504.00 | 121,329.60 | 139,529.04 | 160,458.40 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 9,387,62 | 20,673.81 | 22,741.19 | 25,015.31 | 27,516.84 | 30,268.53 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 20,920,50 | 34,000.00 | 36,000.00 | 38,000.00 | 40,000.00 | 42,000.00 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 172,141,69 | 211,769.49 | 222,357.97 | 233,475.86 | 245,149.66 | 272,116.12 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 2,562,794,75 | 2,853,866.87 | 2,986,138.14 | 3,019,342.08 | 3,052,944.91 | 3,086,951.96 |
| 2.1 | Transfer Dana Perimbangan | 2,275,653,46 | 2,532,467.19 | 2,651,882.47 | 2,678,401.30 | 2,705,185.31 | 2,742,560.13 |
| 2.1.2 | Dana Bagi hasil pajak | 1,050,702,83 | 1,182,067.11 | 1,247,466.39 | 1,259,941.06 | 1,272,540.47 | 1,291,628.58 |
| 2.1.3 | Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam | 678,078,156 | 746,580.64 | 776,443.87 | 784,208.31 | 792,050.39 | 803,931.15 |
| 2.1.4 | Dana alokasi umum | 338,731,61 | 373,021.38 | 387,942.23 | 391,821.65 | 395,739.87 | 399,697.27 |
| 2.1.5 | Dana alokasi khusus | 208,140,86 | 230,798.06 | 240,029.98 | 242,430.28 | 244,854.58 | 247,303.13 |
| 2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 166,657,94 | 184,224.69 | 191,593.68 | 195,425.55 | 199,334.06 | 203,320.75 |
| 2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | | | - | - | - | |
| 2.2.1 | Dana penyesuaian | 166,657,93 | 184,224.69 | 191,593.68 | 195,425.55 | 199,334.06 | 203,320.75 |
| 2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 120,483,356 | 137,174.99 | 142,661.99 | 145,515.23 | 148,425.53 | 151,394.05 |
| 2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 104,662,86 | 119,342.24 | 124,115.93 | 126,598.25 | 129,130.21 | 131,712.82 |
| 2.3.1 | Bantuan Keuangan Provinsi | 15,820,50 | 17,832.75 | 18,546.06 | 18,916.98 | 19,295.32 | 19,681.23 |
| 2.3.2. | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | | | |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lainnya | 159,942,18 | | | | | |
| 3.1 | Pendapatan Hibah | 113,615,46 | | | | | |
| 3.1. | Pendapatan Hibag dari Daerah | 46,326,72 | | | | | |
| 3.2 | Pendapatan Dana Darurat | | | | | | |
| 3.3 | Pendapatan Lainnya | | | | | | |

Tabel III-12 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan)

| Uraian | Tahun Dasar | Proyeksi Tahun Rencana (Rp) | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| BELANJA | | | | | | |
| BELANJA OPERASI | 1.981.293,37 | 2.121.326,83 | 2.131.974,59 | 2.142.675,99 | 2.153.431,32 | 2.178.210,90 |
| Belanja Pegawai | 967.266,48 | 1.067.530,14 | 1.072.867,79 | 1.078.232,13 | 1.083.623,29 | 1.089.041,41 |
| Belanja Barang dan Jasa | 933.384,53 | 973.638,57 | 978.506,76 | 983.399,29 | 988.316,29 | 1.005.257,87 |
| Belanja Subsidi | 9.618,70 | 8.224,01 | 8.306,25 | 8.389,31 | 8.473,21 | 8.557,94 |
| Belanja Hibah | 71.023,67 | 43.129,1 | 43.344,76 | 43.561,48 | 43.779,29 | 45.968,25 |
| Belanja Bantuan Sosial | | 28.805,00 | 28.949,03 | 29.093,77 | 29.239,24 | 29.385,43 |
| BELANJA MODAL | 500.329,66 | 732.836,28 | 757.999,22 | 784.305,51 | 811.811,19 | 881.328,07 |
| Belanja Tanah | 815,25 | 237,35 | 239,72 | 242,12 | 244,54 | 246,99 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 97.002,85 | 110.096,88 | 111.197,85 | 112.309,83 | 113.432,93 | 119.567,26 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 131.718,40 | 176.637,70 | 178.404,08 | 180.188,12 | 181.990,00 | 188.809,90 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 260.976,62 | 442.742,09 | 464.879,20 | 488.123,16 | 512.529,32 | 568.155,79 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 9.816,55 | 3.122,25 | 3.278,36 | 3.442,28 | 3.614,39 | 4.795,12 |
| Belanja Aset Lainnya | | | | | | |
| BELANJA TAK TERDUGA | | 19.599,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Belanja Tak Terduga | 152.938,66 | 19.599,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL BELANJA | 2.634.561,70 | 2.873.762,30 | 2.899.973,81 | 2.936.981,51 | 2.975.2421,51 | 3.016.785,96 |
| TRANSFER | 353.910,55 | 385.163,44 | 513.400,12 | 525.916,25 | 528.344,14 | 530.808,09 |
| Transfer Bagi Hasil ke Desa | - | | | | | |
| Bagi Hasil Pajak | 4.915,35 | 8.655,15 | 9.087,91 | 9.542,30 | 10.019,41 | 10.520,39 |
| Bagi Hasil Retribusi | 763,60 | 1.467,83 | 1.541,22 | 1.618,29 | 1.699,20 | 1.784,16 |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | | | | | |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 348.231,61 | 377.400,12 | 379.287,12 | 381.183,55 | 383.089,47 | 385.004,92 |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | - | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| TOTAL BELANJA DAN TRANSFER | 2.988.472,25 | 3.387.162,41 | 3.425.890,06 | 3.465.325,65 | 3.506.050,60 | 3.602.848,44 |
| SURPLUS (DEFISIT) | (16.984,87) | (177.600,24) | (53.148,76) | (28.162,79) | (910,15) | (730,48) |

Tabel III-13 Proteksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam Jutaan)

| Uraian | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| PEMBIAYAAN | | | | | |
| PENERIMAAN | 208,000.00 | 74,000.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 |
| Penggunaan SiLPA Tahun Lalu | 208,000.00 | 74,000.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | 1,000,00- |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | -- | - |
| Penerimaan Piutang Daerah | - | - | -- | - | - |
| Total Penerimaan | | | | | |
| PENGELUARAN | | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 30,000.00 | 20,000,00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- |
| Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri | | | | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | |
| ADB | | | | | |
| Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga | | | | | |
| Total Pengeluaran | | | | | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 178,000.00 | 54,000.00 | 29,000.00 | 1,000.00 | 1,000,00 |

1.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu untuk kurun waktu 6 tahun mendatang 2021-2026, diperkirakan semakin meningkat. Peningkatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah. Sedangkan SILPA diperkirakan semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2016-2020. Kemudian selama 4 tahun yakni 2022 -2025 Pemerintah Kabupaten Bengkulu merencanakan akan melakukan penyertaan modal kepada BUMD dalam rangka untuk mendorong peningkatan PAD dan perekonomian daerah. Di samping itu jika kondisi keuangan tahun berjalan semakin membaik Pemerintah Kabupaten Bengkulu akan menjajaki pinjaman daerah, walaupun dari perhitungan kapasitas kemampuan keuangan daerah belum diperhitungkan.

Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel III-14 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan)

| Uraian | Proyeksi Tahun Rencana | | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pendapatan | 3,209,562.17 | 3,372,741.30 | 3,437,162.86 | 3,505,140.45 | 3,602,117.96 |
| Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | - | - | - | -- | - |
| Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 208,000.00 | 74,000.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 |
| Total Penerimaan | 3,417,562.17 | 3,446,741.30 | 3,486,162.86 | 3,516,140.45 | 3,603,117.96 |
| Belanja Bagi hasil Pajak | 8,655.15 | 9,087.91 | 9,542.30 | 10,019.41 | 10,520.39 |
| Belanja Bagi Hasil Retibusi | 1,467.83 | 1,541.22 | 1,618.29 | 1,699.20 | 1,784.16 |
| Bantuan Keuangan Kepada desa | 377,400.12 | 379,287.12 | 381,183.55 | 383,089.47 | 385,004.92 |
| Belanja Bantuan Keuangan lainnya | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 19,599.18 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Total Belanja transfer dan Pengel, belanja tidak terduga Pembiayaan | 573,122.28 | 555,916.25 | 558,344.14 | 550,808.08 | 543,309.47 |
| Kapasitas riil kemampuan keuangan | 2,844,439.89 | 2,890,825.05 | 2,927,818.72 | 2,965,332.37 | 3,059,808.49 |

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas, setelah bupati terpilih resmi dilantik. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

1) Prioritas I

Dialokasikan untuk mendanai belanja langsung wajib mengikat serta pemenuhan penerapan urusan wajib pelayanan dasar, dan di dalamnya termasuk kewajiban mandatori diantaranya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% , anggaran kesehatan 10% dan anggaran belanja peningkatan kapasitas pegawai 0,16%, serta belanja Infrastruktur 25% dari transfer umum di lingkungan Kabupaten Bengkalis

2) Prioritas II

Dialokasikan untuk pendanaan Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi BUPATI periode 2021-2026 yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

3) Prioritas III.

Dialokasikan untuk rogram-program urusan pemerintahan lainnya, penunjang tugas dan fungsi OPD dan alokasi yang lainnya yang tidak bertentangan dengan Perarutan dan Perundang-undangan. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.

Tabel III-15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 (dalam Juta)

| No | Uraian | Proyeksi | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Prioritas I | 1.474.060,33 | 1.486.788,73 | 1.511.034,25 | 1.530.370,84 | 1.549.979,23 | 1.599.361,90 |
| | Pendidkan | 648.620,38 | 654.221,17 | 664.889,76 | 673.398,31 | 682.026,45 | 703.755,95 |
| | Kesehatan | 464.468,60 | 468.479,25 | 476.118,89 | 482.211,74 | 488.390,24 | 503.950,46 |
| | Kapasitas Pegawai | 8.460,27 | 8.533,32 | 8.672,48 | 8.783,46 | 8.896,00 | 9.179,43 |
| | Infrastruktur | 352.511,08 | 355.554,99 | 361.353,13 | 365.977,34 | 370.666,55 | 382.476,06 |
| 2 | Prioritas II | 340.351,00 | 379.351,00 | 39.001.878,00 | 401.220,00 | 412.981,00 | 425.330,00 |
| 3 | Prioritas III | 1.005.677,30 | 978.300,16 | 37.622.087,20 | 996.227,88 | 1.002.372,14 | 1.035.116,59 |

BAB IV.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu-isu strategis Kabupaten Bengkalis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting dan telaah terhadap isu strategis internasional, regional maupun kebijakan nasional yang merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi landasan berpijak untuk perumusan program prioritas.

4.1. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bengkalis dilakukan terhadap aspek/fokus/urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani pemerintah Kabupaten Bengkalis.

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- 1) Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung menurun pada harga konstan 2010 pada periode 2016-2020.
- 2) Nilai produksi sektor pertambangan mengalami kontraksi selama periode 2016-2020, sehingga mempengaruhi terhadap akumulasi nilai PDRB Kabupaten Bengkalis. Sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 5-6% pertahun.
- 3) Pendapatan per kapita penduduk cenderung mengalami penurunan, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan (2010). Pendapatan per kapita yang menurun menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun.
- 4) Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada tahun 2019 yaitu 0,334.

4.1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

- 1) IPM Pada tahun 2020 kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis mengalami perlambatan akibat Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2016-2020 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.
- 2) Tingkat partisipasi tenaga kerja penduduk Kabupaten Bengkalis cenderung stagnan pada kisaran 65% serta tingkat pengangguran yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis lebih sempit jika dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Riau. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada sektor pertambangan dan diperburuk oleh kondisi Covid-19 di tahun 2020.

4.1.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a) Seni Budaya

- 1) Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan belum maksimal, berdasarkan data masih ada beberapa benda situs dan Kawasan cagar budaya yang belum dimiliki oleh daerah. Di samping itu diperkirakan masih banyak Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang belum diidentifikasi dan dilestarikan.

b) Olahraga

- 1) Jumlah klub olahraga sebesar 30 klub per 10.000 penduduk, belum didukung dengan sarana/prasarana olahraga (1 unit per 10.000 penduduk).
- 2) Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.
- 3) Lemahnya sinergi kerjasama antar stakeholder untuk menumbuh kembangkan olahraga berprestasi.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a) Urusan Pendidikan

- 1) Distribusi sekolah, dan tenaga pengajar yang belum merata di daerah pedesaan dan perkotaan. Ada ketimpangan yang sangat nyata dirasakan masyarakat pedesaan.
 - 2) Akses terhadap sekolah sangat sulit di beberapa desa di Rupat Utara sehingga banyak anak usia wajib sekolah yang tidak bisa bersekolah.
 - 3) Kemampuan ekonomi masyarakat rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, terutama pada wilayah pedalaman seperti Rupat Utara. Anak-anak yang seharusnya bisa sekolah sampai jenjang perguruan tinggi harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga.
- b) Urusan Kesehatan
- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) dan kematian ibu melahirkan masih tinggi.
 - 2) Angka persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan imunisasi lengkap masih belum optimal terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman.
 - 3) Prevalensi Balita Gizi Buruk masih tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena belum dimbangi dengan pemberian makanan pendamping ASI kepada anak usia 6 -24 bulan bagi keluarga miskin.
 - 4) Cakupan puskesmas, rumah sakit dan fasilitas medis lainnya belum menunjukkan perkembangan signifikan beberapa tahun terakhir.
 - 5) Angka kematian bayi yang sangat tinggi di wilayah Kecamatan Rupat Utara perlu menjadi perhatian serius.
- c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 1) Akses jalan dalam kondisi baik masih sangat rendah. Terutama pada wilayah Pulau Rupat, akses jalan dalam kondisi rusak sedang dan rusak parah telah berdampak pada naiknya harga-harga bahan pokok dan biaya produksi. Akses jalan yang buruk di Pulau Rupat juga menyebabkan kunjungan wisata lebih rendah dari potensi sebenarnya.
 - 2) Sistem drainase dalam kondisi baik masih sangat rendah, membuat wilayah perkotaan rawan banjir saat hujan dan rawan DBD.
 - 3) Akses terhadap air minum dan air bersih masih rendah. Banyak penduduk di wilayah pesisir dan kepulauan kesulitan sumber air bersih dan menyebabkan mahalnya air bersih.
- d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- Ketersediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) seperti air bersih, drainase lingkungan dan jalan lingkungan masih terbatas. Sehingga dapat ditemukan pada beberapa

tempat, terutama perkotaan, banyak drainase bermasalah dan kumuh. Di beberapa wilayah sampah bertumpuk dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

e) Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 37,4% masih jauh di bawah SPM Nasional sebesar 80%.
- 2) Sementara itu, tingkat waktu tanggap sebesar 90% lebih besar dari nilai nasional sebesar 75%.
- 3) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 24% pada tahun 2019, meskipun menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, masih tergolong rendah.

f) Sosial

- 1) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial baru mencapai 75%, masih perlu ditingkatkan.
- 2) Tren jumlah fakir miskin dan komunitas adat tertinggal cenderung naik secara signifikan tiap tahunnya.
- 3) PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial masih rendah yaitu 80% dari total PMKS.
- 4) KAT yang berada di wilayah pedalaman sulit dijangkau dan sulit diberdayakan.

4.1.2.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a) Urusan Tenaga Kerja

Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan menunjukkan angka persentase yang meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan. Permasalahan tenaga kerja saat ini adalah kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, relatif rendahnya kualitas tenaga kerja dan adanya ketimpangan antara kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dengan lapangan kerja yang tersedia.

Capaian, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja ini kerap terkendala tidak cocoknya antara spesifikasi dan kemampuan dari pencari kerja dengan longan kerja yang tersedia. Guna menjembatani kesenjangan antara kebutuhan keahlian di pasar tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja maka langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasi selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/ industri (kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana) serta memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas melalui peningkatan mutu pembelajaran dan sumber daya pendidikan tinggi.

b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Bengkulu.
- 2) Rasio KDRT cenderung meningkat.

c) Urusan Pangan

- 1) Ketersediaan Pangan utama mengalami penurunan sebesar 2,1% dari tahun 2018 ke tahun 2019, yang kemudian mengakibatkan turunnya angka ketersediaan energi dan ketersediaan protein di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2019. Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh menurunnya Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2019.
- 2) Ketimpangan antara masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan sering muncul dalam urusan pangan. Dimana konsumsi pangan per kapita masyarakat pedesaan cenderung lebih rendah dibanding masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan.
- 3) Instabilitas harga ketika mengalami goncangan dari pasar domestik maupun internasional, dan
- 4) Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

d) Urusan Pertanahan

Persentase lahan bersertifikat masih rendah. Peningkatan kepemilikan lahan bersertifikat mesti ditingkatkan untuk menghindari terjadinya konflik agraria di Kabupaten Bengkulu. Prioritas untuk Komunitas Adat Terpencil yang sering terusik oleh perusahaan-perusahaan maupun entitas berkepentingan yang sering membuka lahan baru untuk kebutuhan industri perkebunan.

e) Urusan Lingkungan Hidup

Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kabupaten Bengkulu yang secara perlahan memperlihatkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, namun permasalahan lingkungan hidup di kabupaten Bengkulu terutama yang terkait dengan wilayah-wilayah yang rawan bencana perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Wilayah kabupaten Bengkulu menghadapi permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup terutama permasalahan potensi kebakaran lahan dan hutan, erosi dan abrasi wilayah pesisir pantai dan bahaya banjir rob serta gelombang tinggi yang menjadi perhatian dan keresahan masyarakat secara luas.

Kebakaran lahan dan hutan terjadi di musim kemarau hampir setiap tahun. Tahun 2019 kebakaran lahan dan hutan masih menempatkan kabupaten Bengkulu sebagai wilayah dengan

titik api terbanyak ke empat di Provinsi Riau. Permasalahan kebakaran lahan dan hutan ini sering diakibatkan oleh pembukaan lahan dengan pembakaran. Selain masalah kesehatan masyarakat yang terdampak langsung seperti ISPA, kebakaran tersebut juga telah mengakibatkan rusaknya ekosistem lahan dan hutan terutama daerah gambut, berkurangnya daerah cadangan air baku serta terganggunya perekonomian masyarakat setempat.

Di samping itu, masalah abrasi dan erosi wilayah pesisir di bagian utara pulau rupa, bagian timur pulau Bengkalis dan bagian timur wilayah kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis juga sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi tanah pesisir yang aluvial dan gambut yang rentan terhadap kikisan arus dan energi gelombang laut selat Melaka telah mengakibatkan tingkat abrasi yang tinggi. Selain itu, perubahan iklim laut yang terjadi semakin meningkatkan potensi banjir rob di sebagian wilayah pemukiman serta jalan raya akibat naiknya muka air laut dan potensi bencana badai angin serta hempasan gelombang tinggi.

Pada bagian utara pulau Bengkalis, dimana kondisi lahan pesisir yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan, mengalami erosi atau pergerakan tanah ke arah laut yang signifikan. Abrasi, erosi serta banjir rob ini memerlukan strategi tata kelola pesisir yang tepat agar menjamin kelestarian lingkungan hidup dan membantu peningkatan nilai ekonomi wilayah bagi masyarakat.

Upaya-upaya dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan hidup masih terkendala dengan beberapa faktor antara lain; masih belum optimalnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup terhadap aktivitas pemanfaatan lahan, industri dan pembangunan sebagai akibat belum terpenuhinya aparatur pengawas lingkungan hidup, peran serta lembaga adat dan tokoh-tokoh agama yang belum terkoordinasi dengan optimal untuk berpaduserasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan cadangan sumberdaya alam terbarukan di Kabupaten Bengkalis dan masih lemahnya pelaksanaan kearifan lokal masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup serta cadangan sumberdaya alam terbarukan

f) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang masih harus ditingkatkan antara lain bayi berakte kelahiran dan pasangan berakte nikah. Belum maksimalnya pencapaian ini harus dievaluasi apakah menyangkut dengan ketersediaan sumber daya manusia pelayanan, sarana, dan faktor lainnya. Permasalahan lain adalah susah akses dari beberapa daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten untuk urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Penduduk dari wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten mengaku kesulitan dan membutuhkan banyak pengorbanan untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan dan catatan sipil di ibu kota kabupaten

g) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa permasalahan adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kapasitas masyarakat desa yang menyebabkan rendahnya perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Bengkulu.

h) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi di Kabupaten Bengkulu.
- 2) Rendahnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi telah membuat jumlah anak dalam satu keluarga menjadi lebih tinggi dari standar nasional.
- 3) Angka kelahiran remaja cukup tinggi, terutama yang masih di bawah umur.

i) Urusan Perhubungan

Permasalahan utama dalam urusan perhubungan antara lain;

- 1) Masih diperlukan angkutan darat yang terpadu mengingat baru 3% jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang yang dapat terlayani.
- 2) Masih rendahnya kepemilikan KIR pada angkutan umum di Kabupaten Bengkulu namun secara tren terjadi peningkatan.
- 3) Masih rendahnya jumlah rambu rambu yang terpasang pada Kabupaten Bengkulu

j) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama dalam urusan Komunikasi dan informatika adalah

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis internet saat ini sudah semakin meningkat, namun masih tergolong rendah terutama untuk wilayah pedesaan.
- 2) Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta belum optimalnya penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah termasuk keterbukaan informasi publik. Sehingga perlu lebih intensif dalam mewujudkan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan kebijakan satu data dengan menggunakan bank data (data centre).
- 3) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung sistem teknologi informasi.

k) Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Permasalahan utama dalam urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- 1) Rendahnya daya saing produk hal ini disebabkan oleh rendahnya inovasi dan pengembangan produk dan belum efektifnya pembinaan dan pemberdayaan UKM.

- 2) Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh UKM adalah rendahnya akses terhadap permodalan, terutama terhadap lembaga keuangan bank. Rendahnya pengetahuan dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan perbankan serta suku bunga yang tinggi menyebabkan akses UKM terhadap modal yang bersumber dari lembaga keuangan bank relatif rendah.
- 3) Masih rendahnya persentase Koperasi aktif. Walau secara tren koperasi aktif di Kabupaten Bengkalis naik namun masih di bawah 50% saja yang aktif.

l) Urusan Penanaman Modal

Pelaku Investasi (PMA dan PMDN) berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Termasuk Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Bengkalis pada periode 2016-2019 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat di akhir tahun. Pemasalahan utama dalam penanaman modal di Kabupaten Bengkalis adalah masih Kepastian dalam berinvestasi terkait dengan aturan dan regulasi daerah yang berubah sesuai dengan peraturan perundangan dari pemerintah pusat. Permasalahan lain adalah investasi hanya berfokus pada sektor migas dan perkebunan besar. Pemerintah daerah belum bisa menggaet investor untuk sektor wisata yang sangat potensial.

m) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan dalam bidang kepemudaan dan olahraga adalah masih belum optimalnya pembinaan terhadap olahragawan dan pemuda. Pembinaan olahraga belum dilakukan secara baik. Hal ini terlihat angka persentase pembinaan cabang olahraga yang tidak berubah dari tahun 2014 hingga 2018 yang tetap diangka 40%. angka masih kecilnya jumlah atlet muda yang dibina, Jumlah atlet berprestasi dan prestasi olahraga dari tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang belum signifikan. Peningkatan indikator cakupan pelatih yang berprestasi, pembinaan atlet muda, atlet yang berprestasi dan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga berbasis cabang olahraga kabupaten, provinsi dan nasional.

Permasalahan lain yang timbul dalam urusan kepemudaan dan olahraga adalah kurangnya pendataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki masing-masing kecamatan. Banyak sarana prasarana olahraga yang rusak dan tidak dipelihara dengan baik seperti lapangan sepakbola kecamatan.

n) Urusan Statistik

Permasalahan utaman dalam urusan statistik adalah;

- 1) Buku statistik Kabupaten Bengkalis dalam Angka dan Kecamatan dalam angka tersedia setiap tahun namun dengan kualitas data yang masih lemah.
- 2) Masih lemah koordinasi dan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten dengan BPS Kabupaten Bengkalis.
- 3) Masih lemahnya penyediaan data secara online dan terpadu.

o) Urusan Persandian

Pengelolaan arsip secara baku masih lemah, yaitu masih sebesar 56.2%. Padahal pengelolaan arsip ini penting artinya untuk menjaga data warisan kolektif bangsa.

p) Urusan Kebudayaan

- 1) Masih rendah ketersediaan sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya khususnya pada wilayah kecamatan.
- 2) Masih banyak benda, situs dan kawasan cagar budaya yang belum digali mengingat Pulau Bengkalis merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah yang panjang.
- 3) Banyak benda, situs dan kawasan cagar budaya yang tidak dipelihara dan belum terdata. Bahkan pada beberapa museum terjadi kehilangan benda cagar budaya karena pencurian, pertikaian keluarga dan sebagainya.

q) Urusan Perpustakaan

Permasalahan utama dalam urusan perpustakaan anatara lain ;

- 1) Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah terbatas (tidak lebih dari 300 judul buku) selama tiga tahun terakhir. Setidaknya Jumlah koleksi minimal 5000 judul jika bercermin dari standar perpustakaan Nasional untuk wilayah Kabupaten.
- 2) Masih diperlukan infrastruktur pendukung perpustakaan seperti system perpustakaan yang terintegrasi dengan perpustakaan di kecamatan

4.1.2.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

a) Urusan Perikanan

- 1) Jumlah produksi perikanan tangkap cenderung menurun dalam lima tahun terakhir.
- 2) Produksi perikanan kelompok nelayan terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh penangkapan ikan masih berbasis tradisional oleh nelayan. Penangkapan berbasis tradisional memiliki banyak kekurangan seperti hasil tangkapan yang sangat terbatas bergantung musim, perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan rusaknya ekosistem karena menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- 3) Produksi perikanan budidaya belum optimal karena belum didukung dengan sarana dan prasarana.

b) Urusan Pariwisata

Permasalahan utama dalam urusan pariwisata antara lain;

- 1) Terbatasnya aksesibilitas dan amenitas destinasi wisata
- 2) Masih banyaknya destinasi wisata yang ada pada Kabupaten Bengkalis yang belum terdata dan memiliki legalitas status sebagai objek wisata daerah.
- 3) Promosi wisata masih sangat minim. Belum ada kalender wisata tetap yang menjadi acuan wisatawan.
- 4) PAD sektor pariwisata masih sangat sedikit, jauh dibawah potensi sebenarnya.

c) Urusan Pertanian

Pertanian sebagian besar masih belum melek teknologi. Masih banyak potensi sektor pertanian yang belum digali sehingga produktivitas hasil pertanian sangat rendah di Kabupaten Bengkalis.

Pembangunan di bidang pertanian hendaknya difokuskan ke peningkatan keahlian petani melalui pelatihan, mekanisasi pertanian, dan peningkatan teknologi peningkatan hasil pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.

d) Urusan Kehutanan

Kerusakan hutan merupakan permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran dan kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten dengan luas lahan kritis tertinggi ketiga di Provinsi Riau. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan di Provinsi Riau, yang terluas adalah Kabupaten Indragiri Hilir (195.702,02 Ha) diikuti Kabupaten Kampar (159.786,38 Ha), dan Kabupaten Bengkalis (127.019,19 Ha).

e) Urusan Energi dan Sumber daya mineral

Rasio elektrifikasi di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil mesti ditingkatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di kawasan terpencil. Masyarakat pedesaan dan kawasan terpencil sebagai satu kesatuan utuh dari Kabupaten Bengkalis mesti mendapat perhatian yang sama dengan masyarakat perkotaan yang sudah menikmati listrik dengan layak.

f) Urusan Perdagangan

Tren ekspor bersih Kabupaten Bengkalis menurun pada periode 2017-2019. Hal ini terutama sekali disebabkan oleh penurunan ekspor migas karena semakin sedikitnya jumlah cadangan minyak dan diperparah lagi oleh penurunan harga minyak di pasar internasional. Penurunan perdagangan non migas juga terjadi dikarenakan turunnya harga komoditas di pasar global seperti harga kelapa sawit dan karet, sehingga memicu penurunan jumlah ekspor ke negara mitra dagang, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, India dan Tiongkok.

g) Urusan Perindustrian

Belum berkembangnya industri hilir berbasis sumber daya lokal. Perekonomian kabupaten Bengkalis masih banyak bergantung pada industri migas, padahal potensi industri kreatif sangat besar untuk dikembangkan. Sebut saja industri kuliner melayu, tenun lejo Bengkalis dan oleh-oleh kerajinan khas Bengkalis.

4.1.2.4. Fokus Penunjang Urusan

a) Urusan Perencanaan

Proses perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin keselarasan pembangunan terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bengkalis. Karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut harus terus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan untuk bisa menjadi masukan perbaikan di masa mendatang.

b) Urusan Pelatihan dan Pendidikan

Pemasalahan Kepagawiaan di Kabupaten Bengkalis saat ini adalah menyangkut pada masih belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan belum optimalnya pembinaan ASN. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional. Padahal pelatihan tersebut memiliki berkontribusi untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pegawai.

Balai latihan kerja di Kabupaten Bengkalis juga belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

c) Urusan Keuangan

Menurunnya tren kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah perlu dilakukan kebijakan dan inovasi terhadap kebijakan PAD. Pada masa yang akan datang, kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dimana diharapkan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus semakin besar terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis. Karena selama ini pendapatan dari PAD masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan potensi sebenarnya.

d) Pengawasan

Permasalahan dalam urusan pengawasan adalah belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Persentase tindak lanjut temuan juga terbilang masih rendah. Masih terjadi peningkatan temuan selama kurun waktu 2015-2019. Hal yang sama juga terjadi pada indikator jumlah temuan BPK, memiliki tren naik. Sedangkan pada persentase Pelanggaran Pegawai (ASN) walau tren sudah menunjukkan perubahan yang baik namun masih besar secara kuantitas yaitu 36%.

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

- 1) Kebutuhan non pangan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 mencapai 46,97% pengeluaran dihabiskan untuk kebutuhan non pangan dan pada tahun 2019 47.03% dihabiskan untuk non pangan. Sebaliknya pengeluaran untuk kebutuhan pangan persentasenya terus menurun setiap tahun. Artinya, masyarakat Bengkalis dapat dikatakan sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan/pokok dengan baik setiap tahun dan mulai beralih memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan yang baik, fashion, furniture, kendaraan dan sebagainya
- 1) Nilai NTP untuk petani karet dan kelapa pada tahun 2018 berada pada NTP < 100 dengan demikian kondisi petani karet dan kelapa mengalami defisit ekonomi yang berdampak menurunnya kesejahteraan petani karet dan kelapa.
- 2) Secara umum, angka kriminalitas memiliki tren menurun dari tahun 2015 dari 856 kasus menjadi 595 kasus pada tahun 2019, namun jumlah kriminalitas harus diminimalisir lagi. Rasio kriminalitas kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 10.2 kasus per 10.000 penduduk, sebelum kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 11.6 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 hanya terdapat 10.4 kasus kriminal.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- 1) **Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertambangan, terutama produk minyak dan gas.** Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB atas harga konstant (2010) pada tahun 2019 mencapai 56,45%, kemudian sektor industri pengolahan 18,45% dan sektor pertanian sebesar 11,81%. Dominasi sektor pertambangan secara absolut disumbangkan oleh komoditi minyak termasuk pada aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan, termasuk pada sektor perdagangan. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan pengembangan sektor-sektor ekonomi di luar sektor minyak dan gas, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Kontribusi minyak dan gas yang dominan dalam struktur perekonomian telah menjadi faktor kesenjangan ekonomi yang tinggi antara Kabupaten Bengkalis dengan daerah lain di Riau.
- 2) **Tingkat pengeluaran per kapita penduduk masih relatif rendah terhadap daerah lain di Riau.** Ketimpangan pendapatan antar penduduk masih termasuk dalam kategori sedang dengan Gini Rasio 0,334. Kemudian, nilai PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga konstant (2010) pada tahun 2019 merupakan yang terbesar di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau dengan kontribusi 15,14% terhadap total PDRB Riau. Namun pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis lebih rendah 14,07% dari pengeluaran per kapita penduduk Riau pada tahun 2019 dan berada pada urutan kelima terendah di antara kabupaten/kota lain di Riau. Nilai pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis Rp. 1.059.740/bulan,

sedangkan pengeluaran per kapita penduduk Riau Rp. 1.233.245/bulan. Tingkat pengeluaran yang relatif rendah ini tidak seiring dengan nilai PDRB terbesar di Riau dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terbesar kedua setelah Dumai di Riau. Ketimpangan antarsektor menjadi penyebab distribusi pendapatan kepada penduduk tidak berlangsung dengan baik.

- 3) **Produktivitas pertanian masih rendah.** Produktivitas tanaman padi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 mencapai 3,64 ton/Ha, masih lebih rendah dari Riau yang telah mencapai 3,66 ton/Ha dan jauh berada dari produktivitas padi nasional yang telah mencapai 5,11 ton/Ha. Produktivitas tanaman kelapa sawit 1,79 ton/Ha dan lebih rendah dari Riau sebesar 2,84 ton/Ha, demikian juga produktivitas tanaman karet yang hanya mencapai 0,68 ton/Ha, sedangkan Riau mencapai 0,84 ton/Ha dan tanaman kelapa dengan produktivitas 0,52 ton/Ha lebih rendah dari Riau sebesar 0,89 ton/Ha. Kondisi lahan dan usia tanaman karet dan kelapa yang sudah tua menjadikan tanaman ini tidak produktif lagi dan upaya peremajaan tanaman juga masih terbatas.
- 4) **Pertumbuhan penduduk tinggi dan ketimpangan penyebaran penduduk antarwilayah.** Pertumbuhan penduduk pada wilayah daratan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kepulauan. Secara umum laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pertahun selama periode 2010-2019 sekitar 1,51% per tahun, lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Riau yang mencapai 2,52% per tahun, namun beberapa kecamatan pada wilayah daratan dan pusat pemerintahan di Kabupaten Bengkalis memiliki kepadatan penduduk yang senjang dibandingkan dengan kecamatan lain. Pertambahan penduduk yang tinggi pada beberapa wilayah akan berdampak pada tekanan yang tinggi pada pemanfaatan sumberdaya lahan, peningkatan permasalahan sosial, pengangguran dan kemiskinan.
- 5) **Kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan manusia masih rendah.** Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 tergolong tinggi (73,44) dan lebih tinggi dari IPM Riau (73,00), namun hasil-hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai komponen pembentuk IPM masih memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari angka harapan lama sekolah dan angka harapan hidup penduduk sebagai komponen pembentuk IPM Kabupaten Bengkalis masih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Capaian pembangunan ekonomi terlihat lebih baik sebagai komponen pembentuk IPM Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan Riau, yang terlihat dari besaran pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis yang lebih tinggi dari Provinsi Riau.
- 6) **Kualitas pelayanan kesehatan masih rendah.** Balita dengan status gizi buruk ditemukan meningkat dari 4 orang pada tahun 2018 menjadi 8 orang pada tahun 2019. Angka kesakitan DBD sebanyak 195 per 100.000 penduduk, terbanyak di Riau.

Penduduk dengan keluhan kesehatan merupakan terendah di Riau, yaitu 19,49% sedangkan Riau sebesar 26,44%. Kemudian penyebaran dokter sudah cukup baik dimana Kabupaten Bengkalis memiliki Dokter terbanyak di Riau yaitu 223 atau 11,19% dari total Dokter di Riau, perawat sebanyak 653 orang atau 9,18% dari total perawat di Riau, Bidan sebanyak 470 atau 6,86% dari total bidan di Riau. Jumlah fasilitas kesehatan sudah mencukup, yaitu Rumah Sakit sebanyak 7 unit, Puskesmas 18 unit dan Klinik Pratama sebanyak 23 unit. Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjadi penyebab masih ditemukannya masalah-masalah kesetaraan di Kabupaten Bengkalis.

- 7) **Angka partisipasi sekolah masih relatif rendah.** Angka partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 untuk penduduk usia sekolah SD sebesar 98,77% merupakan kedua terendah di Provinsi Riau yang telah mencapai 99,36%, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP sebesar 94,35% merupakan terendah kelima di Riau yang telah mencapai 95,37% dan angka partisipasi sekolah penduduk usia SMA sebesar 80,90% lebih tinggi dari Riau sebesar 77,29% atau tertinggi kelima di Riau. Kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 16 pulau-pulau utama, menyebabkan partisipasi sekolah pada setiap wilayah tidak merata, akibat penyebaran fasilitas pendidikan dasar dan pendidikan lanjut (SMP Sederajat dan SMA Sederajat). Kondisi ini juga akan berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.
- 8) **Tingkat pengangguran masih relatif lebih tinggi.** Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis sebesar 9,62% pada tahun 2019, merupakan terbesar di antara kabupaten/kota lain di Riau. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Riau sebesar 5,97% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 65,10%, sedangkan TPAK Kabupaten Bengkalis sebesar 64,30%. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bengkalis sebanyak 7,75% dan merupakan jumlah keenam terbesar dari total penduduk usia kerja di Provinsi Riau. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.482 orang pada tahun 2019 atau sebanyak 5,69% dengan urutan kelima terbesar dari total pencari kerja terdaftar di Riau.
- 9) **Pembangunan infrastruktur antarwilayah belum merata.** Panjang jalan bertambah di Kabupaten Bengkalis telah bertambah setiap tahun dengan rasio panjang jalan dengan penduduk sebesar 27,69 Km/10.000 penduduk. Panjang jalan kondisi baik hanya 37,04% pada tahun 2019. Ketersediaan infrastruktur antarwilayah perkotaan dan perdesaan masih belum seimbang. Ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas mengakibatkan konektivitas antarwilayah menjadi terbatas. Infrastruktur pengaman tebing sungai dan pantai baru mencapai 8,8% dalam kondisi baik, kondisi irigasi dalam kondisi baik 77,78%, drainase kondisi baik baru 30%, rumah layak huni baru mencapai 64,31% dan rumah tangga akses pada air minum layak 14,83%. Kondisi geografis wilayah yang berupa pulau dan sungai-sungai dengan topografi dataran rendah menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi mahal dan penyediaan infrastruktur wilayah dan pemukiman menjadi terbatas.

- 10) **Tingginya tingkat abrasi pada pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis**, khususnya pulau Bengkalis dan pulau Rupa serta 16 pulau utama dan juga terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa kecamatan. Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari wilayah daratan dan lautan dengan rata-rata ketinggian antara 2 – 6,1 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memiliki resiko terhadap tingkat abrasi yang berdampak pada mundurnya garis pantai, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada kondisi Sumberdaya Alam pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, infrastruktur wilayah, pemukiman penduduk termasuk penyediaan air bersih dalam hal ketersediaan air baku dan air baku beresiko mengalami intrusi air laut, ancaman pada kondisi fasilitas umum dan fasilitas sosial pada wilayah-wilayah beresiko abrasi.
- 11) **Resiko kebakaran lahan dan hutan yang tinggi**, mempunyai luas lahan gambut terbesar kedua di Provinsi Riau memiliki resiko kebakaran yang tinggi, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 245 titik api atau sekitar 10,70% dari total titik api di Provinsi Riau. Kondisi hidrologi daerah rawa dan kondisi sungai-sungai yang mulai terdegradasi Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah, menjadi penyebab resiko kebakaran lahan hutan semakin tinggi. Resiko kebakaran lahan dan hutan semakin tinggi juga disebabkan oleh perilaku pembukaan lahan untuk kegiatan ekonomi oleh masyarakat pada musim kering dengan intensitas hujan rendah.

4.2. Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam

menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun ke depan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

1.1.1.1 Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ditahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;

- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- 11) Membuat kota kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

1.1.1.2 Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia

Perubahan paradigma dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia merupakan satu hal utama yang ditekankan dalam laporan Human Development Report 2019. Lebih lanjut diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh terkait pemahaman kesenjangan dalam perspektif manusia. Laporan PPB menunjukkan bahwa secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain: pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini, maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender. Tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan, sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Dalam konteks persaingan global, pemerintah Indonesia khususnya daerah daerah yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global seperti Kabupaten Bengkalis.

1.1.1.3 Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya, sehingga memiliki efek disruption industri di setiap negara pada keseluruhan sistem serta meluas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, pendidikan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Pada bidang ekonomi ditandai dengan munculnya bidang pekerjaan baru (data miner, analisis big data, ilmuwan kecerdasan buatan) dan hilangnya beberapa pekerjaan lama; pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin atau robot yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang pekerjaan tersebut. Bidang organisasi dan institusi publik yang menghendaki pengambilan keputusan dilakukan secara cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisis big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pada bidang sosial kemasyarakatan, revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif pada perubahan perilaku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bila disikapi dengan positif, era revolusi industri 4.0 membawa peluang secara ekonomi makro berupa proses otomatisasi dan digitalisasi berpotensi untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.1.2 Isu Strategis Regional

1.1.2.1 Perang dagang China dan Amerika Serikat

Perang dagang China dan Amerika Serikat dimulai sejak Maret 2018 yang ditandai dengan penetapan tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk produk dari China yang masuk ke Amerika Serikat. Hal ini disebabkan China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dengan cara melakukan pencurian kekayaan intelektual dan pemindahan paksa teknologi Amerika ke China, sehingga memperburuk defisit neraca perdagangan Amerika Serikat.

Ketegangan kedua Negara adidaya ini perlu diwaspadai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis di Indonesia, mengingat selama ini kedua negara tersebut merupakan partner yang cukup penting. Hal ini dapat dilihat dari data ekspor dan impor Indonesia cukup besar, sehingga secara ekonomi akan berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.

1.1.2.2 Sengketa wilayah di laut China Selatan

Sengketa laut China Selatan melibatkan klaim terhadap wilayah maritim dan kepulauan di antara beberapa negara berdaulat di wilayah tersebut. Pada awalnya yang terlibat dalam konflik ini adalah Brunei Darussalam, Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Sejak Maret 2016 Indonesia terlibat dalam konflik ini dengan tidak diakuinya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh China dan berkembang ke arah konflik terhadap Kepulauan Natuna Utara. China menganggap wilayah tersebut bukan wilayah Indonesia, sehingga setiap upaya petugas pengamanan laut Indonesia mengusir nelayan dan kapal penangkap ikan China dianggap tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya Indonesia

menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran batas wilayah dan diproses secara hukum Indonesia. Perkembangan kondisi di wilayah laut China Selatan perlu mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan ke depan, mengingat sepertiga dari jalur perdagangan dunia melewati wilayah tersebut, sehingga terkait secara langsung dengan perekonomian Indonesia dari sisi distribusi perdagangan internasional dan pertahanan keamanan.

1.1.3 Isu Kebijakan Nasional

1.1.3.1 RPJMN 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu: 1) peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, 3) pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga, 8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, 9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terdapat 7 (tujuh) prioritas nasional dan isu strategis dalam pembangunan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; dengan isu strategisnya: keberlanjutan sumberdaya alam; efektifitas tata kelola sumberdaya ekonomi; transformasi struktural berjalan lambat; dan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; dengan isu strategisnya: ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan tingginya kemiskinan dikawasan timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi dikawasan barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas didaerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal didaerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dengan isu strategisnya: pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; pemenuhan layanan dasar; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; pengentasan kemiskinan; dan peningkatan produktifitas dan daya saing.

- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dengan isu strategisnya: melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa; belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia; belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti; masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama; belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan; belum optimalnya peran keluarga; dan rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreatifitas.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dengan isu strategis: penyediaan akses dan pemukiman layak, aman dan terjangkau; penyediaan akses air minum, dan sanitasi layak dan aman; pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; keselamatan dan keamanan transportasi; ketahanan kebencanaan; infrastruktur waduk multiguna dan modernisasi irigasi; konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau; energi kelistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan kecukupan; penyediaan transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan isu strategis: peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan iklim pembangunan rendah karbon.
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; dengan isu strategis: konsolidasi demokrasi; optimalisasi kebijakan luar negeri; penegakan hukum nasional, reformasi birokrasi dan tata kelola; dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

1.1.3.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Riau yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Prioritas Tahun 2020-2024, sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui surat bernomor: B.055/M.PPN/D.2/PP.03.03/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. PKSN Bengkalis memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai: 1) pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; 2) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara; 3) pusat pemerintahan; 4) pusat perdagangan dan jasa; 5) pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan; 6) pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan; 7) pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; 8) pusat pelayanan kesehatan; dan 9) pusat pelayanan transportasi laut.

1.1.3.3 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berupaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan target pada akhir tahun 2019 mencapai 100% masyarakat dapat mengakses layanan air minum yang aman. SPAM Regional Durolis (Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis) ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini dimulai pembangunannya pada TA. 2017 dan akan melayani enam kecamatan di Kota Dumai (Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan), empat kecamatan di Rokan Hilir (TP TJ Melawan, Bangko, Rimba Melintang, Batu Hampar, Bangko Pusako) dan dua kecamatan di Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR. Sumber air yang digunakan dalam pembangunan SPAM Regional Durolis berasal dari Sungai Rokan yang menjadi sumber air baku satu-satunya yang layak digunakan untuk pelayanan air minum di ketiga wilayah tersebut.

1.1.3.4 Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Tentang New Normal

Pandemi Covid-19 melanda hampir semua negara dalam waktu singkat, dengan waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara untuk meresponnya sangat bervariasi. Negara maju memiliki sumberdaya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk melakukan recovery dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, sehingga berdampak serius pada bidang ekonomi dan sosial. Meskipun demikian negara berkembang memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi. Menurut studi yang dilakukan McKinsey Global Institute (2020), terdapat 5 (lima) sektor yang sangat berpotensi, yaitu: 1) sebagai pusat manufaktur, 2) infrastruktur hijau, 3) investasi dalam sektor digital, 4) pelatihan ulang bakat, dan 5) industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dikelola dengan baik, dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang.

1.1.4 Isu Strategis Riau

Kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 diarahkan untuk mencapai Visi Riau yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu: 1) mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, berkeuletan dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya, 2) mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 3) mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, 4) mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dan 5) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

Isu strategis pembangunan Provinsi Riau tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berdaya Saing**, dilakukan dengan: peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan; peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, upaya peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan dan penyembuhan; pelayanan warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui peningkatan produktivitas lapangan usaha masyarakat. Peningkatan sumberdaya manusia yang beriman, dilakukan melalui: peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berprestasi dalam bidang keagamaan; dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
- 2) **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**, dilakukan melalui: peningkatan konektivitas untuk penguatan daya saing melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi; peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas air baku serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan; peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat; peningkatan rasio elektrifikasi melalui peningkatan akses dan infrastruktur energi keseluruh wilayah dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; peningkatan infrastruktur sumber daya air; dan peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan pemulihan kawasan kritis dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan.
- 3) **Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan**, dilakukan melalui: peningkatan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal; peningkatan kemandirian dan daya saing industri dengan peningkatan produksi industri dan nilai tambah dan peningkatan keunggulan kompetitif untuk pasar regional dan global; peningkatan daya tarik investasi; peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Penanggulangan kemiskinan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk pengurangan jumlah penduduk miskin; dan peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
- 4) **Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dan Pengembangan Pariwisata**, dilakukan melalui: peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi; peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau; peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata

Kebudayaan. Pengembangan pariwisata dilakukan melalui: pemanfaatan potensi pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan pengelolaan pariwisata.

- 5) **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi**, dilakukan melalui: peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

1.1.5 Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

Isu strategis Kabupaten Bengkalis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, regional, nasional dan Provinsi Riau. Isu Strategis Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif, berkeadilan dan tepat sasaran
- 2) Pengelolaan sumberdaya alam yang lestari
- 3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif
- 5) Peningkatan kualitas pemahaman nilai-nilai budaya Melayu dan kearifan lokal
- 6) Peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur dan kawasan perbatasan
- 7) Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya

BAB V.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Visi

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkulu 2005-2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkulu, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkulu tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”

dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bermarwah, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
- 2) Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
- 3) Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah:

Misi 1: Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean government; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

Misi 3: Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis merupakan cita-cita masyarakat Bengkalis yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

- Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bengkalis periode keempat. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkalis akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (impact) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Tabel V-1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu 2021-2026

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kondisi Awal | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|--|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA | | | | | | | | | |
| Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian | | | | | | | | | |
| 1.1 | Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman. | Pertumbuhan Ekonomi (ADHK Dengan Migas) | -1,08% | -1,02% | -0,64% | -0,25% | 0,13% | 0,51% | 0,51% |
| 1.1.1 | Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah. | Pertumbuhan Agregat sektoral di luar Migas | 0,95% | 1,25% | 1,75% | 2,25% | 2,75% | 3,25% | 3,25% |
| | | Angka Pengangguran | 9% | 8,75% | 8,64% | 8,54% | 8,44% | 8,34% | 8,34% |
| 1.1.2 | Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi. | Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta Rp/ Kapita/ Tahun *ADHB) | 202,54 | 201,17 | 201,29 | 201,78 | 203,21 | 205,59 | 205,59 |
| | | Angka Kemiskinan | 6,19% | 6,07% | 5,94% | 5,81% | 5,69% | 5,56% | 5,56% |

| No. | Tujuan/Sasaran | | Indikator | Kondisi Awal | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---------|--|--|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Gini Ratio | 0,28 | 0,279 | 0,278 | 0,277 | 0,276 | 0,275 | 0,275 |
| 1.2 | Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing. | | Indeks Pembangunan Manusia | 74,06 | 74,47 | 74,88 | 75,3 | 75,71 | 76,12 | 76,12 |
| | 1.2.1 | Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing. | Rata rata Lama Sekolah | 9,88 | 10,15 | 10,37 | 10,62 | 10,85 | 11,1 | 11,1 |
| | 1.2.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. | Angka Harapan Hidup | 71,36 | 71,55 | 71,71 | 71,86 | 72,03 | 72,2 | 72,2 |
| 1.3 | Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. | | Rasio PAD terhadap Total Pendapatan | 10,76% | 11,86% | 12,77% | 13,75% | 14,84% | 15,98% | 15,98% |
| | 1.3.1 | Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset. | Persentase Petumbuhan PAD | 23,2 | 16,1 | 13,13 | 13,3 | 13,48 | 13,68 | 13,68 |
| | | | Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |
| | 1.3.2 | Terciptanya iklim investasi yang kondusif. | Nilai investasi (PMDN/PMA) | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 5,9 |
| Triliun | | | | Triliun | Triliun | Triliun | Triliun | Triliun | Triliun | Triliun |

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kondisi Awal | Target | | | | | Kondisi Akhir | |
|---|--|--|--|--------|------|------|------|------|---------------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik. | | Indek Reformasi Birokrasi | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 72 | 72 |
| | 2.1.1 | Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan pemerintah. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | B | B | BB | BB | A | A | A |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 | 86 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| | | | Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 2.2 | Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Harmonis. | | Persentase penurunan potensi konflik | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% |
| | 2.2.1 | Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu. | Persentase Penyelesaian Konflik Keagamaan | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 30% |
| | | | Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.2.2. | Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olah raga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. | Angka Prestasi olah raga | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| | | | Jumlah Penurunan Penghuni Tindak Pidana | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 650 |

| No. | Tujuan/Sasaran | | Indikator | Kondisi Awal | Target | | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis | | | | | | | |
| | 2.2.3 | Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | Indeks Pembangunan Gender | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,5 | 92 | 92,1 | 92,1 |
| Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah. | | Rasio konektivitas Kabupaten | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| | 3.1.1 | Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik. | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik | 53,50% | 55,49% | 57,47% | 59,46% | 61,44% | 63,43% | 63,43% |
| | | | Panjang Jalan Poros dan jembatan pada wilayah perbatasan dalam kondisi baik (Km). | 11,041 | 16,562 | 22,083 | 27,604 | 33,125 | 38,646 | 38,646 |
| | 3.1.2 | Meningkatnya kapasitas angkutan penyeberangan. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan: | | | | | | | |
| | | | a. Orang | 910.000 | 950.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | | b. Barang | 28.800 | 32.400 | 36.000 | 39.600 | 43.200 | 46.800 | 46.800 |

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kondisi Awal | Target | | | | | Kondisi Akhir | |
|-----|---|--|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 3.2 | Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70,33 | 70,61 | 70,88 | 71,16 | 71,29 | 71,44 | 71,44 | |
| | 3.2.1 | Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas. | Rasio permukiman layak huni | 97,85 | 97,92 | 97,98 | 98,05 | 98,11 | 98,18 | 98,18 |
| | 3.2.2 | Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 56 | 56,06 | 56,11 | 56,17 | 56,22 | 67 | 67 |
| | | | Indek Resiko Bencana | 109,48 | 100,1 | 90,71 | 81,33 | 71,94 | 62,56 | 62,56 |

BAB VI.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai targetnya. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka disusun sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang sistematis berdasarkan strategi yang telah ditentukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kepala daerah dan kebijakan yang terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang efektif serta efisien, Bupati dapat didukung oleh tenaga ahli yang berasal dari akademisi atau profesional.

Adapun strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel 6.1 sebagai berikut

Tabel VI-1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkulu 2021-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|--|--|
| VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA | | | | |
| Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian | | | | |
| 1.1. Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman. | 1.1.1. Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah. | 1.1.1.1. Pertumbuhan Agregat Sektoral di Luar Migas. 1.1.1.2. Angka Pengangguran. | 1.1.1.1.1. Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat. | 1.1.1.1.1.1. Menumbuhkan dan Mengembangkan Industri Kreatif. |
| | | | 1.1.1.1.2. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal, buruh dan pekerja informal. | 1.1.1.1.2.1. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelatihan kerja. 1.1.1.1.2.2. Memfasilitasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi. |
| | | | 1.1.1.1.3. Penguatan ekonomi petani dan nelayan. | 1.1.1.1.3.1. Memberikan stimulus ekonomi, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi dan inovasi pendukung usaha pertanian dan perikanan. 1.1.1.1.3.2. Melaksanakan kerjasama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman. |
| | | | 1.1.1.1.4. Penyediaan lahan pertanian pada kawasan hutan. | 1.1.1.1.4.1. Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan. |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|-------------------|--|--|
| | | | 1.1.1.1.5. Penguatan sektor kepariwisataan unggulan | 1.1.1.1.5.1. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi pendukung pengembangan promosi wisata pantai, kuliner warisan budaya lokal. |
| | | | | 1.1.1.1.5.2. Mengembangkan dan mengimplemantasikan model tata kelola potensi wisata terpadu. |
| | | | 1.1.1.1.6. Penataan kelembagaan dan penguatan produktivitas sub sektor ekonomi kreatif. | 1.1.1.1.6.1. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk perluasan jangkauan promosi produk usaha mikro dan kecil serta menengah. |
| | | | | 1.1.1.1.6.2. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung produktivitas usaha mikro dan kecil serta menengah. |
| | | | 1.1.1.1.7. Penguatan peran BUMDes dalam peningkatan PAD desa dan soko perekonomian masyarakat perdesaan. | 1.1.1.1.7.1. Melaksanakan peningkatan inovasi unit usaha, kompetensi SDM dan modernisasi manajemen BUMDes. |
| | | | 1.1.1.1.8. Penguatan pertumbuhan ekonomi spasial. | 1.1.1.1.8.1. Melaksanakan penyiapan, penataan dan pengembangan kawasan khusus seperti: kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis potensial lainnya. |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|--|--|
| | 1.1.2. Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi | 1.1.2.1. Pendapatan Perkapita Penduduk. 1.1.2.2. Angka Kemiskinan. 1.1.2.3. Gini Ratio. | 1.1.2.1.1. Penguatan kemampuan daya beli masyarakat | 1.1.2.1.1.1. Meningkatkan struktur sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dan kelurahan. |
| | | | | 1.1.2.1.1.2. Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat. |
| | | | 1.1.2.1.2. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah | 1.1.2.1.2.1. Menjamin ketersediaan Pangan bagi masyarakat. |
| 1.2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing. | 1.2.1. Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing. | 1.2.1.1. Rata-rata Lama Sekolah | 1.2.1.1.1. Peningkatan kualitas standard pelayanan minimal pendidikan. | 1.2.1.1.1.1. Mengupayakan kesinambungan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak tempatan dan berprestasi. |
| | | | | 1.2.1.1.1.2. Fasilitasi cakupan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya pada jenjang PAUD. |
| | | | | 1.2.1.1.1.3. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard pendidikan. |
| | 1.2.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. | 1.2.2.1. Angka Harapan Hidup. | 1.2.2.1.1. Peningkatan layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan | 1.2.2.1.1.1. Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat. |
| | | | | 1.2.2.1.1.2. Fasilitasi ketercukupan jumlah, dan kompetensi tenaga kesehatan. |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|---|--|
| | | | 1.2.2.1.2. Peningkatkan keterpaduan penanganan stunting, serta penyelenggaraan PHBS dan pelayanan gizi berbasis masyarakat. | 1.2.2.1.2.1. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Posyandu dalam keterpaduan penanganan stunting, serta penyelenggaraan PHBS dan pelayanan gizi masyarakat. |
| 1.3. Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. | 1.3.1. Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset. | 1.3.1.1. Persentase Petumbuhan PAD. 1.3.1.2. Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur. | 1.3.1.1.1. Peningkatan upaya penerimaan PAD. | 1.3.1.1.1.1. Melaksanakan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah. |
| | | | | 1.3.1.1.1.2. Menyesuaikan semua regulasi daerah terkait penerimaan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi serta potensi-potensi penerimaan daerah. |
| | | | | 1.3.1.1.1.3. Reformulasi tata kelola pendapatan, penggunaan belanja dan pembiayaan daerah yang efektif dan efisien. |
| | | 1.3.1.1.2. Penguatan tata kelola aset dan kekayaan daerah yang baik, efektif dan efisien. | 1.3.1.1.2.1. Melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan aset dan kekayaan daerah tepat guna. | |
| | 1.3.2. Terciptanya iklim investasi yang kondusif. | 1.3.2.1. Nilai investasi (PMDN/PMA). | 1.3.2.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan. | 1.3.2.1.1.1. Menyederhanakan perizinan dan menguatkan sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi. |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|--|--|
| Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter | | | | |
| 2.1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik. | 2.1.1. Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. | 2.1.1.1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. 2.1.1.2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). 2.1.1.3. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE). | 2.1.1.1.1. Penguatan akselerasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. | 2.1.1.1.1.1. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. |
| | | | 2.1.1.1.2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan. | 2.1.1.1.2.1. Melaksanakan sinergisitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan. |
| | | | 2.1.1.1.3. Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien, professional. | 2.1.1.1.3.1. Restrukturisasi dan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang berazaskan kelayakan, efektif dan efisien. |
| | | | | 2.1.1.1.3.2. Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan. |
| | | | 2.1.1.1.4. Penguatan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan capaian kinerja. | 2.1.1.1.4.1. Meningkatkan kompetensi aparatur dengan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan terukur hasilnya. |
| | | | 2.1.1.1.5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. | 2.1.1.1.5.1. Menyedaiakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi. |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|---|---|
| 2.2. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan harmonis. | 2.2.1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu. | 2.2.1.1. Persetase Penyelesaian Konflik Keagamaan. 2.2.1.2. Persetase Pemajuan Kebudayaan Melayu. | 2.2.1.1.1. Penguatan peran dan partisipatif agamawan dan kelompok-kelompok masyarakat. | 2.2.1.1.1.1. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level. |
| | | | 2.2.1.1.2. Introduksi nilai-nilai budaya melayu pada dunia pendidikan. | 2.2.1.1.2.1. Mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kurikulum muatan lokal di jenjang usia dini, dasar dan lanjut. |
| | | | 2.2.1.1.3. Pelestarian peninggalan sejarah kebudayaan melayu. | 2.2.1.1.3.1. Melaksanakan pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap bangunan dan benda cagar budaya (BCB) bersitus kebudayaan melayu. |
| | | | 2.2.1.1.4. Penguatan sinergi pemajuan kebudayaan melayu dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya. | 2.2.1.1.4.1. Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya. |
| | 2.2.2. Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. | 2.2.2.1. Angka Prestasi Olah Raga. 2.2.2.2. Jumlah Penghuni Tindak Pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis. | 2.2.2.1.1. Peningkatan kualitas atlit muda pada cabang olah raga prestasi | 2.2.2.1.1.1. Menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan dan pembinaan yang berkesinambungan sesuai dengan standard nasional. |
| | | | 2.2.2.1.2. Penguatan kinerja pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. | 2.2.2.1.2.1. Fungsionalisasi kelembagaan serta peran dan fungsi Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNKK). |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|--|--|
| | | | | 2.2.2.1.2.2. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok dan organisasi kepemudaan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. |
| | 2.2.3. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan. | 2.2.3.1. Indek Pembangunan Gender. | 2.2.3.1.1. Penguatan agenda perempuan berdaya keluarga sejahtera. | 2.2.3.1.1.1. Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat. |
| Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat | | | | |
| 3.1. Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah. | 3.1.1. Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik. | 3.1.1.1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik. 3.1.1.2. Panjang Jalan Poros dan Jembatan Pada Wilayah Perbatasan Dalam Kondisi Baik. | 3.1.1.1.1. Penguatan kualitas jaringan jalan dan jembatan antar kawasan dan antar wilayah. | 3.1.1.1.1.1. Fasilitasi peningkatan kualitas jalan (jembatan) strategis pada kluster kawasan yang bersumber dari anggaran non APBD. |
| | | | | 3.1.1.1.1.2. Mengembangkan jaringan jalan poros, jembatan dan penataan drainase pada wilayah kecamatan dan perdesaan. |
| | | | 3.1.1.1.2. Penguatan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan | 3.1.1.1.2.1. Mengupayakan pemerataan penyediaan serta fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah LOKPRI (perbatasan). |
| | 3.1.2. Meningkatnya kapasitas angkutan penyebrangan. | 3.1.2.1. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Penyeberangan. | 3.1.2.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan penyebrangan. | 3.1.2.1.1.1. Mengembangkan sistem pelayanan jasa transportasi ro-ro yang lebih memadai. |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| 3.2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan. | 3.2.1. Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas. | 3.2.1.1. Rasio permukiman layak huni. | 3.2.1.1.1. Revitalisasi perumahan rakyat. | 3.2.2.1.1.1. Fasilitasi penyediaan; serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat. |
| | | | 3.2.1.1.2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang tertata baik. | 3.2.1.1.2.1. Menata kawasan permukiman perkotaan kecil dan permukiman kumuh. 3.2.1.1.2.2. Melaksanakan penanganan berkelanjutan abrasi sempadan sungai dan pantai yang berdampak langsung/tidak langsung kepada kelangsungan kawasan permukiman. |
| | | | 3.2.1.1.3. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana utilitas umum kawasan pemukiman. | 3.2.1.1.3.1. Mengupayakan penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan. |
| | | | | 3.2.1.1.3.2. Melaksanakan pemberdayaan desa dan kelurahan dalam pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum. |
| | | | | 3.2.1.1.3.3. Mengupayakan pembangunan dan pengembangan Duri Central Park sebagai ruang hijau terbuka publik perkotaan kecil. |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|---|
| | | | 3.2.1.1.4. Penguatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat. | 3.2.1.1.4.1. Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga. |
| | | | 3.2.1.1.5. Pengoptimalan pengelolaan persampahan permukiman. | 3.2.1.1.5.1. Menyediakan sarana dan prasarana; serta mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas. |
| | 3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup. | 3.2.2.1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan. 3.2.2.2. Indeks Resiko Bencana. | 3.2.2.1.1. Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan. | 3.2.2.1.1.1. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup. |
| 3.2.2.1.1.2. Memfungsikan dengan baik Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang. | | | | |
| 3.2.2.1.1.3. Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang repsonsif dan dinamis. | | | | |
| 3.2.2.2.2. Peningkatan tata kelola potensi lestari kawasan perbatasan. | | | 3.2.2.2.2.1. Kemitraan pengembangan potensi kawasan perbatasan yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup. | |

1.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan dalam periode lima tahun pembangunan ini dirumuskan lagi menjadi rencana kerja tahunan pembangunan daerah dengan berfokus kepada penetapan tema dan prioritas sasaran makro yang akan dicapai.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Bengkalis dengan fokus atau penekanan arah pembangunan tahunan yang dideskripsikan pada Gambar VI-1 dan Tabel VI-2 berikut:



Gambar VI-1 Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Bengkalis

Tabel VI-2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkalis

| Arah Kebijakan | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Meningkatkan aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perekonomian masyarakat Memajukan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan pariwisata | Mengembangkan potensi wilayah perbatasan dan lokus pembangunan kawasan | <ul style="list-style-type: none"> Memantapkan kualitas sumberdaya manusia Memantapkan infrastruktur Memantapkan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera | <ul style="list-style-type: none"> Memantapkan Kesejahteraan masyarakat, Memantapkan Pelayanan Publik Memantapkan daya saing daerah |

Tahun 2022 (Tahun Pertama RPJMD)

Pada tahun pertama ini diharapkan pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai membaik Kembali. Fokus pembangunan pada penggalan kedua ini difokuskan pada Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Tahun 2023 (Tahun Kedua RPJMD)

Pada tahun kedua ini pembangunan daerah difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung Peningkatan perekonomian masyarakat dan memajukan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Pembangunan perekonomian diharapkan lebih terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang kokoh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Pembangunan perekonomian baik pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata yang mengarah pada industrialisasi dikuatkan pada penggalan ini dan dikoordinasikan secara lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terutama pada lokasi-lokasi pengembangan ekonomi potensial dan merupakan prioritas nasional serta lokasi prioritas perbatasan negara.

Tahun 2024 (Tahun Ketiga RPJMD)

Pada penggalan ketiga pembangunan jangka menengah ini difokuskan untuk mengembangkan lebih lanjut potensi wilayah perbatasan dan lokus pembangunan kawasan yang telah direncanakan pada pembangunan berbasis spasial Kabupaten Bengkalis. Penguatan lokus-lokus pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Pembangunan yang terarah dan terintegrasi pada lokus-lokus ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas secara ekonomi dan efektifitas pembangunan spasial daerah

Tahun 2025 (Tahun Keempat RPJMD)

Pada penggalan keempat apada RPJMD ini diarahkan pada Memantapkan kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur dan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sebelumnya yang diharapkan telah membentuk struktur perekonomian daerah yang kuat baik perekonomian yang mendukung industri maupun perekonomian berbasis masyarakat, kualitas sumberdaya yang memiliki daya saing yang baik serta infrastruktur konektifitas yang telah lancar antarkawasan.

Tahun 2026 (Tahun Kelima RPJMD)

Pada penggalan kelima atau penggalan terakhir pada RPJMD ini diarahkan pada Memantapkan Kesejahteraan masyarakat, Pelayanan Publik dan daya saing daerah. Pemantapan kesejahteraan masyarakat ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sumberdaya Manusia sebelumnya yang diharapkan akan meningkat baik pada Pendidikan, Kesehatan serta pendapatan masyarakat Kabupten Bengkalis. Pembangunan pada penggalan terakhir ini diharapkan dapat menyempurnakan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera.

3. Klaster pembangunan Kecamatan Rupert dan Rupert Utara sebagai Kawasan pariwisata unggulan.
4. Klaster pembangunan Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan.

Keterpaduan pembangunan di klaster-klaster tersebut akan menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien baik dari segi potensi keruangan maupun potensi alami kawasan tersebut. Pembangunan yang berorientasi pada klaster-klaster tersebut perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur konektivitas antarkawasan yaitu jaringan jalan, jembatan dan penyeberangan (ro-ro) yang kuat dan lancar serta pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat seperti air bersih, listrik dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pengembangan keempat klaster pembangunan kawasan ini juga sejalan dengan pola ruang pada RTRW Provinsi Riau, arah kebijakan pembangunan spasial Provinsi Riau dan agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJM Nasional 2020-2024 telah tertuang prioritas pembangunan nasional melalui kementerian dan Lembaga Negara antara lain seperti prioritas pengembangan sektor unggulan di Provinsi Riau yaitu pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi. Komoditas-komoditas tersebut merupakan potensi alami di wilayah klaster pembangunan kawasan ke 2 dan ke 4.

Selain itu, untuk pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas juga meliputi pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang tersebar di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang di Riau terdapat di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Prioritas ini merupakan potensi pada klaster 1 dan klaster 2. Sedangkan klaster 1 merupakan kawasan PKSN pariwisata nasional. Pemerintah pusat telah menekankan prioritas pengembangan Kawasan Pariwisata Rupert sebagai Kawasan Wisata Nasional. Hal ini tentunya sinergi dengan kebijakan klaster pengembangan kawasan pariwisata Pulau Rupert.

1.3.2 Pembangunan Kawasan Perbatasan Nasional

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah negara Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Sebagai wilayah perbatasan Republik Indonesia, Kabupaten Bengkalis mendapat perhatian khusus dengan menetapkan lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan khususnya di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupert, Rupert Utara dan Bandar Laksamana.

Untuk kawasan perbatasan ini, Kabupaten Bengkalis telah menetapkan kawasan perbatasan di lima kecamatan tersebut sebagai lokasi prioritas untuk akselerasi pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini memperkuat koordinasi dan dukungan serta pemantapan pembangunan daerah perbatasan yang umumnya juga merupakan daerah yang terisolir atau tertinggal. Beberapa prioritas nasional yang terkait dengan percepatan pembangunan lokasi prioritas perbatasan antara lain:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan yaitu kecamatan: Bengkalis, Bantan, Rupert, Rupert Utara dan Bandar Laksamana
- b) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Bengkalis.
- c) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup:

1. Perbaikan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi.
1. Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa;
3. Pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal;
4. Penataan ruang dan penetapan batas desa;
5. Serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - d) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 1. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
 2. Peningkatan konservasi hutan

1.4 Program Unggulan

Dalam pencapaian Visi dan Misi daerah, kepala daerah telah mengajukan beberapa kebijakan yang relatif spesifik pada kebijakan ataupun rencana program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut dipertimbangkan akan memberikan pengaruh besar secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan disinkronisasi kedalam bentuk formal rumusan arah kebijakan atau program maupun kedalam kegiatan pembangunan lima tahun ke depan.

Teradapat 8 kebijakan khusus dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kemudian dijabar melalui 18 nomenklatur program. Delapan kebijakan khusus tersebut adalah Bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurahan, Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera, Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi, Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat, Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau, Menjadikan Wisma Daerah Sebagai Rumah Aspirasi dan terakhir Stimulus Ekonomi bagi Pekerja Sektor Informal seperti buruh, petani, peternak, nelayan dan lain-lain, Peningkatan.

Untuk merealisasikan delapan kebijakan khusus ini, akan menyerap anggaran sebesar Rp. 372.653.797.644,00 pada tahun 2022. Target penggunaan anggaran ini selanjutnya meningkat menjadi Rp. 375.604.951.730,30 pada tahun 2023. Kebutuhan anggaran untuk delapan kebijakan khusus ini akan terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai Rp. 386.422.542.802,13, lalu pada tahun 2025 akan menelan anggaran hingga Rp. 397.258.620.332,36 dan terakhir pada tahun 2026 penggunaan anggaran untuk membiayai delapan program unggulan meningkat menjadi Rp. 407.917.479.315,75.

Penggunaan anggaran yang sangat besar untuk delapan kebijakan khusus ini diharapkan dapat direalisasikan dengan baik demi mencapai sasaran yang diinginkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Lebih rinci tentang kebijakan khusus daerah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel VI-3 Program Unggulan Daerah Kabupaten Bengkulu 2022-2026

| Program Unggulan | Bidang Urusan | Program | Tahun | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 372.653.797.644,00 | 375.604.951.730,30 | 386.422.542.802,13 | 397.258.620.332,36 | 407.917.479.315,75 | |
| 1. Bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurah) | (Belanja Transfer) | (Bantuan Keuangan) | 136.000.000.000,00 | 136.000.000.000,00 | 136.000.000.000,00 | 136.000.000.000,00 | 136.000.000.000,00 | BPKAD |
| | Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 11.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | Kecamatan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | |

| Program Unggulan | Bidang Urusan | Program | Tahun | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 372.653.797.644,00 | 375.604.951.730,30 | 386.422.542.802,13 | 397.258.620.332,36 | 407.917.479.315,75 | |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 14.500.000.000,00 | 15.225.000.000,00 | 15.986.250.000,00 | 16.785.562.500,00 | 17.624.840.625,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2. Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 1.900.000.000,00 | 1.995.000.000,00 | 2.094.750.000,00 | 2.199.487.500,00 | 2.309.461.875,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak | 220.000.000,00 | 231.000.000,00 | 242.550.000,00 | 254.677.500,00 | 267.411.375,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 400.000.000,00 | 420.000.000,00 | 441.000.000,00 | 463.050.000,00 | 486.202.500,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1.200.000.000,00 | 1.260.000.000,00 | 1.323.000.000,00 | 1.389.150.000,00 | 1.458.607.500,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3. Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi | Kepegawaian | Program Kepegawaian Daerah | 1.621.330.737,00 | 1.647.770.279,00 | 1.668.856.670,00 | 1.690.239.451,00 | 1.744.090.839,00 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| | Pendidikan dan Pelatihan | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.559.995.901,00 | 2.601.742.545,00 | 2.635.036.848,00 | 2.668.799.133,00 | 2.753.827.641,000 | |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | 2.295.585.100,00 | 2.410.364.355,00 | 2.530.882.572,75 | 2.657.426.701,39 | 2.790.298.036,46 | Dinas Pendidikan |
| | Sekretariat Daerah | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 16.644.000.000,00 | 17.476.200.000,00 | 18.350.010.000,00 | 19.267.510.500,00 | 20.230.886.025,00 | Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) |

| Program Unggulan | Bidang Urusan | Program | Tahun | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 372.653.797.644,00 | 375.604.951.730,30 | 386.422.542.802,13 | 397.258.620.332,36 | 407.917.479.315,75 | |
| 4. Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 65.037.919.000,00 | 68.289.814.950,00 | 71.704.305.697,50 | 75.289.520.982,38 | 79.053.997.031,49 | Dinas Kesehatan |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | Program Pemberdayaan Sosial | 454.350.000,00 | 477.067.500,00 | 500.920.875,00 | 525.966.918,75 | 552.265.264,69 | Dinas Sosial |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | 830.873.000,00 | 872.416.650,00 | 916.037.482,50 | 961.839.356,63 | 1.009.931.324,46 | Dinas Sosial |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 18.393.262.600,00 | 19.312.925.730,00 | 20.278.572.016,50 | 21.292.500.617,33 | 22.357.125.648,20 | Dinas Sosial |
| | | Program Penanganan Bencana | 1.299.220.000,00 | 1.364.181.000,00 | 1.432.390.050,00 | 1.504.009.552,50 | 1.579.210.030,13 | Dinas Sosial |
| 5. Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | Program Pengelolaan Pelayaran | 35.989.096.000,00 | 37.788.550.800,00 | 39.677.978.340,00 | 41.661.877.257,00 | 43.744.971.119,85 | Dinas Perhubungan |
| 6. Menjadikan Wisma Daerah Sebagai Rumah Aspirasi | Sekretariat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | Sekretariat Daerah (Bagian Umum) |
| 7. Pelayanan Sistem Kependudukan Berbasis Mobile | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.400.000.000,00 | - | - | - | - | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Program Unggulan | Bidang Urusan | Program | Tahun | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 372.653.797.644,00 | 375.604.951.730,30 | 386.422.542.802,13 | 397.258.620.332,36 | 407.917.479.315,75 | |
| | Dan Pencatatan Sipil | Program Pendaftaran Penduduk | 393.547.500,00 | 413.224.875,00 | 433.886.118,75 | 455.580.424,69 | 478.359.445,92 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 8. Stimulus Ekonomi bagi Pekerja Sektor Informal seperti buruh petani peternak nelayan dan lain-lain Peningkatan Lapangan Pekerjaan dan Penerapan Teknologi serta Inovasi Bidang Perekonomian | Urusan Pemerintah Bidang Industri | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 3.063.134.300,00 | 3.216.291.015,00 | 3.377.105.565,75 | 3.545.960.844,04 | 3.723.258.886,24 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 7.500.000.000,00 | 7.875.000.000,00 | 8.268.750.000,00 | 8.682.187.500,00 | 9.116.296.875,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 867.398.200,00 | 910.768.110,00 | 956.306.515,50 | 1.004.121.841,28 | 1.054.327.933,34 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah | Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) | 1.950.000.000,00 | 2.047.500.000,00 | 2.149.875.000,00 | 2.257.368.750,00 | 2.370.237.187,50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Pengembangan UMKM | 750.000.000,00 | 787.500.000,00 | 826.875.000,00 | 868.218.750,00 | 911.629.687,50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 702.908.154,00 | 738.053.561,70 | 774.956.239,79 | 813.704.051,77 | 854.389.254,36 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 509.983.334,00 | 535.482.500,70 | 562.256.625,74 | 590.369.457,02 | 619.887.929,87 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 843.115.000,00 | 885.270.750,00 | 929.534.287,50 | 976.011.001,88 | 1.024.811.551,96 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan |

| Program Unggulan | Bidang Urusan | Program | Tahun | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 372.653.797.644,00 | 375.604.951.730,30 | 386.422.542.802,13 | 397.258.620.332,36 | 407.917.479.315,75 | |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1.068.271.000,00 | 1.121.684.550,00 | 1.177.768.777,50 | 1.236.657.216,38 | 1.298.490.077,19 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 296.100.000,00 | 310.905.000,00 | 326.450.250,00 | 342.772.762,50 | 359.911.400,63 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1.313.381.818,00 | 1.379.050.908,90 | 1.448.003.454,35 | 1.520.403.627,06 | 1.596.423.808,42 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 2.500.000.000,00 | 2.625.000.000,00 | 2.756.250.000,00 | 2.894.062.500,00 | 3.038.765.625,00 | Dinas Perkebunan |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 4.052.053.000,00 | 3.759.000.000,00 | 4.467.388.432,50 | 4.690.757.854,13 | 4.925.295.746,83 | Dinas Perkebunan |
| | | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 514.501.000,00 | 540.226.050,00 | 567.237.352,50 | 595.599.220,13 | 625.379.181,13 | Dinas Perkebunan |
| | | Program Perizinan Usaha Pertanian | 925.000.000,00 | 971.250.000,00 | 1.019.812.500,00 | 1.070.803.125,00 | 1.124.343.281,25 | Dinas Perkebunan |
| | | Program Penyuluhan Pertanian | 725.000.000,00 | 761.250.000,00 | 799.312.500,00 | 839.278.125,00 | 81.242.031,25 | Dinas Perkebunan |
| | Urusan Pemerintahan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 2.525.000.000,00 | 2.651.250.000,00 | 2.783.812.500,00 | 2.923.003.125,00 | 3.069.153.281,25 | Dinas Perikanan |

| Program Unggulan | Bidang Urusan | Program | Tahun | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 372.653.797.644,00 | 375.604.951.730,30 | 386.422.542.802,13 | 397.258.620.332,36 | 407.917.479.315,75 | |
| | Bidang Kelautan dan Perikanan | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 2.943.772.000,00 | 3.090.960.600,00 | 3.245.508.630,00 | 3.407.784.061,50 | 3.578.173.264,58 | Dinas Perikanan |
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 965.000.000,00 | 1.013.250.000,00 | 1.063.912.500,00 | 1.117.108.125,00 | 1.172.963.531,25 | Dinas Perikanan |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | Program Perencanaan Tenaga Kerja | 250.000.000,00 | 262.500.000,00 | 275.625.000,00 | 289.406.250,00 | 303.876.562,50 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.650.000.000,00 | 1.732.500.000,00 | 1.819.125.000,00 | 1.910.081.250,00 | 2.005.585.312,50 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 110.250.000,00 | 115.762.500,00 | 121.550.625,00 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

Program unggulan daerah pada periode RPJMD 2021-2026 ini yang telah dituangkan dalam arahan-arahan kebijakan daerah merupakan hasil identifikasi dari kepala daerah beserta tim pendukung untuk memetakan masalah-masalah yang dipandang penting yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah teridentifikasi tersebut secara umum disusun sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, percepatan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat serta penguatan sumberdaya daerah mulai dari ujung awal pengembangan keluarga yang kuat dan sehat terutama ibu dan anak. Program unggulan ini merupakan prioritas pembangunan yang telah disampaikan dan dijanjikan oleh calon kepala daerah yang telah terpilih pada saat kampanye pilkada. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ini telah tertuang dalam program-program prioritas daerah pada RPJMD 2021-2026 ini. Selanjutnya diharapkan agar semua OPD dan komponen pelaksana pembangunan lainnya dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan yang merupakan prioritas ini dalam penyusunan detail kegiatan-kegiatan pembangunan tahunan pada periode RPJMD 2021-2026 ini.

1.5 Integrasi KLHS Terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Bengkalis

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Daerah, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Mengingat pentingnya KLHS RPJMD, maka hasilnya akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyusun RPJMD.

Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis pada pembangunan ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata Kelola kelembagaan yang terjadi saat ini sesuai hasil dari KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis identifikasi isu strategis di Kabupaten Bengkalis baik dilihat dari relevansi DDDTLH maupun pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Bab V dokumen KLHS Kabupaten Bengkalis, maka didapat isu strategis Kabupaten Bengkalis sebanyak 32 isu strategis. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel VI-4 Isu Strategis Kabupaten Bengkalis dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

| No | TPB | No Isu | Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan |
|----|--|--------|--|--|
| 1 | Tujuan 1 Mengentaskan segala bentuk kemiskinan | 1 | Rendahnya perlindungan jaminan kesehatan, bantuan keluarga harapan, dan partisipasi kepemilikan akta kelahiran | Proporsi peserta jaminan kesehatan pada tahun 2019 hanya sebesar 68%. Tingkat kepemilikan akta kelahiran anak hanya sebesar 65%. Selain itu, jumlah rumah tangga yang mendapat program bantuan keluarga harapan belum mengalami penurunan (masih meningkat). |
| | | 2 | Belum optimalnya ketersediaan data program kemiskinan, dampak ekonomi bencana sosial, dan layanan pokok | Pendataan sumber daya untuk program pengurangan kemiskinan dan dampak ekonomi akibat bencana sosial belum optimal. |
| 2 | Tujuan 2 Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan | 3 | Rendahnya ketahanan pangan dan pola pangan harapan | Tingkat Pola Pangan harapan tahun 2019 sebesar 92% sedangkan target nasional 92,5%. Selain itu, prevalensi kerawanan pangan cenderung meningkat. |
| | | 4 | Belum tersedianya data nilai tambah tenaga kerja dari sektor pertanian | Pendataan tenaga kerja khusus sektor pertanian belum tersedia. |
| 3 | Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia | 5 | Masih tingginya persentase penduduk mengkonsumsi alkohol, merokok, obesitas dan Total Fertility Rate (TFR) | Total Fertility Rate (TFR) belum mencapai target nasional yakni menurun menjadi 2,28. Selain itu, tingkat persentase penduduk mengkonsumsi alkohol, merokok, obesitas masih tinggi |
| | | 6 | Belum tersedianya data eliminasi filariasis, unmeet need pelayanan kesehatan dan proporsi kematian akibat keracunan | Pendataan eliminasi filariasis, unmeet need pelayanan kesehatan dan proporsi kematian akibat keracunan belum optimal |
| 4 | Tujuan 4 Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua | 7 | Belum optimalnya peningkatan APK dan persentase akreditasi pada pendidikan dasar | Nilai APK dan persentase akreditasi pada pendidikan dasar belum mencapai target nasional. APK pada SD/MI hanya 108,6% (Target: 114,09%), dan APK SMP/MTs hanya 95% (Target: 106,94%). |
| | | 8 | Belum tersedianya data keterampilan teknologi dan proporsi kelengkapan infrastruktur di sekolah | Belum tersedianya data proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) |
| 5 | Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan | 9 | Belum optimalnya sistem pendataan kesejahteraan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan belum optimal. Persentase layanan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan belum mencapai target nasional, yakni sebesar 25%. |
| | | 10 | Belum optimalnya pemahaman dan kemandirian dalam pelaksanaan program KB | Sistem pendataan dan sosialisasi mencapai kemandirian program KB belum optimal dilakukan. Unmeet need KB sebesar 14,9% (Target 9,9%). |
| 6 | Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | 11 | Terbatasnya akses air minum, air baku, sanitasi layak dan pengelolaan air limbah | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 93,1% (Target 100%). Sistem Pengelolaan air limbah komunal, khususnya limbah domestik belum optimal dilaksanakan. |
| | | 12 | Belum optimalnya konservasi sumber daya air tanah dan permukaan | Sebagian besar Kab Bengkalis berada dilahan gambut dan pesisir. Penerapan kebijakan pengelolaan konservasi sumberdaya air tanah dan permukaan (sungai dan danau) dinilai belum optimal. |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | 13 | Rendahnya pertumbuhan kontribusi PDB | Pertumbuhan PDB Kabupaten Bengkalis tergolong rendah dan cenderung menurun yakni -1,9% pada tahun 2019 |
| | | 14 | Belum tersedianya data sebaran lembaga keuangan dan akses UMKM, usia muda tidak sekolah, serta persentase pekerja sektor informal dan pariwisata | Sistem pendataan lembaga keuangan dan akses UMKM, usia muda tidak sekolah, serta persentase pekerja sektor informal dan pariwisata belum optimal |

| No | TPB | No Isu | Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan |
|----|---|--------|--|---|
| 9 | Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | 15 | Belum optimalnya pengembangan dermaga penyeberangan | Dermaga penyeberangan yang tersedia sebanyak 3 unit. Namun pengembangan dermaga yang dilakukan belum optimal |
| | | 16 | Belum tersedianya data tenaga kerja manufaktur, serta proporsi kontribusi dan pinjaman industri kecil | Sistem pendataan tenaga kerja manufaktur, serta proporsi kontribusi dan pinjaman industri kecil belum tersedia |
| | | 17 | Belum tersedianya data layanan mobile <i>boardband</i> | Data layanan mobile <i>boardband</i> belum tersedia |
| 10 | Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara | 18 | Belum tersedianya data pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal dan penyandang difabilitas | Sistem pendataan pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal dan penyandang difabilitas belum tersedia |
| | | 19 | Masih rendahnya indeks kebebasan sipil | Indeks kebebasan sipil hanya 80,0% (Target 87%) |
| 11 | Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | 20 | Belum tersedianya data lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi kebencanaan | Sistem pendataan lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi kebencanaan belum tersedia |
| | | 21 | Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan | Persentase sampah yang tertangani sebesar 51,9% (Target 80%) |
| 12 | Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | 22 | Belum optimalnya fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister | Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister pada fasilitas publik belum optimal |
| 13 | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | 23 | Belum tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah belum tersedia |
| 14 | Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan | 24 | Belum tersedianya data kesepakatan pengelolaan sumberdaya perikanan laut | Pengelolaan sumberdaya laut telah menjadi kewenangan provinsi. Namun aktifitas pemanfaatan perikanan seperti nelayan tetap perlu menjadi perhatian. Namun kebijakan kesepakatan pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut belum tersedia. |
| | | 25 | Belum optimalnya peningkatan luas konservasi kawasan perairan | Kab Bengkalis merupakan kawasan pesisir yang rentan terjadi abrasi pantai. Luas kawasan konservasi perairan (sempadan pantai) yakni 65,7 ha. Upaya konservasi perairan tersebut perlu dioptimalkan. |
| 15 | Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | 26 | Belum tersedianya data kerangka legislasi dan kebijakan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan genetik. | Kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan pembagian keuntungan yang adil dan merata terhadap perlindungan ekosistem dan sumber daya alam belum tersedia ditingkat daerah. |
| 16 | Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | 27 | Belum tersedianya data persepsi keamanan masyarakat dan kekerasan anak | Sistem pendataan persepsi keamanan masyarakat dan kekerasan anak belum tersedia |
| | | 28 | Belum tersedianya data tingkat kepatuhan UU dalam pelayanan publik, pengadaan E-Procurement, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi | Pendataan tingkat kepatuhan UU dalam pelayanan publik, pengadaan E-Procurement, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi belum tersedia |
| | | 29 | Belum optimalnya persentase kepemilikan akta kelahiran, khususnya pada kelompok berpendapatan bawah | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran masih rendah yakni sebesar 62%. Untuk data kepemilikan akta kelahiran secara khususnya pada kelompok berpendapatan bawah belum tersedia |
| 17 | Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | 30 | Masih rendahnya kontribusi pajak terhadap PDB dan pembangunan daerah | Kontribusi pajak terhadap PDB belum mencapai target nasional yakni 10,3% (Target 12%) |

| No | TPB | No Isu | Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan |
|----|-----|--------|--|---|
| | | 31 | Belum tersedianya informasi pembangunan daerah dengan melibatkan peran badan usaha | Perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan badan usaha dan filantropi belum dilakukan secara optimal. |
| | | 32 | Belum tersedianya data akses telekomunikasi universal dan internet pada berbagai wilayah | Sistem pendataan akses telekomunikasi universal dan internet di daerah belum tersedia |

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis, 2020

Untuk selanjutnya isu strategis dalam KLHS disinkronkan pada arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis yang menghasilkan 25 arah kebijakan yang bersingungan langsung terhadap 32 isu strategis yang terdapat dalam rekomendasi dokumen KLHS. Hal ini dilakukan untuk menentukan prioritas di dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah. Untuk melihat hasil dari singkorinsai isu strategis tersebut dapat dilihat pada Tabe VI-5. Tabel tersebut juga menunjukkan adanya tantangan yang signifikan di Daerah dalam mencapai beberapa target TPB.

Tabel VI-5 Sikronisasi Isu Strategis KLHS Terhadap Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

| Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan | Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026 | Program |
|---|--|---|---|
| Mengentaskan segala bentuk kemiskinan | Rendahnya perlindungan jaminan kesehatan, bantuan keluarga harapan, dan partisipasi kepemilikan akta kelahiran | Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. |
| | | Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. |
| | | | Program Pemberdayaan Sosial. |
| | | Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan | Program Pendaftaran Penduduk. |
| | | | Program Pencatatan Sipil. |
| | | Belum optimalnya ketersediaan data program kemiskinan, dampak ekonomi bencana sosial, dan layanan pokok | Menyedaikan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi. |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. | | |
| | Program Penanganan Bencana. | | |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. | | |
| | Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan | Rendahnya ketahanan pangan dan pola pangan harapan | Menjamin ketersediaan Pangan bagi masyarakat |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. | | | |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan. | | | |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan. | | | |
| Belum tersedianya data nilai tambah tenaga kerja dari sektor pertanian | | Meningkatkan kualitas kelembagaan pelatihan kerja. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. |
| | | | Program Penyuluhan Pertanian. |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. |
| Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia | Masih tingginya persentase penduduk mengkonsumsi alkohol, merokok, obesitas dan Total Fertility Rate (TFR) | Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |

| Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan | Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026 | Program | |
|---|---|---|---|--|
| | Belum tersedianya data eliminasi filariasis, unmeet need pelayanan kesehatan dan proporsi kematian akibat keracunan | Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. | |
| Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua | Belum optimalnya peningkatan APK dan persentase akreditasi pada pendidikan dasar | Fasilitasi cakupan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya pada jenjang PAUD. | Program Pengelolaan Pendidikan. | |
| | | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. | |
| | Belum tersedianya data keterampilan teknologi dan proporsi kelengkapan infrastruktur di sekolah | Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard pendidikan | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. | |
| | | | Program Pengelolaan Pendidikan. | |
| Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan | Belum optimalnya sistem pendataan kesejahteraan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. | Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat. | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | | | Program Perlindungan Perempuan | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | |
| | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | |
| | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | Belum optimalnya pemahaman dan kemandirian dalam pelaksanaan program KB | Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat. | Program Pengendalian Penduduk. | |
| | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). | |
| | | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). | |
| | | | | |
| Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | Terbatasnya akses air minum, air baku, sanitasi layak dan pengelolaan air limbah | Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. | |
| | | | Mengupayakan penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). |
| | | | | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh. |
| | | | | Program Pengembangan Perumahan. |
| | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. |
| | Menyediakan sarana dan prasarana; serta mengembangkannya | Program Pengelolaan Persampahan | | |

| Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan | Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026 | Program |
|--|---|--|---|
| | | n sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas. | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. |
| | Belum optimalnya konservasi sumber daya air tanah dan permukaan | Menyelenggarakan tata kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | Rendahnya pertumbuhan kontribusi PDB | Menumbuhkan dan Mengembangkan Industri Kreatif | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. |
| | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota. |
| | | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. |
| | | Meningkatkan kualitas kelembagaan pelatihan kerja. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. |
| | | | Program Penempatan Tenaga Kerja. |
| | | | Program Perencanaan Tenaga Kerja. |
| | | Memberikan stimulus ekonomi dan penyediaan sarana prasarana pendukung usaha pertanian dan perikanan. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian. |
| | | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. |
| | | Melaksanakan kerjasama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan |
| | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan. |
| | | Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan. | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah. |
| | | | Program Perizinan Usaha Pertanian. |
| | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. |
| | | Mengembangkan dan mengimplemen tasikan model tata kelola potensi wisata terpadu. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. | | | |
| Program Informasi Dan Komunikasi Publik. | | | |
| Mengupayakan penyediaan sarana | Program Pengembangan UMKM. | | |

| Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan | Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026 | Program | |
|---|--|--|---|--|
| | | dan prasarana pendukung produktivitas usaha mikro dan kecil serta menengah. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). | |
| | | | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. | |
| | | | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. | |
| | Belum tersedianya data sebaran lembaga keuangan dan akses UMKM, usia muda tidak sekolah, serta persentase pekerja sektor informal dan pariwisata | Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi perluasan jangkauan promosi produk usaha mikro dan kecil serta menengah. | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. | |
| | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). | |
| | | | Program Informasi Dan Komunikasi Publik. | |
| | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. | |
| | | Mengembangkan dan mengimplementasikan model tata kelola potensi wisata terpadu. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. | |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. | |
| | | | Program Informasi Dan Komunikasi Publik. | |
| Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | Belum optimalnya pengembangan dermaga penyeberangan | Mengembangkan sistem jasa pelayanan ro-ro yang lebih memadai. | Program Pengelolaan Pelayaran. | |
| | Belum tersedianya data tenaga kerja manufaktur, serta proporsi kontribusi dan pinjaman industri kecil | Menumbuhkan dan Mengembangkan Industri Kreatif. | Program Penempatan Tenaga Kerja. | |
| | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota. | |
| | | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. | |
| | Belum tersedianya data layanan mobile boardband | Pengembangan kebijakan, tata Kelola dan pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. | Program Informasi Dan Komunikasi Publik. | |
| | | | Program Aplikasi Informatika. | |
| | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. | |
| | Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara | Belum tersedianya data pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal dan penyandang difabilitas | Sinergisitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. |
| | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. |
| | | Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. | |
| | | | Program Rehabilitasi Sosial. | |
| | | | Program Pemberdayaan Sosial. | |

| Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan | Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026 | Program | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | Masih rendahnya indeks kebebasan sipil | Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level. | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat. | | |
| | | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | |
| | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | |
| | | Sinergisitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. | | |
| | | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. | | |
| | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. | | |
| | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. | | |
| | | Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | Belum tersedianya data lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi kebencanaan | Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis. | Program Penanggulangan Bencana |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. | | | | | |
| Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian. | | | | | |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | | |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | | | | | |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | | | | | |
| Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan | Menyediakan sarana dan prasarana; serta mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas. | | | | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional |
| | | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. |
| | | | Program Pencatatan Sipil | | |

| Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan | Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026 | Program |
|---|---|--|--|
| Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | Belum optimalnya fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan non kependudukan. | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | | | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam |
| | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |
| Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | Belum tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah | Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup | Program Perencanaan Lingkungan Hidup |
| | | Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis. | Program Penanggulangan Bencana |
| Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan | Belum tersedianya data kesepakatan pengelolaan sumberdaya perikanan laut. | Pelaksanaan kerja sama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan |
| | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | Belum optimalnya peningkatan luas konservasi kawasan perairan | Pelaksanaan kerja sama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman. | Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | | Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup. |
| Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | Belum tersedianya data kerangka legislasi dan kebijakan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan genetik. | Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). |
| | | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup |
| Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses | Belum tersedianya data persepsi keamanan masyarakat dan kekerasan anak | Meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok dan organisasi kepemudaan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak |

| Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan | Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026 | Program | |
|--|--|---|---|--|
| Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | |
| | | | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | |
| | | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | |
| | Belum tersedianya data tingkat kepatuhan UU dalam pelayanan publik, pengadaan E-Procurement, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi | | Menyediakan kebijakan tata kelola dalam mengembangkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. | Program Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | Program Aplikasi Informatika |
| | | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |
| | | | | Program Pengelolaan Arsip |
| | | | Melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan kegiatan. | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| | Belum optimalnya persentase kepemilikan akta kelahiran, khususnya pada kelompok berpendapatan bawah | | Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan non kependudukan. | Program Pendaftaran Penduduk |
| Program Pencatatan Sipil | | | | |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | |
| Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | Masih rendahnya kontribusi pajak terhadap PDB dan pembangunan daerah | Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | Menyesuaikan semua regulasi daerah terkait penerimaan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi serta potensi-potensi penerimaan daerah. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | Belum tersedianya informasi pembangunan daerah dengan melibatkan peran badan usaha | | Menyediakan kebijakan tata kelola dalam mengembangkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. | Program Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | | | Sinergisitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta provinsi dan seluruh pemangku kepentingan. |

| Isu Strategis | Deskripsi Permasalahan | Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026 | Program |
|---------------|--|---|--|
| | Belum tersedianya data akses telekomunikasi universal dan internet pada berbagai wilayah | Menyediakan kebijakan tata kelola dalam mengembangkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. | Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |

1.6 Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis akan dijabarkan dalam program pembangunan. Program pembangunan berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada subbab ini akan disajikan program pembangunan daerah, yaitu program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 disajikan per misi yang selanjutnya dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasarannya masing-masing. Lebih detail mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 disajikan pada table berikut ini.

Tabel VI-6 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman | Pertumbuhan Ekonomi | -1,08% | -1,02% | -0,64% | -0,25% | 0,13% | 0,51% | 0,51% | | | | | | |
| | 1.1.1 Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah | Pertumbuhan Agregat Sektoral di Luar Migas (%) | 0,95% | 1,25% | 1,75% | 2,25% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | | | | | | |
| | | Angka Pengangguran | 9,00% | 8,75% | 8,64% | 8,54% | 8,44% | 8,34% | 8,34% | | | | | | |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Jumlah sentra IKM yg dikembangkan; Jumlah IKM baru | 5; 50 | 5; 50 | 1.962.663.524 | 8; 50 | 1.994.669.285 | 10;50 | 2.020.194.917 | 10; 50 | 2.046.079.335 | 15; 50 | 2.111.267.858 | 15; 100 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase kreatifias usaha ekonomi yang dihasilkan | 60% | 65% | 628.621.216 | 70% | 638.872.336 | 75% | 647.047.937 | 80% | 655.338.454 | 85% | 676.217.676 | 95% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase Produk Unggulan IKM yg dipromosikan | 64% | 71% | 853.331.967 | 78% | 867.247.515 | 85% | 878.345.616 | 92% | 889.599.711 | 100% | 917.942.547 | 100% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Pelaksanaan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 100% | 100% | 275.000.000 | 100% | 302.000.600 | 100% | 332.750.000 | 100% | 366.025.000 | 100% | 402.627.000 | 100% | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota | Persentase pelaku usaha IKM yg difasilitasi izinnya | 100% | 100% | 341.332.787 | 100% | 346.899.006 | 100% | 351.338.246 | 100% | 355.839.884 | 100% | 367.177.019 | 100% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase tersedianya data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenaga Kerjaan serta Ketrasmigrasian se Kabupaten Bengkalis | 50% | 85% | 383.999.385 | 87% | 390.261.382 | 90% | 395.255.527 | 92% | 400.319.870 | 93% | 413.074.146 | 93% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kerja dengan sertifikasi Kompetensi di Kabupaten Bengkalis | 10% | 15% | 1.535.997.541 | 20% | 1.561.045.527 | 25% | 1.581.022.109 | 30% | 1.601.279.480 | 35% | 1.652.296.585 | 35% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Bengkalis | 75% | 80% | 255.999.590 | 83% | 260.174.255 | 85% | 263.503.685 | 87% | 266.879.913 | 90% | 275.382.764 | 90% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Program Hubungan Industrial | Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Bengkalis | 86% | 90% | 383.999.385 | 93% | 390.261.382 | 95% | 395.255.527 | 97% | 400.319.870 | 100% | 413.074.146 | 100% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan | 100% | 100% | 2.827.373.251 | 100% | 2.873.480.100 | 100% | 2.910.251.808 | 100% | 2.947.540.376 | 100% | 3.041.449.639 | 100% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan prasarana produksi Perkebunan | 75% | 80% | 477.865.902 | 82% | 485.658.608 | 85% | 491.873.545 | 87% | 498.175.838 | 90% | 514.047.826 | 90% | Dinas Perkebunan |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Sarana Pertanian yang dikembangkan | 100% | 100% | 2.468.973.825 | 100% | 2.509.236.143 | 100% | 2.541.346.649 | 100% | 2.573.908.497 | 100% | 2.655.913.769 | 100% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Peningkatan sarana produksi Perkebunan | 75% | 80% | 3.583.994.261 | 82% | 3.642.439.563 | 85% | 3.689.051.587 | 87% | 3.736.318.786 | 90% | 3.855.358.697 | 90% | Dinas Perkebunan |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 85,63% | 89,51% | 2.190.218.715 | 92,83% | 2.225.935.289 | 94,23% | 2.254.420.414 | 100% | 2.283.305.925 | 100% | 2.356.052.537 | 100% | Dinas Perikanan |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 82,50% | 83,33% | 3.783.105.054 | 90% | 3.844.797.317 | 95,88% | 3.893.998.898 | 98,75% | 3.943.892.052 | 100% | 4.069.545.292 | 100% | Dinas Perikanan |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase tingkat konsumsi ikan | 90% | 95,16% | 995.553.962 | 95,70% | 1.011.788.768 | 97,59% | 1.024.736.552 | 98,18% | 1.037.866.330 | 100% | 1.070.932.972 | 100% | Dinas Perikanan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|----------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|
| | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 88% | 89% | 318.577.268 | 89,50% | 323.772.406 | 90% | 174.297.118 | 90,50% | 177.401.298 | 91% | 184.541.938 | 91% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase peningkatan kompetensi penyuluh | 100% | 100% | 3.345.061.311 | 100% | 3.399.610.259 | 100% | 3.443.114.815 | 100% | 3.487.230.867 | 100% | 3.598.334.784 | 100% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase peningkatan kompetensi penyuluh perkebunan | 75% | 80% | 637.154.535 | 82% | 647.544.811 | 85% | 655.831.393 | 87% | 664.234.451 | 90% | 685.397.102 | 90% | Dinas Perkebunan |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase peningkatan Kesehatan Hewan, dan pencegahan/ penanganan Wabah Penyakit Hewan Menular | 100% | 100% | 2.429.151.666 | 100% | 2.468.764.593 | 100% | 2.500.357.187 | 100% | 2.532.393.844 | 100% | 2.613.076.450 | 100% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan |
| | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya | 82% | 85% | 597.332.377 | 90% | 607.073.261 | 94% | 614.841.931 | 97% | 622.719.798 | 100% | 642.559.783 | 100% | Dinas Perikanan |
| | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah | 5% | 5% | 162.133.074 | 8% | 164.777.028 | 11% | 166.885.667 | 14% | 169.023.945 | 17% | 174.409.084 | 17% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase pengawasan dan perizinan usaha perkebunan | 75% | 80% | 358.399.426 | 82% | 364.243.956 | 85% | 368.905.159 | 87% | 373.631.879 | 90% | 385.535.870 | 90% | Dinas Perkebunan |
| | Program Penetapan Tanah Ulayat | Persentase Penetapan Tanah Ulayat | 8% | 8% | 298.666.188 | 8% | 303.536.630 | 9% | 307.420.966 | 10% | 311.359.899 | 13% | 321.279.891 | 15% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase pelaksanaan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan | 5% | 5% | 238.932.951 | 8% | 242.829.304 | 11% | 245.936.772 | 14% | 249.087.919 | 17% | 257.023.913 | 17% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Destinasi Pariwisata Daerah yang Dikembangkan | 10% | 15% | 3.094.750.600 | 20% | 3.145.217.654 | 25% | 3.185.466.767 | 30% | 3.226.281.619 | 35% | 3.329.071.637 | 35% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase Kunjungan wisata | 80% | 85% | 290.132.869 | 90% | 294.864.155 | 95% | 298.637.509 | 100% | 302.463.902 | 100% | 312.100.466 | 100% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase kewirausahaan kreatif baru | 25% | 30% | 3.288.172.513 | 40% | 3.341.793.758 | 45% | 3.384.558.440 | 50% | 3.427.924.220 | 55% | 3.537.138.614 | 55% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pengembangan UMKM | Persentase fasilitasi peningkatan pengembangan UMKM yang dilakukan | 15% | 16% | 614.399.016 | 17% | 624.418.211 | 18% | 632.408.844 | 19% | 640.511.792 | 20% | 660.918.634 | 20% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase produk UMKM yang diberdayakan | 11% | 15% | 1.604.264.098 | 20% | 1.630.425.328 | 25% | 1.651.289.758 | 30% | 1.672.447.457 | 35% | 1.725.731.988 | 40% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi yang diurus | 45% | 50% | 819.198.688 | 55% | 832.557.614 | 60% | 843.211.791 | 65% | 854.015.723 | 70% | 881.224.845 | 70% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perkoperasian | 45% | 50% | 699.732.213 | 55% | 711.142.962 | 60% | 720.243.405 | 65% | 729.471.763 | 70% | 752.712.889 | 70% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang dilakukan | 45% | 50% | 409.599.344 | 55% | 416.278.807 | 60% | 421.605.896 | 65% | 427.007.861 | 70% | 440.612.423 | 70% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilakukan | 45% | 50% | 665.598.934 | 55% | 676.453.062 | 60% | 685.109.580 | 65% | 693.887.775 | 70% | 715.995.187 | 70% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Persentase Koperasi Sehat | 20% | 22% | 597.332.377 | 25% | 607.073.261 | 28% | 614.841.931 | 32% | 622.719.798 | 35% | 642.559.783 | 35% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase pelaksanaan tertib ukur UTTP | 4293 | 88% | 910.220.765 | 91% | 925.064.016 | 95% | 936.901.990 | 97% | 948.906.358 | 100% | 979.138.717 | 100% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Desa yang dilakukan | 100% | 100% | 5.560.879.985 | 100% | 5.651.562.973 | 100% | 5.723.885.598 | 100% | 5.797.224.783 | 100% | 5.981.925.598 | 100% | Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|------------------------------------|--|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Pasar yang dikelola Pemda | 30% | 100% | 2.616.884.699 | 100% | 2.659.559.046 | 100% | 2.693.593.222 | 100% | 2.728.105.780 | 100% | 2.815.023.811 | 100% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Koordinasi, Pemantauan dan Penataan Kebijakan | 40% | 50% | 12.515.535.516 | 60% | 12.719.630.220 | 70% | 12.882.402.368 | 80% | 13.047.462.428 | 90% | 13.463.157.356 | 95% | Sekretariat Daerah |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase Data IKM yang dipublikasikan | 60% | 65% | 540.443.579 | 79% | 549.256.760 | 85% | 556.285.557 | 90% | 563.413.150 | 95% | 581.363.613 | 98% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Persentase pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi | 100% | 100% | 113.777.596 | 100% | 115.633.002 | 100% | 117.112.749 | 100% | 118.613.295 | 100% | 122.392.340 | 100% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase pelaksanaan pembangunan kawasan Transmigrasi | 100% | 100% | 113.777.596 | 100% | 115.633.002 | 100% | 117.112.749 | 100% | 118.613.295 | 100% | 122.392.340 | 100% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Program Penataan Desa | Persentase Sarana Desa yang didefenitifkan | 100% | 12 Desa | 981.331.762 | 12 Desa | 997.334.642 | - | 1.010.097.458 | - | 1.023.039.668 | - | 1.055.633.929 | 36 Desa | Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase pelaksanaan pembentukan BKAD yang difasilitasi | 100% | 100% | 327.110.587 | 100% | 332.444.881 | 100% | 336.699.153 | 100% | 341.013.223 | 100% | 351.877.976 | 100% | Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | 1.1.2 Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi | Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta Rp/ Kapita/ Tahun *ADHB) | 202,54 | 201,17 | | 201,29 | | 201,78 | | 203,21 | | 205,59 | | 205,59 | |
| | | Angka Kemiskinan | 6% | 6,07% | | 5,94% | | 5,81% | | 5,69% | | 5,56% | | 5,56% | |
| | | Gini Ratio | 0,283 | 0,279 | | 0,278 | | 0,277 | | 0,276 | | 0,275 | | 0,275 | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 1.036.798.340 | 100% | 1.053.705.731 | 100% | 1.067.189.923 | 100% | 1.080.863.649 | 100% | 1.115.300.195 | 100% | Kecamatan Bantan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | 100% | Kecamatan Bandar Laksamana |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 844.798.647 | 100% | 858.575.040 | 100% | 869.562.160 | 100% | 880.703.714 | 100% | 908.763.122 | 100% | Kecamatan Siak Kecil |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 1.036.798.340 | 100% | 1.053.705.731 | 100% | 1.067.189.923 | 100% | 1.080.863.649 | 100% | 1.115.300.195 | 100% | Kecamatan Bathin Solapan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 1.107.198.227 | 100% | 1.125.253.651 | 100% | 1.139.653.437 | 100% | 1.154.255.625 | 100% | 1.191.030.455 | 100% | Kecamatan Talang Muandau |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 1.013.189.489 | 100% | 1.029.711.883 | 100% | 1.042.889.028 | 100% | 1.056.251.390 | 100% | 1.089.903.784 | 100% | Kecamatan Rupat Utara |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial | 100% | 100% | 1.092.264.918 | 100% | 1.110.076.819 | 100% | 1.124.282.388 | 100% | 1.138.687.630 | 100% | 1.174.966.460 | 100% | Dinas Sosial |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial | 78% | 80% | 18.022.371.143 | 90% | 18.316.267.517 | 91% | 18.550.659.410 | 92% | 18.788.345.896 | 95% | 19.386.946.593 | 95% | Dinas Sosial |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 100% | 100% | 1.706.663.934 | 100% | 1.734.495.030 | 100% | 1.756.691.232 | 100% | 1.779.199.422 | 100% | 1.835.885.094 | 100% | Dinas Sosial |
| | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun | 100% | 100% | 102.399.836 | 100% | 104.069.702 | 100% | 105.401.474 | 100% | 106.751.965 | 100% | 110.153.106 | 100% | Dinas Sosial |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 88 | 89 | 1.592.886.338 | 89,5 | 1.618.862.028 | 90 | 1.946.999.449 | 90,5 | 1.971.946.026 | 91 | 2.034.772.646 | 91 | Dinas Ketahanan Pangan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase penyediaan lumbung pangan dan pembinaan kelompok | 100% | 100% | 487.821.441 | 100% | 495.776.496 | 100% | 502.120.910 | 100% | 508.554.501 | 100% | 524.757.156 | 100% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pengujian Mutu dan Keamanan PSAT | 100% | 100% | 109.510.936 | 100% | 111.296.764 | 100% | 112.721.021 | 100% | 114.165.296 | 100% | 117.802.627 | 100% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase tingkat capaian Indeks Ketahanan Pangan | 72% | 75% | 99.555.396 | 85% | 101.178.877 | 90% | 102.473.655 | 92% | 103.786.633 | 95% | 107.093.297 | 95% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase ketersediaan Bapokting; jumlah paket bahan pokok penting yg diserahkan ke masyarakat kurang mampu | 100%; 0 | 100%; 13.000 | 625.776.776 | 100%; 13.000 | 635.981.511 | 100%; 13.000 | 644.120.118 | 100%; 13.000 | 652.373.121 | 100%; 13.000 | 673.157.868 | 100%; 13.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1.2 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | 74,06 | 74,47 | 74,88 | 75,3 | 75,71 | 76,12 | 76,12 | 76,12 | 76,12 | 76,12 | 76,12 | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | 1.2.1 Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing | Rata rata Lama Sekolah | 9,88 | 10,15 | | 10,37 | | 10,62 | | 10,85 | | 11,1 | | 11,1 | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APSe) Rata-Rata | 96,82% | 97,1% | 192.995.246.537 | 97,5% | 196.142.479.643 | 97,8% | 198.652.500.152 | 98,2% | 201.197.801.305 | 98,56% | 207.608.006.047 | 98,56% | Dinas Pendidikan |
| | 1.2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | 71,36 | 71,55 | | 71,71 | | 71,86 | | 72,03 | | 72,2 | | 72,2 | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 90% | 95% | 147.020.032.115 | 100% | 149.417.533.197 | 100% | 151.329.618.093 | 100% | 153.268.579.098 | 100% | 151.992.297.430 | 100% | Dinas Kesehatan |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit | 90% | 95% | 4.318.441.725 | 100% | 4.388.863.889 | 100% | 4.445.027.849 | 100% | 4.501.981.245 | 100% | 4.645.415.325 | 100% | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit | 100% | 100% | 8.706.686.859 | 100% | 8.848.669.491 | 100% | 8.961.905.247 | 100% | 9.076.732.635 | 100% | 9.365.919.268 | 100% | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 80% | 85% | 629.636.112 | 90% | 639.903.782 | 95% | 648.092.583 | 95% | 656.396.484 | 95% | 755.925.687 | 95% | Dinas Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 100% | 100% | 13.720.820.271 | 100% | 13.944.569.925 | 100% | 14.123.017.534 | 100% | 14.303.973.388 | 100% | 15.118.513.749 | 100% | Dinas Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase peningkatan dan pengembangan | 100% | 100% | 15.449.508.703 | 100% | 15.701.448.614 | 100% | 15.902.378.867 | 100% | 16.106.133.379 | 100% | 16.619.278.214 | 100% | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase peningkatan dan pengembangan Kapasitas sumberdaya Aparatur | 100% | 100% | 15.750.740.860 | 100% | 16.007.593.057 | 100% | 16.212.441.018 | 100% | 16.420.168.304 | 100% | 16.943.318.359 | 100% | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase pembinaan posyandu | 100% | 100% | 2.300.000.000 | 100% | 2.300.000.000 | 100% | 2.300.000.000 | 100% | 2.300.000.000 | 100% | 2.300.000.000 | 100% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 100% | 100% | 839.514.816 | 100% | 853.205.043 | 100% | 864.123.444 | 100% | 875.195.312 | 100% | 10.079.009.166 | 100% | Dinas Kesehatan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 100% | 100% | 49.190.321 | 100% | 49.992.483 | 100% | 50.632.233 | 100% | 51.280.975 | 100% | 52.914.798 | 100% | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau |
| | 1.3 Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif | Rasio PAD terhadap Total Pendapatan | 10,76% | 11,86% | | 12,77% | | 13,75% | | 14,84% | | 15,98% | | 15,98% | |
| | 1.3.1 Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset. | Persentase Petumbuhan PAD | 23,20% | 16,10% | | 13,13% | | 13,30% | | 13,48% | | 13,68% | | 13,68% | |
| | | Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur | 45% | 50% | | 55% | | 60% | | 65% | | 70% | | 70% | |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase pengelolaan pendapatan daerah | 100% | 100% | 7.913.231.774 | 100% | 8.042.275.289 | 100% | 8.145.191.679 | 100% | 8.249.554.653 | 100% | 8.512.387.219 | 100% | Badan Pendapatan Daerah |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Ketepatan waktu penyusunan APBD | 100% | 100% | 324.442.502.733 | 100% | 329.733.286.853 | 100% | 333.952.858.841 | 100% | 338.231.740.787 | 100% | 349.007.875.986 | 100% | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Penatausahaan Aset yang tertib dan terukur | 100% | 100% | 5.934.923.830 | 100% | 6.031.706.467 | 100% | 6.108.893.759 | 100% | 6.187.165.990 | 100% | 6.384.290.414 | 100% | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 1.3.2 Terciptanya iklim investasi yang kondusif | Nilai investasi (PMDN/PMA) | 5,2 Triliun | 4,8 Triliun | | 5,1 Triliun | | 5,3 Triliun | | 5,6 Triliun | | 5,9 Triliun | | 5,9 Triliun | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 100% | 100% | 34.133.279 | 100% | 34.689.901 | 100% | 35.133.825 | 100% | 35.583.988 | 100% | 36.717.702 | 100% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal | 100% | 100% | 204.799.672 | 100% | 208.139.404 | 100% | 210.802.948 | 100% | 213.503.931 | 100% | 220.306.211 | 100% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 100% | 100% | 136.533.115 | 100% | 138.759.602 | 100% | 140.535.299 | 100% | 142.335.954 | 100% | 146.870.808 | 100% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pelayanan Penanaman Modal | 100% | 100% | 318.577.268 | 100% | 323.772.406 | 100% | 327.915.697 | 100% | 332.117.225 | 100% | 342.698.551 | 100% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase Pemantauan dan Evaluasi Izin Lokasi | 15% | 15% | 153.599.754 | 15% | 156.104.553 | 16% | 158.102.211 | 18% | 160.127.948 | 20% | 165.229.658 | 20% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 443.732.623 | 100% | 450.968.708 | 100% | 456.739.720 | 100% | 462.591.850 | 100% | 477.330.124 | 100% | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US\$) | 554,9 | 558,76 | 341.332.787 | 559 | 346.899.006 | 562,98 | 351.338.246 | 568,26 | 355.839.884 | 568,26 | 367.177.019 | 568,26 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik | Indek Reformasi Birokrasi | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 72 | 72 | | | | | | |
| | 2.1.1 Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. | BB | BB | BB | A | A | A | A | | | | | | |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 | 86 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 | | | | | | |
| | | Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | | | | | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) | 95% | 95% | 5.176.880.600 | 96% | 5.261.301.591 | 97 | 5.328.630.070 | 98 | 5.396.904.913 | 99 | 5.568.851.452 | 99 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|----------------------------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|---|
| | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Persentase peningkatan penunjang fungsi dan tupoksi DPRD | 100% | 100% | 42.808.820.345 | 100% | 43.506.917.003 | 100 | 44.063.671.736 | 100 | 44.628.252.169 | 100 | 46.050.117.775 | 100 | Sekretariat DPRD |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah | 95% | 95% | 8.504.875.271 | 96% | 8.643.566.900 | 97 | 8.754.177.973 | 98 | 8.866.343.786 | 99 | 9.148.827.385 | 99 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan | 80% | 85% | 457.954.822.290 | 88% | 465.422.833.050 | 90% | 471.378.813.920 | 95% | 477.418.511.570 | 97% | 492.629.166.890 | 100% | Dinas Pendidikan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan | 100% | 100% | 100.138.376.621 | 100% | 101.771.364.064 | 100% | 103.073.724.529 | 100% | 104.394.390.867 | 100% | 100.790.091.661 | 100% | Dinas Kesehatan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis | 100% | 100% | 83.297.484.546 | 100% | 84.655.842.359 | 100% | 85.739.176.785 | 100% | 86.837.738.471 | 100% | 89.604.407.288 | 100% | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau | 100% | 100% | 73.874.024.435 | 100% | 75.078.710.973 | 100% | 76.039.487.571 | 100% | 77.013.768.767 | 100% | 79.467.443.819 | 100% | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100% | 100% | 25.599.959.010 | 100% | 26.017.425.450 | 100% | 26.350.368.480 | 100% | 26.687.991.330 | 100% | 27.538.276.410 | 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaranya penunjang urusan dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan | 100% | 100% | 10.097.761.610 | 100% | 10.262.428.928 | 100% | 10.979.320.200 | 100% | 11.119.996.388 | 100% | 11.474.281.838 | 100% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 100% | 10.094.917.170 | 100% | 10.259.538.102 | 100% | 10.390.828.637 | 100% | 10.523.964.581 | 100% | 10.859.260.331 | 100% | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 100% | 100% | 6.249.234.438 | 100% | 6.351.142.635 | 100% | 6.432.417.728 | 100% | 6.514.835.217 | 100% | 6.722.399.253 | 100% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran | 100% | 100% | 7.210.655.121 | 100% | 7.328.241.502 | 100% | 7.422.020.455 | 100% | 7.517.117.558 | 100% | 7.756.614.522 | 100% | Dinas Pemadam Kebakaran |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial | 100% | 100% | 9.932.784.096 | 100% | 10.094.761.075 | 100% | 10.223.942.970 | 100% | 10.354.940.636 | 100% | 10.684.851.247 | 100% | Dinas Sosial |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 100% | 100% | 10.239.983.604 | 100% | 10.406.970.180 | 100% | 10.540.147.392 | 100% | 10.675.196.532 | 100% | 11.015.310.564 | 100% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 100% | 100% | 10.751.982.784 | 100% | 10.927.318.689 | 100% | 11.067.154.762 | 100% | 11.208.956.359 | 100% | 11.566.076.092 | 100% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 100% | 7.347.188.236 | 100% | 7.467.001.104 | 100% | 714.973.331 | 100% | 724.134.165 | 100% | 747.205.233 | 100% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup | 100% | 100% | 17.242.994.613 | 100% | 17.524.181.453 | 100% | 17.748.437.081 | 100% | 17.975.844.827 | 100% | 18.548.559.066 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100% | 100% | 17.834.638.110 | 100% | 18.125.473.064 | 100% | 18.357.423.374 | 100% | 18.592.633.960 | 100% | 19.184.999.232 | 100% | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | 100% | 10.140.428.208 | 100% | 10.305.791.303 | 100% | 10.437.673.737 | 100% | 10.571.409.899 | 100% | 10.908.217.267 | 100% | Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 100% | 100% | 8.021.320.490 | 100% | 8.152.126.641 | 100% | 8.256.448.790 | 100% | 8.362.237.283 | 100% | 8.628.659.942 | 100% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan | 100% | 100% | 30.947.506.003 | 100% | 31.452.176.544 | 100% | 32.850.126.038 | 100% | 33.271.029.191 | 100% | 34.331.051.258 | 100% | Dinas Perhubungan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 100% | 100% | 6.940.433.332 | 100% | 7.053.613.122 | 100% | 6.558.313.933 | 100% | 6.642.344.509 | 100% | 6.853.971.018 | 100% | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 100% | 100% | 11.656.514.669 | 100% | 11.846.601.055 | 100% | 11.998.201.115 | 100% | 12.151.932.052 | 100% | 12.539.095.192 | 100% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100% | 100% | 10.239.983.604 | 100% | 10.406.970.180 | 100% | 10.540.147.392 | 100% | 10.675.196.532 | 100% | 11.015.310.564 | 100% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 100% | 100% | 21.053.800.932 | 100% | 21.723.277.947 | 100% | 22.257.207.586 | 100% | 22.798.642.096 | 100% | 24.162.215.936 | 100% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100% | 78,50% | 4.938.107.310 | 80% | 4.844.245.388 | 85% | 7.837.743.441 | 88,50% | 7.838.661.096 | 90% | 7.952.296.585 | 90% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan | 100% | 100% | 12.344.869.123 | 100% | 12.546.180.717 | 100% | 12.706.733.245 | 100% | 12.869.542.486 | 100% | 13.279.568.847 | 100% | Dinas Perikanan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------------------------------------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Tanamana Pangan Holtikultura dan Peternakan | 100% | 100% | 1.473.419.863 | 100% | 1.497.447.376 | 100% | 1.516.610.097 | 100% | 1.536.042.168 | 100% | 1.584.980.798 | 100% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan | 100% | 100% | 21.265.032.618 | 100% | 21.611.808.074 | 100% | 21.888.372.751 | 100% | 22.168.824.798 | 100% | 22.875.128.271 | 100% | Dinas Perkebunan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 100% | 100% | 6.030.212.567 | 100% | 6.128.549.106 | 100% | 6.206.975.686 | 100% | 6.286.504.624 | 100% | 6.486.793.999 | 100% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah | 100% | 100% | 104.817.609.947 | 100% | 106.526.903.093 | 100% | 107.890.119.832 | 100% | 109.272.497.835 | 100% | 112.753.942.857 | 100% | Sekretariat Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD | 100% | 100% | 56.746.575.806 | 100% | 57.671.959.748 | 100% | 58.409.983.464 | 100% | 59.158.380.782 | 100% | 61.043.179.376 | 100% | Sekretariat DPRD |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Bappeda | 100% | 100% | 23.295.962.699 | 100% | 23.675.857.160 | 100% | 23.978.835.317 | 100% | 24.286.072.110 | 100% | 25.059.831.533 | 100% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah | 100% | 100% | 21.761.387.378 | 100% | 22.116.257.045 | 100% | 22.399.277.117 | 100% | 22.686.275.297 | 100% | 23.409.064.853 | 100% | Badan Pendapatan Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 100% | 100% | 35.609.542.983 | 100% | 36.190.238.801 | 100% | 36.653.362.556 | 100% | 37.122.995.940 | 100% | 38.305.742.486 | 100% | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 100% | 100% | 6.911.988.933 | 100% | 7.024.704.872 | 100% | 7.114.599.490 | 100% | 7.205.757.659 | 100% | 7.435.334.631 | 100% | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 100% | 100% | 10.168.872.607 | 100% | 10.334.699.554 | 100% | 10.466.951.924 | 100% | 10.601.063.223 | 100% | 10.938.815.352 | 100% | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat | 100% | 100% | 12.799.979.505 | 100% | 13.008.712.725 | 100% | 13.175.184.240 | 100% | 13.343.995.665 | 100% | 13.769.138.205 | 100% | Inspektorat |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis | 100% | 100% | 10.137.583.768 | 100% | 10.302.900.478 | 100% | 10.434.745.918 | 100% | 10.568.444.567 | 100% | 11.905.157.458 | 100% | Kecamatan Bengkalis |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bantan | 100% | 100% | 5.049.591.915 | 100% | 5.131.937.170 | 100% | 5.197.610.183 | 100% | 5.264.206.290 | 100% | 5.431.925.022 | 100% | Kecamatan Bantan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bathin Solapan | 100% | 100% | 4.742.392.407 | 100% | 4.819.728.065 | 100% | 4.881.405.761 | 100% | 4.943.950.394 | 100% | 6.101.465.705 | 100% | Kecamatan Bathin Solapan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Mandau | 100% | 100% | 20.053.301.225 | 100% | 20.380.316.603 | 100% | 20.641.121.976 | 100% | 20.905.593.209 | 100% | 21.571.649.855 | 100% | Kecamatan Mandau |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Pinggir | 100% | 100% | 6.242.123.339 | 100% | 6.343.915.572 | 100% | 6.425.098.181 | 100% | 6.507.421.886 | 100% | 7.714.749.731 | 100% | Kecamatan Pinggir |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Talang Muandau | 100% | 100% | 4.633.592.581 | 100% | 4.709.154.006 | 100% | 4.769.416.695 | 100% | 4.830.526.431 | 100% | 4.984.428.030 | 100% | Kecamatan Talang Muandau |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bandar Laksamana | 100% | 100% | 403.514.652 | 100% | 4.380.200.521 | 100% | 4.430.200.521 | 100% | 4.516.481.913 | 100% | 4.733.776.990 | 100% | Kecamatan Bandar Laksamana |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bukti Batu | 100% | 100% | 5.996.932.620 | 100% | 6.094.726.453 | 100% | 6.172.720.207 | 100% | 6.251.810.236 | 100% | 6.450.994.239 | 100% | Kecamatan Bukit Batu |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|----------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Siak Kecil | 100% | 100% | 5.286.391.536 | 100% | 5.372.598.355 | 100% | 5.441.351.091 | 100% | 5.511.070.210 | 100% | 5.686.654.079 | 100% | Kecamatan Siak Kecil |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Rupal | 100% | 100% | 9.850.010.895 | 100% | 10.010.638.066 | 100% | 10.138.743.445 | 100% | 10.268.649.464 | 100% | 10.595.810.820 | 100% | Kecamatan Rupal |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Rupal Utara | 100% | 100% | 5.258.231.581 | 100% | 5.343.979.187 | 100% | 5.412.365.686 | 100% | 5.481.713.419 | 100% | 5.656.361.975 | 100% | Kecamatan Rupal Utara |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100% | 100% | 7.377.054.855 | 100% | 7.497.354.767 | 100% | 7.593.297.850 | 100% | 7.690.589.502 | 100% | 7.935.613.319 | 100% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan | 100% | 100% | 3.413.327.868 | 100% | 3.468.990.060 | 100 | 3.513.382.464 | 100 | 3.558.398.844 | 100 | 3.671.770.188 | 100 | Inspektorat |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase tindak lanjut hasil asistensi | 100% | 100% | 853.331.967 | 100% | 867.247.515 | 100 | 878.345.616 | 100 | 889.599.711 | 100 | 917.942.547 | 100 | Inspektorat |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 61.439.902 | 100% | 62.441.821 | 100% | 63.240.884 | 100% | 64.051.179 | 100% | 66.091.863 | 100% | Kecamatan Bengkulu |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 31.999.949 | 100% | 32.521.782 | 100% | 32.937.961 | 100% | 33.359.989 | 100% | 34.422.846 | 100% | Kecamatan Bantan |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | 100% | Kecamatan Bandar Laksamana |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 41.244.378 | 100% | 41.916.963 | 100% | 42.453.371 | 100% | 42.997.319 | 100% | 44.367.223 | 100% | Kecamatan Bukit Batu |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|------------------------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 31.999.949 | 100% | 32.521.782 | 100% | 32.937.961 | 100% | 33.359.989 | 100% | 34.422.846 | 100% | Kecamatan Siak Kecil |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 19.199.969 | 100% | 19.513.069 | 100% | 19.762.776 | 100% | 20.015.993 | 100% | 20.653.707 | 100% | Kecamatan Bathin Solapan |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 56.888.798 | 100% | 57.816.501 | 100% | 58.556.374 | 100% | 59.306.647 | 100% | 61.196.170 | 100% | Kecamatan Mandau |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 46.933.258 | 100% | 47.698.613 | 100% | 48.309.009 | 100% | 48.927.984 | 100% | 50.486.840 | 100% | Kecamatan Pinggir |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 140.799.775 | 100% | 143.095.840 | 100% | 144.927.027 | 100% | 146.783.952 | 100% | 151.460.520 | 100% | Kecamatan Talang Muandau |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 72.533.217 | 100% | 73.716.039 | 100% | 74.659.377 | 100% | 75.615.975 | 100% | 78.025.116 | 100% | Kecamatan Rupat |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 81.350.981 | 100% | 82.677.596 | 100% | 83.735.615 | 100% | 84.808.506 | 100% | 87.510.523 | 100% | Kecamatan Rupat Utara |
| | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100% | 100% | 4.323.548.633 | 100% | 4.394.054.076 | 100% | 4.450.284.454 | 100% | 4.507.305.202 | 100% | 4.650.908.905 | 100% | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pencatatan Sipil | Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil | 100% | 100% | 2.161.774.316 | 100% | 2.197.027.038 | 100% | 2.225.142.227 | 100% | 2.253.652.601 | 100% | 2.325.454.452 | 100% | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Penyajian Data Kependudukan | 100% | 100% | 2.296.885.211 | 100% | 2.334.341.228 | 100% | 2.364.213.616 | 100% | 2.394.505.889 | 100% | 2.470.795.356 | 100% | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|----------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase Pengelolaan Data Kependudukan | 100% | 100% | 135.110.895 | 100% | 137.314.190 | 100% | 139.071.389 | 100% | 140.853.288 | 100% | 145.340.903 | 100% | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 140.799.775 | 100% | 143.095.840 | 100% | 144.927.027 | 100% | 146.783.952 | 100% | 151.460.520 | 100% | Kecamatan Bantan |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 197.973.016 | 100% | 201.201.423 | 100% | 203.776.183 | 100% | 206.387.133 | 100% | 212.962.671 | 100% | Kecamatan Bengkalis |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | 100% | Kecamatan Bandar Laksamana |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 189.724.141 | 100% | 192.818.031 | 100% | 195.285.509 | 100% | 197.787.669 | 100% | 204.089.226 | 100% | Kecamatan Bukit Batu |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 134.399.785 | 100% | 136.591.484 | 100% | 138.339.435 | 100% | 140.111.954 | 100% | 144.575.951 | 100% | Kecamatan Siak Kecil |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 159.999.744 | 100% | 162.608.909 | 100% | 164.689.803 | 100% | 166.799.946 | 100% | 172.114.228 | 100% | Kecamatan Bathin Solapan |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 248.888.490 | 100% | 252.947.192 | 100% | 256.184.138 | 100% | 259.466.582 | 100% | 267.733.243 | 100% | Kecamatan Mandau |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 112.639.820 | 100% | 114.476.672 | 100% | 115.941.621 | 100% | 117.427.162 | 100% | 121.168.416 | 100% | Kecamatan Pinggir |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 121.599.805 | 100% | 123.582.771 | 100% | 125.164.250 | 100% | 126.767.959 | 100% | 130.806.813 | 100% | Kecamatan Talang Muandau |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 116.053.148 | 100% | 117.945.662 | 100% | 119.455.004 | 100% | 120.985.561 | 100% | 124.840.186 | 100% | Kecamatan Rupert |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 199.679.680 | 100% | 202.935.919 | 100% | 205.532.874 | 100% | 208.166.332 | 100% | 214.798.556 | 100% | Kecamatan Rupat Utara |
| | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah | 60% | 67% | 8.319.986.678 | 70% | 8.455.663.271 | 75% | 8.563.869.756 | 80% | 8.673.597.182 | 85% | 8.949.939.833 | 85% | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase Pengelolaan Perpustakaan | 75% | 78,50% | 537.599.139 | 80% | 546.365.934 | 85% | 553.357.738 | 88,50% | 560.447.818 | 90% | 578.303.805 | 90% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Pengeloaan Arsip | 65% | 68,50% | 127.555.191 | 70% | 131.266.004 | 75% | 134.225.498 | 78,50% | 137.226.590 | 80% | 144.784.679 | 80% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 100% | 100,00% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100,00% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase penegakan peraturan daerah | 24% | 24% | 9.614.206.828 | 24% | 9.770.988.669 | 24% | 9.896.027.274 | 24% | 10.022.823.411 | 24% | 10.342.152.696 | 24% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 31.999.949 | 100% | 32.521.782 | 100% | 32.937.961 | 100% | 33.359.989 | 100% | 34.422.846 | 100% | Kecamatan Bantan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 40.959.934 | 100% | 41.627.881 | 100% | 42.160.590 | 100% | 42.700.786 | 100% | 44.061.242 | 100% | Kecamatan Bengkulu |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | 100% | Kecamatan Bandar Laksamana |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 32.995.503 | 100% | 33.533.571 | 100% | 33.962.697 | 100% | 34.397.855 | 100% | 35.493.778 | 100% | Kecamatan Bukit Batu |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 25.599.959 | 100% | 26.017.425 | 100% | 26.350.368 | 100% | 26.687.991 | 100% | 27.538.276 | 100% | Kecamatan Siak Kecil |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 115.199.816 | 100% | 117.078.415 | 100% | 118.576.658 | 100% | 120.095.961 | 100% | 123.922.244 | 100% | Kecamatan Bathin Solapan |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 263.110.690 | 100% | 267.401.317 | 100% | 270.823.232 | 100% | 274.293.244 | 100% | 283.032.285 | 100% | Kecamatan Mandau |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 42.008.000 | 100% | 43.108.400 | 100% | 44.263.820 | 100% | 45.477.011 | 100% | 46.750.860 | 100% | Kecamatan Pinggir |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 102.399.836 | 100% | 104.069.702 | 100% | 105.401.474 | 100% | 106.751.965 | 100% | 110.153.106 | 100% | Kecamatan Talang Muandau |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 79.786.539 | 100% | 81.087.643 | 100% | 82.125.315 | 100% | 83.177.573 | 100% | 85.827.628 | 100% | Kecamatan Rupal |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 88.746.525 | 100% | 90.193.742 | 100% | 91.347.944 | 100% | 92.518.370 | 100% | 95.466.025 | 100% | Kecamatan Rupal Utara |
| | Program Kepegawaian Daerah | Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian | 100% | 100% | 1.621.330.737 | 100% | 1.647.770.279 | 100% | 1.668.856.670 | 100% | 1.690.239.451 | 100% | 1.744.090.839 | 100% | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur | 100% | 100% | 2.559.995.901 | 100% | 2.601.742.545 | 100% | 2.635.036.848 | 100% | 2.668.799.133 | 100% | 2.753.827.641 | 100% | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Aplikasi Informatika | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkulu | 1,8 | 2 | 2.047.996.721 | 2,1 | 2.081.394.036 | 2,2 | 2.108.029.478 | 2,3 | 2.135.039.306 | 2,4 | 2.203.062.113 | 2,4 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktivitas komunikasi dan informasi | 12% | 15% | 426.665.984 | 20% | 433.623.758 | 25% | 439.172.808 | 30% | 444.799.856 | 35% | 458.971.274 | 35% | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Satu Data Kabupaten Bengkulu | 70% | 75% | 284.443.989 | 80% | 289.082.505 | 85% | 292.781.872 | 90% | 296.533.237 | 95% | 305.980.849 | 95% | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu | 75% | 80% | 2.389.329.508 | 85% | 2.428.293.042 | 90% | 2.459.367.725 | 95% | 2.490.879.191 | 100% | 2.570.239.132 | 100% | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | 2.2 Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan harmonis. | Persentase penurunan potensi konflik | 65% | 60% | | 55% | | 50% | | 45% | | 40% | | 40% | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|----------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|---|
| | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| | 2.2.1 Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu. | Persentase Penyelesaian Konflik Keagamaan | 65% | 60% | | 55% | | 50% | | 45% | | 40% | | 40% | |
| | | Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu | 80% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase terselenggaranya administrasi pemerintahan dan kewilayahan | 100% | 100% | 39.111.048.488 | 100% | 39.748.844.438 | 100% | 40.257.507.400 | 100% | 40.773.320.088 | 100% | 42.072.366.738 | 100% | Sekretariat Daerah |
| | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 0% | 85% | 3.271.105.874 | 87% | 3.324.448.808 | 90% | 3.366.991.528 | 95% | 3.410.132.226 | 97% | 3.518.779.764 | 100% | Dinas Pendidikan |
| | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Bernilai Sejarah yang dilestarikan | 75% | 80% | 177.777.493 | 85% | 180.676.566 | 85% | 182.988.670 | 90% | 185.333.273 | 90% | 191.238.031 | 90% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 45% | 47% | 151.998.155 | 50% | 170.784.145 | 50% | 185.766.582 | 50% | 200.959.610 | 50% | 239.222.438 | 50% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Kunjungan ke museum | 60% | 65% | 92.444.296 | 70% | 93.951.814 | 75% | 95.154.108 | 80% | 96.373.302 | 85% | 99.443.776 | 85% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Persentase Pelestarian koleksi nasional naskah kuno | 75% | 78,50% | 486.399.221 | 80% | 494.331.084 | 85% | 500.657.001 | 88,50% | 507.071.835 | 90% | 523.227.252 | 90% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara dalam satu tahun | 100% | 100% | 375.466.065 | 100% | 381.588.907 | 100% | 386.472.071 | 100% | 391.423.873 | 100% | 403.894.721 | 100% | Dinas Sosial |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Tradisi Budaya yang Dilestarikan | 80% | 85% | 1.000.000.000 | 90% | 1.000.000.000 | 95% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 50% | 50% | 99.555.396 | 50% | 101.178.877 | 50% | 102.473.655 | 50% | 103.786.633 | 50% | 107.093.297 | 50% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase peningkatan Penanganan Konflik di Daerah | 40% | 40% | 268.799.570 | 40% | 273.182.967 | 40% | 276.678.869 | 40% | 280.223.909 | 40% | 289.151.902 | 40% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan | 50% | 50% | 258.844.030 | 50% | 263.065.080 | 50% | 266.431.504 | 50% | 269.845.246 | 50% | 278.442.573 | 50% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase peningkatan pembinaan Pendidikan Politik | 50% | 50% | 1.800.000.000 | 50% | 2.000.000.000 | 50% | 2.000.000.000 | 50% | 1.800.000.000 | 50% | 1.800.000.000 | 50% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 20.479.967 | 100% | 20.813.940 | 100% | 21.080.295 | 100% | 21.350.393 | 100% | 22.030.621 | 100% | Kecamatan Bengkalis |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 108.799.826 | 100% | 110.574.058 | 100% | 111.989.066 | 100% | 113.423.963 | 100% | 117.037.675 | 100% | Kecamatan Bantan |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 262.314.969 | 100% | 292.314.969 | 100% | 327.400.411 | 100% | 327.400.411 | 100% | 327.400.411 | 100% | Kecamatan Bandar Laksamana |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 329.955.027 | 100% | 335.335.706 | 100% | 339.626.972 | 100% | 343.978.555 | 100% | 354.937.785 | 100% | Kecamatan Bukit Batu |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 76.799.877 | 100% | 78.052.276 | 100% | 79.051.105 | 100% | 80.063.974 | 100% | 82.614.829 | 100% | Kecamatan Siak Kecil |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 326.399.477 | 100% | 331.722.174 | 100% | 335.967.198 | 100% | 340.271.889 | 100% | 351.113.024 | 100% | Kecamatan Bathin Solapan |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 782.220.970 | 100% | 794.976.889 | 100% | 805.150.148 | 100% | 815.466.402 | 100% | 841.447.335 | 100% | Kecamatan Mandau |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 187.733.033 | 100% | 190.794.453 | 100% | 193.236.036 | 100% | 195.711.936 | 100% | 201.947.360 | 100% | Kecamatan Pinggir |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 294.399.529 | 100% | 299.200.393 | 100% | 303.029.238 | 100% | 306.911.900 | 100% | 316.690.179 | 100% | Kecamatan Talang Muandau |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 369.919.408 | 100% | 375.951.798 | 100% | 380.762.825 | 100% | 385.641.475 | 100% | 397.928.094 | 100% | Kecamatan Rupal |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 754.345.459 | 100% | 766.646.803 | 100% | 776.457.525 | 100% | 786.406.145 | 100% | 811.461.212 | 100% | Kecamatan Rupal Utara |
| | 2.2.2 Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba | Angka Prestasi olah raga (Povinsi dan Nasioanal dan Internasional) | 13 | 15 | | 16 | | 20 | | 25 | | 30 | | 30 | |
| | | Jumlah Penghuni Tindak Pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis | 900 | 850 | | 800 | | 750 | | 700 | | 650 | | 650 | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Prestasi Olahraga | 80% | 80% | 767.998.770 | 80% | 780.522.764 | 80% | 790.511.054 | 80% | 800.639.740 | 80% | 826.148.292 | 80% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase peningkatan Ketahanan Ekonomi, Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama | 40% | 50% | 278.755.109 | 50% | 283.300.855 | 50% | 286.926.235 | 50% | 290.602.572 | 50% | 299.861.232 | 50% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Pembinaan Kepemudaan | 70% | 80% | 22.559.995.901 | 85% | 22.601.742.545 | 90% | 22.635.036.848 | 95% | 22.668.799.133 | 100% | 22.753.827.641 | 100% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase Fasilitas Organisasi Gerakan Pramuka | 60% | 70% | 938.665.164 | 80% | 953.972.267 | 85% | 966.180.178 | 90% | 978.559.682 | 100% | 1.009.736.802 | 100% | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase pelaksanaan fasilitas, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta hukum adat masyarakat | 100% | 100% | 13.401.308.193 | 100% | 13.657.354.276 | 100% | 13.861.559.334 | 100% | 14.068.634.682 | 100% | 14.590.142.865 | 100% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.2.3.Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan. | Indeks Pembangunan Gender | 90,5 | 90,75 | | 91 | | 91,5 | | 92 | | 92,1 | | 92 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|----------------------------|--|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 69.23% | 72% | 2.389.329.508 | 75% | 2.428.293.042 | 80% | 2.459.367.725 | 90% | 2.490.879.191 | 100% | 2.570.239.132 | 100% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Program Perlindungan Perempuan | Pravelensi kekerasan terhadap perempuan | 1% | 1% | 938.665.164 | 1% | 953.972.267 | 1% | 966.180.178 | 1% | 978.559.682 | 0% | 1.009.736.802 | 0% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase kelompok BKB, BKL, BKR, dan UPPKS yang aktif; persentase kelompok PIK-R aktif | 60; 60 | 65; 65 | 296.109.306 | 70;70 | 296.109.306 | 75; 75 | 296.109.306 | 75; 75 | 296.109.306 | 75; 75 | 296.109.306 | 75; 75 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga | 5% | 12% | 853.331.967 | 19% | 867.247.515 | 25% | 878.345.616 | 30% | 889.599.711 | 35% | 917.942.547 | 35% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR); presentase kesertaan KB Baru | 66; 66,5 | 67; 66,1 | 511.999.180 | 69;66,5 | 520.348.509 | 70;67 | 527.007.370 | 70; 67 | 533.759.827 | 70; 67 | 550.765.528 | 70; 67 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak | 5% | 20% | 170.666.393 | 25% | 173.449.503 | 30% | 175.669.123 | 35% | 177.919.942 | 0 | 183.588.509 | 45% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | Prevalensi kekerasan terhadap anak | 30% | 20% | 767.998.770 | 18% | 780.522.764 | 15% | 790.511.054 | 10% | 800.639.740 | 5% | 826.148.292 | 5% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak | MADYA | MADYA | 1.194.664.754 | NINDYA | 1.214.146.521 | NINDYA | 1.229.683.862 | UTAMA | 1.245.439.595 | UTAMA | 1.285.119.566 | UTAMA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pengendalian Penduduk | Persentase penurunan angka laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; menurunnya angka kelahiran total (TFR) | 1,62%; 78 jiwa/km2; 2,51% | 1,61%; 79 jiwa/km2; 2,50% | 211.506.647 | 1,60%; 80 jiwa/km2; 2,49% | 211.506.647 | 1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah. | Rasio konektivitas Kabupaten | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | | | | | | |
| | 3.1.1. Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik. | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik | 53,50% | 55,49% | 57,47% | 59,46% | 61,44% | 63,43% | 63,43% | | | | | | |
| | | Panjang Jalan Poros dan Jembatan Pada Wilayah Perbatasan Dalam Kondisi Baik. | 11.041 Km | 16.562 Km | 22.083 Km | 27.604 Km | 33.125 Km | 38.646 Km | 38.646 Km | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik (Km) | 480,097 Km | 528,096 Km | 152.888.644.088 | 576.104 Km | 155.381.846.438 | 624.113 Km | 158.102.210.880 | 672.122 Km | 160.127.947.980 | 720.131 Km | 165.229.658.460 | 720.131 Km | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase luas kawasan bebas banjir | 78.10% | 79,10% | 6.968.877.731 | 81,10% | 7.082.521.373 | 83,1 | 7.173.155.864 | 85,1 | 7.265.064.307 | 87,1 | 7.496.530.801 | 87,1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan; Perangkat pendukung dan penunjang untuk layanan jasa konstruksi; Laporan SIPJAKI; Persentase penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang memadai; Laporan IUJK; Persentase SDM yang mengerti undang-undang jasa konstruksi; Persentase tenaga terampil yang mempunyai keahlian di bidang konstruksi; | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 2.844.439.890 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 2.890.825.050 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 2.927.818.720 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 2.965.332.370 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 3.059.808.490 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 3.1.2. Meningkatnya kapasitas angkutan penyebrangan. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyebrangan: a. orang; b. barang | 910.000; 28.800 | 950.000;32.400 | | 1.100.000;36.000 | | 1.200.000;39.600 | | 1.300.000;43.200 | | 1.350.000;46.800 | | 1.350.000; 46.800 | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi | 50 | 50 | 36.750.163.379 | 61 | 37.349.459.646 | 71 | 38.822.876.227 | 80 | 39.320.307.226 | 86 | 40.573.060.577 | 88 | Dinas Perhubungan |
| | 3.2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70,7 | 70,85 | | 71 | | 71,14 | | 71,29 | | 71,44 | | 71,44 | |
| | 3.2.1. Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas. | Rasio permukiman layak huni. | 97,85 | 97,92 | | 97,98 | | 98,05 | | 98,11 | | 98,18 | | 98,18 | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Persentase pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 2.844.439.890 | 100% | 2.890.825.050 | 100% | 2.927.818.720 | 100% | 2.965.332.370 | 100% | 4.059.808.490 | 100% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Kawasan Permukiman | Persentase legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) | 100% | 100% | 2.133.329.918 | 100% | 2.168.118.788 | 100% | 2.195.864.040 | 100% | 2.223.999.278 | 100% | 2.294.856.368 | 100% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan gedung yang layak | 20% | 24% | 25.599.959.010 | 35% | 26.017.425.450 | 46% | 26.350.368.480 | 57,40% | 26.687.991.330 | 68,35% | 27.538.276.410 | 68,35% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase pencegahan perumahan kumuh | 100% | 100% | 12.799.979.505 | 100% | 13.008.712.725 | 100% | 13.175.184.240 | 100% | 13.343.995.665 | 100% | 13.769.138.205 | 100% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik; Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur; Panjang infrastruktur pengaman tebing untuk daerah rawan longsor; Jumlah unit air baku dalam kondisi baik | 70,04%; 32,6 km; 2 km; 4 unit | 71,04%; 33,6 km; 2 km; 4 unit | 31.288.838.790 | 73,49%; 35,6 km; 4 km; 5 unit | 31.799.075.550 | 75,77%; 37,6 km; 6 km; 6 unit | 32.206.005.920 | 75,85%; 39,6 km; 8 km; 6 unit | 32.618.656.070 | 78,59%; 41,6 km; 10 km; 6 unit | 33.657.893.390 | 71,04%; 33,6 km; 2 km; 4 unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | 100% | 100% | 41.955.488.378 | 100% | 42.639.669.488 | 100% | 43.917.280.800 | 100% | 44.479.985.550 | 100% | 45.897.127.350 | 100% | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase pengolahan air limbah yang ditangani | 100% | 100% | 2.815.995.491 | 100% | 2.861.916.800 | 100% | 2.898.540.533 | 100% | 2.935.679.046 | 100% | 3.029.210.405 | 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Persentase TPU yang dipelihara/ditata | 100% | 100% | 1.194.664.754 | 100% | 1.214.146.521 | 100% | 1.229.683.862 | 100% | 1.245.439.595 | 100% | 1.285.119.566 | 100% | Dinas Sosial |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi | 23% | 23% | 29.013.286.878 | 42% | 29.486.415.510 | 57% | 30.184.639.875 | 70% | 30.571.390.601 | 83% | 31.545.401.609 | 83% | Dinas Perhubungan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 3.194.874.884 | 100% | 3.246.974.696 | 100% | 3.288.525.986 | 100% | 3.330.661.318 | 100% | 3.436.776.896 | 100% | Kecamatan Bengkulu |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 1.658.024.012 | 100% | 1.685.061.922 | 100% | 1.706.625.532 | 100% | 1.728.492.238 | 100% | 1.783.562.369 | 100% | Kecamatan Bukit Batu |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 14.151.088.453 | 100% | 14.381.854.624 | 100% | 14.565.898.132 | 100% | 14.752.528.541 | 100% | 15.222.547.238 | 100% | Kecamatan Mandau |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 2.797.222.188 | 100% | 2.842.837.354 | 100% | 2.879.216.929 | 100% | 2.916.107.853 | 100% | 3.009.015.669 | 100% | Kecamatan Pinggir |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100% | 100% | 4.018.340.233 | 100% | 4.083.868.548 | 100% | 4.136.129.506 | 100% | 4.189.125.039 | 100% | 4.322.591.454 | 100% | Kecamatan Rupal |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati | 60% | 70% | 1.871.641.448 | 80% | 1.902.162.883 | 90% | 1.926.504.718 | 95% | 1.951.188.699 | 100% | 2.013.353.986 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, panjang jaringan perpipaan yang terbangun | 94,96% | 96,88%; 5000 m | 36.977.718.570 | 98,81%; 5000 m | 37.580.725.650 | 100%; 5000 m | 38.061.643.360 | 100%; 5000 m | 38.549.320.810 | 100%; 5000 m | 39.777.510.370 | 100%; 5000 m | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase sampah yang dikelola | 72% | 74% | 16.327.084.969 | 76% | 16.593.335.787 | 80% | 16.805.679.453 | 83% | 17.021.007.804 | 85% | 17.563.300.733 | 85% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Regional | 100% | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 56 | 56,06 | 56,11 | 56,17 | 56,22 | 67 | 67 | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | Indek Resiko Bencana | 109,48 | 100,1 | | 90,71 | | 81,33 | | 71,94 | | 62,56 | | 62,56 | |
| | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | 75% | 80% | 796.443.169 | 85% | 809.431.014 | 90% | 819.789.242 | 95% | 830.293.064 | 100% | 856.746.377 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 70% | 75% | 1.991.107.923 | 80% | 2.023.577.535 | 85% | 2.049.473.104 | 95% | 2.075.732.659 | 100% | 2.141.865.943 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap ketentuan pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 70% | 75% | 119.466.475 | 80% | 121.414.652 | 85% | 122.968.386 | 95% | 124.543.960 | 100% | 128.511.957 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH | 80% | 85% | 796.443.169 | 90% | 809.431.014 | 92% | 819.789.242 | 95% | 830.293.064 | 100% | 856.746.377 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang telah ditangani | 100% | 100% | 278.755.109 | 100% | 283.300.855 | 100% | 286.926.235 | 100% | 290.602.572 | 100% | 299.861.232 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH | Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH yang telah mendapatkan pengakuan | 20% | 40% | 79.644.317 | 50% | 80.943.101 | 70% | 81.978.924 | 85% | 83.029.306 | 100% | 85.674.638 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup | 25% | 30% | 318.577.268 | 35% | 323.772.406 | 40% | 327.915.697 | 50% | 332.117.225 | 60% | 342.698.551 | 60% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kepastian pemberian informasi dan perizinan terkait tata ruang; Jumlah Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang; Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Penataan Ruang; Jumlah Koordinasi Tata Ruang | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 738.740.244 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 750.787.110 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 760.394.876 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 770.137.688 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 794.674.438 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Persentase terlaksananya penanggulangan Bencana di Kabupaten Bengkulu | 100% | 100% | 6.729.944.780 | 100% | 6.839.692.068 | 100% | 6.927.219.092 | 100% | 7.015.976.387 | 100% | 7.239.506.887 | 100% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial | 100% | 100% | 1.706.663.934 | 100% | 1.734.495.030 | 100% | 1.756.691.232 | 100% | 1.779.199.422 | 100% | 1.835.885.094 | 100% | Dinas Sosial |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase terlaksananya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran | 100% | 100% | 8.172.075.804 | 100% | 8.305.340.369 | 100% | 8.411.623.183 | 100% | 8.519.399.899 | 100% | 8.790.829.792 | 100% | Dinas Pemadam Kebakaran |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Bencana Pertanian di Kabupaten Bengkulu yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan | 100% | 100% | 278.755.109 | 100% | 283.300.855 | 100% | 286.926.235 | 100% | 290.602.572 | 100% | 299.861.232 | 100% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase pengendalian bencana produksi Perkebunan | 75% | 80% | 676.976.694 | 82% | 688.016.362 | 85% | 696.820.855 | 87% | 705.749.104 | 90% | 728.234.421 | 90% | Dinas Perkebunan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program Pengelolaan Perbatasan | Persentase Tertib Administrasi Kewilayahan | 100% | 100% | 824.887.568 | 100% | 838.339.265 | 100% | 849.067.429 | 100% | 859.946.387 | 100% | 887.344.462 | 100% | Sekretariat Daerah |

BAB VII.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bengkulu terpilih;
- 2) berbasis pada target pencapaian dalam indikator sasaran;
- 3) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
- 4) penerapan sub urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026 berjumlah 144 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah tertuang dan dianalisis pada Bab III dokumen ini.

Kerangka pendanaan pembangunan Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel VII-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bengkulu (dalam Juta)

| Kode | Kapasitas Riil / Belanja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAPASITAS RIIL KEUANGAN | 3,224,851.26 | 3,417,562.17 | 3,446,741.30 | 3,486,162.86 | 3,516,140.45 | 3,603,117.96 |
| | BELANJA DAN TRANSFER | 3.224.258,42 | 3,387,162.41 | 3,425,890.06 | 3,465,325.65 | 3,506,050.60 | 3,602,848.44 |
| | BELANJA | 2.634.561,70 | 2.839.094,98 | 2,873,762.30 | 2,899,973.81 | 2,936,981.51 | 2,975,2421.51 |
| | Belanja Operasi | 2.110.732,46 | 2,121,326.83 | 2,131,974.59 | 2,142,675.99 | 2,153,431.32 | 2,178,210.90 |
| | Belanja Pegawai | 1.062.219,04 | 1,067,530.14 | 1,072,867.79 | 1,078,232.13 | 1,083,623.29 | 1,089,041.41 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 968.794,60 | 973,638.57 | 978,506.76 | 983,399.29 | 988,316.29 | 1,005,257.87 |

| Kode | Kapasitas Riil / Belanja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Belanja Subsidi | 8.142,58 | 8,224.01 | 8,306.25 | 8,389.31 | 8,473.21 | 8,557.94 |
| | Belanja Hibah | 42.914,54 | 43,129.1 | 43,344,76 | 43,561.48 | 43,779.29 | 45,968.25 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 28.661,70 | 28,805.00 | 28,949.03 | 29,093.77 | 29,239.24 | 29,385.43 |
| | Belanja Modal | 708.763,34 | 732,836.28 | 757,999.22 | 784,305.51 | 811,811.19 | 881,328.07 |
| | Belanja Tanah | 235,00 | 237.35 | 239.72 | 242.12 | 244.54 | 246.99 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 109.006,81 | 110,096.88 | 111,197.85 | 112,309.83 | 113,432.93 | 119,567.26 |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 174.888,82 | 176,637.70 | 178,404.08 | 180,188.12 | 181,990.00 | 188,809.90 |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 421.659,14 | 442,742.09 | 464,879.20 | 488,123.16 | 512,529.32 | 568,155.79 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 2.973,57 | 3,122.25 | 3,278.36 | 3,442.28 | 3,614.39 | 4,795.12 |
| | Belanja Aset Lainnya | - | - | - | -- | - | |
| | Belanja Tidak Terduga | 19.599,18 | 19,599.18 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Belanja Transfer | 385.163,44 | 513,400,12 | 525,916.25 | 528,344.14 | 530,808.09 | 533,309.47 |
| | Belanja Bagi Hasil Pajak | 8.243,00 | 8,655.15 | 9,087.91 | 9,542.30 | 10,019.41 | 10,520.39 |
| | Belanja Bagi Hasil Retirbusi | 1.397,94 | 1,467.83 | 1,541.22 | 1,618.29 | 1,699.20 | 1,784.16 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 375.522,51 | 513.400,12 | 515.287,12 | 517.183,55 | 519.089,47 | 521.004,92 |
| | Belanja Bantuan Keuangan Lainnya | | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 |

Tabel VII-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkulu

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---------------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | 1.556.417.750.366 | | 1.581.788.239.509 | | 1.604.071.500.809 | | 1.624.615.953.035 | | 1.673.879.637.587 | | 1.673.879.637.587 | |
| 1 | 1 | Pendidikan | | | 654.221.174.701 | | 664.889.761.501 | | 673.398.305.600 | | 682.026.445.101 | | 703.755.952.701 | | 703.755.952.701 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan | 80% | 85% | 457.954.822.290 | 88% | 465.422.833.050 | 90% | 471.378.813.920 | 95% | 477.418.511.570 | 97% | 492.629.166.890 | 97% | 492.629.166.890 | DINAS PENDIDIKAN |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APSe) Rata-rata | 96,82% | 97,1% | 192.995.246.537 | 97,50% | 196.142.479.643 | 97,8% | 198.652.500.152 | 98,2% | 201.197.801.305 | 98,56% | 207.608.006.047 | 98,56% | 207.608.006.047 | DINAS PENDIDIKAN |
| | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 0% | 85% | 3.271.105.874 | 87% | 3.324.448.808 | 90% | 3.366.991.528 | 95% | 3.410.132.226 | 97% | 3.518.779.764 | 97% | 3.518.779.764 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 2 | Kesehatan | | | 463.794.457.384 | | 471.357.696.877 | | 477.389.625.753 | | 483.506.338.925 | | 495.434.534.764 | | 495.434.534.764 | |
| | Kesehatan | | | | 262.348.379.935 | | 266.626.576.011 | | 270.038.576.183 | | 273.498.535.149 | | 278.735.837.693 | | 278.735.837.693 | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 100% | 100% | 839.514.816 | 100% | 853.205.043 | 100% | 864.123.444 | 100% | 875.195.312 | 100% | 10.079.009.166 | 100% | 10.079.009.166 | DINAS KESEHATAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|---------------------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 90% | 95% | 147.020.032.115 | 100% | 149.417.533.197 | 100% | 151.329.618.093 | 100% | 153.268.579.098 | 100% | 151.992.297.430 | 100% | 151.992.297.430 | DINAS KESEHATAN |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 100% | 100% | 13.720.820.271 | 100% | 13.944.569.925 | 100% | 14.123.017.534 | 100% | 14.303.973.388 | 100% | 15.118.513.749 | 100% | 15.118.513.749 | DINAS KESEHATAN |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan | 100% | 100% | 100.138.376.621 | 100% | 101.771.364.064 | 100% | 103.073.724.529 | 100% | 104.394.390.867 | 100% | 100.790.091.661 | 100% | 100.790.091.661 | DINAS KESEHATAN |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 80% | 85% | 629.636.112 | 90% | 639.903.782 | 95% | 648.092.583 | 95% | 656.396.484 | 95% | 755.925.687 | 95% | 755.925.687 | DINAS KESEHATAN |
| | RSUD Kab Bengkulu | | | | 103.065.434.974 | | 104.746.154.862 | | 106.086.583.501 | | 107.445.853.095 | | 110.869.100.827 | | 110.869.100.827 | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit | 90% | 95% | 4.318.441.725 | 100% | 4.388.863.889 | 100% | 4.445.027.849 | 100% | 4.501.981.245 | 100% | 4.645.415.325 | 100% | 4.645.415.325 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase peningkatan dan pengembangan tenaga kesehatan | 100% | 100% | 15.449.508.703 | 100% | 15.701.448.614 | 100% | 15.902.378.867 | 100% | 16.106.133.379 | 100% | 16.619.278.214 | 100% | 16.619.278.214 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Bengkulu | 100% | 100% | 83.297.484.546 | 100% | 84.655.842.359 | 100% | 85.739.176.785 | 100% | 86.837.738.471 | 100% | 89.604.407.288 | 100% | 89.604.407.288 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu |
| | RSUD Kec Mandau | | | | 98.380.642.475 | | 99.984.966.004 | | 101.264.466.069 | | 102.561.950.681 | | 105.829.596.244 | | 105.829.596.244 | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 100% | 100% | 49.190.321 | 100% | 49.992.483 | 100% | 50.632.233 | 100% | 51.280.975 | 100% | 52.914.798 | 100% | 52.914.798 | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---------------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit | 100% | 100% | 8.706.686.859 | 100% | 8.848.669.491 | 100% | 8.961.905.247 | 100% | 9.076.732.635 | 100% | 9.365.919.268 | 100% | 9.365.919.268 | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase peningkatan dan pengembangan tenaga kesehatan | 100% | 100% | 15.750.740.860 | 100% | 16.007.593.057 | 100% | 16.212.441.018 | 100% | 16.420.168.304 | 100% | 16.943.318.359 | 100% | 16.943.318.359 | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di RSUD Kecamatan Mandau | 100% | 100% | 73.874.024.435 | 100% | 75.078.710.973 | 100% | 76.039.487.571 | 100% | 77.013.768.767 | 100% | 79.467.443.819 | 100% | 79.467.443.819 | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau |
| 1 | 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 286.366.806.159 | | 291.026.182.206 | | 295.474.140.448 | | 299.251.754.266 | | 308.765.472.509 | | 308.765.472.509 | |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan gedung yang layak | 20% | 24% | 25.599.959.010 | 35% | 26.017.425.450 | 46% | 26.350.368.480 | 57,40% | 26.687.991.330 | 68,35% | 27.538.276.410 | 68,35% | 27.538.276.410 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase luas kawasan bebas banjir | 78,10% | 79,10% | 6.968.877.731 | 81,10% | 7.082.521.373 | 83,10% | 7.173.155.864 | 85,10% | 7.265.064.307 | 87,10% | 7.496.530.801 | 87,10% | 7.496.530.801 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di perumahan | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, panjang jaringan perpipaan yang terbangun | 94,96% | 96,88% ; 5000m | 36.977.718.570 | 98,81% ; 5000m | 37.580.725.650 | 100% ; 5000m | 38.061.643.360 | 100% ; 5000m | 38.549.320.810 | 100% ; 5000m | 39.777.510.370 | 100% ; 5000m | 39.777.510.370 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik; Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur; Panjang infrastruktur pengamanan tebing untuk daerah rawan longsor; Jumlah unit air baku dalam kondisi baik | 70,04%; 32,6 km; 2 km; 4 unit | 71,04%; 33,6 km; 2 km; 4 unit | 31.288.838.790 | 73,49%; 35,6 km; 4 km; 5 unit | 31.799.075.550 | 75,77%; 37,6 km; 6 km; 6 unit | 32.206.005.920 | 75,85%; 39,6 km; 8 km; 6 unit | 32.618.656.070 | 78,59%; 41,6 km; 10 km; 6 unit | 33.657.893.390 | 71,04%; 33,6 km; 2 km; 4 unit | 33.657.893.390 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase pengolahan air limbah yang ditangani | 100% | 100% | 2.815.995.491 | 100% | 2.861.916.800 | 100% | 2.898.540.533 | 100% | 2.935.679.046 | 100% | 3.029.210.405 | 100% | 3.029.210.405 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Regional | 100% | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | 100% | 643.633.335 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan; Perangkat pendukung dan penunjang untuk layanan jasa konstruksi; Laporan SIPJAKI; Persentase penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang memadai; Laporan IUJK; Persentase SDM yang mengerti undang-undang jasa konstruksi; Persentase tenaga terampil yang mempunyai keahlian di bidang konstruksi; | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 2.844.439.890 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 2.890.825.050 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 2.927.818.720 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 2.965.332.370 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 3.059.808.490 | 100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org | 3.059.808.490 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100% | 100% | 25.599.959.010 | 100% | 26.017.425.450 | 100% | 26.350.368.480 | 100% | 26.687.991.330 | 100% | 27.538.276.410 | 100% | 27.538.276.410 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik (Km) | 480,097 Km | 528.096 Km | 152.888.644.088 | 576.104 Km | 155.381.846.438 | 624.113 Km | 158.102.210.880 | 672.122 Km | 160.127.947.980 | 720.131 Km | 165.229.658.460 | 720.131 Km | 165.229.658.460 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kepastian pemberian informasi dan perizinan terkait tata ruang; Jumlah Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang; Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Penataan Ruang; Jumlah Koordinasi Tata Ruang | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 738.740.244 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 750.787.110 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 760.394.876 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 770.137.688 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 794.674.438 | 100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi | 794.674.438 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | 69.830.999.301 | | 70.969.754.979 | | 73.195.468.000 | | 74.133.309.251 | | 77.495.212.251 | | 77.495.212.251 | |
| | Program Kawasan Permukiman | Persentase legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) | 100% | 100% | 2.133.329.918 | 100% | 2.168.118.788 | 100% | 2.195.864.040 | 100% | 2.223.999.278 | 100% | 2.294.856.368 | 100% | 2.294.856.368 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pengembangan Perumahan | Persentase pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 2.844.439.890 | 100% | 2.890.825.050 | 100% | 2.927.818.720 | 100% | 2.965.332.370 | 100% | 4.059.808.490 | 100% | 4.059.808.490 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | 100% | 100% | 41.955.488.378 | 100% | 42.639.669.488 | 100% | 43.917.280.800 | 100% | 44.479.985.550 | 100% | 45.897.127.350 | 100% | 45.897.127.350 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Perumahan Permukiman Dan Pertanian | 100% | 100% | 10.097.761.610 | 100% | 10.262.428.928 | 100% | 10.979.320.200 | 100% | 11.119.996.388 | 100% | 11.474.281.838 | 100% | 11.474.281.838 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase pencegahan perumahan kumuh | 100% | 100% | 12.799.979.505 | 100% | 13.008.712.725 | 100% | 13.175.184.240 | 100% | 13.343.995.665 | 100% | 13.769.138.205 | 100% | 13.769.138.205 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 5 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | 48.071.034.141 | | 48.854.943.345 | | 49.480.136.369 | | 50.114.117.053 | | 51.710.763.481 | | 51.710.763.481 | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Persentase terlaksananya penanggulangan Bencana di Kabupaten Bengkalis | 100% | 100% | 6.729.944.780 | 100% | 6.839.692.068 | 100% | 6.927.219.092 | 100% | 7.015.976.387 | 100% | 7.239.506.887 | 100% | 7.239.506.887 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 100% | 100% | 6.249.234.438 | 100% | 6.351.142.635 | 100% | 6.432.417.728 | 100% | 6.514.835.217 | 100% | 6.722.399.253 | 100% | 6.722.399.253 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase terlaksananya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran | 100% | 100% | 8.172.075.804 | 100% | 8.305.340.369 | 100% | 8.411.623.183 | 100% | 8.519.399.899 | 100% | 8.790.829.792 | 100% | 8.790.829.792 | Dinas Pemadam Kebakaran |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran | 100% | 100% | 7.210.655.121 | 100% | 7.328.241.502 | 100% | 7.422.020.455 | 100% | 7.517.117.558 | 100% | 7.756.614.522 | 100% | 7.756.614.522 | Dinas Pemadam Kebakaran |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase penegakan peraturan daerah | 24% | 24% | 9.614.206.828 | 24% | 9.770.988.669 | 24% | 9.896.027.274 | 24% | 10.022.823.411 | 24% | 10.342.152.696 | 24% | 10.342.152.696 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 100% | 10.094.917.170 | 100% | 10.259.538.102 | 100% | 10.390.828.637 | 100% | 10.523.964.581 | 100% | 10.859.260.331 | 100% | 10.859.260.331 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 6 | Sosial | | | 34.133.278.680 | | 34.689.900.601 | | 35.133.824.639 | | 35.583.988.439 | | 36.717.701.881 | | 36.717.701.881 | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial | 100% | 100% | 1.092.264.918 | 100% | 1.110.076.819 | 100% | 1.124.282.388 | 100% | 1.138.687.630 | 100% | 1.174.966.460 | 100% | 1.174.966.460 | DINAS SOSIAL |
| | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial | 100% | 100% | 1.706.663.934 | 100% | 1.734.495.030 | 100% | 1.756.691.232 | 100% | 1.779.199.422 | 100% | 1.835.885.094 | 100% | 1.835.885.094 | DINAS SOSIAL |
| | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun | 100% | 100% | 102.399.836 | 100% | 104.069.702 | 100% | 105.401.474 | 100% | 106.751.965 | 100% | 110.153.106 | 100% | 110.153.106 | DINAS SOSIAL |
| | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dalam satu tahun | 100% | 100% | 375.466.065 | 100% | 381.588.907 | 100% | 386.472.071 | 100% | 391.423.873 | 100% | 403.894.721 | 100% | 403.894.721 | DINAS SOSIAL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|--|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|--|------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial | 100% | 100% | 9.932.784.096 | 100% | 10.094.761.075 | 100% | 10.223.942.970 | 100% | 10.354.940.636 | 100% | 10.684.851.247 | 100% | 10.684.851.247 | DINAS SOSIAL |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial | 78% | 80% | 18.022.371.143 | 90% | 18.316.267.517 | 91% | 18.550.659.410 | 92% | 18.788.345.896 | 95% | 19.386.946.593 | 95% | 19.386.946.593 | DINAS SOSIAL |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 100% | 100% | 1.706.663.934 | 100% | 1.734.495.030 | 100% | 1.756.691.232 | 100% | 1.779.199.422 | 100% | 1.835.885.094 | 100% | 1.835.885.094 | DINAS SOSIAL |
| | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Persentase TPU yang dipelihara/ditata | 85% | 90% | 1.194.664.754 | 90% | 1.214.146.521 | 95% | 1.229.683.862 | 95% | 1.245.439.595 | 95% | 1.285.119.566 | 95% | 1.285.119.566 | DINAS SOSIAL |
| | | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan | | | | 318.124.365.744 | | 322.803.304.866 | | 324.635.728.470 | | 328.743.835.850 | | 338.109.813.386 | | 338.109.813.386 | |
| | | Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | Tenaga Kerja | | | | 12.799.979.505 | | 13.008.712.726 | | 13.175.184.240 | | 13.343.995.665 | | 13.769.138.205 | | 13.769.138.205 | |
| | | Program Hubungan Industrial | Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Bengkalis | 86% | 90% | 383.999.385 | 93% | 390.261.382 | 95% | 395.255.527 | 97% | 400.319.870 | 100% | 413.074.146 | 100% | 413.074.146 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kerja dengan sertifikasi Kompetensi di Kabupaten Bengkalis | 10% | 15% | 1.535.997.541 | 20% | 1.561.045.527 | 25% | 1.581.022.109 | 30% | 1.601.279.480 | 35% | 1.652.296.585 | 35% | 1.652.296.585 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Bengkalis | 75% | 80% | 255.999.590 | 83% | 260.174.255 | 85% | 263.503.685 | 87% | 266.879.913 | 90% | 275.382.764 | 90% | 275.382.764 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 100% | 100% | 10.239.983.604 | 100% | 10.406.970.180 | 100% | 10.540.147.392 | 100% | 10.675.196.532 | 100% | 11.015.310.564 | 100% | 11.015.310.564 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase ketersediaan data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenaga Kerjaan serta Ketrasmigrasian se Kabupaten Bengkulu | 55% | 85% | 383.999.385 | 87% | 390.261.382 | 90% | 395.255.527 | 92% | 400.319.870 | 93% | 413.074.146 | 93% | 413.074.146 | DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI |
| 2 | 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 17.066.639.340 | | 17.344.950.301 | | 17.566.912.320 | | 17.791.994.220 | | 18.358.850.940 | | 18.358.850.940 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | 100% | 100% | 10.751.982.784 | 100% | 10.927.318.689 | 100% | 11.067.154.762 | 100% | 11.208.956.359 | 100% | 11.566.076.092 | 100% | 11.566.076.092 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak | MADYA | MADYA | 1.194.664.754 | NINDYA | 1.214.146.521 | NINDYA | 1.229.683.862 | UTAMA | 1.245.439.595 | UTAMA | 1.285.119.566 | UTAMA | 1.285.119.566 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 69.23% | 72% | 2.389.329.508 | 75% | 2.428.293.042 | 80% | 2.459.367.725 | 90% | 2.490.879.191 | 100% | 2.570.239.132 | 100% | 2.570.239.132 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak | 5% | 20% | 170.666.393 | 25% | 173.449.503 | 30% | 175.669.123 | 35% | 177.919.942 | 0 | 183.588.509 | 45% | 183.588.509 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga | 5% | 12% | 853.331.967 | 19% | 867.247.515 | 25% | 878.345.616 | 30% | 889.599.711 | 35% | 917.942.547 | 35% | 917.942.547 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | Prevalensi kekerasan terhadap anak | 30% | 20% | 767.998.770 | 18% | 780.522.764 | 15% | 790.511.054 | 10% | 800.639.740 | 5% | 826.148.292 | 5% | 826.148.292 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | Program Perlindungan Perempuan | Pravelensi kekerasan terhadap perempuan | 1% | 1% | 938.665.164 | 1% | 953.972.267 | 1% | 966.180.178 | 1% | 978.559.682 | 0% | 1.009.736.802 | 0% | 1.009.736.802 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2 | 9 | Pangan | | | 9.955.539.615 | | 10.117.887.675 | | 3.553.585.484 | | 3.599.987.919 | | 3.716.172.897 | | 3.716.172.897 | | |
| | | Dinas Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase tingkat capaian Indeks Ketahanan Pangan | 72% | 75% | 99.555.396 | 85% | 101.178.877 | 90% | 102.473.655 | 92% | 103.786.633 | 95% | 107.093.297 | 95% | 107.093.297 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pengujian Mutu dan Keamanan PSAT | 100% | 100% | 109.510.936 | 100% | 111.296.764 | 100% | 112.721.021 | 100% | 114.165.296 | 100% | 117.802.627 | 100% | 117.802.627 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase penyediaan lumbung pangan dan pembinaan kelompok | 100% | 100% | 487.821.441 | 100% | 495.776.496 | 100% | 502.120.910 | 100% | 508.554.501 | 100% | 524.757.156 | 100% | 524.757.156 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 88% | 89% | 1.592.886.338 | 89,50% | 1.618.862.028 | 90% | 1.946.999.449 | 90,50% | 1.971.946.026 | 91% | 2.034.772.646 | 91% | 2.034.772.646 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 100% | 7.347.188.236 | 100% | 7.467.001.104 | 100% | 714.973.331 | 100% | 724.134.165 | 100% | 747.205.233 | 100% | 747.205.233 | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|---------------------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Pelaksanaan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan pada Masyarakat | 100% | 100% | 318.577.268 | 100% | 323.772.406 | 100% | 174.297.118 | 100% | 177.401.298 | 100% | 184.541.938 | 100% | 184.541.938 | DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN | |
| 2 | # | Pertanahan | | | 853.331.967 | | 867.247.515 | | 878.345.616 | | 889.599.711 | | 917.942.546 | | 917.942.546 | | |
| | Program Penetapan Tanah Ulayat | Persentase Penetapan Tanah Ulayat | 8% | 8% | 298.666.188 | 8% | 303.536.630 | 9% | 307.420.966 | 10% | 311.359.899 | 13% | 321.279.891 | 15% | 321.279.891 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Izin Lokasi | 15% | 15% | 153.599.754 | 15% | 156.104.553 | 16% | 158.102.211 | 18% | 160.127.948 | 20% | 165.229.658 | 20% | 165.229.658 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah | 15% | 5% | 162.133.074 | 8% | 164.777.028 | 11% | 166.885.667 | 14% | 169.023.945 | 17% | 174.409.084 | 17% | 174.409.084 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase pelaksanaan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan | 5% | 5% | 238.932.951 | 8% | 242.829.304 | 11% | 245.936.772 | 14% | 249.087.919 | 17% | 257.023.913 | 17% | 257.023.913 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| 2 | 11 | Lingkungan Hidup | | | 39.822.158.460 | | 40.471.550.700 | | 40.989.462.082 | | 41.514.653.180 | | 42.837.318.860 | | 42.837.318.860 | | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap izin lingkungan, PPLH dan PULH | 80% | 85% | 796.443.169 | 90% | 809.431.014 | 92% | 819.789.242 | 95% | 830.293.064 | 100% | 856.746.377 | 100% | 856.746.377 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | 100% | 100% | 278.755.109 | 100% | 283.300.855 | 100% | 286.926.235 | 100% | 290.602.572 | 100% | 299.861.232 | 100% | 299.861.232 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---------------------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH | Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH yang mendapatkan pengakuan | 20% | 40% | 79.644.317 | 50% | 80.943.101 | 70% | 81.978.924 | 85% | 83.029.306 | 100% | 85.674.638 | 100% | 85.674.638 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) | Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati | 60% | 70% | 1.871.641.448 | 80% | 1.902.162.883 | 90% | 1.926.504.718 | 95% | 1.951.188.699 | 100% | 2.013.353.986 | 100% | 2.013.353.986 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase pengelolaan persampahan yang dikelola | 72% | 74% | 16.327.084.969 | 76% | 16.593.335.787 | 80% | 16.805.679.453 | 83% | 17.021.007.804 | 85% | 17.563.300.733 | 85% | 17.563.300.733 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap ketentuan pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 70% | 75% | 119.466.475 | 80% | 121.414.652 | 85% | 122.968.386 | 95% | 124.543.960 | 100% | 128.511.957 | 100% | 128.511.957 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 70% | 75% | 1.991.107.923 | 80% | 2.023.577.535 | 85% | 2.049.473.104 | 95% | 2.075.732.659 | 100% | 2.141.865.943 | 100% | 2.141.865.943 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup | 25% | 30% | 318.577.268 | 35% | 323.772.406 | 40% | 327.915.697 | 50% | 332.117.225 | 60% | 342.698.551 | 60% | 342.698.551 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup | 100% | 100% | 17.242.994.613 | 100% | 17.524.181.453 | 100% | 17.748.437.081 | 100% | 17.975.844.827 | 100% | 18.548.559.066 | 100% | 18.548.559.066 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | 75% | 80% | 796.443.169 | 85% | 809.431.014 | 90% | 819.789.242 | 95% | 830.293.064 | 100% | 856.746.377 | 100% | 856.746.377 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | # | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 26.751.957.165 | | 27.188.209.596 | | 27.536.135.060 | | 27.888.950.940 | | 28.777.498.848 | | 28.777.498.848 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---------------------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pencatatan Sipil | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil | 100% | 100% | 2.161.774.316 | 100% | 2.197.027.038 | 100% | 2.225.142.227 | 100% | 2.253.652.601 | 100% | 2.325.454.452 | 100% | 2.325.454.452 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100% | 100% | 4.323.548.633 | 100% | 4.394.054.076 | 100% | 4.450.284.454 | 100% | 4.507.305.202 | 100% | 4.650.908.905 | 100% | 4.650.908.905 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Penyajian Data Kependudukan | 100% | 100% | 2.296.885.211 | 100% | 2.334.341.228 | 100% | 2.364.213.616 | 100% | 2.394.505.889 | 100% | 2.470.795.356 | 100% | 2.470.795.356 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan | 100% | 100% | 135.110.895 | 100% | 137.314.190 | 100% | 139.071.389 | 100% | 140.853.288 | 100% | 145.340.903 | 100% | 145.340.903 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100% | 100% | 17.834.638.110 | 100% | 18.125.473.064 | 100% | 18.357.423.374 | 100% | 18.592.633.960 | 100% | 19.184.999.232 | 100% | 19.184.999.232 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | # | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 32.711.058.735 | | 33.244.488.075 | | 33.669.915.280 | | 34.101.322.255 | | 35.187.797.635 | | 35.187.797.635 | |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Desa yang dilakukan | 100% | 100% | 5.560.879.985 | 100% | 5.651.562.973 | 100% | 5.723.885.598 | 100% | 5.797.224.783 | 100% | 5.981.925.598 | 100% | 5.981.925.598 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---------------------------------------|--|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase pelaksanaan fasilitasi, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta hukum adat masyarakat | 100% | 100% | 15.701.308.193 | 100% | 15.957.354.276 | 100% | 16.161.559.334 | 100% | 16.368.634.682 | 100% | 16.890.142.865 | 100% | 16.890.142.865 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | Program Penataan Desa | Persentase Sarana Desa yang di Defenitifkan | 100% | 100% | 981.331.762 | 100% | 997.334.642 | 100% | 1.010.097.458 | 100% | 1.023.039.668 | 100% | 1.055.633.929 | 100% | 1.055.633.929 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentasae pelaksanaan pembentukan BKAD yang difasilitasi | 100% | 100% | 327.110.587 | 100% | 332.444.881 | 100% | 336.699.153 | 100% | 341.013.223 | 100% | 351.877.976 | 100% | 351.877.976 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 100% | 100% | 10.140.428.208 | 100% | 10.305.791.303 | 100% | 10.437.673.737 | 100% | 10.571.409.899 | 100% | 10.908.217.267 | 100% | 10.908.217.267 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | # | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | 9.040.935.623 | | 9.180.091.103 | | 9.291.072.113 | | 9.403.613.063 | | 9.687.041.423 | | 9.687.041.423 | |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Persentase kelompok BKB, BKL, BKR, dan UPPKS yang aktif; persentase kelompok PIK-R aktif | 60; 60 | 65; 65 | 296.109.306 | 70;70 | 296.109.306 | 75; 75 | 296.109.306 | 75; 75 | 296.109.306 | 75; 75 | 296.109.306 | 75; 75 | 296.109.306 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR); presentase kesertaan KB Baru | 66; 66,5 | 67; 66,1 | 511.999.180 | 69;66,5 | 520.348.509 | 70;67 | 527.007.370 | 70; 67 | 533.759.827 | 70; 67 | 550.765.528 | 70; 67 | 550.765.528 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Penurunan angka laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; menurunnya angka kelahiran total (TFR) | 1,62%; 78 jiwa/km2; 2,51% | 1,61%; 79 jiwa/km2; 2,50% | 211.506.647 | 1,60%; 80 jiwa/km2; 2,49% | 211.506.647 | 1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48% | 211.506.647 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 100% | 100% | 8.021.320.490 | 100% | 8.152.126.641 | 100% | 8.256.448.790 | 100% | 8.362.237.283 | 100% | 8.628.659.942 | 100% | 8.628.659.942 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | # | Perhubungan | | | 96.710.956.260 | | 98.288.051.700 | | 101.857.642.140 | | 103.162.727.018 | | 106.449.513.444 | | 106.449.513.444 | |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi | 50% | 50% | 36.750.163.379 | 61% | 37.349.459.646 | 71% | 38.822.876.227 | 80% | 39.320.307.226 | 86% | 40.573.060.577 | 88% | 40.573.060.577 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Perhubungan | 100% | 100% | 30.947.506.003 | 100% | 31.452.176.544 | 100% | 32.850.126.038 | 100% | 33.271.029.191 | 100% | 34.331.051.258 | 100% | 34.331.051.258 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi | 23% | 23% | 29.013.286.878 | 42% | 29.486.415.510 | 57% | 30.184.639.875 | 70% | 30.571.390.601 | 83% | 31.545.401.609 | 83% | 31.545.401.609 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi | 100% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2 | # | Komunikasi dan Informatika | | | 11.377.759.561 | | 11.563.300.200 | | 11.125.711.136 | | 11.268.263.006 | | 11.627.272.263 | | 11.627.272.263 | |
| | Program Aplikasi Informatika | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkulu | 2 | 2,2 | 2.047.996.721 | 2,4 | 2.081.394.036 | 2,6 | 2.108.029.478 | 2,8 | 2.135.039.306 | 2,8 | 2.203.062.113 | 2,8 | 2.203.062.113 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu | 100 | 100 | 2.389.329.508 | 100 | 2.428.293.042 | 100 | 2.459.367.725 | 100 | 2.490.879.191 | 100 | 2.570.239.132 | 100 | 2.570.239.132 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 100% | 100% | 6.940.433.332 | 100% | 7.053.613.122 | 100% | 6.558.313.933 | 100% | 6.642.344.509 | 100% | 6.853.971.018 | 100% | 6.853.971.018 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | # | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | 17.066.639.339 | | 17.344.950.300 | | 17.566.912.320 | | 18.101.994.221 | | 18.358.850.941 | | 18.358.850.941 | |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi yang diurus | 45% | 50% | 819.198.688 | 55% | 832.557.614 | 60% | 843.211.791 | 65% | 854.015.723 | 70% | 881.224.845 | 70% | 881.224.845 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang dilakukan | 45% | 50% | 409.599.344 | 55% | 416.278.807 | 60% | 421.605.896 | 65% | 427.007.861 | 70% | 440.612.423 | 70% | 440.612.423 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Persentase produk UMKM yang diberdayakan | 0,11 | 0,15 | 1.604.264.098 | 0,2 | 1.630.425.328 | 0,25 | 1.651.289.758 | 0,3 | 1.672.447.457 | 0,35 | 1.725.731.988 | 0,4 | 1.725.731.988 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perkoperasian | 45% | 50% | 699.732.213 | 55% | 711.142.962 | 60% | 720.243.405 | 65% | 729.471.763 | 70% | 752.712.889 | 70% | 752.712.889 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi yang dilakukan | 45% | 50% | 665.598.934 | 55% | 676.453.062 | 60% | 685.109.580 | 65% | 693.887.775 | 70% | 715.995.187 | 70% | 715.995.187 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Pengembangan Umkm | Persentase fasilitasi peningkatan pengembangan UMKM yang dilakukan | 1,50% | 1,60% | 614.399.016 | 1,70% | 624.418.211 | 1,80% | 632.408.844 | 1,90% | 640.511.792 | 2% | 660.918.634 | 2% | 660.918.634 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat | 20% | 22% | 597.332.377 | 25% | 607.073.261 | 28% | 614.841.931 | 32% | 622.719.798 | 35% | 642.559.783 | 35% | 642.559.783 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 100% | 100% | 11.656.514.669 | 100% | 11.846.601.055 | 100% | 11.998.201.115 | 100% | 12.461.932.052 | 100% | 12.539.095.192 | 100% | 12.539.095.192 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 2 | # | Penanaman Modal | | | 11.377.759.561 | | 11.563.300.201 | | 11.711.274.881 | | 11.861.329.480 | | 12.239.233.960 | | 12.239.233.960 | | |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pelayanan Penanaman Modal | 100% | 100% | 318.577.268 | 100% | 323.772.406 | 100% | 327.915.697 | 100% | 332.117.225 | 100% | 342.698.551 | 100% | 342.698.551 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 100% | 100% | 34.133.279 | 100% | 34.689.901 | 100% | 35.133.825 | 100% | 35.583.988 | 100% | 36.717.702 | 100% | 36.717.702 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 100% | 100% | 136.533.115 | 100% | 138.759.602 | 100% | 140.535.299 | 100% | 142.335.954 | 100% | 146.870.808 | 100% | 146.870.808 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100% | 100% | 10.239.983.604 | 100% | 10.406.970.180 | 100% | 10.540.147.392 | 100% | 10.675.196.532 | 100% | 11.015.310.564 | 100% | 11.015.310.564 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 443.732.623 | 100% | 450.968.708 | 100% | 456.739.720 | 100% | 462.591.850 | 100% | 477.330.124 | 100% | 477.330.124 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal | 100% | 100% | 204.799.672 | 100% | 208.139.404 | 100% | 210.802.948 | 100% | 213.503.931 | 100% | 220.306.211 | 100% | 220.306.211 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | # | Kepemudaan dan Olahraga | | | 24.266.659.835 | | 24.336.237.576 | | 24.391.728.080 | | 24.447.998.555 | | 24.589.712.735 | | 24.589.712.735 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|--|------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Prestasi Olahraga | 80% | 80% | 767.998.770 | 80% | 780.522.764 | 80% | 790.511.054 | 80% | 800.639.740 | 80% | 826.148.292 | 80% | 826.148.292 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Pembinaan Kepemudaan | 75% | 80% | 22.559.995.901 | 85% | 22.601.742.545 | 90% | 22.635.036.848 | 95% | 22.668.799.133 | 100% | 22.753.827.641 | 100% | 22.753.827.641 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase Fasilitas Organisasi Gerakan Pramuka | 65% | 70% | 938.665.164 | 80% | 953.972.267 | 85% | 966.180.178 | 90% | 978.559.682 | 100% | 1.009.736.802 | 100% | 1.009.736.802 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | # | Statistik | | | | 284.443.989 | | 289.082.505 | | 292.781.872 | | 296.533.237 | | 305.980.849 | | 305.980.849 | |
| | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase PD dengan statistik sektoral terintegrasi pada portal data | 80% | 100% | 284.443.989 | 100% | 289.082.505 | 100% | 292.781.872 | 100% | 296.533.237 | 100% | 305.980.849 | 100% | 305.980.849 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | # | Persandian | | | | 426.665.984 | | 433.623.758 | | 439.172.808 | | 444.799.856 | | 458.971.274 | | 458.971.274 | |
| | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah | 100% | 100% | 426.665.984 | 100% | 433.623.758 | 100% | 439.172.808 | 100% | 444.799.856 | 100% | 458.971.274 | 100% | 458.971.274 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | # | Kebudayaan | | | | 1.422.219.944 | | 1.445.412.525 | | 1.463.909.360 | | 1.482.666.185 | | 1.529.904.245 | | 1.529.904.245 | |
| | | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Bernilai Sejarah yang dilestarikan | 75% | 80% | 177.777.493 | 85% | 180.676.566 | 85% | 182.988.670 | 90% | 185.333.273 | 90% | 191.238.031 | 90% | 191.238.031 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 45% | 47% | 151.998.155 | 50% | 170.784.145 | 50% | 185.766.582 | 50% | 200.959.610 | 50% | 239.222.438 | 50% | 239.222.438 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Kunjungan ke museum | 60% | 65% | 92.444.296 | 70% | 93.951.814 | 75% | 95.154.108 | 80% | 96.373.302 | 85% | 99.443.776 | 85% | 99.443.776 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Tradisi Budaya yang Dilestarikan | 80% | 85% | 1.000.000.000 | 90% | 1.000.000.000 | 95% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | # | Perpustakaan | | | 5.962.105.670 | | 5.884.942.406 | | 8.891.758.180 | | 8.906.180.749 | | 9.053.827.642 | | 9.053.827.642 | |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase Pengelolaan Perpustakaan | 75% | 78,50% | 537.599.139 | 80% | 546.365.934 | 85% | 553.357.738 | 88,50% | 560.447.818 | 90% | 578.303.805 | 90% | 578.303.805 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Pelestarian koleksi nasional naskah kuno | 75% | 78,50% | 486.399.221 | 80% | 494.331.084 | 85% | 500.657.001 | 88,50% | 507.071.835 | 90% | 523.227.252 | 90% | 523.227.252 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100% | 78,50% | 4.938.107.310 | 80% | 4.844.245.388 | 85% | 7.837.743.441 | 88,50% | 7.838.661.096 | 90% | 7.952.296.585 | 90% | 7.952.296.585 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | # | Kearsipan | | | 227.555.191 | | 231.266.004 | | 234.225.498 | | 237.226.590 | | 244.784.679 | | 244.784.679 | |
| | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Pengelolaan Arsip | 65% | 68,50% | 127.555.191 | 70% | 131.266.004 | 75% | 134.225.498 | 78,50% | 137.226.590 | 80% | 144.784.679 | 80% | 144.784.679 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 100% | 100,00% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100,00% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | 102.813.470.465 | | 104.838.743.757 | | 106.463.180.456 | | 108.112.543.499 | | 112.219.176.750 | | 112.219.176.750 | |
| 3 | # | Kelautan dan Perikanan | | | 19.911.079.231 | | 20.235.775.352 | | 20.494.731.040 | | 20.757.326.591 | | 21.418.659.431 | | 21.418.659.431 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya | 82% | 85% | 597.332.377 | 90% | 607.073.261 | 94% | 614.841.931 | 97% | 622.719.798 | 100% | 642.559.783 | 100% | 642.559.783 | DINAS PERIKANAN |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 82,50% | 83,33% | 3.783.105.054 | 90% | 3.844.797.317 | 95,88% | 3.893.998.898 | 98,75% | 3.943.892.052 | 100% | 4.069.545.292 | 100% | 4.069.545.292 | DINAS PERIKANAN |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 85,63% | 89,51% | 2.190.218.715 | 92,83% | 2.225.935.289 | 94,23% | 2.254.420.414 | 100% | 2.283.305.925 | 100% | 2.356.052.537 | 100% | 2.356.052.537 | DINAS PERIKANAN |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase tingkat konsumsi ikan | 90% | 95,16% | 995.553.962 | 95,70% | 1.011.788.768 | 97,59% | 1.024.736.552 | 98,18% | 1.037.866.330 | 100% | 1.070.932.972 | 100% | 1.070.932.972 | DINAS PERIKANAN |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Perikanan | 100% | 100% | 12.344.869.123 | 100% | 12.546.180.717 | 100% | 12.706.733.245 | 100% | 12.869.542.486 | 100% | 13.279.568.847 | 100% | 13.279.568.847 | DINAS PERIKANAN |
| 3 | # | Pariwisata | | | 28.355.478.130 | | 29.144.025.850 | | 29.772.918.239 | | 30.410.650.291 | | 32.016.744.329 | | 32.016.744.329 | |
| | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase Kunjungan wisata | 80% | 85% | 290.132.869 | 90% | 294.864.155 | 95% | 298.637.509 | 100% | 302.463.902 | 100% | 312.100.466 | 100% | 312.100.466 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase kreatifitas usaha ekonomi yang dihasilkan | 60% | 65% | 628.621.216 | 70% | 638.872.336 | 75% | 647.047.937 | 80% | 655.338.454 | 85% | 676.217.676 | 95% | 676.217.676 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase kewirausahaan kreatif baru | 25% | 30% | 3.288.172.513 | 40% | 3.341.793.758 | 45% | 3.384.558.440 | 50% | 3.427.924.220 | 55% | 3.537.138.614 | 55% | 3.537.138.614 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Destinasi Pariwisata Daerah yang Dikembangkan | 10% | 15% | 3.094.750.600 | 20% | 3.145.217.654 | 25% | 3.185.466.767 | 30% | 3.226.281.619 | 35% | 3.329.071.637 | 35% | 3.329.071.637 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---------------------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga | 100% | 100% | 21.053.800.932 | 100% | 21.723.277.947 | 100% | 22.257.207.586 | 100% | 22.798.642.096 | 100% | 24.162.215.936 | 100% | 24.162.215.936 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3 | # | Pertanian | | | 39.822.158.461 | | 40.471.550.700 | | 40.989.462.081 | | 41.514.653.180 | | 42.837.318.859 | | 42.837.318.859 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan | 100% | 100% | 21.265.032.618 | 100% | 21.611.808.074 | 100% | 21.888.372.751 | 100% | 22.168.824.798 | 100% | 22.875.128.271 | 100% | 22.875.128.271 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Peningkatan sarana produksi Perkebunan | 75% | 80% | 3.583.994.261 | 82% | 3.642.439.563 | 85% | 3.689.051.587 | 87% | 3.736.318.786 | 90% | 3.855.358.697 | 90% | 3.855.358.697 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Rogram Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan prasarana produksi Perkebunan | 75% | 80% | 477.865.902 | 82% | 485.658.608 | 85% | 491.873.545 | 87% | 498.175.838 | 90% | 514.047.826 | 90% | 514.047.826 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase pengendalian bencana produksi Perkebunan | 75% | 80% | 676.976.694 | 82% | 688.016.362 | 85% | 696.820.855 | 87% | 705.749.104 | 90% | 728.234.421 | 90% | 728.234.421 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase peningkatan kompetensi penyuluh perkebunan | 75% | 80% | 637.154.535 | 82% | 647.544.811 | 85% | 655.831.393 | 87% | 664.234.451 | 90% | 685.397.102 | 90% | 685.397.102 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase pengawasan dan perizinan usaha perkebunan | 75% | 80% | 358.399.426 | 82% | 364.243.956 | 85% | 368.905.159 | 87% | 373.631.879 | 90% | 385.535.870 | 90% | 385.535.870 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Hortikultura Tanaman Pangan Dan Peternakan | 100% | 100% | 1.473.419.863 | 100% | 1.497.447.376 | 100% | 1.516.610.097 | 100% | 1.536.042.168 | 100% | 1.584.980.798 | 100% | 1.584.980.798 | DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|---------------------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Bencana Pertanian di Kabupaten Bengkalis yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan | 100% | 100% | 278.755.109 | 100% | 283.300.855 | 100% | 286.926.235 | 100% | 290.602.572 | 100% | 299.861.232 | 100% | 299.861.232 | DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase peningkatan Kesehatan Hewan, dan pencegahan/ penanganan Wabah Penyakit Hewan Menular | 100% | 100% | 2.429.151.666 | 100% | 2.468.764.593 | 100% | 2.500.357.187 | 100% | 2.532.393.844 | 100% | 2.613.076.450 | 100% | 2.613.076.450 | DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase sarana dan sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan | 100% | 100% | 2.827.373.251 | 100% | 2.873.480.100 | 100% | 2.910.251.808 | 100% | 2.947.540.376 | 100% | 3.041.449.639 | 100% | 3.041.449.639 | DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Sarana Pertanian yang dikembangkan | 100% | 100% | 2.468.973.825 | 100% | 2.509.236.143 | 100% | 2.541.346.649 | 100% | 2.573.908.497 | 100% | 2.655.913.769 | 100% | 2.655.913.769 | DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase peningkatan kompetensi penyuluh | 100% | 100% | 3.345.061.311 | 100% | 3.399.610.259 | 100% | 3.443.114.815 | 100% | 3.487.230.867 | 100% | 3.598.334.784 | 100% | 3.598.334.784 | DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
| 3 | # | Perdagangan | | | 11.652.759.561 | | 11.865.300.800 | | 12.044.024.878 | | 12.227.354.478 | | 12.641.860.961 | | 12.641.860.961 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 100% | 100% | 6.030.212.567 | 100% | 6.128.549.106 | 100% | 6.206.975.686 | 100% | 6.286.504.624 | 100% | 6.486.793.999 | 100% | 6.486.793.999 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Pelaksanaan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 100% | 100% | 275.000.000 | 100% | 302.000.600 | 100% | 332.750.000 | 100% | 366.025.000 | 100% | 402.627.000 | 100% | 402.627.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US\$) | 554,90% | 558,76 | 341.332.787 | 559 | 346.899.006 | 562,98 | 351.338.246 | 568,26 | 355.839.884 | 568,26 | 367.177.019 | 568,26 | 367.177.019 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase Produk Unggulan IKM yg dipromosikan | 64% | 71% | 853.331.967 | 78% | 867.247.515 | 85% | 878.345.616 | 92% | 889.599.711 | 100% | 917.942.547 | 100% | 917.942.547 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--|---------------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Pasar yang dikelola Pemda | 30% | 100% | 2.616.884.699 | 100% | 2.659.559.046 | 100% | 2.693.593.222 | 100% | 2.728.105.780 | 100% | 2.815.023.811 | 100% | 2.815.023.811 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase ketersediaan Bapokting; jumlah paket bahan pokok penting yg diserahkan ke masy kurang mampu | 100%; 0 | 100%; 13.000 | 625.776.776 | 100%; 13.000 | 635.981.511 | 100%; 13.000 | 644.120.118 | 100%; 13.000 | 652.373.121 | 100%; 13.000 | 673.157.868 | 100%; 13.000 | 673.157.868 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase pelaksanaan tertib ukur UTPP | 85% | 88% | 910.220.765 | 91% | 925.064.016 | 95% | 936.901.990 | 97% | 948.906.358 | 100% | 979.138.717 | 100% | 979.138.717 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3 | # | Perindustrian | | | 2.844.439.890 | | 2.890.825.051 | | 2.927.818.720 | | 2.965.332.369 | | 3.059.808.490 | | 3.059.808.490 | |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase Data IKM yg dipublikasikan | 60% | 65% | 540.443.579 | 79% | 549.256.760 | 85% | 556.285.557 | 90% | 563.413.150 | 95% | 581.363.613 | 98% | 581.363.613 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Persentase pelaku usaha IKM yg difasilitasi izinya | 100 % | 100% | 341.332.787 | 100% | 346.899.006 | 100% | 351.338.246 | 100% | 355.839.884 | 100% | 367.177.019 | 100% | 367.177.019 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase sentra IKM yg dikembangkan; Peningkatan IKM baru | 5; 50 | 5; 50 | 1.962.663.524 | 8; 50 | 1.994.669.285 | 10;50 | 2.020.194.917 | 10; 50 | 2.046.079.335 | 15; 50 | 2.111.267.858 | 15; 100 | 2.111.267.858 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3 | # | Transmigrasi | | | 227.555.192 | | 231.266.004 | | 234.225.498 | | 237.226.590 | | 244.784.680 | | 244.784.680 | |
| | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase pelaksanaan pembangunan kawasan Transmigrasi | 100% | 100% | 113.777.596 | 100% | 115.633.002 | 100% | 117.112.749 | 100% | 118.613.295 | 100% | 122.392.340 | 100% | 122.392.340 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Persentase pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi | 100% | 100% | 113.777.596 | 100% | 115.633.002 | 100% | 117.112.749 | 100% | 118.613.295 | 100% | 122.392.340 | 100% | 122.392.340 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Unsur Penunjang | | | | 255.999.590.102 | | 260.174.254.502 | | 263.503.684.800 | | 266.879.913.302 | | 275.382.764.102 | | 275.382.764.102 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 4 | 1 | Sekretariat Daerah | | | 156.444.193.951 | | 158.995.377.751 | | 161.030.029.600 | | 163.093.280.351 | | 168.289.466.951 | | 168.289.466.951 | | |
| | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase terselenggaranya administrasi pemerintahan dan kewilayahan | 100% | 100% | 39.111.048.488 | 100% | 39.748.844.438 | 100% | 40.257.507.400 | 100% | 40.773.320.088 | 100% | 42.072.366.738 | 100% | 42.072.366.738 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah | 100% | 100% | 104.817.609.947 | 100% | 106.526.903.093 | 100% | 107.890.119.832 | 100% | 109.272.497.835 | 100% | 112.753.942.857 | 100% | 112.753.942.857 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Koordinasi, Pemantauan dan Penataan Kebijakan | 40% | 50% | 12.515.535.516 | 60% | 12.719.630.220 | 70% | 12.882.402.368 | 80% | 13.047.462.428 | 90% | 13.463.157.356 | 95% | 13.463.157.356 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 2 | Sekretariat DPRD | | | 99.555.396.151 | | 101.178.876.751 | | 102.473.655.200 | | 103.786.632.951 | | 107.093.297.151 | | 107.093.297.151 | | |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd | Persentase peningkatan penunjang fungsi dan tupoksi DPRD | 100% | 100% | 42.808.820.345 | 100% | 43.506.917.003 | 100% | 44.063.671.736 | 100% | 44.628.252.169 | 100% | 46.050.117.775 | 100% | 46.050.117.775 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD | 100% | 100% | 56.746.575.806 | 100% | 57.671.959.748 | 100% | 58.409.983.464 | 100% | 59.158.380.782 | 100% | 61.043.179.376 | 100% | 61.043.179.376 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | Unsur Pendukung | | | 463.046.369.692 | | 470.597.409.892 | | 476.619.609.429 | | 482.726.456.511 | | 498.106.224.086 | | 498.106.224.086 | | |
| 5 | 1 | Perencanaan | | | 36.977.718.570 | | 37.580.725.651 | | 38.061.643.360 | | 38.549.320.809 | | 39.777.510.370 | | 39.777.510.370 | | |
| | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah | 95% | 95% | 8.504.875.271 | 96% | 8.643.566.900 | 97% | 8.754.177.973 | 98% | 8.866.343.786 | 99% | 9.148.827.385 | 99% | 9.148.827.385 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Bappeda | 100% | 100% | 23.295.962.699 | 100% | 23.675.857.160 | 100% | 23.978.835.317 | 100% | 24.286.072.110 | 100% | 25.059.831.533 | 100% | 25.059.831.533 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) | 95% | 95% | 5.176.880.600 | 96% | 5.261.301.591 | 97% | 5.328.630.070 | 98% | 5.396.904.913 | 99% | 5.568.851.452 | 99% | 5.568.851.452 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 5 | 2 | Keuangan | | | 395.661.588.698 | | 402.113.764.455 | | 407.259.583.952 | | 412.477.732.667 | | 425.619.360.958 | | 425.619.360.958 | | |
| | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase pengelolaan pendapatan daerah | 100% | 100% | 7.913.231.774 | 100% | 8.042.275.289 | 100% | 8.145.191.679 | 100% | 8.249.554.653 | 100% | 8.512.387.219 | 100% | 8.512.387.219 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Pendapatan Daerah | 100% | 100% | 21.761.387.378 | 100% | 22.116.257.045 | 100% | 22.399.277.117 | 100% | 22.686.275.297 | 100% | 23.409.064.853 | 100% | 23.409.064.853 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Penatausahaan Aset yang tertib dan terukur | 100% | 100% | 5.934.923.830 | 100% | 6.031.706.467 | 100% | 6.108.893.759 | 100% | 6.187.165.990 | 100% | 6.384.290.414 | 100% | 6.384.290.414 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Ketepatan waktu penyusunan APBD | 100% | 100% | 324.442.502.733 | 100% | 329.733.286.853 | 100% | 333.952.858.841 | 100% | 338.231.740.787 | 100% | 349.007.875.986 | 100% | 349.007.875.986 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 100% | 100% | 35.609.542.983 | 100% | 36.190.238.801 | 100% | 36.653.362.556 | 100% | 37.122.995.940 | 100% | 38.305.742.486 | 100% | 38.305.742.486 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 3 | Kepegawaian | | | 8.533.319.670 | | 8.672.475.151 | | 8.783.456.160 | | 8.895.997.110 | | 9.179.425.470 | | 9.179.425.470 | | |
| | | Program Kepegawaian Daerah | Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian | 100% | 100% | 1.621.330.737 | 100% | 1.647.770.279 | 100% | 1.668.856.670 | 100% | 1.690.239.451 | 100% | 1.744.090.839 | 100% | 1.744.090.839 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan | 100% | 100% | 6.911.988.933 | 100% | 7.024.704.872 | 100% | 7.114.599.490 | 100% | 7.205.757.659 | 100% | 7.435.334.631 | 100% | 7.435.334.631 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 5 | 4 | Pendidikan dan Pelatihan | | | 2.559.995.901 | | 2.601.742.545 | | 2.635.036.848 | | 2.668.799.133 | | 2.753.827.641 | | 2.753.827.641 | | |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur | 100% | 100% | 2.559.995.901 | 100% | 2.601.742.545 | 100% | 2.635.036.848 | 100% | 2.668.799.133 | 100% | 2.753.827.641 | 100% | 2.753.827.641 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 5 | 5 | Penelitian dan Pengembangan | | | 18.488.859.285 | | 18.790.362.825 | | 19.030.821.680 | | 19.274.660.405 | | 19.888.755.185 | | 19.888.755.185 | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 100% | 100% | 10.168.872.607 | 100% | 10.334.699.554 | 100% | 10.466.951.924 | 100% | 10.601.063.223 | 100% | 10.938.815.352 | 100% | 10.938.815.352 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah | 65% | 67% | 8.319.986.678 | 70% | 8.455.663.271 | 75% | 8.563.869.756 | 80% | 8.673.597.182 | 85% | 8.949.939.833 | 85% | 8.949.939.833 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 | 6 | Pengelola Perbatasan Daerah | | | 824.887.568 | | 838.339.265 | | 849.067.429 | | 859.946.387 | | 887.344.462 | | 887.344.462 | | |
| | | Program Pengelolaan Perbatasan | Persentase Tertib Administrasi Kewilayahan | 100% | | 824.887.568 | | 838.339.265 | | 849.067.429 | | 859.946.387 | | 887.344.462 | | 887.344.462 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Unsur Pengawasan | | | 17.066.639.340 | | 17.344.950.300 | | 17.566.912.320 | | 17.791.994.220 | | 18.358.850.940 | | 18.358.850.940 | | |
| 6 | 1 | Insektorat | | | 17.066.639.340 | | 17.344.950.300 | | 17.566.912.320 | | 17.791.994.220 | | 18.358.850.940 | | 18.358.850.940 | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat | 100% | 100% | 12.799.979.505 | 100% | 13.008.712.725 | 100% | 13.175.184.240 | 100% | 13.343.995.665 | 100% | 13.769.138.205 | 100% | 13.769.138.205 | INSPEKTORAT |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan | 100% | 100% | 3.413.327.868 | 100% | 3.468.990.060 | 100% | 3.513.382.464 | 100% | 3.558.398.844 | 100% | 3.671.770.188 | 100% | 3.671.770.188 | INSPEKTORAT |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase tindak lanjut hasil asistensi | 100% | 100% | 853.331.967 | 100% | 867.247.515 | 100% | 878.345.616 | 100% | 889.599.711 | 100% | 917.942.547 | 100% | 917.942.547 | INSPEKTORAT |
| | | Unsur Kewilayahan | | | 0 | 120.930.703.331 | 0 | 122.903.173.028 | 0 | 124.476.559.423 | | 126.072.102.732 | 0 | 133.088.611.686 | 0 | 133.088.611.686 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Kecamatan Bandar Laksamana | | | | 6.542.211.747 | | 6.648.897.616 | | 6.733.983.058 | | 6.820.264.450 | | 7.037.559.527 | | 7.037.559.527 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 4.303.514.652 | 100% | 4.380.200.521 | 100% | 4.430.200.521 | 100% | 4.516.481.913 | 100% | 4.733.776.990 | 100% | 4.733.776.990 | KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | 100% | 750.358.188 | KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | 100% | 1.027.127.244 | KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | 100% | 162.914.529 | KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 262.314.969 | 100% | 292.314.969 | 100% | 327.400.411 | 100% | 327.400.411 | 100% | 327.400.411 | 100% | 327.400.411 | KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | 100% | 35.982.165 | KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA |
| | Kecamatan Bantan | | | | 6.399.989.754 | | 6.504.356.363 | | 6.587.592.121 | | 6.671.997.832 | | 6.884.569.104 | | 6.884.569.104 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 31.999.949 | 100% | 32.521.782 | 100% | 32.937.961 | 100% | 33.359.989 | 100% | 34.422.846 | 100% | 34.422.846 | KECAMATAN BANTAN |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 1.036.798.340 | 100% | 1.053.705.731 | 100% | 1.067.189.923 | 100% | 1.080.863.649 | 100% | 1.115.300.195 | 100% | 1.115.300.195 | KECAMATAN BANTAN |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 31.999.949 | 100% | 32.521.782 | 100% | 32.937.961 | 100% | 33.359.989 | 100% | 34.422.846 | 100% | 34.422.846 | KECAMATAN BANTAN |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 5.049.591.915 | 100% | 5.131.937.170 | 100% | 5.197.610.183 | 100% | 5.264.206.290 | 100% | 5.431.925.022 | 100% | 5.431.925.022 | KECAMATAN BANTAN |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 140.799.775 | 100% | 143.095.840 | 100% | 144.927.027 | 100% | 146.783.952 | 100% | 151.460.520 | 100% | 151.460.520 | KECAMATAN BANTAN |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 108.799.826 | 100% | 110.574.058 | 100% | 111.989.066 | 100% | 113.423.963 | 100% | 117.037.675 | 100% | 117.037.675 | KECAMATAN BANTAN |
| | Kecamatan Bathin Solapan | | | | 6.399.989.753 | | 6.504.356.363 | | 6.587.592.119 | | 6.671.997.832 | | 7.884.569.103 | | 7.884.569.103 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 115.199.816 | 100% | 117.078.415 | 100% | 118.576.658 | 100% | 120.095.961 | 100% | 123.922.244 | 100% | 123.922.244 | KECAMATAN BATHIN SOLAPAN |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 1.036.798.340 | 100% | 1.053.705.731 | 100% | 1.067.189.923 | 100% | 1.080.863.649 | 100% | 1.115.300.195 | 100% | 1.115.300.195 | KECAMATAN BATHIN SOLAPAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penganggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 19.199.969 | 100% | 19.513.069 | 100% | 19.762.776 | 100% | 20.015.993 | 100% | 20.653.707 | 100% | 20.653.707 | KECAMATAN BATHIN SOLAPAN |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 4.742.392.407 | 100% | 4.819.728.065 | 100% | 4.881.405.761 | 100% | 4.943.950.394 | 100% | 6.101.465.705 | 100% | 6.101.465.705 | KECAMATAN BATHIN SOLAPAN |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 159.999.744 | 100% | 162.608.909 | 100% | 164.689.803 | 100% | 166.799.946 | 100% | 172.114.228 | 100% | 172.114.228 | KECAMATAN BATHIN SOLAPAN |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 326.399.477 | 100% | 331.722.174 | 100% | 335.967.198 | 100% | 340.271.889 | 100% | 351.113.024 | 100% | 351.113.024 | KECAMATAN BATHIN SOLAPAN |
| | Kecamatan Bengkulu | | | | 13.653.311.471 | | 13.875.960.239 | | 14.053.529.856 | | 14.233.595.376 | | 15.687.080.751 | | 15.687.080.751 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 10.137.583.768 | 100% | 10.302.900.478 | 100% | 10.434.745.918 | 100% | 10.568.444.567 | 100% | 11.905.157.458 | 100% | 11.905.157.458 | KECAMATAN BENGKALIS |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 40.959.934 | 100% | 41.627.881 | 100% | 42.160.590 | 100% | 42.700.786 | 100% | 44.061.242 | 100% | 44.061.242 | KECAMATAN BENGKALIS |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 3.194.874.884 | 100% | 3.246.974.696 | 100% | 3.288.525.986 | 100% | 3.330.661.318 | 100% | 3.436.776.896 | 100% | 3.436.776.896 | KECAMATAN BENGKALIS |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 61.439.902 | 100% | 62.441.821 | 100% | 63.240.884 | 100% | 64.051.179 | 100% | 66.091.863 | 100% | 66.091.863 | KECAMATAN BENGKALIS |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 197.973.016 | 100% | 201.201.423 | 100% | 203.776.183 | 100% | 206.387.133 | 100% | 212.962.671 | 100% | 212.962.671 | KECAMATAN BENGKALIS |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 20.479.967 | 100% | 20.813.940 | 100% | 21.080.295 | 100% | 21.350.393 | 100% | 22.030.621 | 100% | 22.030.621 | KECAMATAN BENGKALIS |
| | Kecamatan Bukit Batu | | | | 8.248.875.681 | | 8.383.392.646 | | 8.490.674.288 | | 8.599.463.872 | | 8.873.444.620 | | 8.873.444.620 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 32.995.503 | 100% | 33.533.571 | 100% | 33.962.697 | 100% | 34.397.855 | 100% | 35.493.778 | 100% | 35.493.778 | KECAMATAN BUKIT BATU |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 1.658.024.012 | 100% | 1.685.061.922 | 100% | 1.706.625.532 | 100% | 1.728.492.238 | 100% | 1.783.562.369 | 100% | 1.783.562.369 | KECAMATAN BUKIT BATU |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 41.244.378 | 100% | 41.916.963 | 100% | 42.453.371 | 100% | 42.997.319 | 100% | 44.367.223 | 100% | 44.367.223 | KECAMATAN BUKIT BATU |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 5.996.932.620 | 100% | 6.094.726.453 | 100% | 6.172.720.207 | 100% | 6.251.810.236 | 100% | 6.450.994.239 | 100% | 6.450.994.239 | KECAMATAN BUKIT BATU |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 189.724.141 | 100% | 192.818.031 | 100% | 195.285.509 | 100% | 197.787.669 | 100% | 204.089.226 | 100% | 204.089.226 | KECAMATAN BUKIT BATU |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 329.955.027 | 100% | 335.335.706 | 100% | 339.626.972 | 100% | 343.978.555 | 100% | 354.937.785 | 100% | 354.937.785 | KECAMATAN BUKIT BATU |
| | Kecamatan Mandau | | | | 35.555.498.626 | | 36.135.313.126 | | 36.597.734.000 | | 37.066.654.625 | | 38.247.606.126 | | 38.247.606.126 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 263.110.690 | 100% | 267.401.317 | 100% | 270.823.232 | 100% | 274.293.244 | 100% | 283.032.285 | 100% | 283.032.285 | KECAMATAN MANDAU |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 14.151.088.453 | 100% | 14.381.854.624 | 100% | 14.565.898.132 | 100% | 14.752.528.541 | 100% | 15.222.547.238 | 100% | 15.222.547.238 | KECAMATAN MANDAU |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 56.888.798 | 100% | 57.816.501 | 100% | 58.556.374 | 100% | 59.306.647 | 100% | 61.196.170 | 100% | 61.196.170 | KECAMATAN MANDAU |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 20.053.301.225 | 100% | 20.380.316.603 | 100% | 20.641.121.976 | 100% | 20.905.593.209 | 100% | 21.571.649.855 | 100% | 21.571.649.855 | KECAMATAN MANDAU |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 248.888.490 | 100% | 252.947.192 | 100% | 256.184.138 | 100% | 259.466.582 | 100% | 267.733.243 | 100% | 267.733.243 | KECAMATAN MANDAU |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 782.220.970 | 100% | 794.976.889 | 100% | 805.150.148 | 100% | 815.466.402 | 100% | 841.447.335 | 100% | 841.447.335 | KECAMATAN MANDAU |
| | Kecamatan Pinggir | | | | 9.428.659.638 | | 9.582.831.064 | | 9.706.065.596 | | 9.831.073.832 | | 11.144.118.876 | | 11.144.118.876 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 2.797.222.188 | 100% | 2.842.837.354 | 100% | 2.879.216.929 | 100% | 2.916.107.853 | 100% | 3.009.015.669 | 100% | 3.009.015.669 | KECAMATAN PINGGIR |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 46.933.258 | 100% | 47.698.613 | 100% | 48.309.009 | 100% | 48.927.984 | 100% | 50.486.840 | 100% | 50.486.840 | KECAMATAN PINGGIR |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 6.242.123.339 | 100% | 6.343.915.572 | 100% | 6.425.098.181 | 100% | 6.507.421.886 | 100% | 7.714.749.731 | 100% | 7.714.749.731 | KECAMATAN PINGGIR |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 112.639.820 | 100% | 114.476.672 | 100% | 115.941.621 | 100% | 117.427.162 | 100% | 121.168.416 | 100% | 121.168.416 | KECAMATAN PINGGIR |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 42.008.000 | 100% | 43.108.400 | 100% | 44.263.820 | 100% | 45.477.011 | 100% | 46.750.860 | 100% | 46.750.860 | KECAMATAN PINGGIR |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 187.733.033 | 100% | 190.794.453 | 100% | 193.236.036 | 100% | 195.711.936 | 100% | 201.947.360 | 100% | 201.947.360 | KECAMATAN PINGGIR |
| | Kecamatan Rupal | | | | 14.506.643.440 | | 14.743.207.756 | | 14.931.875.472 | | 15.123.195.087 | | 15.605.023.298 | | 15.605.023.298 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 79.786.539 | 100% | 81.087.643 | 100% | 82.125.315 | 100% | 83.177.573 | 100% | 85.827.628 | 100% | 85.827.628 | KECAMATAN RUPAT |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 4.018.340.233 | 100% | 4.083.868.548 | 100% | 4.136.129.506 | 100% | 4.189.125.039 | 100% | 4.322.591.454 | 100% | 4.322.591.454 | KECAMATAN RUPAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 72.533.217 | 100% | 73.716.039 | 100% | 74.659.377 | 100% | 75.615.975 | 100% | 78.025.116 | 100% | 78.025.116 | KECAMATAN RUPAT |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 9.850.010.895 | 100% | 10.010.638.066 | 100% | 10.138.743.445 | 100% | 10.268.649.464 | 100% | 10.595.810.820 | 100% | 10.595.810.820 | KECAMATAN RUPAT |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 116.053.148 | 100% | 117.945.662 | 100% | 119.455.004 | 100% | 120.985.561 | 100% | 124.840.186 | 100% | 124.840.186 | KECAMATAN RUPAT |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 369.919.408 | 100% | 375.951.798 | 100% | 380.762.825 | 100% | 385.641.475 | 100% | 397.928.094 | 100% | 397.928.094 | KECAMATAN RUPAT |
| | Kecamatan Rupa Utara | | | | 7.395.543.715 | | 7.516.145.130 | | 7.612.328.672 | | 7.709.864.162 | | 7.955.502.075 | | 7.955.502.075 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 88.746.525 | 100% | 90.193.742 | 100% | 91.347.944 | 100% | 92.518.370 | 100% | 95.466.025 | 100% | 95.466.025 | KECAMATAN RUPAT UTARA |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 1.013.189.489 | 100% | 1.029.711.883 | 100% | 1.042.889.028 | 100% | 1.056.251.390 | 100% | 1.089.903.784 | 100% | 1.089.903.784 | KECAMATAN RUPAT UTARA |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 81.350.981 | 100% | 82.677.596 | 100% | 83.735.615 | 100% | 84.808.506 | 100% | 87.510.523 | 100% | 87.510.523 | KECAMATAN RUPAT UTARA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 5.258.231.581 | 100% | 5.343.979.187 | 100% | 5.412.365.686 | 100% | 5.481.713.419 | 100% | 5.656.361.975 | 100% | 5.656.361.975 | KECAMATAN RUPAT UTARA |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 199.679.680 | 100% | 202.935.919 | 100% | 205.532.874 | 100% | 208.166.332 | 100% | 214.798.556 | 100% | 214.798.556 | KECAMATAN RUPAT UTARA |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 754.345.459 | 100% | 766.646.803 | 100% | 776.457.525 | 100% | 786.406.145 | 100% | 811.461.212 | 100% | 811.461.212 | KECAMATAN RUPAT UTARA |
| | Kecamatan Siak Kecil | | | | 6.399.989.753 | | 6.504.356.362 | | 6.587.592.120 | | 6.671.997.832 | | 6.884.569.103 | | 6.884.569.103 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 25.599.959 | 100% | 26.017.425 | 100% | 26.350.368 | 100% | 26.687.991 | 100% | 27.538.276 | 100% | 27.538.276 | KECAMATAN SIAK KECIL |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 844.798.647 | 100% | 858.575.040 | 100% | 869.562.160 | 100% | 880.703.714 | 100% | 908.763.122 | 100% | 908.763.122 | KECAMATAN SIAK KECIL |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 31.999.949 | 100% | 32.521.782 | 100% | 32.937.961 | 100% | 33.359.989 | 100% | 34.422.846 | 100% | 34.422.846 | KECAMATAN SIAK KECIL |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 5.286.391.536 | 100% | 5.372.598.355 | 100% | 5.441.351.091 | 100% | 5.511.070.210 | 100% | 5.686.654.079 | 100% | 5.686.654.079 | KECAMATAN SIAK KECIL |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 134.399.785 | 100% | 136.591.484 | 100% | 138.339.435 | 100% | 140.111.954 | 100% | 144.575.951 | 100% | 144.575.951 | KECAMATAN SIAK KECIL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---------------------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 76.799.877 | 100% | 78.052.276 | 100% | 79.051.105 | 100% | 80.063.974 | 100% | 82.614.829 | 100% | 82.614.829 | KECAMATAN SIAK KECIL |
| | Kecamatan Talang Maudau | | | | 6.399.989.753 | | 6.504.356.363 | | 6.587.592.121 | | 6.671.997.832 | | 6.884.569.103 | | 6.884.569.103 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 100% | 102.399.836 | 100% | 104.069.702 | 100% | 105.401.474 | 100% | 106.751.965 | 100% | 110.153.106 | 100% | 110.153.106 | KECAMATAN TALANG MANDAU |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 100% | 1.107.198.227 | 100% | 1.125.253.651 | 100% | 1.139.653.437 | 100% | 1.154.255.625 | 100% | 1.191.030.455 | 100% | 1.191.030.455 | KECAMATAN TALANG MANDAU |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 140.799.775 | 100% | 143.095.840 | 100% | 144.927.027 | 100% | 146.783.952 | 100% | 151.460.520 | 100% | 151.460.520 | KECAMATAN TALANG MANDAU |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 4.633.592.581 | 100% | 4.709.154.006 | 100% | 4.769.416.695 | 100% | 4.830.526.431 | 100% | 4.984.428.030 | 100% | 4.984.428.030 | KECAMATAN TALANG MANDAU |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 121.599.805 | 100% | 123.582.771 | 100% | 125.164.250 | 100% | 126.767.959 | 100% | 130.806.813 | 100% | 130.806.813 | KECAMATAN TALANG MANDAU |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 294.399.529 | 100% | 299.200.393 | 100% | 303.029.238 | 100% | 306.911.900 | 100% | 316.690.179 | 100% | 316.690.179 | KECAMATAN TALANG MANDAU |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | | Unsur Pemerintahan Umum | | | 10.083.008.960 | | 10.418.082.546 | | 10.525.808.113 | | 10.435.047.862 | | 10.710.162.323 | | 10.710.162.323 | | |
| 8 | 1 | Kesatuan Bangsa dan Politik | | 53 | 10.083.008.960 | 53 | 10.418.082.546 | 53 | 10.525.808.113 | 56.384.566 | 10.435.047.862 | 53 | 10.710.162.323 | 53 | 10.710.162.323 | | |
| | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 50% | 50% | 99.555.396 | 50% | 101.178.877 | 50% | 102.473.655 | 50% | 103.786.633 | 50% | 107.093.297 | 50% | 107.093.297 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase peningkatan Ketahanan Ekonomi Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama | 40% | 50% | 278.755.109 | 50% | 283.300.855 | 50% | 286.926.235 | 50% | 290.602.572 | 50% | 299.861.232 | 50% | 299.861.232 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan | 50% | 50% | 258.844.030 | 50% | 263.065.080 | 50% | 266.431.504 | 50% | 269.845.246 | 50% | 278.442.573 | 50% | 278.442.573 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase peningkatan Penanganan Konflik di Daerah | 40% | 40% | 268.799.570 | 40% | 273.182.967 | 40% | 276.678.869 | 40% | 280.223.909 | 40% | 289.151.902 | 40% | 289.151.902 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase peningkatan pembinaan Pendidikan Politik | 50% | 50 | 1.800.000.000 | 50 | 2.000.000.000 | 50 | 2.000.000.000 | 50 | 1.800.000.000 | 50 | 1.800.000.000 | 50 | 1.800.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan | 100% | 100% | 7.377.054.855 | 100% | 7.497.354.767 | 100% | 7.593.297.850 | 100% | 7.690.589.502 | 100% | 7.935.613.319 | 100% | 7.935.613.319 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| TOTAL | | | | | | 2.844.481.898.000 | | 2.890.868.158.400 | | 2.927.862.983.820 | | 2.965.377.847.011 | | 3.059.855.240.860 | 3.059.855.240.860 | |

BAB VIII.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu tahun 2021-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu selama periode 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan Indikator Kinerja Utama didasarkan pada pencapaian *outcomes* dan *impact* yang dirumuskan berdasarkan target pencapaian Visi dan Misi yang diseralarkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Penetapan IKU akan menjadi alat ukur tingkat pencapaian keberhasilan, efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berikut disajikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkulu selama periode 2021-2026.

Tabel VIII-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu

| No. | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (Dengan Migas) | % *ADHK | -1,08% | -1,02% | -0,64% | -0,25% | 0,13% | 0,51% |
| 2. | Pertumbuhan Agregat sektoral di luar Migas | % *ADHK | 0,95% | 1,25% | 1,75% | 2,25% | 2,75% | 3,25% |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Point | 74,06 | 74,47 | 74,88 | 75,3 | 75,71 | 76,12 |
| 4. | Rasio PAD terhadap Total Pendapatan | % | 10,76% | 11,86% | 12,77% | 13,75% | 14,84% | 15,98% |
| 5. | Indek Reformasi Birokrasi | Nilai | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 72 |
| 6. | Pendapatan Perkapita Penduduk | Juta Rp/ Kapita/ Tahun *ADHB | 202,54 | 201,17 | 201,29 | 201,78 | 203,21 | 205,59 |
| 7. | Angka pengangguran | % | 9 | 8,75 | 8,64 | 8,54 | 8,44 | 8,34 |
| 8. | Angka Kemiskinan | % | 6,19 | 6,07 | 5,94 | 5,81 | 5,69 | 5,56 |
| 9. | Gini Rasio | Point | 0,28 | 0,279 | 0,278 | 0,277 | 0,276 | 0,275 |
| 10. | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik | % | 53,5 | 55,49 | 57,47 | 59,46 | 61,44 | 63,43 |

| No. | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | |
|-----|--|--------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 11. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan: | | | | | | | |
| | a. Orang | | 910.000 | 950.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
| | b. Barang | | 28.800 | 32.400 | 36.000 | 39.600 | 43.200 | 46.800 |
| 12. | IKLH | % | 70,33 | 70,61 | 70,88 | 71,16 | 71,29 | 71,44 |
| 13. | Indek Resiko Bencana | Nilai | 109,48 | 100,1 | 90,71 | 81,33 | 71,94 | 62,56 |

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah, merupakan akumulasi dari pencapaian indikator penyelenggaraan urusan dari perangkat daerah setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan dari Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel VIII.2 dibawah ini:

Tabel VIII-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----------|--|--------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 9 | 8,54 | 8,44 | 8,54 | 8,64 | 8,75 | 8,75 |
| | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,88 | 10,15 | 10,37 | 10,62 | 10,85 | 11,1 | 11,1 |
| | Usia Harapan Hidup | Tahun | 71,36 | 71,55 | 71,71 | 71,86 | 72,03 | 72,2 | 72,2 |
| | Persentase balita gizi buruk | Persen | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 66,21 | 66,22 | 67,18 | 67,29 | 67,77 | 68,3 | 68,3 |
| | Rasio penduduk yang bekerja | Persen | 91,08 | 91,45 | 91,82 | 92,19 | 92,56 | 92,93 | 92,93 |
| II | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | | |
| | Layanan Urusan Wajib Dasar | | | | | | | | |
| | Pendidikan | | | | | | | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun (SD) | Persen | 100,31 | 99,18 | 98,05 | 96,92 | 95,8 | 94,67 | 94,67 |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun (SMP) | Persen | 93,8 | 95,12 | 96,44 | 97,76 | 99,09 | 100,41 | 100,41 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | Persen | 109,58 | 107,63 | 108,98 | 108,79 | 109,41 | 109,12 | 109,12 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Persen | 96,82 | 97,62 | 98,41 | 99,2 | 100 | 100,79 | 100,79 |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | 98,22 | 98,27 | 98,32 | 98,37 | 98,42 | 98,47 | 98,47 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|---|-------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | 87,84 | 89,06 | 90,29 | 91,52 | 92,74 | 93,97 | 93,97 |
| | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kesehatan | | | | | | | | |
| | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Per 1.000 Penduduk | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | Per 1.000 Penduduk | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2 | 2 |
| | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | Per 1.000 Penduduk | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | Per 1.000 Penduduk | 191 | 181 | 172 | 164 | 156 | 148 | 148 |
| | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada BALITA | Persen | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| | Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk | Per 100.000 Penduduk | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk | Per 1.000 Penduduk | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | Angka kesembuhan penderita TB dan paru | Angka | 376 | 414 | 455 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| | Prevalensi HIV | Persen | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Rumah Sakit | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 95 |
| | Akreditasi Rumah Sakit | Nilai | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| | Cost Recovery Rate | Persen | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|--|------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| | Pekerjaan Umum: | | | | | | | | |
| | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 53,5 | 55,49 | 57,47 | 59,46 | 61,44 | 63,43 | 63,43 |
| | Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik | Kilo Meter | 480,087 | 528,096 | 576,104 | 624,113 | 672,122 | 720,131 | 720,131 |
| | Panjang Jalan Poros dan jembatan pada wilayah perbatasan dalam kondisi baik | Kilo Meter | 11,041 | 16,562 | 22,083 | 27,604 | 33,125 | 38,646 | 38,646 |
| | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 |
| | Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik | Persen | 69,18 | 71,04 | 73,49 | 75,77 | 75,85 | 78,59 | 78,59 |
| | Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur | Kilo Meter | 31,6 | 33,6 | 35,6 | 37,6 | 39,6 | 41,6 | 41,6 |
| | Panjang infrastruktur pengaman daerah rawan longsor | Kilo Meter | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| | Jumlah unit air baku dalam kondisi baik | Unit | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Persentase luas kawasan bebas banjir | Persen | 77,1 | 79,1 | 81,1 | 83,1 | 85,1 | 87,1 | 87,1 |
| | Penataan Ruang: | | | | | | | | |
| | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Status | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | Persentase RT akses air bersih | Persen | 58,03% | 60,53% | 63,03% | 65,53% | 68,03% | 70,53% | 70,53% |
| | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 91,32 | 93,81 | 96,29 | 98,78 | 100 | 100 | 100 |
| | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | |
| | Persentase lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) | Persen | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|---|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Rasio permukiman layak huni | Rasio | 97,85 | 97,92 | 97,98 | 98,05 | 98,11 | 98,18 | 98,18 |
| | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Persen | 4,28 | 4,15 | 4,02 | 3,89 | 3,76 | 3,63 | 3,63 |
| | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | |
| | Trantibumlinmas: | | | | | | | | |
| | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 83 | 85 | 90 | 93 | 95 | 100 | 100 |
| | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kebencanaan: | | | | | | | | |
| | Indeks Resiko Bencana | Persen | 109,48 | 100,1 | 90,71 | 81,33 | 71,94 | 62,56 | 62,56 |
| | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kebakaran: | | | | | | | | |
| | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Sosial | | | | | | | | |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|---|--------|---|-----------------------------|------|------|------|------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) | Persen | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 99 |
| | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) | Persen | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Layanan Urusan Wajib Non Dasar | | | | | | | | |
| | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| | Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | Persen | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Persen | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indek | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58 |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indek | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,5 | 92 | 92,1 | 92,1 |
| | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 32 |
| | Persentase layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|--|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ketahanan Pangan | | | | | | | | |
| | Indeks Ketahanan Pangan | Persen | 70 | 75 | 82 | 90 | 92 | 95 | 95 |
| | Persentase desa bebas dari status rawan pangan | Persen | 81 | 85 | 90 | 94 | 97 | 100 | 100 |
| | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91 |
| | Pertanahan | | | | | | | | |
| | Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Persen | 74,25 | 77,19 | 80,13 | 83,07 | 86,01 | 88,94 | 88,94 |
| | Persentase pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota | Persen | 72 | 74 | 76 | 80 | 83 | 85 | 85 |
| | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Persen | 70,7 | 70,85 | 71 | 71,14 | 71,29 | 71,44 | 71,44 |
| | Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Persen | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 |
| | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | |
| | Persentase penduduk memiliki KPT Elektronik | Persen | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA | Persen | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| | Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun | Persen | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Cakupan kepemilikan akte kematian | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan | Indeks | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|---|--------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Persentase pasangan suami istri yang memiliki Akta Perkawinan | Persen | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | |
| | Jumlah Desa status Desa Mandiri | Angka | 38 | 50 | 65 | 80 | 95 | 100 | 100 |
| | Persentase PKK Aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah Bumdesa Aktif | Angka | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| | Kontribusi PADes terhadap APBDes | Persen | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
| | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | |
| | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,26 | 0,2 | 0,2 |
| | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | 2,51 | 2,5 | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) | Persen | 66 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) | Persen | 18,5 | 17,5 | 15,5 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| | Perhubungan | | | | | | | | |
| | Cakupan konektivitas wilayah | Persen | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| | Rasio ijin trayek | Unit | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| | Jumlah uji kir angkutan umum | Unit | 21.203 | 21.899 | 22.595 | 23.291 | 23.987 | 24.683 | 24.683 |
| | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Pemasangan rambu-rambu | Persen | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan: | | | | | | | | |
| | a. Orang | Orang | 910000 | 950.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|---|--------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | b. Barang | Barang | 28800 | 32.400 | 36.000 | 39.600 | 43.200 | 46.800 | 46.800 |
| | Cakupan sarana dan prasarana transportasi layak operasi | Persen | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | |
| | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | Angka | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| | Indeks keterbukaan informasi publik (KIP) | Persen | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | |
| | Persantaase Jumlah Koperasi Sehat | Persen | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| | Persentase Jumlah Koperasi Sehat | Persen | 0,11 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
| | Persentase koperasi aktif | Persen | 46,31 | 48,66 | 51,01 | 53,35 | 55,7 | 58,04 | 58,04 |
| | Persentase UKM non BPR atau LKM aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase usaha mikro dan kecil | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Penanaman Modal | | | | | | | | |
| | Nilai investasi (PMDN/PMA) | Persen | 4,6 Terliun | 4,8 Terliun | 5,1 Terliun | 5,3 Terliun | 5,6 Terliun | 5,9 Terliun | 5,9 Terliun |
| | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | |
| | Jumlah pemuda berprestasi atau pelopor | Angka | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| | Jumlah prestasi olahraga | Cabang | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | Persen | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| | Jumlah Atlet Berprestasi | Orang | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Statistik | | | | | | | | |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|---|----------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Persentase Satu Data Kabupaten Bengkalis | Persen | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| | Persandian | | | | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktivitas komunikasi dan informasi | Persen | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| | Kebudayaan | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Persen | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| | Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya | Jumlah | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu | Jumlah | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| | Perpustakaan | | | | | | | | |
| | Pembangunan literasi masyarakat | Jumlah | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Persen | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | Orang | 260.546 | 273.573 | 287.252 | 301.615 | 316.695 | 332.536 | 332.536 |
| | Kearsipan | | | | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | OPD | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | | |
| | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | |
| | Jumlah Total Produksi Perikanan | Ton | 6.852 | 6.765 | 6.678 | 6.591 | 6.504 | 6.417 | 6.417 |
| | Pendapatan rata rata Nelayan | Juta Rupiah/tahun | 39,6 | 41,2 | 43,5 | 45,6 | 47,8 | 49,3 | 49,3 |
| | Pariwisata | | | | | | | | |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-----|---|--------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara | Jumlah | 1458 | 1.895 | 2.559 | 3.71 | 5.565 | 8.347 | 8.347 |
| | Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara | Jumlah | 21.000 | 24.150 | 30.188 | 39.244 | 52.979 | 74.17 | 74.17 |
| | Tingkat Hunian Akomodasi | Persen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku | Persen | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD | persen | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
| | Pertanian | | | | | | | | |
| | Tanaman Pangan, Holtukultura dan Peternakan | | | | | | | | |
| | Produksi tanaman pangan (Padi) | Ton | 20744,5 | 21.366,84 | 22.648,85 | 24.687,24 | 27.402,84 | 30.828,19 | 30.828,19 |
| | Produksi tanaman holtikultura | Ton | 987,05 | 1.006,79 | 1.036,99 | 1.078,47 | 1.132,40 | 1.200,34 | 1.200,34 |
| | Populasi ternak sapi | Ekor | 16.579 | 17.076 | 18.101 | 19.730 | 21.900 | 24.638 | 24.638 |
| | Perkebunan | | | | | | | | |
| | Produksi Tanaman Perkebunan: | Ton | | | | | | | |
| | a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering) | | 19.142 | 19.342 | 19.542 | 19.742 | 19.942 | 20.142 | 20.142 |
| | b. Kelapa (Kopra setara 4,5 butir kelapa) | | 4.062 | 4.112 | 4.162 | 4.212 | 4.262 | 4.312 | 4.312 |
| | c. Kelapa Sawit (setara CPO) | | 262.292 | 262.500 | 263.00 | 263.500 | 264.00 | 265.000 | 265.00 |
| | d. Sagu (Tepung Sagu Kering) | | 3.189 | 3.489 | 3.789 | 4.089 | 4.389 | 4.689 | 4.689 |
| | Produktivitas Tanaman Perkebunan | Ton/Ha | | | | | | | |
| | a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering) | | 0,777 | 0,778 | 0,779 | 0,78 | 0,781 | 0,782 | 0,782 |
| | b. Kelapa (Kopra setara 4,5 butir kelapa) | | 0,914 | 0,915 | 0,916 | 0,917 | 0,918 | 0,919 | 0,919 |
| | c. Kelapa Sawit (setara CPO) | | 2677 | 2.678 | 2.679 | 2.680 | 2.681 | 2.682 | 2.682 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|---------------------------------|--|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | d. Sagu (Tepung Sagu Kering) | | 1533 | 1.534 | 1.535 | 1.536 | 1.537 | 1.538 | 1.538 |
| | Presentase Perkebun dengan Penghasilan minimal setara UMR | Persen | 62,67 | 62,68 | 62,69 | 62,7 | 62,71 | 62,72 | 62,72 |
| Perdagangan | | | | | | | | | |
| | Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Penting bagi Masyarakat | Persen | 70 | 74 | 84 | 88 | 92 | 95 | 95 |
| | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 45 | 52 | 58 | 65 | 69 | 74 | 74 |
| | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Persen | 32 | 48 | 64 | 79 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Perindustrian | | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) | Persen | 45 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 |
| | Persentase Pelaku Usaha IKM yang difasilitasi izin produknnya | Persen | 70 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku | Persen | 17,01 | 17,2 | 17,9 | 18,02 | 18,08 | 18,25 | 18,5 |
| Transmigrasi | | | | | | | | | |
| | Memonitoring dan evaluasi pengembangan wilayah transmigrasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Layanan Urusan Penunjang | | | | | | | | | |
| Sekretariat Daerah | | | | | | | | | |
| | IKM | Persen | 85 | 86 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|-------------------------|---|----------|--|-----------------------------|------|------|------|------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa | Persen | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| | Indeks Kelembagaan | Persen | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | Persentase produk hukum daerah yang lulus uji harmonisasi | Persen | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| | Prediket LPPD | Predikat | T | T | T | ST | ST | ST | ST |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten | Predikat | B | B | BB | BB | A | A | A |
| Sekretariat DPRD | | | | | | | | | |
| | Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD) (Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan) | Status | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan | Status | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran | Status | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Unsur Pendukung | | | | | | | | | |
| Perencanaan | | | | | | | | | |
| | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Status | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA | Status | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | Tersedianya dokumen perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Status | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd | Persen | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|------------------------------------|--|--------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD | Persen | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah | Persen | 94,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Keuangan | | | | | | | | | |
| | Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur | Persen | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |
| | Rasio PAD terhadap Total Pendapatan | Persen | 1076,00% | 11,86 | 12,77 | 13,75 | 14,84 | 15,98 | 15,98 |
| | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Angka | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kepegawaian | | | | | | | | | |
| | Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT) | Persen | 1,5 | 1,65 | 1,78 | 1,93 | 2,06 | 2,21 | 2,21 |
| | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 3,79 | 0,18 | 3,94 | 4,02 | 4,1 | 4,17 | 4,17 |
| Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | |
| | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | Persen | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 2.000 (sangat inovatif) | 2.500 (sangat inovatif) | 3.000 (sangat inovatif) | 3.500 (sangat inovatif) | 3.750 (sangat inovatif) | 4.000 (sangat inovatif) | 4.000 (sangat inovatif) |
| Pengelola Perbatasan Daerah | | | | | | | | | |
| | Persentase pengelolaan wilayah perbatasan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Unsur Pengawas | | | | | | | | | |
| | Inspektorat | | | | | | | | |

| NO. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD |
|------------|--|------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | Layanan Urusan Kewilayahan | | | | | | | | |
| | Kecamatan | | | | | | | | |
| | Indek Kepuasan Masyarakat | Indeks | 85 | 86 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| | Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | |
| | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | |
| | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase partisipasi politik masyarakat | Persen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang kerukunan umat beragama | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| III | Aspek Daya Saing | | | | | | | | |
| | Indek Reformasi Birokrasi | Nilai | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 72 | 72 |
| | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | Keterangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

BAB IX.

PENUTUP

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah, dan program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Bertolak dari hal tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, dan masyarakat termasuk dunia usaha;
- 2) Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
- 3) Bupati berkewajiban menyebarluaskan RPJMD kepada masyarakat;
- 4) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD;
- 5) Penyusunan RKPD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berpedoman pada RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026; dan
- 6) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

1.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Daerah, diperlukan adanya pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir periode RPJMD ini. Penyusunan RKPD Tahun

2027 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD, RPJPD Provinsi Riau, RKP Tahun 2026, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2027. RPJMD ini dapat pula dilakukan penyesuaian mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJMD.

Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu agenda penting dalam penyusunan RKPD adalah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2026. Agenda penting lainnya RKPD adalah untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2027, baik nasional maupun provinsi. Kesemua hal tersebut hendaknya dipertimbangkan secara tepat dan cermat dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.